

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU
KELURAHAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

TESIS

NUR RATIKA SYAMSIAR

NIM. 46 171 020 02



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2020

TESIS

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU
KELURAHAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

***EVALUATION TO HANDLE SLUM'S SETTLEMENT
(STUDY ON KOTAKU PROGRAM AT BANGGAE SUBDISTRICT
IN THE MAJENE REGENCY)***

NUR RATIKA SYAMSIAR

NIM. 46 171 020 02



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2020

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal :

Tesis atas nama : Nur Ratika Syamsiar

NIM : 46 171 020 02

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

Sekretaris : Dr. Ir. Drs. H. Syahriar Tato, M.S

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. Ir. Mary Selintung, M.Sc

2. Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si

Makassar,.....

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

NIDN. 09 1301 7402

HALAMAN PENGESAHAN

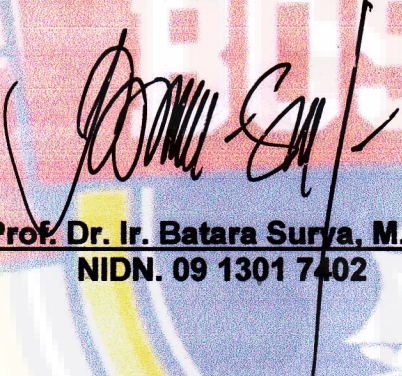
1. Judul : Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh
(Studi Pada Penanganan Program KOTAKU
Kelurahan Banggae Kabupaten Majene)
2. Nama Mahasiswa : Nur Ratika Syamsiar
3. NIM : 4617102002
4. Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN. 09 1301 7402


Dr. Ir. Drs. H. Syahriar Tato, M.S.
NIDN. 09 2102 5101

Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah Dan Kota



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN. 09 1301 7402


Dr. Ir. Syafri, M.Si
NIDN. 09 0507 6804

PERNYATAAN KEORSINILAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan. Serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 23 Agustus 2020



Nur Ratika Syamsiar

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "*Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Pada Penanganan Program KOTAKU Kelurahan Banggae Kabupaten Majene)*" dan tak lupa pula dihaturkan salawat dan salam kepada Nabiullah dan Rasulallah Muhammad SAW yang telah mengajarkan dan mengeluarkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju alam yang benar dan terang benderang. Tujuan dari penyusunan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar S2 Perencanaan Wilayah dan Kota. Dalam penyelesaian tesis ini, saya tidak lepas mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini, diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, yakni ayahanda **H. Syamsiar Muchtar, SH., MM** dan ibunda **Dr. Hj. Atika Bustan, S.Sos., MM**, yang telah melahirkan dan tulus juga ikhlas membesarkan dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan dukungan dan doanya yang tak ternilai sehingga saya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik seperti sekarang ini. Tidak lupa kepada kedua adik saya, yakni **Nur Indahsari Syamsiar, SH** dan **Nur Khairunnisa Syamsiar** yang senantiasa bersabar, pengertian dan memberikan dukungan didalam kebersamaan mulai dari perkuliahan hingga penyelesaian studi, penulis mengucapkan terima kasih.
2. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar dan sekaligus selaku pembimbing I, dan juga kepada bapak **Dr. Ir. Syahriar Tato, M.Si** selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktu menerima penulis untuk melakukan konsultasi dan bimbingan, serta mencurahkan pikiran dalam

memberikan saran, kritik, dan arahan dari proposal hingga terselesaikannya tesis ini.

3. Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula penulis haturkan kepada para penguji bapak **Prof. Dr. Ir. Mary Selitung, M.Sc** dan **Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si** yang kesemuanya telah banyak memberikan saran, kritik, dan arahan dari proposal hingga terselesaikannya tesis ini, yang sangat positif serta bermanfaat bagi kesempurnaan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan kebaikan serta jasa baik beliau.
4. Kepada yang terhormat bapak **Prof. Dr. H. M. Saleh Pallu, M.Eng** selaku Rektor Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar dan kepada bapak **Dr. Ir. Syafri, M.Si** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana UNIBOS Makassar, dan kepada seluruh bapak dan ibu dosen serta seluruh staf pegawai pada Program Pascasarjana UNIBOS Makassar, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan jasa kebaikan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Ucapan terima kasih disampaikan kepada bapak Bupati Majene **Dr. H. Fahmi Massiara, MH**, bapak Wakil Bupati Majene **H. Lukman, S.Pd., M.Pd** dan Sekretaris Daerah kabupaten Majene **H. A. Achmad Syukri, SE.,MM** Provinsi Sulawesi Barat beserta pejabat terkait dan jajarannya, yang telah memberikan bantuan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lingkup wilayah kabupaten Majene.
6. Rekan-Rekan pada Program KOTAKU Provinsi Sulawesi Barat kepada Team Leader bapak **Drs. Bakhrun Gassing** dan Koordinator Kota ibu **Ramlah Razak, ST** dan seluruh fasilitator di Kabupaten Majene yang telah berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Koordinator Kota Majene-Polewali Mandar Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi Sulawesi Barat.
7. Rekan-rekan mahasiswa di Program Pascasarjana UNIBOS Makassar, khususnya rekan-rekan di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Program Pascasarjana UNIBOS Makassar tahun angkatan 2017, yang telah memberikan dukungan moril dari awal perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan dukungannya baik berupa ide-ide pemikiran maupun dukungan moral bagi penyelesaian tesis ini yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan semoga Allah SWT memberikan ridha dan balasan yang setimpal atas semua jasa dan budi baik untuk semuanya. Amin.

Makassar, 27 Desember 2019

Penulis

Nur Ratika Syamsiar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae pasca pelaksanaan program Kotaku, (2) mengevaluasi penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku, dan (3) mengevaluasi perubahan, manfaat dan dampak yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan desain eksploratif, komparatif dan evaluatif. Fokus penelitian adalah evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku, Instrumen penelitian peneliti sendiri, peta lokasi, pedoman observasi atau survei, pedoman wawancara, dan perlengkapan peralatan lainnya. Jenis data kuantitatif dan kualitatif, dan sumber data berupa data primer dan sekunder. Data dikoleksi melalui dua pendekatan yakni *library study* (studi kepustakaan) dan *field study* (studi lapangan). Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca pelaksanaan program Kotaku, evaluasi kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae Tahun 2019 masih berstatus atau dikategorikan kumuh ringan (sedang). Ada empat aspek utama yang menonjol dilakukan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh yakni (1) Perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan penanganan permukiman kumuh, (2) Skenario pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, (3) Skenario peningkatan kualitas permukiman kumuh pada kawasan prioritas penanganan, dan (4) Kebutuhan penanganan dan perencanaan teknis peningkatan kualitas permukiman kumuh prioritas Copala. Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan, selain penanganan dominan *action plan* (hanya sebagian *real action*), pilihan pendekatan penanganan juga masih banyak bersifat tunggal dan monoton, tidak terintegratif dan komprehensif dalam penyelesaian/ penuntasan akar masalah dan kebutuhan *problem solving*. Akibatnya, pola pendekatan penanganan dan pilihan intervensi menjadi tidak efektif serta tidak tuntas. Evaluasi perubahan, manfaat dan dampak berdasarkan indikator dalam perbandingan kondisi permukiman kumuh sebelum dan pasca pelaksanaan program Kotaku menunjukkan aneka ragam permasalahan dihadapi oleh masyarakat local dan lingkungan permukiman belum sepenuhnya terentaskan. Perubahan yang menonjol adalah pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar terutama jalan lingkungan dan drainase, namun untuk indikator-indikator lainnya masih tetap. Ada kesenjangan atau ketimpangan realisasi antara indikator, serta belum tuntasnya penanganan semua indikator permukiman kumuh. Disarankan agar (1) program Kotaku dilanjutkan sesuai hasil evaluasi, dan (2) menerapkan pola penanganan terpadu sebagai strategi utama penanganan permukiman kumuh, yang diintegrasikan dengan penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat (*Community-based development/ CBD*), *Redevelopment*, Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya), penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN), penerapan konsep Kampung Tematik, termasuk pendekatan partisipatif dan pendekatan kultural.

Kata kunci: Evaluasi, penanganan, program Kotaku, permukiman kumuh

ABSTRACT

This study aimed (1) to evaluate current condition at Banggae after program of Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) (a program to actualize a city without slum's area), (2) to evaluate the handling a slum area residence within Kotaku program implementation, and (3) to evaluate any change, benefit and impact resulted from the handling Kotaku program. A qualitative descriptive as kind of this research, into design are explorative, comparative and evaluative. This study focused to evaluate any planning, implementation and output-outcome resulted from the handling Kotaku program. Instrument used include investigator as self-participant, map of location, survey or observation guideness, interviews guideness, and other facilities need it. Sources of data. All data collected to use two approach namely library study and field study. A qualitative used to analyze any data.

The result of this study indicated that after Kotaku's program implemented it, current condition (Year 2019) of people residence at Banggae is still "middle or light category in slum's area". There are appear four main aspects applied by Kotaku's program to handling slum's area residence namely (1) planning, implementation dan sustainability; (2) scenario to prevent and increase any quality of slum's area; (3) scenario to improve a quality of slum's area at the area priority to handling at Banggae; and (4) the handling need and technical planning to improve a quality of slum's area at Copala as treatment priority. Base on the all evaluation results shown that the handling is still dominant as action plan (only a part as real action) and approach alternative to handle are single and monotone way, not yet integrative and comprehensive to solve or finish any problems and not fully suitable problem solving need. It result, approach pattern to handling and intervention choiced not be effective and also non-completeness it. Evaluate to any change, benefit and impact to slum's area base on the amount indicators within comparison between before and after Kotaku's program implemented it indicate many more problem are still faced by local community and their residence environment at Banggae as resulted program intervention not be completely. Dominantly change especially at basic infrastructures indicator as like road and drainage development, but other indicators are still stagnancy. There are realization gap among indicators and the handling all indicators of slum's area not be completely finish them. Recommended that (1) program of Kotaku be continue base on the evaluation result, and (2) to apply an integrated-handling pattern as main strategy to overcome slum's area problems, which can be synergize or combined with other approach include Community-based development/CBD, Redevelopment, Revitalizations (physic environment, social, culture and economy way), Sustainable Urban Neighborhood (SUN) principle, Tematik village, and also participatory and cultural approach.

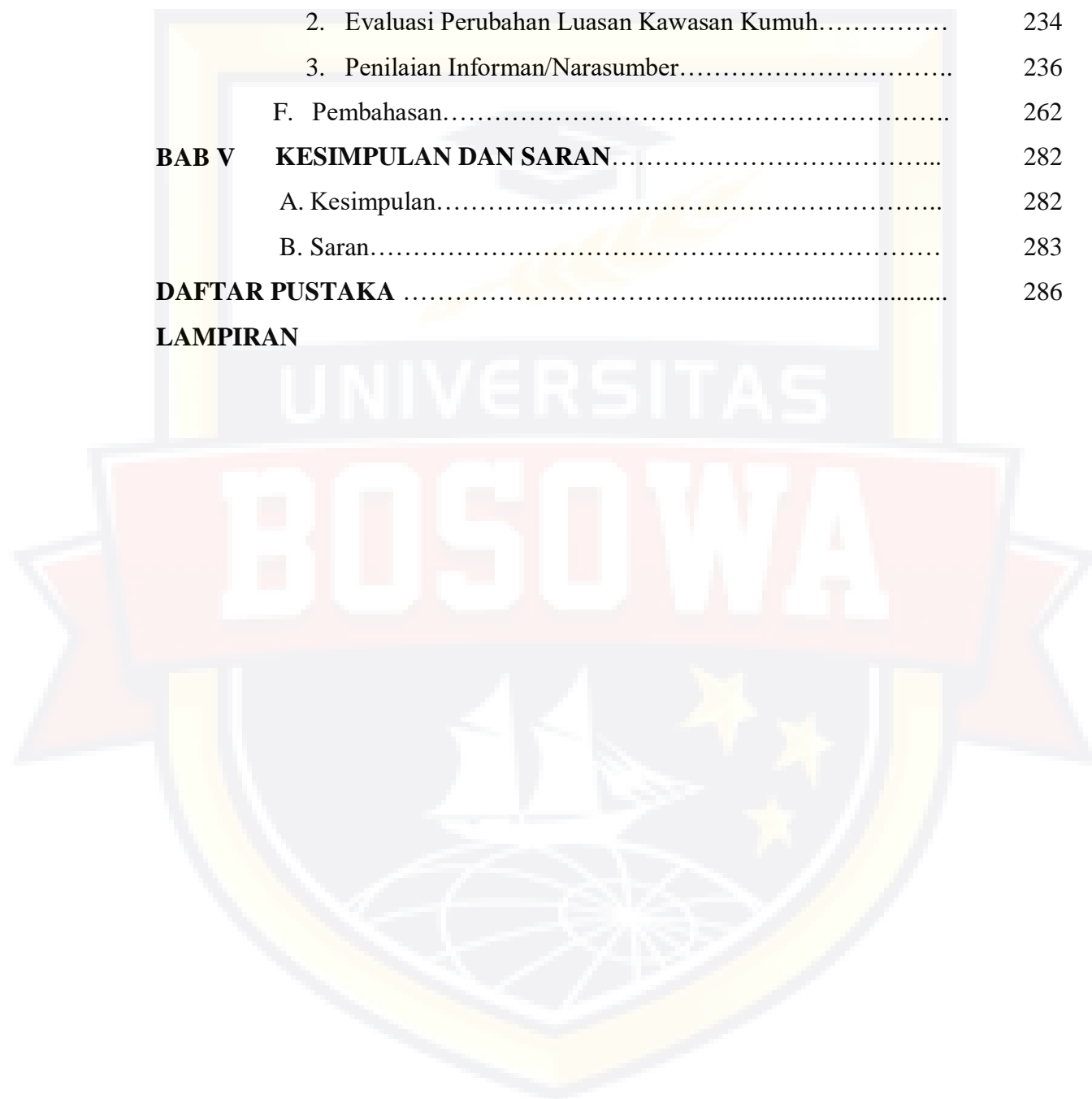
Keywords: Evaluation, handling, program of Kotaku, slum's area.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Lingkup Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP.....	14
A. Perspektif Teori.....	14
1. Konsep Evaluasi Kebijakan dan Program.....	14
a. Konsep Dasar Evaluasi.....	14
b. Konsep Evaluasi Program	16
2. Konsep Efektivitas Program.....	22
3. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	26
4. Konsep Permukiman Kumuh.....	37
5. Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh.....	48
6. Konsep <i>Good Urban Governance</i>	57
B. Penelitian Terdahulu.....	62

C. Kerangka Konseptual.....	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	77
A. Tipe dan Desain Penelitian	77
B. Lokasi Penelitian	77
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	77
D. Instrumen Penelitian	78
E. Jenis dan Sumber Data	79
F. Teknik Pengumpulan Data	81
G. Teknik Analisis Data.....	81
H. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	82
I. Operasionalisasi Konsep	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
A. Gambaran Umum Kedudukan Kelurahan Banggae di Kecamatan Banggae dan Kabupaten Majene.....	93
B. Deskripsi Umum Kelurahan Banggae.....	94
C. Evaluasi Kondisi Permukiman Saat Ini Di Kelurahan Banggae Pasca Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).....	114
1. Evaluasi Perkembangan Permukiman Dalam Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Banggae	114
2. Evaluasi Kondisi Permukiman Di Lingkungan Copala.....	120
3. Penilaian Informan/Narasumber.....	126
D. Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Banggae	149
1. Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Keberlanjutan Penanganan Permukiman Kumuh.....	149
2. Penilaian Informan/Narasumber.....	157
E. Evaluasi Perubahan, Manfaat Dan Dampak Yang Dihasilkan Dari Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan	

Banggae	179
1. Evaluasi Perubahan, Manfaat Dan Dampak Berdasarkan Indikator Dan Perbandingan Kondisi Permukiman Kumuh Sebelum Dan Pasca Pelaksanaan Program Kotaku.....	179
2. Evaluasi Perubahan Luasan Kawasan Kumuh.....	234
3. Penilaian Informan/Narasumber.....	236
F. Pembahasan.....	262
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	282
A. Kesimpulan.....	282
B. Saran.....	283
DAFTAR PUSTAKA	286
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
2.1	Deskripsi Singkat Penelitian Terdahulu.....	63
3.1	Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	78
3.2	Teknik Analisa Data.....	82
3.3	Kategori Penilaian Tingkat Kekumuhan Pemukiman Pasca Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Banggae.....	91
4.1	Luas Wilayah Empat Lingkungan di Kelurahan Banggae.....	95
4.2	Pola Ruang dan Penggunaan Lahan di Kelurahan Banggae.....	100
4.3	Distribusi Jumlah Penduduk di Kelurahan Banggae.....	103
4.4	Evaluasi Kondisi Permukiman Saat Ini di Lingkungan Copala dalam Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Banggae.....	115
4.5	Karakteristik Wilayah, Permukiman, Bangunan Hunian Dan Penduduk di Lingkungan Copala Tahun 2019.....	120
4.6	Evaluasi Kondisi Permukiman Saat Ini di Lingkungan Copala dalam Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Banggae.....	121
4.7	Penanganan Permukiman Kumuh Oleh Program Kotaku Berdasarkan Analisis Kebutuhan dan Indikator Di Kelurahan Banggae Tahun 2016-2021.....	150
4.8	Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh Oleh Program Kotaku Berdasarkan Indikator Di Kelurahan Banggae Tahun 2019....	153
4.9	Formulasi Penilaian Informan Ahli Tentang Aplikasi dan Strategi Pola Penanganan Permukiman Kumuh Oleh Program Kotaku di Kelurahan Banggae.....	176
4.10	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Bangunan Hunian Pasca Pelaksanaan Program Kotaku.....	182
4.11	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Aksesibilitas Jalan Lingkungan Pasca Pelaksanaan Program Kotaku.....	189
4.12	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Drainase Lingkungan Pasca Pelaksanaan Program Kotaku.....	192
4.13	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pelayanan Air Bersih/Baku/Air Minum Pasca Pelaksanaan Program Kotaku...	197

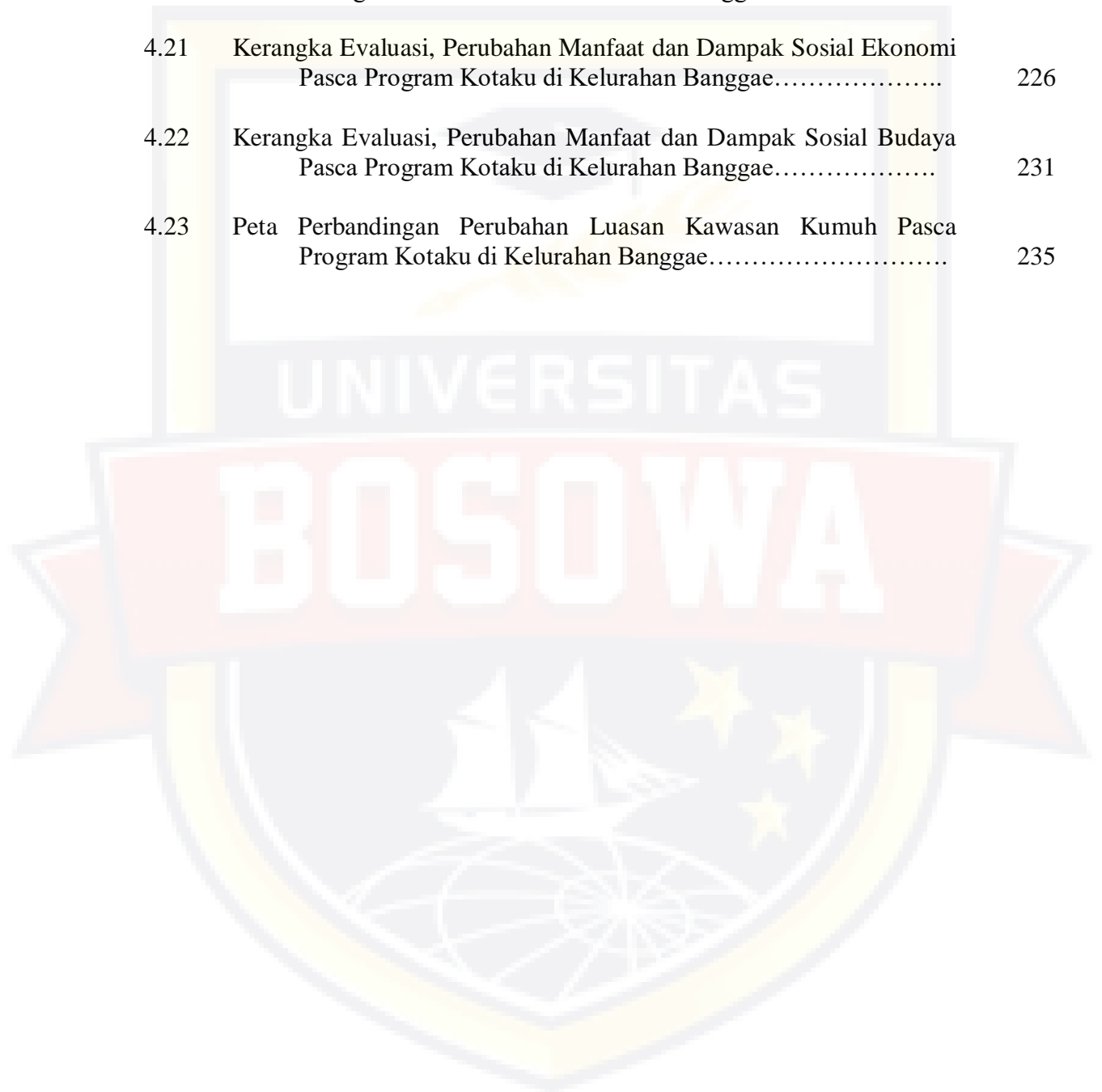
4.14	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Air Limbah (PAL) Pasca Pelaksanaan Program Kotaku.....	201
4.15	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Sampah Domestik (PSD) Pasca Pelaksanaan Program Kotaku.....	208
4.16	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Perlindungan Keamanan Dari Bahaya Kebakaran Pasca Pelaksanaan Program Kotaku...	215
4.17	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Legalitas Lahan dan Bangunan Pasca Pelaksanaan Program Kotaku.....	219
4.18	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Ruang Terbuka Publik (RTP) Pasca Pelaksanaan Program Kotaku...	224
4.19	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Sosial Ekonomi Pasca Pelaksanaan Program Kotaku.....	227
4.20	Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Sosial Budaya Pasca Pelaksanaan Program Kotaku.....	232
4.21	Hasil Evaluasi Kondisi Permukiman Saat Ini di Kelurahan Banggae Pasca Pelaksanaan Program Kotaku.....	263

BUSUWA

DAFTAR GAMBAR

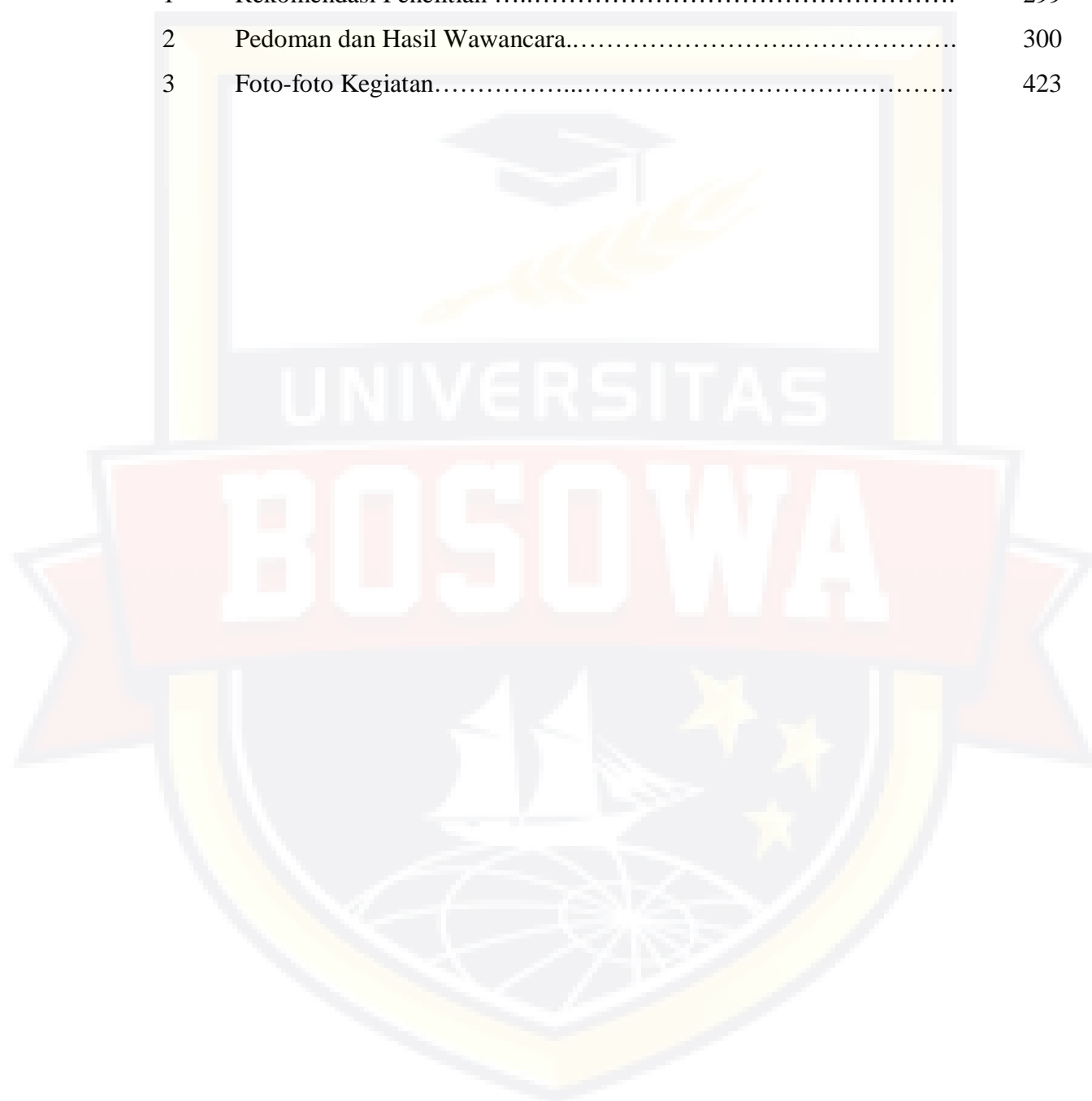
Nomor		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	76
3.1	Skema Analisis Data	82
4.1	Posisi Kecamatan Banggae dan Kelurahan Banggae dalam Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Majene.....	93
4.2	Posisi Kelurahan Banggae dalam Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Banggae.....	94
4.3	Profil Wilayah Geografi Kelurahan Banggae.....	95
4.4	Peta Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Banggae.....	96
4.5	Peta Garis Kontur dan Jenis Tanah Kelurahan Banggae.....	97
4.6	Peta Pola Ruang dan Penggunaan Lahan Kelurahan Banggae.....	99
4.7	Histogram dan Grafik Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Banggae	102
4.8	Kelompok Usia Penduduk di Kelurahan Banggae.....	104
4.9	Kelompok Pendidikan Penduduk di Kelurahan Banggae.....	105
4.10	Kelompok Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Banggae.....	106
4.11	Peta Eksisting Sarana Prasarana & Fasilitas serta Aneka Jenis Kegiatan Usaha Ekonomi dan Perdagangan di Kelurahan Banggae.....	111
4.12	Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Bangunan Hunian di Kelurahan Banggae.....	181
4.13	Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Aksesibilitas Jalan Lingkungan di Kelurahan Banggae.....	188
4.14	Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Drainase Lingkungan di Kelurahan Banggae.....	191
4.15	Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pelayanan Air Bersih/Baku/Air Minum di Kelurahan Banggae.....	196
4.16	Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan Banggae.....	200
4.17	Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Sampah Domestik di Kelurahan Banggae.....	207
4.18	Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Perlindungan	

	Keamanan Kebakaran di Kelurahan Banggae.....	214
4.19	Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak legalitas Lahan dan Bangunan di Kelurahan Banggae.....	218
4.20	Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kelurahan Banggae.....	223
4.21	Kerangka Evaluasi, Perubahan Manfaat dan Dampak Sosial Ekonomi Pasca Program Kotaku di Kelurahan Banggae.....	226
4.22	Kerangka Evaluasi, Perubahan Manfaat dan Dampak Sosial Budaya Pasca Program Kotaku di Kelurahan Banggae.....	231
4.23	Peta Perbandingan Perubahan Luasan Kawasan Kumuh Pasca Program Kotaku di Kelurahan Banggae.....	235



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1	Rekomendasi Penelitian	299
2	Pedoman dan Hasil Wawancara.....	300
3	Foto-foto Kegiatan.....	423



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsinya, dimana dan kapan pun suatu kebijakan dan program diimplementasikan atau dilaksanakan maka selalu ada tuntutan evaluasi menyertainya. Sebaik, sehebat serta seunggul apapun suatu kebijakan dan program, tidak akan menjadi sempurna tanpa evaluasi. Oleh karena itu antara kebijakan, program dan evaluasi sesungguhnya saling integral dan ketergantungan secara timbal balik. Evaluasi sebagai salah satu unsur dan fungsi manajemen memainkan peran kunci dalam menentukan kesinambungan (*continuity*) dan keberlanjutan (*sustainability*) suatu kebijakan dan program, bahkan evaluasi memainkan atau sangat berperan di dalam menentukan hasil dan dampak (*output-outcome*), kualitas, manfaat, dan efektivitas dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota.

Pembicaraan tentang evaluasi secara konseptual atau teoritis maupun praktikal telah dikemukakan kalangan ahli bahwa evaluasi merupakan: proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (Stufflebeam, 1971 dalam Fernandes (1984:2) dalam Muchsin dan Putra (2002:5), proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi (Djaali dan Mulyono, 2004 dalam Yusuf, 2005:1), proses memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil

keputusan”(Sukardi, 2009 dalam Widoyoko,2010:10); sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan” (Arikunto dan Abdul Jabar, 2010).

Kaitannya dengan program, Langbein dan Felbinger (2006 dalam Tayibnapi, 2008:3) mengemukakan bahwa “evaluasi program merupakan penerapan model, teknik dan pengetahuan tentang evaluasi, untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan efektivitas program secara sistematis”. Menurut Rutman (1984 dalam Tayibnapi, 2008:12) bahwa “evaluasi program adalah suatu kegiatan yang membutuhkan metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program dengan tujuan untuk membuat keputusan”. Issac dan Michael (1984 dalam Tayibnapi, 2008:6) menegaskan bahwa program harus diakhiri dengan evaluasi, guna memastikan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: 1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, 2) mencari data yang relevan dengan penelitian, dan 3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut.

Model-model evaluasi program relatif beragam atau bervariasi yang dikemukakan oleh kalangan ahli, walaupun maksud dan tujuannya relatif sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi atas objek yang dievaluasi. Keberagaman model evaluasi program yang dikenal secara luas dalam

praktek menurut (Tayibnapi, 2000) antara lain: *Probus Evaluation Model* atau evaluasi kesenjangan program, *CSE-UCLA Evaluation Model*, *CIPP Evaluation Model*. Khusus mengenai Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (1985) sebagai sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan (Tayibnapi, 2008; Widoyoko, 2009). Model evaluasi CIPP ini terdiri dari beberapa aspek atau dimensi yakni: *Contex evaluation, Input evaluation, Processevaluation, dan Product evaluation*, sehingga menurut Widoyoko (2010) bahwa model evaluasi CIPP lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil.

Langkah-langkah evaluasi program menurut Oemar Hamalik (2008:13) adalah: (1) Menyusun suatu rencana evaluasi dalam bentuk kisi-kisi apa yang akan dinilai berkaitan dengan tujuan program; (2) Menyusun instrumen evaluasi, misalnya skala, daftar rentang, pedoman observasi/kuesioner, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi; (3) Melaksanakan pengamatan lapangan, yaitu mengumpulkan data dari responden atau sampel evaluasi; (4) Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat ditentukan tingkat keberhasilan program, kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala untuk diperbaiki; (5) Mengajukan sejumlah rekomendasi terhadap program yang telah dievaluasi

tersebut; (6) Menyusun laporan evaluasi dan menyebarluaskan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan (Arifin, 2009:43).

Sehubungan dengan persoalan evaluasi dengan berbagai seluk beluknya tersebut, salah satu aspek yang bersifat urgen, vital dan strategis dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik khususnya di Indonesia adalah penanganan permukiman kumuh (*slum's settlement management*) terutama di daerah perkotaan. Konsep permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). Permukiman kumuh dikemukakan oleh kalangan ahli seperti E.E. Bergel (1970) bahwa permukiman kumuh sebagai daerah *slum* yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial (Wirotomo, 1997:17). Permukiman kumuh merupakan suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak terstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, dan MCK), bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler mengalami banjir tiap tahunnya (Santosa, 2007:3). Permukiman kumuh dipandang sebagai permukiman atau perumahan bagi orang-orang miskin perkotaan yang berpenduduk padat, terdapat dipinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kondisinya kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau yang disebut juga sebagai wilayah pencomberan (Suparlan, 1997). Permukiman kumuh dianggap sebagai tempat dimana mayoritas anggota masyarakat kota berpenghasilan rendah dengan

membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim (Adisasmita R, 2005:147).

Masalah permukiman kumuh bukanlah persoalan baru melainkan sudah menjadi fenomena permasalahan klasik baik di tingkat global, regional maupun nasional dan lokal. Di tingkat global, menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa walaupun proporsi penduduk yang tinggal di daerah kumuh perkotaan menurun dari 47 persen menjadi 37 persen di negara berkembang antara Tahun 1990 dan Tahun 2005, namun karena populasi meningkat maka jumlah penghuni kawasan kumuh meningkat. Satu miliar orang di seluruh dunia tinggal di daerah kumuh dan angka ini akan mencapai 2 miliar sampai Tahun 2030 (Conyers, 1991; Nisanth, 2015).

Khusus di Indonesia, menurut Kementerian Perumahan Rakyat bahwa permukiman kumuh makin meluas, dan terbukti pada Tahun 2009 sudah mencapai 57.800 hektar dari kondisi pada Tahun 2004 hanya 54.000 hektar (Novalius, 2017; Erawan, 2012). Menyadari kenyataan tersebut, mendorong Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DJCK Kemen PUPR) memberlakukan sebuah program strategis yang disebut Program Kota Tanpa Kumuh atau disebut juga Program KOTAKU. Program ini sebenarnya merupakan program lanjutan dari Program PNPM Mandiri Perkotaan. Program KOTAKU tersebut telah disosialisasikan di tingkat Nasional melalui Workshop Nasional yang melibatkan Kementerian PUPR sebagai *leading sector* kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan

Tata Ruang (Kemen ATR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP, BPK-RI, civitas akademika, penggiat penataan kota dan pemukiman. Selain itu juga melibatkan 20 Kementerian Lembaga, 271 Bupati/Walikota, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum/Perkim dari masing-masing Kota ataupun Kabupaten, serta 40 kantor pertahanan Kabupaten/Kota (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2015/2016).

Pemberlakuan Program KOTAKU tersebut bertitik tolak dari amanat kebijakan hukum yang melandasi yakni Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 khususnya Pasal 28H Ayat 1 yang mengatur bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanat konstitusi Negara ini mengisyaratkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Oleh karena itu, penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi Pemerintah Kota/Kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2015/2016).

Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019) yang menyebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya

pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, 2016).

Program KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, 2016).

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten (termasuk di Kabupaten Majene) pada 34 Provinsi (termasuk di Provinsi Sulawesi Barat) yang menjadi “*platform*” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana

Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat (Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh, DJCK Kemen. PUPR Tahun 2016).

Di Kabupaten Majene, seperti halnya daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Sulawesi Barat khususnya, telah dan sedang menghadapi aneka permasalahan dan tantangan dalam berbagai aspek kehidupan dan bidang pembangunan di internal daerah dan masyarakatnya terutama di bidang lingkungan, tata ruang wilayah dan kota, sosial ekonomi dan sosial budaya, serta perumahan dan permukiman. Salah satu permasalahan khusus yang cukup menonjol dari bidang-bidang kehidupan dan pembangunan tersebut adalah masalah *slum's settlement* atau permukiman kumuh, yang masih berkembang luas sehingga menjadi alasan bagi penetapan lokasi program KOTAKU guna mengatasi permasalahan kekumuhan permukiman tersebut.

Program KOTAKU telah diimplementasikan di Kabupaten Majene sejak Tahun 2014/2015. Berdasarkan laporan hasil survei lapangan atau pendataan baseline 100-0-100 wilayah permukiman yang dilakukan oleh masyarakat melalui program KOTAKU Tahun 2015 (Profil Permukiman Kabupaten Majene, 2015), memberikan gambaran secara umum bahwa pada Tahun 2014/2015, ada 8 (delapan) kelurahan masuk dalam target atau sasaran Program KOTAKU, namun yang mendapat Surat Keputusan (SK) Bupati Majene hanya 5 (lima) kelurahan, sedangkan 3 (tiga) kelurahan lainnya belum dicantumkan dalam SK tersebut.

Secara keseluruhan, luas permukiman pada 8 kelurahan tersebut adalah 293,4 ha, dan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh seluas 30,56 ha.

Penerima bantuan dana investasi (BDI) Program Kotaku 2017 dari Kementerian PUPR di Kabupaten Majene sebagian besar adalah kelurahan yang berada di pesisir pantai yaitu Kelurahan Pangali-ali, Rangas, Totoli dan Banggae, yang sebagian besar dihuni oleh nelayan dan penduduk dengan penghasilan menengah kebawah. Harapannya, bantuan tersebut dapat membantu dalam memberdayakan masyarakat kelurahan penerima BDI, sehingga diharapkan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.” (Profil Permukiman Kabupaten Majene, 2015). Namun kenyataannya, luas kawasan permukiman kumuh bukannya berkurang malahan semakin meningkat. Dengan program KOTAKU justru terjadi peningkatan luas kawasan kumuh sebesar 19,55 ha s/d 22,74 ha selama dalam interval waktu 3-4 tahun terakhir. Hal ini memberikan gambaran awal bagi rencana penelitian ini bahwa bukan saja terjadi *gap* atau kesenjangan, malahan dapat dikatakan bahwa program KOTAKU **tidak efektif** atau gagal mencegah dan menangani permukiman kumuh.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU masih dominan menyentuh pembangunan fisik lingkungan dalam penanganan permukiman kumuh, sedangkan aspek sosial ekonomi dan sosial budaya belum tertangani dengan baik dan maksimal. Penanganan permukiman kumuh di kelurahan tersebut belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi persebaran permukiman kumuh, bahkan masih dominan berorientasi proyek yang berkejaran waktu menghabiskan anggaran tanpa memperdulikan tuntutan perubahan-

perubahan yang signifikan secara terpadu antara aspek lingkungan, perumahan dan permukiman, tata ruang wilayah dan kota, sosial, ekonomi dan budaya.

Sehubungan dengan penanganan permukiman kumuh tersebut, kalangan ahli mengemukakan pilihan-pilihan strategi penanganan permukiman kumuh berdasarkan persebaran kawasan kumuh ataupun berdasarkan kebutuhan *problem solution* atau pemecahan masalah. Pilihan-pilihan strategi penanganan tersebut adalah: (1) penanganan terpadu yakni perbaikan dan pemugaran, peremajaan, relokasi (Emerson,2011); (2) Penataan (Supriyatno,2014); (3) Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat (Conyers,1991; Daljoeni,1997 dalam Sutiarti (2006); Isbandi,2008; Hardian,2016);(4) *Redevelopment*(Priatmodjo, 2003 dalam Hasni. 2010); (5) Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya) (Nuissl & Heinrichs, 2013; Wirotomo, 1997:8);(6) Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN) (Sandy, 1984; Tarigan R, 2005;Bratakusumah dkk, 2009; Sadyohutomo, 2009); (7) Penerapan konsep Kampung Tematik (Majewski dan Zmyslony dalam Tamara dkk, 2018:3).Pengkajian terhadap masalahpenanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU Kelurahan Banggae Kabupaten Majene tersebut menggunakan *grand theory*yakni *Good Urban Governance* dari UN-Habitat (2000).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah evaluasi kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae pasca pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?
2. Bagaimanakah evaluasi penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Banggae?
3. Bagaiman perubahan, manfaat dan dampak yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Banggae?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae pasca pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
2. Mengevaluasi penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Banggae.
3. Mengevaluasi perubahan, manfaat dan dampak yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Banggae.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan atau Teoritis

Manfaat kontributif dari aspek keilmuan atau akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah menambah khasanah pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota, serta menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa khususnya tentang evaluasi penanganan permukiman kumuh dengan program KOTAKU.

2. Aspek Guna Laksana atau Praktikal

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan *input* (masukan) dan pertimbangan bagi Pemerintah/ Kementerian terkait khususnya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku *policy maker - decision maker* tingkat nasional dalam rangka evaluasi penyempurnaan konsep dan praktek Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh ke depan
- b. Bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kabupaten Majene/ Instansi terkait *leading sector* khususnya Dinas PU, BAPPEDA dan *lining sector* lainnya selaku *policy maker - decision maker* tingkat lokal dalam upaya evaluasi terintegratif dan komprehensif serta memaksimalkan penanganan permukiman kumuh dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di daerahnya
- c. Bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi pengelola Program KOTAKU dalam melakukan evaluasi terpadu dan menyeluruh terhadap

pelaksanaan program tersebut guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau diharapkan.

- d. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh mengenai hak-hak dan kewajiban, serta tanggungjawabnya dalam menangani, mencegah dan menanggulangi permukiman kumuh melalui serta peran partisipatifnya dalam pelaksanaan program KOTAKU di lingkungan permukimannya.

E. Lingkup Penelitian

1. Lingkup Substansi Penelitian

Substansi persoalan dalam kajian studi ini adalah evaluasi kondisi permukiman saat ini pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae. Evaluasi tersebut difokuskan pada sejumlah determinan indikator permukiman kumuh baik indikatorkeciptakaryaan atau fisik (seperti penataan bangunan, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pelayanan air minum, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran) maupun indikator non-fisik (ruang terbuka publik, legalitas lahan dan bangunan, sosial ekonomi dan budaya). Selain itu, penelitian juga difokuskan pada pola penanganan permukiman kumuh serta perubahan, manfaat dan dampaknya.

2. Lingkup Wilayah Penelitian

Lingkup wilayah penelitian ini: Pertama, wilayah di Kelurahan Banggae secara keseluruhan (empat lingkungan: Pakkola, Saleppa, Battayang dan Copala. Kedua, kawasan prioritas Copala.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Perspektif Teori

1. Konsep Evaluasi Program

a. Konsep Dasar Evaluasi

Evaluasi sebenarnya merupakan salah satu unsur dari manajemen terutama dalam konsep POACE (*Planning, Organize, Actualize, Controlling, Evaluation*) (Simanjuntak, 2005). Jadi istilah evaluasi sesungguhnya berasal dari bahasa asing khususnya bahasa Inggris yakni “*evaluation*” (noun) yang artinya penilaian (kata benda), atau dalam kata kerja ‘*evaluate*’ artinya menentukan nilai atau menilai. Evaluasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Alwi, 2001; Poerdarminta, 1996; Tim Redaksi, 2005). sinonim atau mempunyai padanan arti seperti meninjau ulang, menilai, mengukur, menakar, memperbandingkan.

Kalangan ahli memberikan definisi atau mengemukakan konsepnya tentang evaluasi yang dipandang sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan, seperti Stufflebeam (1971, dalam Fernandes 1984) dalam Muchsin dan Putra (2002) yang mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Menurut Djaali dan Mulyono (2004 dalam Yusuf, 2005:1) bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dengan pengambilan

keputusan atas objek yang dievaluasi. Hal senada dikemukakan Sukardi (2009, dalam Widoyoko, 2010:10) bahwa evaluasi merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambilan keputusan. Demikian pula Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar (2010) mengkonseptualisasikan evaluasi sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Konseptualisasi yang lebih luas tentang evaluasi dikemukakan oleh Alkin (2004 dalam Yusuf, 2005:127) bahwa evaluasi meliputi pokok-pokok dalam metode penelitian sosial untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya sehingga informasi tersebut dapat membantu dalam pembentukan kebijakan publik, rancangan program, dan penilaian efektivitas dan efisiensi kebijakan-kebijakan sosial dan program-program sosial.

Uraian pendapat beberapa ahli tersebut mengisyaratkan bahwa evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai suatu program maupun kegiatan yang dilaksanakan dari pengumpulan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode penelitian sosial, manusia, peralatan) dimana informasi tersebut digunakan untuk menentukan sejauhmana perencanaan dan tujuan yang telah dicapai dalam suatu program berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yang dimaksudkan untuk membantu keputusan mengenai objek yang dievaluasi.

b. Konsep Evaluasi Program

1) Arti dan makna evaluasi program

Program secara umum dipahami sebagai rencana yang terstruktur dan sistematis yang digariskan oleh kebijakan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan di dalamnya beserta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Hal ini tercermin dari pendapat Fink (1995) bahwa "program adalah sebuah usaha yang sistematis untuk mencapai sebuah tujuan yang direncanakan sebelumnya" (Tayibnaps, 2000). Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2009:2) bahwa program dibagi menjadi dua yaitu secara umum maupun khusus. Program secara umum sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang di kemudian hari. Sedangkan program secara khusus berkaitan dengan evaluasi, yang artinya suatu kesatuan atau unit kegiatan yang merupakan implementasi atau realisasi suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Kaitannya dengan evaluasi, Langbein dan Felbinger mengemukakan bahwa "evaluasi program merupakan penerapan model, teknik dan pengetahuan tentang evaluasi, untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan efektivitas program secara sistematis" (Tayibnaps, 2008:3). Menurut Rutman (1984) bahwa "evaluasi program adalah suatu kegiatan yang membutuhkan metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program dengan tujuan untuk

membuat keputusan” (Tayibnapis, 2000:10). Issac dan Michael (1984) menegaskan bahwa program harus diakhiri dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: 1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, 2) mencari data yang relevan dengan penelitian, dan 3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut (Tayibnapis, 2000:6).

2) Tujuan Evaluasi Program

Evaluasi program menurut Mulyatiningsih (2011) mempunyai tujuan yaitu: (1) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk pengembangan program yang sama di tempat lain; (2) Mengambil keputusan mengenai keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan (Agus dan Ratih, 2012:114-115). Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2009:13) bahwa terdapat dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus difokuskan pada tiap-tiap komponen.

Wang (2014) mengemukakan bahwa evaluasi dilihat dari tujuannya adalah ingin mengetahui sesuatu kondisi, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian

evaluatif. Penelitian evaluatif pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari suatu kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Oleh karena itu, dalam suatu evaluasi program, pelaksana berpikir serta menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian. Untuk mempermudah mengidentifikasi tujuan evaluasi program, perlu memperhatikan tiga unsur dalam kegiatan atau penggarapannya, yaitu: *what* (apa yang digarap), *who* (siapa yang menggarap), dan (*how*) bagaimana menggarapnya (Sugyono, 2014).

3) Model-model evaluasi program

Program, seperti halnya kebijakan, mempunyai model evaluasi yang juga relatif beragam/ bervariasi yang dikemukakan oleh kalangan ahli, walaupun maksud dan tujuannya relatif sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi atas objek yang dievaluasi (Widoyoko, 2010:13). Keberagaman model evaluasi program tersebut dapat diuraikan berikut:

1. *Provus Evaluation Model* atau evaluasi kesenjangan program
Kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara *standard* yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut (Widoyoko, 2010:14). Model *discrepancy Provus* terbagi menjadi lima aspek, yaitu: *program design*, *program installation*, *program process*, *program product* dan *cost*, yang diuraikan berikut.
 - a. *Design* (rancangan; *program design*), yaitu rancangan kegiatan atau program kerja. Oleh karena itu ada yang

menyebutnya dengan *program definition* (penetapan program). Yang dievaluasi adalah ada tidaknya unsur input, proses, dan output.

- 1) *Installation (program installation)*; penyediaan perangkat perlengkapan yang dibutuhkan program). Agar program bisa dilaksanakan, lembaga pembuat program itu tentu harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukungnya. Jadi, yang dievaluasi adalah ketepatan berbagai sumber daya, perangkat dan perlengkapan yang tersedia untuk pelaksanaan program.
- 2) *Process (program process)*, yaitu proses pelaksanaan program. Di dalamnya termasuk kepemimpinan dan penugasan-penugasan (*instruction*). Yang dievaluasi adalah keterkaitan (kegayutan) antara sesuatu yang akan diubah, dibangun, dikembangkan dan sebagainya.
- 3) *Product (program product)*, hasil program), yang dievaluasi adalah efektivitas desain atau rancangan program; tegasnya apakah tujuan atau target program bisa tercapai.
- 4) *Cost* (biaya, pengeluaran), yaitu implikasi (kemanfaatan) sosial politik ekonomi apa yang diharapkan bisa tergapai dari pelaksanaan program tersebut (Kirkpatrick, 1998).

b. *CSE-UCLA Evaluation Model*

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu *CSE* dan *UCLA*. *CSE* merupakan singkatan dari *Center for the Study of Evaluation*, sedangkan *UCLA* merupakan singkatan dari *University of California in Los Angeles*. Ciri dari model *CSE-UCLA* adalah adanya lima tahapan evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. Fernandes (1984) mengemukakan bahwa model *CSE-UCLA* juga dapat dibagi ke dalam empat tahapan evaluasi, yaitu: 1) *Needs assessment*, 2) *Program planning*, 3) *Formative evaluation*, dan 4) *Sumative evaluation*. Pada dasarnya, pentahapan tersebut adalah merupakan tahapan yang ada pada *CSE-UCLA model*. Tahapan perencanaan dan pengembangan program memerlukan tahapan evaluasi yang disebut *needs assessment*. Pada tahap implementasi, diperlukan evaluasi formatif, sedangkan untuk mengetahui hasil dan dampak program, diperlukan evaluasi sumatif (Tayibnapis, 2000).

c. *CIPP Evaluation Model*

Model evaluasi *CIPP (Context, Input, Process, Product)* dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (1985) sebagai sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator

atau *leader* pengambil keputusan ((Kirkpatrick, 2009). Model evaluasi *CIPP* terdiri dari beberapa aspek atau dimensi yakni:

1) *Context evaluation*

Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan, serta berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu (Widoyoko, 2010:15). Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2009:12) bahwa evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

2) *Input evaluation*

Evaluasi masukan berguna untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi: sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana atau anggaran, dan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan (Widoyoko, 2010:14-15).

3) *Process evaluation*

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

4) *Product evaluation*

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan (Partner C. 2009).

Ketiga model evaluasi program tersebut, menurut Widoyoko (2010:17) bahwa *CIPP Evaluation Model* lebih komprehensif diantara

model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Selain kelebihan tersebut, di satu sisi model evaluasi ini juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran dikelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak ada modifikasi.

4) Langkah-Langkah Evaluasi Program

Setiap program yang hendak dievaluasi memerlukan langkah-langkah evaluatif. Dalam konteks ini, Oemar Hamalik (2008) mengemukakan beberapa langkah evaluasi program sebagai berikut:

1. Menyusun suatu rencana evaluasi dalam bentuk kisikisi apa yang akan dinilai berkaitan dengan tujuan program.
2. Menyusun instrumen evaluasi, misalnya skala, daftar rentang, pedoman observasi/kuesioner, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi.
3. Melaksanakan pengamatan lapangan, yaitu mengumpulkan data dari responden atau sampel evaluasi.
4. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat ditentukan tingkat keberhasilan program, kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala untuk diperbaiki.
5. Mengajukan sejumlah rekomendasi terhadap program yang telah dievaluasi tersebut.
6. Menyusun laporan evaluasi dan menyebarluaskan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan (Arifin,2009:13).

5) Manfaat Evaluasi Program

Manfaat yang bisa didapatkan pada evaluasi program menurut Tayibnapis (2008) antara lain:

1. Evaluasi program berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program yang dilaksanakan.
2. Menghentikan program, karena dipandang program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

3. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tapi hanya sedikit).
4. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
5. Menyebarluaskan program, karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain (Widoyoko, 2009).

6) Sasaran Evaluasi Program

Peneliti perlu mengenali program dengan baik, untuk menentukan sasaran evaluasi program, utamanya pada komponen-komponennya, karena yang menjadi sasaran evaluasi bukan pada program secara keseluruhan tetapi pada komponen atau bagian program. Tujuan umum seharusnya diuraikan menjadi tujuan khusus, maka sasaran peneliti diarahkan pada komponen agar pengamatannya dapat lebih cermat dan data yang dikumpulkan lebih lengkap (Arikunto dan Abdul Jabar, 2009:12).

2. Konsep Efektivitas Program

Terminologi tentang 'Efektivitas' (kata sifat) atau dalam bahasa Inggris disebut *Effectivity*, berasal dari akar kata 'efektif', atau dengan kata kerja 'mengefektifkan' (*to be effective*). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Tim Redaksi, 2005), kata efektif atau efektivitas diartikan 'tercapainya tujuan yang dikehendaki tanpa memperhitungkan besarnya pengorbanan untuk mencapai tujuan tersebut'. Hal ini berbeda dengan konsep 'efisiensi' yang lebih memperhitungkan faktor pengorbanan tersebut baik dari sisi tenaga, fasilitas, materi terlebih biaya.

Terlepas dari pengertian dasar tersebut, kalangan ahli seperti Dunn (2003:498) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasari dari pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, atau nilai-nilai rakyat. Sedangkan menurut Gibson (1996:30) bahwa efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka semakin lebih efektif dalam menilai.

Siagian (2008:24) mengemukakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Menurut Martoyo (2002:4) bahwa efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Marthen dan Inayatullah (1980) menjelaskan bahwa untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi, maka *output*, *effect* dan *impact* merupakan hasil fisik proyek dan efek yang ditimbulkan tentunya berhubungan langsung dengan kepentingan

masyarakat yang merupakan sasaran proyek, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Nawawi, 1994:43).

Kaitannya dengan kebijakan atau program, Emerson (2011) mengemukakan bahwa efektivitas program adalah pengukuran tercapainya suatu sasaran yang telah ditetapkan pada program maupun kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila tujuan yang telah ditetapkan atau ditentukan telah dicapai, maka dapat dikatakan sebuah program maupun kegiatan tersebut efektif. Begitupun sebaliknya, apabila tujuan yang telah ditetapkan atau ditentukan belum tercapai, maka dapat dikatakan sebuah program maupun kegiatan tersebut belum dapat disebut efektif.

Efektivitas memiliki 3 (tiga) tingkatan menurut David J. Lawless yakni: efektivitas individu, kelompok, dan efektivitas organisasi (Gibson dkk, 1997:25). Menurut Gibson (1996) bahwa ada tujuh kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu: (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap; (4) Perencanaan yang matang; (5) Penyusunan program yang tepat; (6) Tersedianya sarana dan prasarana; (7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik (Gibson, 2003:65). Persyaratan penting yang harus terpenuhi untuk tercapainya efektivitas dalam sebuah program menurut GC. Edwards III adalah: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Sikap dari para pelaksana, (4) Struktur birokrasi. Dalam kaitan itu, Hogwood & Gunn (1986) mengemukakan

bahwa untuk dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan secara sempurna maka terdapat persyaratan, diantaranya:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- 2) Tersedia waktu dan sumber daya;
- 3) Keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- 4) Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- 6) Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- 7) Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- 8) Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang baik;
- 10) Pihak-pihak berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain (Solichin, 1997:71).

Ada 2 (dua) kategori implementasi kebijakan, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasi artinya suatu kebijakan tidak terlaksana sesuai yang direncanakan, mungkin karena implementor kurang atau tidak mau bekerjasama, tidak bekerja secara efisien, persoalan dan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaan, sehingga usaha maksimal yang diusahakan menghadapi hambatan-hambatan yang tidak dapat diatasi. Sedangkan, implementasi yang tidak berhasil disebabkan karena adanya pengaruh dari faktor dan kondisi eksternal (Hogwood & Gunn, 1986 dalam Solichin, 1997:61).

Richard M Steers (1985:8) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah program, yaitu: karakteristik organisasi, pekerja, lingkungan, dan kebijakan dan praktek manajemen. Mazmanian dan Sebatier (1983) mengemukakan 6 (enam) pra kondisi yang mempengaruhi efektivitas, yakni:

- 1) Kemampuan undang-undang (legislasi) atau kebijaksanaan legal lainnya yang nyata dan konsisten untuk memecahkan konflik tujuan;
- 2) Kemampuan undang-undang mencakup teori identifikasi faktor-faktor prinsip dan ketertarikan hubungan yang mempengaruhi sasaran kebijaksanaan;
- 3) Kemampuan struktur undang-undang dalam proses implementasi untuk melakukan tujuan yang diinginkan;
- 4) Pimpinan unit pelaksana memiliki keahlian manajerial dan politik yang dapat melakukan tujuan undang-undang;
- 5) Aktivitas program didukung oleh organisasi kelompok pemilih dan pemimpin elit melalui proses implementasi yang menghendaki tidak memihak dan adanya dukungan;
- 6) Prioritas dari sasaran undang-undang tidak mengurangi jangka waktu penanganan konflik kebijakan publik atau perubahan dalam hubungan kondisi sosial ekonomi yang melemahkan penetapan suatu teori atau dukungan politik (Nugroho R, 2007:41-42).

3. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan

kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen (Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh 2016).

Penanganan kumuh ini meliputi aspek pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Program KOTAKU untuk mewujudkan konsep “100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum dan sanitasi, serta 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen hibah sanitasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) mengatur bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Berdasarkan konsepsi tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- 1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
- 2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
- 3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah:
 - a) Keteraturan bangunan

- b) Jalan Lingkungan
- c) Drainase Lingkungan
- d) Penyediaan Air Bersih/Minum
- e) Pengelolaan Persampahan
- f) Pengelolaan Air Limbah
- g) Pengamanan Kebakaran
- h) Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dan sebagainya. (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh Direktorat Jenderal Kementerian PUPR, 2016).

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ditujukan untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai antara lain:

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 ha
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik

3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (antara lain: drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU;
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh. (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh Direktorat Jenderal Kementerian PUPR, 2016).

Tujuan dibuatnya program KOTAKU dapat dilihat dari tercapainya indikator-indikator tersebut. Apabila akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih, pengelolaan air limbah yang tidak mencemari lingkungan,

pengelolaan persampahan yang baik, dan adanya Ruang Terbuka Hijau, maka program ini dapat dikatakan berhasil.

Upaya mewujudkan program yang baik dan maksimal yang dicanangkan oleh Pemerintah maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk mencapainya. Adapun strategi yang disusun oleh Tim KotaTanpa Kumuh adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi Dasar Kolaborasi, yaitu seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.
- 2) Strategi operasional dalam penyelenggaraan program KOTAKU adalah sebagai berikut:
 - (1) Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
 - (2) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;
 - (3) Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multisektor dan multi-aktor;
 - (4) Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
 - (5) Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
 - (6) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;
 - (7) Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan kehidupan berkelanjutan;
 - (8) Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci;
 - (9) Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan. (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU, 2016).

Adanya strategi dalam melaksanakan program maka tujuan program akan lebih mudah tercapai. Hal ini dikarenakan strategi akan membantu pelaksana program untuk mencapai apa yang menjadi tujuan program, dan

meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak negatif yang terjadi jika program tidak memiliki strategi dan prinsip.

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

1. Pemerintah Daerah sebagai Nakhoda. Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.
2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program). Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/ kota, yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).
3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten/ kota dalam RPJMD.
4. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kota/ kabupaten dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kota/ kabupaten mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkot/ Pemkab hingga pemerintah desa dan kecamatan.
5. Partisipatif, yaitu pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*)
6. Kreatif dan Inovatif Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh
7. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*good governance*) pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan masyarakat mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*)
8. Investasi penanganan kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan. (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, 2016).

Prinsip-prinsip dari pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh adalah: pertama, *Partisipatif* (yakni pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses kegiatan); kedua, *Transparan* (dilaksanakan secara terbuka); ketiga, *Akuntabel*, dapat dipertanggungjawabkan; keempat, *Keberlanjutan*, infrastruktur permukiman memberikan manfaat secara menerus. Adapun komponen Program KOTAKU, adalah : Pertama, Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan; Komponen 2: Integrasi perencanaan dan pengembangan kapasitas untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat; Ketiga, Komponen 3: Perbaikan infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh, meliputi: a. infrastruktur primer dan sekunder, termasuk dukungan pengembangan pusat usaha di kabupaten/kota terpilih., dan b. infrastruktur tersier atau infrastruktur lingkungan, termasuk dukungan penghidupan berkelanjutan; Keempat, Komponen 4: Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; Kelima, Komponen 5: Dukungan untuk darurat bencana (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, 2016).

Berdasarkan tujuan program yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Cipta Kementerian PUPR menetapkan pola penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU yakni tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-

Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
yaitu:

1. Pencegahan: tindakan pencegahan kumuh meliputi pengelolaan dan pemeliharaan kualitas perumahan dan permukiman, serta dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru.
2. Peningkatan Kualitas: peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali
3. Pengelolaan
 - a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;
 - b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
 - c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
 - d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan. (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, 2016).

Program Kotaku dilaksanakan di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah:

1. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kota/kabupaten terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
3. Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh. (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, 2016).

Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kota dan masyarakat mencakup beberapa kegiatan penting dan utama yakni: persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan sebagaimana diuraikan berikut.

1. Persiapan

- a. Advokasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan
 - 1) Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah dan masyarakat;
 - 2) Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau pengelola program seperti PMU, CCMU dan Pokja PKP Nasional;
 - 3) Lokakarya orientasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- b. Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran
 - 1) Seleksi kabupaten/kota yang memiliki komitmen penanganan kumuh dan kriteria sesuai yang ditentukan Program
 - 2) Penandatanganan MOU antara Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bukti komitmen akan menyelenggarakan Program KOTAKU.
- c. Pengembangan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan
 - 1) Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan/pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah. Bila diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapangan pendukung;
 - 2) Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti PMU, CCMU (Central Collaboration Management Unit), Pokja PKP nasional dan daerah serta kelembagaan masyarakat;
 - 3) Pengembangan sistem informasi terpadu; dan
 - 4) Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku dilaksanakan melalui pelatihan untuk para pelaku dan pemangku kepentingan nasional.

Di tingkat kota/kabupaten, tahap persiapan meliputi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Penyepakatan MoU antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Program KOTAKU. MoU menyepakati indikasi kebutuhan pendampingan kabupaten/kota yang bersangkutan, termasuk apakah akan menggunakan rencana penanganan kumuh yang sudah ada (yang memenuhi kriteria minimum

dan tercantum dalam RPJM), merevisi, atau menyusun yang baru.

- 2) Lokakarya Sosialisasi Kabupaten/kota
- 3) Penggalangan Komitmen Para Pemangku Kepentingan
- 4) Pembentukan atau Penguatan Pokja Penanganan Permukiman kumuh.
- 5) Komitmen Penyusunan Dokumen RP2KP-KP.

2. Perencanaan

- a. Persiapan perencanaan
- b. Penyusunan RP2KP-KP dan RPLP
- c. Penyusunan Rencana Detil/Teknis.

3. Pelaksanaan

- a. Penganggaran di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan keterpaduan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana investasi yang telah disepakati dalam RP2KP-KP, rencana kawasan, maupun dokumen lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan, berdasarkan prioritas dari perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota atau Kelurahan/Desa dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah
- b. Penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervise kegiatan. Pelaksana kegiatan infrastruktur skala kabupaten/kota secara kontraktual oleh pihak ketiga (kontraktor) dengan pengadaan barang dan jasa oleh Satker Provinsi, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
- c. Sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan Rencana O & P.

4. Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi. Upaya

keberlanjutan pada program KOTAKU diharapkan pada keberlanjutan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kerangka regulasi
- 2) Penguatan Kelembagaan untuk Penganggaran dan Operasional dan Pemeliharaan. Pembangunan lembaga pengelola infrastruktur yang telah dibangun, misalnya pemilik sampah, penilik drainase, kebakaran, bangunan, dan sebagainya
- 3) Pengelolaan Database dan Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Program.
- 4) Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi dan GIS yang berbasis website. Sistem informasi mencakup profil kumuh di tingkat kota/kabupaten, kawasan, maupun kelurahan sesuai data hasil survey baseline maupun SK kumuh, ringkasan RP2KP-KP dan RPLP, proses dan progress kegiatan peningkatan kualitas maupun pencegahan, hasil-hasil kegiatan infrastruktur, capaian indicator kinerja, maupun informasi kelembagaan, pemrograman maupun penganggaran di tingkat kota/kabupaten. Tahap evaluasi diselenggarakan dengan mengacu pada baseline data, hasil monitoring dan survei khusus untuk studi evaluasi. Evaluasi akan memberikan gambaran pencapaian serta rekomendasi sebelum masuk ke siklus selanjutnya.

Implementasi program Kotaku melibatkan berbagai pihak berkewenangan maupun berkepentingan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan atau desa, yaitu: Pertama, garis koordinasi dan kolaborasi mulai dari Tim Pengarah Pokja PKP Nasional sampai dengan tingkat kelurahan/ desa; Kedua, mekanisme koordinasi dan kerjasama antar pelaku program KOTAKU dalam garis pelaksanaan mulai dari Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Cipta Karya (DJCK) hingga BKM/LKN, KSN dan relawan; Ketiga, garis koordinasi dan pengendalian dalam garis dukungan program. Masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan program KOTAKU telah memiliki mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat

yakni melalui pembentukan pengelolaan pengaduan masyarakat (disingkat PPM) berdasarkan kelompok kerja (Pokja)PKP (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa) menurut hirarki wilayah dengan derajat masalahnya masing-masing.

4. Konsep Permukiman Kumuh

a. Konsep Kumuh

Istilah 'kumuh' sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa asing khususnya bahasa Inggris yakni '*Slum*'. Dalam kamus ilmu-ilmu sosial atau sosiologi, *Slum's* diartikan sebagai suatu daerah yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat. *Slum's* yaitu daerah penduduk yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat kesehatan (Soerjono, 1985). Menurut Nussli dan Heinrichs (2013) bahwa daerah *slum's* dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat.

Slum's menurut Utomo merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman (Syaiful, 20002). *Slum's* adalah permukiman di atas lahan yang sah yang sudah sangat merosot (kumuh) baik perumahan maupun permukimannya (Herlianto, 1985 dalam Odexyundo, 2016). Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas

menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan (Nuissl, 2013).

Kumuh atau *slum* adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di pinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan oleh Suparlan. Tetapi pada perincian ini permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim. (Adisasmita R, 2005:147).

Menurut Clinard bahwa kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan di mana pun juga, kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif. Pemahaman kumuh dapat ditinjau dari: Pertama, Sebab Kumuh : kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari (1) segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara, (2) segi masyarakat/ sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah. Kedua, Akibat

Kumuh: kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain (1) kondisi perumahan yang buruk; (2) penduduk yang terlalu padat; (3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai; (4) tingkah laku menyimpang; (5) budaya kumuh; (6) apati dan isolasi. (Putro, 2011:20).

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Putro, 2011:21).

b. Konsep Permukiman Kumuh

1) Konsep dasar: kriteria, dimensi dan karakteristik

Permukiman kumuh memiliki beragam pemaknaan dari berbagai sudut pandang. Permukiman kumuh merupakan suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak terstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, dan MCK), bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler mengalami banjir tiap tahunnya (Santosa, 2007:3). Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).

Charter Adam (1984) menyebut permukiman di lingkungan kumuh sebagai kampung gembel dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah (Wirotno,1997:23).Sedangkan E.E. Bergel (1970) menyebut permukiman kumuh sebagai daerah *slum* yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial ((Wirotno,1997:23-24).Soemadi (1990) menyatakan perkampungan kumuh adalah bagian dari kota yang jorok, bangunan-bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan fasilitas tempat pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan (Wirotno,1997:24).

Suparlan (1997) mengemukakan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman atau perumahan orang-orang miskin perkotaan yang berpenduduk padat, terdapat dipinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kondisinya kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau yang disebut juga sebagai wilayah pencomberan. Namun, menurut Adisasmita R (2005:147) bahwa secara rinci permukiman kumuh dianggap sebagai tempat dimana anggota masyarakat kota di wilayah tersebut mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim. Dengan demikian, permukiman kumuh tidak hanya menekankan pada kondisi fisik yang tidak layak, namun juga pada aspek kehidupan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut yang tergolong masyarakat miskin.

Menurut Drakakish (2002) bahwa permukiman kumuh adalah daerah permukiman dengan unit rumah yang mempunyai ukuran kecil-kecil, serta kondisi fisik lingkungan buruk. Permukiman kumuh dalam kaitannya dengan masalah perkotaan. Apabila dilihat dari kondisi fisik lingkungan yang tidak memadai, sedangkan kondisi geografisnya layak untuk huni. Permukiman kumuh bersifat legal atau secara hukum diakui kepemilikannya.

Kriteria umum permukiman kumuh adalah:

- (1) Mandiri dan produktif dalam banyak aspek, namun terletak pada tempat yang perlu dibenahi;
- (2) Keadaan fisik hunian minim dan perkembangannya lambat. Meskipun terbatas, namun masih dapat ditingkatkan;
- (3) Para penghuni lingkungan pemukiman kumuh pada umumnya bermata pencaharian tidak tetap dalam usaha non formal dengan tingkat pendidikan rendah.
- (4) Pada umumnya penghuni mengalami kemacetan mobilitas pada tingkat yang paling bawah, meskipun tidak miskin serta tidak menunggu bantuan pemerintah, kecuali dibuka peluang untuk mendorong mobilitas tersebut.
- (5) Ada kemungkinan dilayani oleh berbagai fasilitas kota dalam kesatuan program pembangunan kota pada umumnya.
- (6) Kehadirannya perlu dilihat dan diperlukan sebagai bagian sistem kota yang satu, tetapi tidak semua begitu saja dapat dianggap permanen (Nuissl dan Heinrichs, 2013).

Kriteria Khusus Pemukiman Kumuh adalah:

- (1) Berada di lokasi tidak legal
- (2) Dengan keadaan fisik yang substandar, penghasilan penghuninya amat rendah (miskin);
- (3) Tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota;
- (4) Tidak diinginkan kehadirannya oleh umum (kecuali yang berkepentingan);
- (5) Pemukiman kumuh selalu menempati lahan dekat pasar kerja (non formal), ada sistem angkutan yang memadai dan dapat dimanfaatkan secara umum walau tidak selalu murah (Nisanth, 2015).

Menurut Sandy (1984) bahwa umumnya permukiman kumuh tumbuh yang dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu:

- (1) Di lahan yang ada peruntukan bangunan, dengan koefisien dasar bangunan (KDB) lebih besar dari 0%, maksudnya di daerah yang boleh didirikan bangunan. Lokasi tersebut antara lain di tanah-tanah kosong milik negara atau swasta yang belum sempat dikembangkan (di atas tanah bukan milik), dan umumnya di pusat kota;
- (2) Di lahan kosong yang tidak ada peruntukan bangunan (tidak boleh ada bangunan), KDB=0%, antara lain untuk jalur pengaman atau penghijauan. Lokasi tersebut antara lain: di pinggir rel kereta api, di bantaran sungai, di bawah jalur tegangan tinggi, di pinggir jalan tol, di jalur hijau, dan di bawah jembatan. Yang tinggal di permukiman kumuh ini umumnya bukan warga kota. Mereka hanya mencari nafkah di kota, dan termasuk golongan masyarakat tertinggal (Adisasmita R,2005: 148).

Pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, maka akan melampaui daya dukung lingkungan, karena fasilitas lingkungan hanya disediakan berdasarkan jumlah penduduk formal. Dalam hal ini hunian penduduk yang tumbuh tidak terencana termasuk bukan penduduk tetap, diluar perhitungan penyediaan fasilitas yang ada, maka kualitas lingkungan cenderung akan merosot dan kumuh (Aditama, 2016).

Umumnya permukiman kumuh diwarnai oleh tingginya kepadatan penduduk; tingginya kepadatan hunian; kualitas rumah yang sangat rendah; tidak memadainya sarana atau fasilitas yang meliputi air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Selain itu permukiman kumuh juga diwarnai oleh rendahnya kemampuan ekonomi atau pendapatan, rendahnya tingkat

pendidikan dan keterampilan, dan kohesivitas komunitas masyarakat yang rendah (Syahriartato, 2016).

Permukiman kumuh pada umumnya diwarnai oleh tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tingkat kepadatan hunian sangat tinggi, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut (Purnomo, 2012).

Menurut Carrasco & Ochiai (2016) bahwa definisi permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Ciri permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah.

Karakteristik pemukiman kumuh menurut Johan Silas (1996)

antara lain:

- a. Keadaan rumah pada pemukiman kumuh terpaksa dibawah standar rata-rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas perkotaan secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karenalokasinya dekat dengan pemukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.
- b. Pemukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (*opportunity value*) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa. Manfaat pemukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi. Hampir setiap orang tanpa syarat yang bertele-tele pada setiap saat dan tingkat kemampuan membayar apapun, selalu dapat diterima dan berdiam di sana (Syaiful, 2002).

Permukiman kumuh pada dasarnya terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terajut dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Oleh karena itu permukiman kumuh harus senantiasa dipandang secara utuh dan integral dalam dimensi yang lebih luas (Syaiful, 2002).

Suatu permukiman dapat dikategorikan sebagai permukiman kumuh memiliki beberapa karakteristik tertentu. Sinulingga (2005) mengemukakan bahwa karakteristik permukiman kumuh terdiri atas:

1. Penduduk yang sangat padat antara 250-400 jiwa/ha. Suatu kawasan yang telah mencapai kepadatan penduduk sekitar 80 jiwa/ha seharusnya tidak layak lagi untuk dilakukan penambahan jumlah pemukiman karena dapat mengurangi kualitas kesehatan dan lingkungan permukiman tersebut.
2. Jalan-jalan yang sempit sehingga tidak dapat diakses atau dilalui oleh roda empat

3. Fasilitas drainase yang tidak memadai dan bahkan terdapat jalan-jalan yang tidak memiliki drainase sehingga apabila hujan, kawasan tersebut tergenang oleh air
4. Fasilitas pembuangan kotoran/tinja sangat minim sekali, sehingga masyarakat membuangnya di sungai-sungai terdekat
5. Fasilitas penyediaan air bersih yang minim.

Karakteristik atau ciri permukiman kumuh adalah: 1) Daerah permukiman dengan lingkungan yang tidak sehat, 2) Daerah permukiman yang dihuni oleh warga kota yang gagal dalam bidang ekonomi. Menurut Suparlan (1997) bahwa ciri-ciri permukiman kumuh adalah:

- 1) Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- 2) Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- 3) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- 4) Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - a) Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b) Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c) Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
- 5) Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
- 6) Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal (Putro, 2011:22).

Konsepsi dari Suparlan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa permukiman kumuh memiliki ciri kondisi hunian rumah dan pemukiman

serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. Penggunaan ruang tersebut berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH)(Ridwan dan Sodik, 2008). Keadaan demikian menunjukkan bahwa penghuninya yang kurang mampu untuk membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni. Dengan begitu, permukiman yang berada pada kawasan SUTET, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, dan sempadan situ/danau merupakan kawasan permukiman kumuh(Purnomo, 2012).

Menurut Ditjen Bangda Depdagri, ciri-ciri permukiman atau daerah perkampungan kumuh dan miskin dipandang dari segi sosial ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan.
- b. Sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal
- c. Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki:
 - 1) Kepadatan penduduk yang tinggi > 200 jiwa/km².
 - 2) Kepadatan bangunan > 110 bangunan/ha.
 - 3) Kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan).

- 4) Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun <20% dari luas persampahan.
 - 5) Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal.
- d. Permukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit dan keamanan.
 - e. Kawasan permukiman dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya (Ridwan dan Sodik, 2008).

2) Pola Persebaran Permukiman Kumuh

Kota-kota tumbuh dan berkembang karena beberapa hal. Ada kota yang tumbuh karena perdagangan dan kemudian berkembang sebagai kota perdagangan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tidak ada kota yang berfungsi satu seperti misalnya hanya kota pelajar, atau hanya kota industri dan lainnya. Struktur kota di Indonesia baik kota kolonial, bekas "Gemeente" maupun kota-kota bukan bekas "Gemeente" akan nampak ada perbedaan. Struktur kota "bekas Gemeente" memiliki:

1. Pusat usaha meliputi toko, pasar los; 2. Perumahan kumuh dan padat;
3. Perumahan baik; 4. Perumahan kumuh dengan lorong-lorong sempit.

Sedangkan struktur kota bukan bekas "Gemeente" memiliki: 1. Pusat usaha meliputi toko; pasar los; 2. Perumahan baik, tidak ada lorong sempit (Wirotoomo, 1997; Dimas Handoko, 2016).

Persebaran permukiman membicarakan dimana terdapat permukiman kumuh dan dimana tidak terdapat permukiman kumuh dalam suatu wilayah. Disamping itu pula membahas bagaimana terjadinya permukiman kumuh, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya persebaran permukiman kumuh. Dengan kata lain permukiman kumuh

membicarakan tentang persebaran permukiman kumuh baik lokasi penyebaran, proses terjadinya, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran permukiman kumuh (Odexyundo, 2016).

5. Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh

a. Penanganan terpadu

Penanganan terpadu perumahan dan permukiman kumuh perlu disesuaikan dengan kepadatan penduduk, kondisi bangunan, prasarana dan sarana lingkungan, utilitas, serta kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang (RTRWK), dalam bentuk penanganan terintegrasi atau terpadu yakni perbaikan dan pemugaran, peremajaan, relokasi (Emerson, 2011).

1) Perbaikan atau pemugaran

Perumahan dan permukiman kumuh yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang, dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang tidak sangat tinggi, sehingga masih dimungkinkan penambahan, perluasan, serta perbaikan bangunan, prasarana dan sarana lingkungan maupun utilitas umum, penanganannya dilakukan dengan perbaikan atau pemugaran (Wirotno, 1997:17-18).

2) Peremajaan

Cara mengatasi permukiman kumuh mengatasi masalah permukiman tidak terbatas pada perbaikan lingkungan fisik namun juga perlu penanaman kesadaran akan pentingnya lingkungan sehat dan tertata. Salah satu model penanganan kawasan permukiman kumuh adalah dengan konsep peremajaan. Peremajaan permukiman kota adalah segala upaya dan kegiatan pembangunan yang terencana untuk mengubah/ memperbaharui suatu kawasan terbangun di kota yang fungsinya sudah merosot atau tidak sesuai dengan perkembangan kota, sehingga kawasan tersebut dapat meningkat kembali fungsinya dan menjadi sesuai dengan pengembangan kota. Peningkatan fungsi dalam peremajaan kota dimaksudkan untuk memperbaiki tatanan sosial ekonomi di kawasan bersangkutan agar lebih mampu menunjang kehidupan kota secara lebih luas (Elly LN, 2010).

Peremajaan harus dapat memecahkan kekumuhan secara mendasar, karenanya tidak hanya memberi alternatif pengganti lain yang pada kenyataannya dapat menimbulkan kekumuhan di tempat lain dan menjadikan beban baru bagi masyarakat, tetapi peremajaan harus tanpa menggusur dan dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat secara umum, sehingga peremajaan yang antara lain dengan perbaikan fisik dipakai sebagai suatu alat untuk peningkatan taraf hidup, yang sekaligus memperbaiki pula kondisi fisik kota sejalan dengan program nasional penanggulangan kemiskinan. Kegiatan peremajaan mengisyaratkan pula bahwa perumahan dan permukiman kumuh yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang, akan tetapi dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat tinggi, sehingga tidak dimungkinkan penambahan, perluasan, dan perbaikan bangunan, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum, penanganannya dilakukan dengan peremajaan.

3) Relokasi

Perumahan dan permukiman kumuh yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang, penanganannya dilakukan dengan relokasi ke lokasi perumahan dan permukiman lain yang telah dipersiapkan sesuai dengan peruntukannya, dan dengan memperhatikan kesinambungan kesempatan kerja dan peningkatan masyarakat penghuni (Supriyatno, (2014).

b. Penataan permukiman kumuh

Penataan Permukiman kumuh dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang meliputi strategi dalam rangka perbaikan permukiman dan peningkatan kualitas permukiman (Putro, 2011). Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan. Secara umum, Undang-Undang ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Undang-Undang tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa salah satu ruang lingkup penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan program oleh berbagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pembinaan dalam proses penanganan permukiman kumuh yang dilakukan dalam lingkup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Tanggung jawab pemerintah dilakukan melalui koordinasi; sosialisasi peraturan perundang-undangan; bimbingan, supervisi dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pendampingan dan pemberdayaan; serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi (Putro, 2011).

c. Penerapan Konsep Pembangunan bertumpu pada masyarakat

Pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat secara umum dapat dikaitkan sebagai metode, proses, pendekatan dan bahkan pranata pembangunan yang meletakkan keputusan-keputusannya berdasarkan keputusan masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini yaitu agar hasil pembangunan dapat diterima oleh masyarakat penghuni kawasan tersebut sesuai dengan kegiatan yang telah mereka laksanakan (Isbandi, 2007).

Partisipasi masyarakat dalam pendekatan ini menjadi faktor penting dalam proses perencanaan dan perancangan program pembangunan. Hal yang dapat ditarik dari pendekatan untuk permukiman adalah metode partisipasi merupakan metode penting karena dengan metode ini keputusan-keputusan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat diambil dan pendekatan partisipatif dalam konteks ini adalah bersifat langsung, pengertian masyarakat selalu diartikan kelompok yang langsung memiliki kepentingan dengan proses pembangunan permukiman yang terkait, maka seringkali pendekatan pembangunan bertumpu pada masyarakat dilakukan untuk pembangunan yang bersifat lokal dan berorientasi pada kepentingan lokal (Muslim, 2008).

d. *Redevelopment*

Priatmodjo (2003) menjelaskan bahwa *redevelopment* adalah salah satu golongan dalam garis besar pengembangan kawasan yang berarti menata kawasan kembali. Penghidupan kembali kawasan dilakukan dengan cara memperbaharui fisik dan non fisik kawasan (proses peremajaan), kemudian ketika proses dilakukan akan ditemui kebutuhan-kebutuhan baru sehingga dilakukan *infill* (Hasni, 2010). Tujuan *redevelopment* adalah membuat nilai tambah yang dimiliki kawasan tersebut (perbaikan ekonomi atau mengikis kerawanan lingkungan) dan menciptakan kawasan dengan kualitas yang lebih baik (Papageorgiou (1970) dalam Tarigan (2005); Khomarudin (1997)).

Metode Konsep Townscape menjelaskan bahwa peremajaan kota menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pembongkaran bangunan-bangunan yang rusak, yang memberi ciri lingkungan rusak dan menggantikannya dengan bangunan baru (Papageorgiou (1970) dalam Tarigan (2005). Peremajaan kota juga termasuk usaha-usaha untuk menghidupkan berbagai kegiatan ekonomi di daerah yang rusak, dengan cara meningkatkan pendapatan keluarga hingga taraf hidup yang cukup sehingga memungkinkan mereka memperbaharui tempat-tempat tinggalnya. Keberhasilan peremajaan kota juga menuntut dikuasainya keterampilan yang cukup di dalam perencanaan dan perancangan, untuk meminimalkan kondisi-kondisi buruk pada lingkungan secara fisik pada awal pembangunan. Masalah utama lain di dalam peremajaan permukiman kota muncul sebagai akibat dari pemindahan penduduk berpendapatan rendah yang tinggal di dalam bangunan-bangunan yang akan dibongkar dan dipindahkan ke bangunan baru (Elly LN, 2010).

e. Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalize kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital hidup akan tetapi mengalami kemunduran dan degradasi. Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang. Revitalisasi fisik diyakini

dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga ruang ruang publik) kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (*economic revitalization*) yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek lingkungan (*environmental objectives*). Hal tersebut mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuklah sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota (Nuisl dan Heinrichs, 2013).

Menurut Wirotomo (1997) bahwa revitalisasi sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, terjadi atau dilakukan melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi:

- 1) Intervensi fisik

Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, system tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

- 2) Rehabilitasi ekonomi

Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota. Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (*vitalitas baru*).

3) Revitalisasi sosial/institusional

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (interesting), jadi bukan sekedar membuat beautiful place. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (public realms). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (place making) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik. Revitalisasi sebagai bentuk upaya peningkatan suatu kawasan tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara. Usaha pemerintah dalam penanganan terpadu perumahan dan permukiman kumuh meliputi kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pembinaan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan masyarakat (Wirotnomo, 1997:8-9).

f. Penerapan Prinsip *Sustainable Urban Neighborhood*

Sustainable Urban Neighborhood adalah skala kecil kawasan perkotaan yang terdiri dari sosial, ekonomi dan lingkungan berkelanjutan. Istilah "SUN" adalah berkelanjutan yang berhubungan dengan generasi yang akan datang dan mengurangi dampak yang dapat merusak lingkungan, keadaan kota yang berkaitan dengan lokasi dan karakter fisik, dan kesejahteraan sosial dan ekonomi daerah (Tarigan R, 2005; Sadyohutomo, 2009).

Kawasan yang dapat disebut telah menjadi sebuah lingkungan yang *sustainable urban neighbourhood* dimana perencanaan tata ruang yang strategis antara lain:

- 1) Kawasan yang dapat ditempuh dengan jalan kaki. Hal ini akan memungkinkan karyawan untuk tinggal di dekat tempat kerja, mengurangi kendaraan dan menciptakan komunitas ramah lingkungan
- 2) Dapatkan spasial strategi yang tepat. Sekitar perencanaan dan perencanaan penggunaan lahan dan infrastruktur wewenang dan sub-wilayah tingkat lokal saling melengkapi

- 3) Mendorong pemulihan area hijau di pusat kota. Investasi publik jangka panjang sangat penting untuk mendukung kota populasi dan ekonomi
- 4) Gunakan solusi pendanaan yang kreatif. Kepastian keuangan memerlukan kerjasama antara masyarakat dan sektor swasta dan pengurangan risiko dalam pembangunan (Bratakusumah dkk, 2009).

Perancangan desain yang dapat dilakukan untuk mencegah pengurangan lahan lingkungan asli dari pembangunan berlebihan, yaitu:

- 1) Memaksimalkan penggunaan lahan dan bangunan serta mengurangi pembangunan yang dapat mengurangi lahan hijau.
- 2) Menyediakan hunian yang ramah lingkungan.
- 3) Mendorong penataan daerah perkotaan yang baik dengan cara kualitas bangunan, perencanaan jalan, dan ruang terbuka dengan fasilitas yang baik.
- 4) Memudahkan kegiatan masyarakat setempat dari pergi bekerja maupun fasilitas-fasilitas lainnya.
- 5) Membuat transportasi publik menjadi nyaman dan layak serta membuat kegiatan berjalan dan bersepeda menjadi menarik (Sandy, 1984; Tarigan, 2005).

g. Penerapan konsep Kampung Tematik

Kampung tematik merupakan upaya untuk menciptakan kampung yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan kearifan lokal. Menurut Majewski dan Zmyslony bahwa konsep kampung tematik lebih menawarkan masyarakat untuk terlibat secara proaktif untuk menciptakan tata ruang kampung yang berciri khas dan berkelanjutan. Sedangkan Kloczko-Gajewska Konsep kampung tematik juga merupakan suatu gagasan kreatif yang lahir dari komunitas maupun masyarakat yang disebut juga sebagai sebuah inovasi sosial. Karena dalam prosesnya masyarakat mengembangkan ide dan gagasan baru untuk menciptakan kampung yang kreatif dan berkelanjutan (Tamara dkk,2018:3).

Pelaksanaan konsep kampung tematik berdasarkan skema inovasi sosial memiliki tiga tahapan. Tahap pertama merupakan pemetaan problematika yaitu: masyarakat bersama mencari ide/gagasan dalam mengembangkan kampungnya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Tahap kedua adalah menentukan tema kampung dengan menemukan sekelompok orang yang tertarik untuk dapat bekerja sama dalam menerapkan gagasan atau tema pada kampungnya. Selanjutnya tahap ketiga adalah deliniasi dan koordinasi melalui gagasan atau tema yang kemudian dimodifikasi oleh berbagai aktor yang terlibat hingga akhirnya diimplementasikan secara nyata pada wilayahnya.

Berdasarkan tiga tahap pelaksanaan konsep kampung tematik dijelaskan pula bahwa kampung tematik dapat berkembang atas kelayakan ide atau tema. Menurut Atkočiūnienė & Kaminaitė bahwa kampung tematik juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakteristik ekonomi, sosial, adanya potensi lokal yang diangkat, dukungan keuangan dari pihak luar, inisiatif dari tokoh masyarakat, meningkatnya pendapatan, dan inisiatif dari masyarakat (Atkočiūnienė & Kaminaitė, 2017). Sedangkan menurut Fosso & Kahane bahwa suatu konsep pengembangan kawasan seperti kampung tematik dapat mencapai hal yang positif apabila masyarakat dapat berpartisipasi dan melihat dampak positif, potensi peningkatan hingga kemungkinan pendapatan yang dapat dihasilkan (Tamara dkk,2018:3-4).

Penelitian yang dilakukan oleh Kloczko-Gajewska menunjukkan bahwa kampung tematik yang berhasil merupakan kampung yang melibatkan kelompok masyarakat untuk dapat mengimplementasikan tema yang sesuai dengan kampungnya (Tamara dkk,2018). Sebaliknya, kampung tematik dikatakan tidak berhasil apabila dilihat dari ketidakikutsertaan masyarakat dalam implementasi tema sehingga akhirnya tema itu tidak dapat berjalan hingga ditinggalkan.

6. Konsep *Good Urban Governance*

Tata kelola kotamenurut Nisanth (2015) dapat menjadi strategi dalam penanganan permukiman kumuh. Hal ini penting karena dalam permukiman kumuh dibutuhkan upaya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman dan juga perlu melibatkan pasrtisipasi masyarakat serta kontribusi dari pihak swasta dalam penanganannya. Adisasmita R (2010:147) mengemukakan bahwa permasalahan utama dalam tata kelola atau penanganan kawasan perkotaan adalah meningkatnya kebutuhan pelayanan perkotaan, terbatasnya kemampuan pengelolaan perkotaan khususnya sumber pembiayaan, meningkatnya masalah sosial permasyarakatan di perkotaan, meluasnya kawasan kumuh sehingga menurunnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan, rendahnya pengelolaan lalu lintas dan transportasi umum di kawasan perkotaan, rendahnya pengelolaan lalu lintas dan transportasi umum di kawasan perkotaan, belum baiknya sistem penataan ruang dan penataan lahan perkotaan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka pengelolaan kawasan perkotaan adalah meningkatnya peran kota untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat seperti lapangan kerja, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan umum lainnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan penting lainnya adalah menciptakan ketertiban umum dan rasa aman masyarakat, peningkatan pelayanan umum, ketertiban dalam penataan. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan penataan yang tepat maka sangat diperlukan suatu *urban governance* atau tata kelola perkotaan (Adisasmita R, 2010:148).

Menurut Edenlebos *et.al.*, (1999) bahwa *Urban governance* muncul sebagai respon atas kompleksitas permasalahan perkotaan yang mana upaya penyelesaiannya tidak dapat dituntaskan dalam bentuk birokrasi tradisional, namun dengan melakukan jejaring antar organisasi. Dengan demikian *Urban Governance* dimaknai bahwa penyelesaian permasalahan hanya bisa diselesaikan dengan tidak hanya bergantung pada kekuasaan dan peranan manajerial pemerintah semata, namun juga pada tataran lokal harus dibangun hubungan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dalam memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang ada (Julian dan Meine, 1999), sehingga *urban governance* dapat menjadi strategi untuk mengembangkan kapasitas kelembagan di tataran lokal dengan mengembangkan modal sosial sehingga permasalahan yang muncul diharapkan dapat terselesaikan. *Urban governance* sangat memberikan ruang

bagi adanya peran institusi lokal baik dari pemerintah daerah maupun partisipasi dari masyarakat.

Pierre (1999) menekankan bahwa *Urban Governance* juga merupakan masuknya sektor swasta dalam berperan dalam pembangunan perkotaan, selain memang membutuhkan peran dari institusi lokal seperti pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Dengan demikian *urban governance* juga memuat tentang adanya relasi yang terwujud dalam kemitraan atau kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta. Richard E. Stren mengemukakan tentang tatakelola perkotaan yang lebih bersifat teknis dan mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Proyek pembangunan perkotaan dalam konteks wilayah kota dan pertimbangan kelembagaan.
2. Memusatkan perhatian pada sumber daya keuangan lokal untuk memperkuat desentralisasi.
3. Memusatkan perhatian pada berbagai alternatif untuk mengorganisir dan membiayai pelayanan kota seperti: air bersih, transportasi, listrik sampah, kesehatan, dan lain-lain.
4. Perhatian untuk mencari dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pelayanan infrastruktur kota (Pierre, 1999).

Aspek-aspek manajemen perkotaan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *urban governance* atau tata kelola perkotaan perlu mempertimbangkan dari segi kelembagaan atau pelaksana manajemen perkotaan. *Urban governance* perlu menekankan pada kemampuan keuangan daerah sehingga dapat mendukung operasional pelaksanaan manajemen perkotaan. Hal ini karena manajemen perkotaan dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas infrastruktur fisik suatu kota seperti pada penyediaan pelayanan publik diberbagai bidang yakni

penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal yang layak, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, manajemen perkotaan juga tidak lupa perlu melibatkan atau memberi ruang kepada partisipasi masyarakat.

Good urban governance merupakan suatu konsep mengenai manajemen atau tata kelola perkotaan yang berakar dari dua konsep yakni konsep *good governance* dan *urban governance*. Konsep *good governance* sendiri merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dengan beberapa komponen yang menjadi indikator pengelolaan pemerintah dapat dikatakan baik. Namun, konsep *good governance* tidaklah lepas dari aspek *governance*. UNDP mengidentifikasi adanya dua aspek utama dari *governance* yakni: (1) secara teknis merupakan suatu proses dan prosedur dalam memobilisasi sumber daya, formulasi perencanaan, aplikasi teknis dan alokasi sumber daya, dan (2) dalam prosesnya perlu adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat (Syakrani dan Syahriani, 2009:120). Sedangkan World Bank mengidentifikasi 4 aspek utama dalam *good governance* yang meliputi manajemen sektor publik, akuntabilitas, penegakan hukum dalam pembangunan, informasi publik dan transparansi (Tahir, 2015:12).

Konsep *governance* dan *good governance* menjadi landasan penting dalam penerapan *good urban governance*. *Good urban governance* dalam penjelesannya memiliki beragam perspektif. Hendrik (2014:13) mengemukakan bahwa inti dari nilai-nilai *good urban governance* berasal dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance*. Prinsip-prinsip

tersebut antara lain: responsitas, efektifitas, adanya penegakan aturan yang adil, akuntabel dan demokratis. Tata kelola yang baik atau *good urban governance* haruslah memperhatikan hal-hal tersebut dalam pelaksanaannya. Perspektif lain menyebutkan bahwa *good urban governance* sebenarnya merupakan kampanye global dari salah satu organisasi PBB yang bernama *United Nations Human Settlements Programme* (UN-Habitat). Organisasi ini bertujuan untuk membuat pedoman bagi negara-negara di dunia dalam rangka mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. *Good urban governance* merupakan upaya merespon berbagai permasalahan pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Konsep *good urban governance* UN Habitat (2000) adalah:

Urban governance is inextricably linked to the welfare of the citizenry. Good urban governance must enable women and men to access the benefits of urban citizenship. Good urban governance, based on the principle of urban citizenship, affirms that no man, woman or child can be denied access to the necessities of urban life, including adequate shelter, security of tenure, safe water, sanitation, a clean environment, health, education and nutrition, employment and public safety and mobility. Through good urban governance, citizens are provided with the platform which will allow them to use their talents to the full to improve their social and economic conditions.” (Hendrik, 2014:13).

Konsep *good urban governance* dari UN-Habitat tersebut tampak lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola kota yang berkelanjutan. Menurut UN-Habitat (2000) bahwa *good urban governance* merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di

perkotaan dan berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dan stakeholder lain untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang baik di suatu daerah. Dengan demikian penerapan dari *good urban governance* tidak hanya berupaya dalam membentuk infrastruktur perkotaan secara tepat tetapi juga upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengembangan kapasitas dari aktor-aktor lokal untuk terlibat secara aktif dalam tata kelola kota. Selain itu, UN-Habitat juga menjelaskan secara gamblang bahwa *good urban governance* berupaya untuk memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam tata kelola kota.

Berdasarkan pendapat dari UN-Habitat tersebut, maka tata kelola kota memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola kota yang baik harus dapat memberikan akses bagi setiap masyarakat termasuk perempuan dan anak untuk menggunakan fasilitas perkotaan bagi kebutuhan mereka. Beberapa fasilitas yang harus dipenuhi meliputi rasa aman, ketersediaan air bersih, sanitasi, lingkungan yang bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan, pemenuhan gizi, dan pekerjaan yang layak. Ketersediaan beberapa aspek tersebut akan memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Selain itu, *good urban governance* berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Good urban governance sebagai suatu konsep memiliki beberapa prinsip atau komponen yang perlu dipenuhi sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan tata kelola kota yang baik, seperti pengurangan kemiskinan, penyediaan fasilitas dan infrastruktur bagi masyarakat, serta peningkatan

kondisi atau taraf hidup masyarakat. Prinsip-prinsip *good urban governance* yang selayaknya diterapkanyaitu aspek keberlanjutan (*sustainability*), desentralisasi (*decentralization*), keadilan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keterlibatan masyarakat sipil (*civic engagement*), dan keamanan (*security*) (Hendrik, 2014:13).

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kegiatan wisata kepusatakaan atau penelusuran berbagai literatur seperti jurnal hasil penelitian khususnya yang relevan dengan studi penelitian yang dilakukan, diperoleh gambaran mengenai penelitian mutakhir (terdahulu) seperti diformulasikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Deskripsi Singkat Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode	Temuan/ Rekomendasi
1	Intania Irfani dan F. Winarni. (2017).	Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta	Deskriptif kualitatif	Peran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, BKM Tridaya Waru Mandiri serta masyarakat dalam program KOTAKU telah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya, khususnya dalam penyediaan jalan lingkungan, keteraturan bangunan, penyediaan sistem drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, serta penyediaan ruang terbuka publik sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Namun untuk penyediaan pengamanan kebakaran, belum dapat merealisasikannya sehingga belum efektif karena salah satu kriterianya belum dapat dipenuhi. Saran: bagi pemerintah Dinas terkait hendaknya lebih aktif dalam monitoring Program KOTAKU untuk melihat pengelolaan sarana dan prasarana. Sedangkan bagi masyarakat, harus bisa menggunakan dana dari pemerintah dengan bijak untuk pelaksanaan Program KOTAKU.
2	Sulista Yuniati dan Sugi Rahayu. (2018).	Peningkatan Kualitas Permukiman Melalui Program Kota	Deskriptif kualitatif	Penanganan pengurangan permukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo terutama yang masuk dalam SK Bupati belum berjalan efektif, tercermin dari empat indikator pengukuran peningkatan kualitas permukiman melalui evaluasi program dengan model CIPP (<i>Context,</i>

Lanjutan

		Tanpa Kumuh Di Kabupaten Wonosobo		<p><i>Input, Process, Product</i>). Dari keempat dimensi tersebut, penanganan permukiman kumuh sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran program dengan intervensi kegiatan yang telah dilakukan oleh para aktor. Capaian penanganan sampai Tahun 2017 hanya seluas 9,79 hektar. Hambatan pelaksanaan yaitu faktor anggaran, lahan dan pola pikir masyarakat. Implementasi program juga di dukung oleh swadaya masyarakat yang tinggi sebagai pelaksana dan kolaborasi antar aktor yang terlibat.</p> <p>Saran:1. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar aktor yang terlibat terkait dateline pengumpulan data setiap kelurahan agar perhitungan kumuh dapat dilakukan tanpa harus dikejar-kejar dalam pengumpulannya agar dapat menjadi evaluasi pengurangan kumuh di tahun berikutnya. 2. Perlu adanya acuan resmi dalam perhitungan kumuh dari pusat secara keseluruhan agar tidak ada kesalahan dalam perhitungan kumuh antar wilayah 3. Perlu adanya peran aktif para aktor dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain terutama untuk anggaran agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar.</p>
3	Hafidzita Eka Putri Irvan. (2018).	Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru	Deskriptif kualitatif	<p>Bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh terbagi menjadi empat tahap yaitu: 1.Tahap Pengambilan Keputusan (belum optimal), 2.Tahap Pelaksanaan Program (belum optimal), 3.Tahap Pengambilan Manfaat (optimal), dan 4. Tahap Evaluasi (masih dalam proses belajar).</p> <p>Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU yakni: a. rendahnya kesadaran masyarakat akibat masih adanya anggapan bahwa Program KOTAKU merupakan proyek dari pemerintah sehingga partisipasinya kurang; b. Lemahnya pemahaman mengenai maksud dan tujuan proyek pembangunan di wilayahnya; c. Kesibukan masyarakat yang tidak bisa meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi pada setiap kegiatan.</p>
4	Indah Ambar Arum dan Meirinawati (2018).	Manajemen Strategi Dalam Menangani Permasalahan Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kawasan Kenjeran Oleh Badan Perencanaan Pembangunan	Deskriptif kualitatif	<p>Bappeda berusaha keras memaksimalkan kekuatan yang dimiliki berupa struktur organisasi, kerjasama dengan beberapa SKPD, pemerintah pusat, SDM yang berkompeten dan memperbesar peluang yang ada yaitu program KOTAKU di Kawasan Kenjeran dapat dijadikan sebagai kampung wisata yang dapat dicontoh oleh kampung-kampung lain yang melaksanakan program KOTAKU. Selain itu juga bekerjasama dengan pihak CSR/perusahaan swasta dalam hal anggaran dan berpedoman pada Program KOTAKU. Kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu jumlah pegawai dan anggaran yang kurang. Saran, supaya menambah jumlah pegawai dan anggaran yang dikhususkan untuk Program KOTAKU. Selain itu Bappeda hendaknya lebih meningkatkan pelatihan UMKM serta kemampuan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya keterlibatan/partisipasi dan kesadaran</p>

Lanjutan

		Kota Surabaya.		mereka, serta perlu lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dalam penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang arti kebersihan dalam menjaga lingkungan demi kenyamanan dan tercapainya tujuan bersama.
5	Stevanni Imelda Christianin grum, Titik Djumiarti(2018)	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kecamatan Semarang Timur	Deskriptif kualitatif	Implementasi KOTAKU sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan terdapat capaian penurunan luas pemukiman kumuh 71,5%, yaitu dari 415,83 ha menjadi 118,5 ha. Faktor penghambat: kurangnya sosialisasi, kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan. Rekomendasi: pihak pemerintah perlu menambah sosialisasi terkait program dan melakukan koordinasi langsung kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya strategi dalam sosialisasi yang dilakukan secara <i>bottom up</i> agar semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif.
6	Merly Mutiara Saputri, Imam Hanafi, Mochamad Chazienul Ulum. (2016).	Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah (Studi di Bank Sampah Sumber Rejeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri)	Deskriptif kualitatif	Program Bank Sampah sudah membantu pemerintah dalam mengurangi volume sampah dan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat dan lingkungan. Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah menunjukkan hasil yang cukup baik. Peran DKP Kota Kediri sebagai penyedia sarana dan prasarana selalu melakukan pemantauan pada tiap kelompok Bank Sampah dan partisipasi masyarakat yang ikut menjadi nasabah Bank Sampah Sumber Rejeki. Jumlah Bank Sampah dari tahun ke tahun terus meningkat. Disarankan agar pemerintah (DKP) terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar program bank sampah dapat terus membantu dalam mengurangi volume sampah yang ada.
7	Riko Avesiena Lazuardi Ahmad, Aufarul Marom, Titik Djumiarti(2013).	Evaluasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Alih Fungsi Lahan Hijau Menjadi Kawasan Industri Candi Kota Semarang.	Deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> Faktor yang mempengaruhi dampak sosial dan ekonomi dari alih fungsi lahan hijau menjadi Kawasan Industri Candi adalah: kesempatan kerja/berusaha, peningkatan pendapatan, persepsi masyarakat, keresahan masyarakat, estetika lingkungan, kenyamanan dan kesehatan. Kesesuaian dampak sosial dan ekonomi yang terjadi dengan yang diinginkan Dari tujuh faktor, hanya faktor kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan yang sesuai dengan keinginan Dampak sosial dan ekonomi alih fungsi lahan hijau menjadi Kawasan Industri Candi (1) Efektifitas tercapai; (2). Efisiensi usaha yang dilakukan sangat mempengaruhi tingkat efisiensi suatu program; (3) Kecukupan dalam memecahkan masalah tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Namun, dari aspek sosial pemecahan masalah yang ada belum cukup yaitu persepsi masyarakat, keresahan

Lanjutan

				<p>masyarakat, estetika lingkungan, kenyamanan dan kesehatan; (4) Pemerataan: manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan belum merata antara masyarakat satu dengan lainnya; (5) Responsivitas belum memadai; (6) Ketepatan</p> <p>Rekomendasi: 1. Membuat MOU terkait jumlah perekrutan tenaga kerja lokal 2. Segera merealisasikan pembangunan embung dan sumur resapan di setiap unit industri/gudang.</p>
8	Imas Widiyanti (2018).	Implementasi Program Kotaku Dalam Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh Di Kricak Yogyakarta.	Deskriptif kualitatif	<p>Implementasi Program Kotaku sudah berjalan sesuai dengan SE PU Nomor 40/SE/DC/2016. Tahap implementasi meliputi sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu perubahan fisik lingkungan menjadi tidak kumuh, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan adanya ruang terbuka publik, serta peningkatan ekonomi masyarakat setempat dengan pemanfaatan ruang terbuka publik.</p> <p>Saran: (1) Pelibatan perempuan dalam perencanaan kegiatan; (2) Program Kotaku diharapkan memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk fisik namun pemberdayaan (<i>skill</i>): (3) Menumbuhkan kekompakan pada lingkungan masyarakat; (4) Perlu peningkatan kreatifitas anak dalam menggunakan ruangterbuka publik.</p>
9	Enike Mentari Uli S. (2018).	Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalarjo, Yogyakarta	Deskriptif kualitatif	<p>Penilaian masyarakat tentang hasil implementasi program KOTAKU sudah efektif, hanya satu variabel yang menunjukkan penilaian yang cukup efektif yaitu penyediaan sarana proteksi kebakaran dikarenakan keterbatasan jumlah sarana. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dari masyarakat adalah ketersediaan dan keikhlasan masyarakat dalam mendukung program, sedangkan dari pelaksana program adalah keikhlasan dan kolaborasi yang baik dari pemerintah tripilar Karangwaru sebelum maupun dalam melaksanakan program. Masyarakat menilai program ini layak dilanjutkan pelaksanaannya hingga selesai. Untuk keberlanjutan program apabila telah selesai dilaksanakan dan dana dihentikan menunjukkan bahwa masyarakat tidak keberatan dalam mengeluarkan dana dalam hal perbaikan maupun penyediaan sarana prasarana walaupun kontribusinya masih sedikit.</p>
10	Ratu Aliyati (2017).	Permukiman Kumuh Di Bantaran Ci-Liwung (Studi Kasus Kel. Manggarai-Srengeng Sawah Dan Kel. Kampung Melayu-Kalisari)	Analisa spasial dan kualitatif	<p>Permukiman kumuh Region Barat Bantaran Ci-Liwung meliputi Kelurahan Manggarai - Kelurahan Srengeng Sawah terdapat dua karakteristik yaitu kumuh sedang dan kumuh ringan. Permukiman kumuh Region Timur Bantaran Ci-Liwung meliputi Kelurahan Kampung Melayu – Kelurahan Kalisari terdapat tiga karakteristik yaitu kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan. Daerah penelitian tidak sesuai dengan konsepsi penataan ruang serta masyarakat daerah penelitian tidak paham dan tidak siap tentang implementasi konsep penataan ruang khususnya pada daerah penelitian.</p>
11	Zulyanti,	Implementasi	Kualitatif	Implementasi program KOTAKU melalui 4

Lanjutan

	Dewi(2017)	Program Kotaku Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung		tahap utama yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun tidak seluruh masyarakat ikut terlibat didalamnya, masih dominan peran pemerintah dalam segala bentuk pelaksanaan yang membuat tidak maksimalnya realisasi pembangunan berbasis masyarakat. Saran:Perlunya peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat dan masyarakat dalam setiap proses pembangunan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemerintah perlu senantiasa memperhatikan hasil musyawarah masyarakat, keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah perlu meninggalkan pendekatan <i>top-down</i> dan beralih kepada pendekatan <i>bottom-up</i> yang lebih aspiratif dan memihak kepada masyarakat.
12	Sahria Apriliana (2018)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan)	Deskriptif kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Kotaku dalam program pembangunan drainase dan sanitasi sudah baik dalam pemanfaatan hasil pembangunan, hanya saja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan belum maksimal.Hal ini tercermin pada perencanaan dan pelaksanaannya hanya beberapa saja warga yang terlibat, belum semua warga ikut dalam kegiatan karena kesibukan akanpekerjaan/profesinya, dan tahapan evaluasi belum adapeningkatan manfaat secara signifikan. Faktor penghambat: kurangnya kesadaran/kemauan masyarakat itu sendiri, kesibukan pekerjaan, kurangnya kepercayaan masyarakat tentangpenyelenggaraan program Kotaku, seperti penyelewengan dana, kebiasaan masyarakat mengharapkan imbalan, kurang pahamiannya masyarakat akan pembangunan yang baik dan kurang tanggapnya terhadap masalah yang terjadi pada lingkungan sendiri, dan fasilitas kurang memadai.
13	Sri Yuliani, Gusty Putri Dhini Rosyida (2017)	Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta.	Deskriptif kualitatif	Kolaborasi belum diimplementasikan dalam perencanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi karena hanya beberapa stakeholder yang terlibat dalam setiap tahap. Sejauh ini ada pula rintangan kerjasama dalam bentuk sumber daya manusia dan kendala komunikasi antara masing-masing stakeholder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi belum efektif dan memerlukan pemerataan persepsi tentang bentuk sebenarnya dan konsep kolaborasi.
14	Muhajir Syam (2017)	Identifikasi kawasan kumuh dan strategi penanganannya pada permukiman di Kelurahan Rangas Kecamatan	Deskriptif kualitatif Analisa SWOT	Faktor-faktor atau permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Rangas adalah permasalahan sarana dan prasarana lingkungan seperti hunian dengan kondisi rumah tidak sehat baik pencahayaan, udara dan toilet serta bersifat temporer, dimana tidak diperbaiki dengan baik, hal ini sangat rentan terhadap kebakaran serta kurangnya ketersediaan prasaranalingkungan. Hasil analisis pembobotan menggunakan Draft Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dari

Lanjutan

		Banggae Kabupaten Majene		<p>Kemen PU menunjukkan tingkat kekumuhan termasuk kategori kumuh sedang. Berdasarkan analisis SWOT, strategi penanganan permukiman kumuh yang diperlukan adalah peremajaan serta program penataan fisik dan non fisik.</p> <p>Saran: 1. Masyarakat diharapkan secara swadaya dapat terlibat langsung dalam perawatan dan perbaikan kecil terhadap saluran drainase. Selain itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan pemeliharaan sejumlah drainase yang masih berfungsi dengan baik sekaligus melakukan perbaikan untuk drainase yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, seeta penggantian saluran drainase yang rusak berat. 2. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan akses yang sesuai dengan standar yang ditentukan untuk pencegahan dan penanganan bencana kebakaran di Lingkungan Rangas Pabesoang. Akses tersebut berupa jalan pengerasan dan lebar jalan yang sesuai untuk mobil pemadam kebakaran.</p>
15	Bani perdatawati Hasanuddin (2014).	Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar	Deskriptif	<p>Implementasi revitalisasi permukiman kumuh di Kota Makassar telah sesuai dengan zonasi yang ada dalam Perda RTRW Kota Makassar. NUSSP sebagai salah satu program penataan permukiman kumuh di Kawasan Kumuh Lette telah berjalan 100% Tahun 2006-2008 untuk tahap pertama, meski demikian keberlanjutan pemeliharaan oleh masyarakat tidak berjalan baik sehingga keadaan lingkungan masih tidak terlihat sehat. Untuk tahap kedua, di Kawasan Kumuh Tallo yang dicanangkan berjalan di tahun 2012-2017 baru mencapai 30% selama pelaksanaan 2012-2014 dikarenakan pelaksanaan pogram NUSSP yang tidak sesuai dengan perencanaan awal Dinas PU Kota Makassar. Faktor kendala tidak berjalan sesuai perencanaan adalah kurangnya lahan untuk relokasi; kurangnya koordinasi antara instansi pelaksana program penataan permukiman kumuh; instansi pelaksana rencana tata ruang wilayah kota yang melenceng; penataan permukiman kumuh tidak sesuai perencanaan; dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidupnya.</p> <p>Saran: Perlunya mengoptimalkan koordinasi antar instansi pelaksana penataan permukiman kumuh agar lebih efektif dalam melaksanakan perencanaan program kegiatan permukiman kumuh. 2. Perlunya pemerintah konsisten dalam pelaksanaan program kegiatan penataan permukiman kumuh sesuai perencanaannya, serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dari segi pemeliharaan lingkungan hidupnya melainkan juga pada kualitas perekonomian terutama warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.</p>
Sumber : Jurnal hasil penelitian dan tesis Tahun 2014 – 2018				

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai sejumlah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis. Namun demikian, penelitian yang menyangkut evaluasi penanganan permukiman kumuh dengan program KOTAKU secara tertintegratif, komprehensif dan holistik belum ditemukan. Oleh karena itu, kemutakhiran penelitian ini dapat menjadi produk studi penelitian yang lebih tertintegratif, komprehensif dan holistik.

C. Kerangka Konseptual

Penanganan permukiman kumuh di perkotaan sebagai salah satu isu utama secara global, regional, nasional serta lokal sesungguhnya berangkat dari konsep dasar dan kebijakan global dalam perencanaan wilayah dan kota yang disebut *Good Urban Governance (GUG)*. Inti dari nilai-nilai *good urban governance* berasal dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance*, antara lain: responsitas, efektifitas, adanya penegakan aturan yang adil, akuntabel dan demokratis. Tata kelola perkotaan yang baik (*good urban governance*) haruslah memperhatikan hal-hal tersebut dalam pelaksanaannya (Hendriks, 2014:13). *Good urban governance* merupakan upaya merespon berbagai permasalahan pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersama-sama dengan unsur masyarakat (UN-Habitat, 2000:20).

Good urban governance merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di perkotaan dan berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dan stakeholder lain untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang baik di

suatu daerah. *Good urban governance* tidak hanya berupaya membentuk infrastruktur perkotaan secara tepat tetapi juga upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengembangan kapasitas dari aktor-aktor lokal untuk terlibat secara aktif dalam tata kelola kota (UN-Habitat, 2000:20).

Good urban governance sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan tata kelola kota yang baik, seperti pengurangan kemiskinan, penyediaan fasilitas dan infrastruktur bagi masyarakat, serta peningkatan kondisi atau taraf hidup masyarakat. Prinsip-prinsip *good urban governance* yang selayaknya diterapkan yaitu aspek keberlanjutan (*sustainability*), desentralisasi (*decentralization*), keadilan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keterlibatan masyarakat sipil (*civic engagement*), dan keamanan (*security*) (Hendriks, 2014:13).

Di Indonesia, perwujudan tujuan dan *Good Urban Governance* dalam pembangunan perumahan dan permukiman tersebut telah dikonstitusionalisasikan dalam amanat konstitusi Negara UUD 1945 khususnya Pasal 28H Ayat 1 yang mengatur bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Demikian pula Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai hak hidup layak bagi setiap warga Negara. Selain itu juga telah diinstitutionalisasi dalam sejumlah kebijakan hukum Undang-Undang (UU) seperti UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1961 (Pasal 2, 14, 15), UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman. Demikian sejumlah peraturan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Selaku Ketua Badan Kebijakan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional (BKP4N) Nomor: 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Perumahan Dan Permukiman (KSNPP), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah, Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan.

Pembangunan perumahan dan permukiman nasional di Indonesia masih menghadapi salah satu persoalan klasik yakni “Permukiman Kumuh (*Slum's Settlement*). Permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas, atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, sehingga tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya (Carrasco & Ochiai, 2016:35). Ciri-ciri permukiman atau daerah perkampungan kumuh dan miskin dipandang dari segi sosial ekonomi antara lain: Pertama, sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, sistem sosial yang rentan, serta berusaha atau bekerja

di sektor informal; Kedua, Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya dibawah standar minimal sebagai tempat bermukim (Ditjen Bangda Depdagri dalam Ridwan dkk, 2008; Purnomo, 2012).

Permukiman kumuh sebagai salah satu masalah nasional dan lokal, mendorong Pemerintah/ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya menetapkan Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) sejak Tahun 2015 sebagai program penanganan permukiman kumuh berlandaskan kebijakan hukum yang ada khususnya UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya (SE DJCK) No.40/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh dan SE DJCK Nomor: 88/SE/DC/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ditujukan untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai antara lain:(1) Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 ha; (2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik; (3) Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; (5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. (SE DJCK No.: 40/SE/DC/2016, SE DJCK No.: 88/SE/DC/2016).

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*”:

- (1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (antara lain: drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
- (2) Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
- (3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU;
- (4) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan

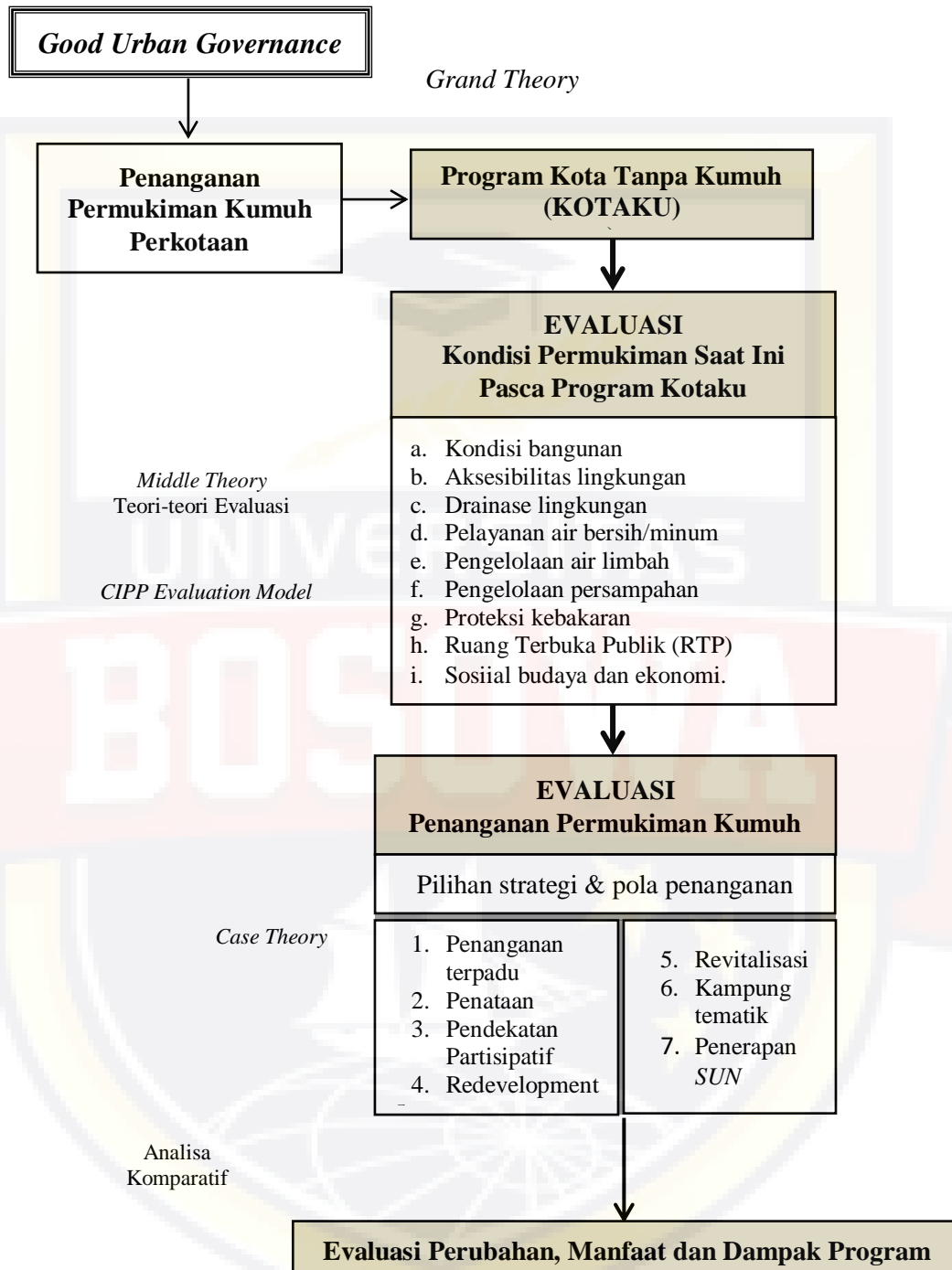
kumuh; (5) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh (SE DJCK No.: 40/SE/DC/2016, SE DJCK No.: 88/SE/DC/2016).

Evaluasi program merupakan penerapan model, teknik dan pengetahuan tentang evaluasi, untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan efektivitas program secara sistematis” (Langbein dan Felbinger (2006) dalam Tayibnapis, 2008:3; Widoyoko, 2010). Evaluasi program adalah suatu kegiatan yang membutuhkan metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program dengan tujuan untuk membuat keputusan (Rutman (1984) dalam Tayibnapis, 2008:10). Program harus diakhiri dengan evaluasi, dengan maksud untuk menilai keberhasilan program menjalankan fungsinya sebagaimana ditetapkan sebelumnya (Issac dan Michael (1984) dalam Tayibnapis, 2000:6). Ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: 1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, 2) mencari data yang relevan dengan penelitian, dan 3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut (Tayibnapis, 2000:6).

Ada tiga model evaluasi program yang dikenal secara luas dalam prakteknya, yaitu: (1) *Provus Evaluation Model* atau model evaluasi kesenjangan program (Arikunto, dan Abdul Jabar, 2009:5; Widoyoko, 2010:14); (2) *CSE-UCLA Evaluation Model* (Fernandes, 1984 dalam Tayibnapis, 2000:8); (3) *CIPP (Context, Input, Process, Product) Evaluation Model* (Kirkpatrick, 1998, 2009; Tayibnapis, 2000). Model evaluasi *CIPP* terdiri dari beberapa aspek atau dimensi

yakni: *Context evaluation*, *Input evaluation*, *Processevaluation*, dan *Product evaluation* (Partner C. 2009). Model evaluasi *CIPP* lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. (Widoyoko, 2010:17).

Ada 2 kategori implementasi kebijakan atau program, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). (Hogwood & Gunn. 1986; Solichin, 1997:61). Evaluasi terhadap efektifitas program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh, diperhadapkan pada pilihan-pilihan strategi penanganan permukiman kumuh yang tepat berdasarkan persebaran kawasan kumuh ataupun berdasarkan kebutuhan *problem solution* atau pemecahan masalah dengan pendekatan *collaborative governance* (Dawes & Prefontaine, 2003; Ansell & Gash, 2007). Pilihan-pilihan strategi penangan tersebut adalah: (1) penanganan terpadu yakni perbaikan dan pemugaran, peremajaan, relokasi (Emerson, 2011); (2) Penataan (Supriyatno, 2014); (3) Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat (Conyers, 1991; Daljoeni, 1997; Isbandi, 2008; Hardian, 2016); (4) *Redevelopment* (Priatmodjo, 2003); (5) Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya) (Nuissl & Heinrichs, 2013; Wirotomo, 1997); (6) Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN) (Sandy, 1984; Tarigan R, 2005; Bratakusumah dkk, 2009; Sadyohutomo, 2009); (7) Penerapan konsep Kampung Tematik (Majewski dan Zmyslony dalam Tamara dkk, 2018). Untuk jelasnya lihat skema berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Desain Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan desain penelitian adalah eksploratif, komparatif dan evaluatif. Deskriptif kualitatif bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Studi eksploratif ditujukan untuk mengkaji lebih mendalam fenomena permasalahan mengenai penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Banggae Kabupaten Majene. Studi komparatif–evaluatif menganalisa perbandingan-perbandingan atas perubahan-perubahan yang terjadi (baik fisik lingkungan permukiman maupun sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat) sebelum dan sesudah program dilaksanakan, manfaat dan dampak dari penanganan permukiman kumuh dengan Program Kotaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah lingkungan atau kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae khususnya pada empat lingkungan yakni Lingkungan Battayang, Lingkungan Copala, Lingkungan Pakkola, dan Lingkungan Saleppa. Pemilihan lokasi penelitian tersebut terutama didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Banggae merupakan ibukota Kabupaten Majene.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah sejumlah indikator permukiman kumuh yang ditangani oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae, yaitu: kondisi

bangunanhunian, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum/bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, legalitas bangunan dan lahan, ruang terbuka publik (RTP), sosial ekonomi, dan sosial budaya. Deskripsi fokusnyatertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Kondisi bangunan	1) Keteraturan bangunan (jarak antar bangunan hunian) 2) Kepadatan (unit/ha) 3) Kelayakan luas lantai bangunan (standar ≥ 7 m ² /orang)
2	Aksesibilitas lingkungan	1) Panjang jalan lingkungan 2) Lebar jalan lingkungan (≥ 3 m) 3) Ketersediaan bangunan pelengkap saluran samping jalan (drainase jalan) 4) Kondisi (kualitas) jalan (pengerasan).
3	Drainase lingkungan	1) Panjang drainase (m) 2) Kondisi genangan air pada saluran drainase 3) Kualitas drainase
4	Pelayanan air bersih/minum	1) Sumber air minum (PDAM, sumur bor, sumur gali) 2) Akses pelayanan air minum 3) Ketercukupan kebutuhan air minum sesuai standar minimal 60 l/hr/jiwa
5	Pengelolaan air limbah	1) Ketersediaan jamban individu dan komunal 2) Akses komunal pelayanan jamban keluarga/bersama 3) Kondisi IPAL-SPAL dan genangan air 4) Kelayakan teknis
6	Pengelolaan persampahan	1) Ketersediaan sarana pengelolaan sampah 2) Akses pelayanan angkutan sampah domestik
7	Proteksi kebakaran	1) Ketersediaan sarana pemadaman kebakaran 2) Akses pelayanan perlindungan kebakaran.
8	Legalitas bangunan dan lahan	1) Kepemilikan IMB 2) Kepemilikan SHM/HGB
9	Ruang terbuka publik	Ketersediaan taman kota, RTH, fasilitas umum dan sosial
10	Sosial budaya	Pendidikan, kesehatan
11	Sosial ekonomi	Pola pencaharian, akses sumber modal, akses sumber daya listrik

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan berupa: peneliti sendiri, peta Kelurahan Banggae, pedoman observasi atau survei, pedoman wawancara, alat

komunikasi (handphone seluler), alat pemotretan (kamera DSLR), alat perekam (recorder), alat pengukur (mistar, meteran), alat penghitung (kalkulator), alat tulis menulis (kertas, pensil, pulpen, penghapus), laptop.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yakni data kuantitatif dan data kualitatif.

a. Data Kuantitatif

Yaitu data numerik berupa angka-angka statistik, grafik, histogram, tabel, peta. Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini antara lain: peta dan statistik wilayah dan permukiman, dan aneka statistik (penduduk, sosial budaya dan ekonomi, bangunan hunian, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pelayanan air bersih/minum, persampahan, proteksi kebakaran, legalitas lahan dan bangunan, ruang terbuka publik, kegiatan program, kelompok penerima manfaat, anggaran, rencana investasi dan kolaborasi dan RPLP).

b. Data Kualitatif

Yaitu data non-numerik berupa narasi statemen atau pernyataan, pendapat-pendapat, persepsi, ungkapan-ungkapan verbal dan tertulis.

Adapun data kualitatif dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Hasil wawancara dengan kelompok penerima manfaat
- 2) Hasil wawancara dengan unsur pelaksana program tingkat kelurahan (relawan, KSM, TIPP, BKM/LKM, Lurah, Kepala Lingkungan)

- 3) Hasil wawancara dengan unsur pelaksana program tingkat kabupaten (Bupati, Bappeda)
- 4) Hasil wawancara dengan informan ahli (pakar/akademisi, praktisi, pemerhati/pengamat) dari bidang keilmuan/keahlian manajemen, tata ruang wilayah dan kota, lingkungan perkotaan, sosiologi perkotaan, MSDM dan ekonomi perkotaan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atas kondisi riil yang terjadi. Data primer dalam penelitian ini antara lain: (1) Hasil survei (observasi) langsung di lapangan mengenai kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae; (2) Hasil wawancara dengan informan dari unsur pengelola/pelaksana program Kotaku dan informan ahli.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang ada: Pemerintah Daerah/ instansi terkait, pengelola program Kotaku, media *online* (internet), jurnal-jurnal hasil penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain: (1) Data mengenai gambaran umum Kelurahan Banggae; (2) Data baseline 100-0-100 program Kotaku; (3) Data Rencana Investasi dan Kolaborasi (RIK) Tahun 2016-2021 Kelurahan Banggae; (4) Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Banggae Tahun 2016-2021; (5) Dokumen RPJMD Kabupaten Majene; (5) Dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW); (6) SK Bupati tentang penetapan kawasan kumuh.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. *Library Study* (Studi Kepustakaan)

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: a. Studi atau penelaahan literatur: buku-buku, jurnal-jurnal hasil penelitian yang relevan; b. Studi dokumen(dokumentasi) berupa: dokumen peraturan perundang-undangan, surat-surat keputusan, dokumen pedoman penyelenggaraan program Kotaku, dokumen statistik permukiman kumuh, dokumen statistik wilayah dan penduduk, dan sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan data dan informasi dalam penelitian ini.

2. *Field Study* (Studi Lapangan)

Pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: a. Observasi atau survei, yaitu melalui pengamatan dan pengukuran-pengukuran langsung di lapangan atas obyek yang diteliti untuk mengetahui kondisi riil yang terjadi di lokasi penelitian; b. Interview, yaitu melalui wawancara langsung, berstruktur dan mendalam dengan informan atau narasumber. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Miles dan Huberman, 1984; Cresswel,1998). Koleksi data dilakukan melalui pendekatan *discourses analyses*. Proses analisa data dilakukan melalui

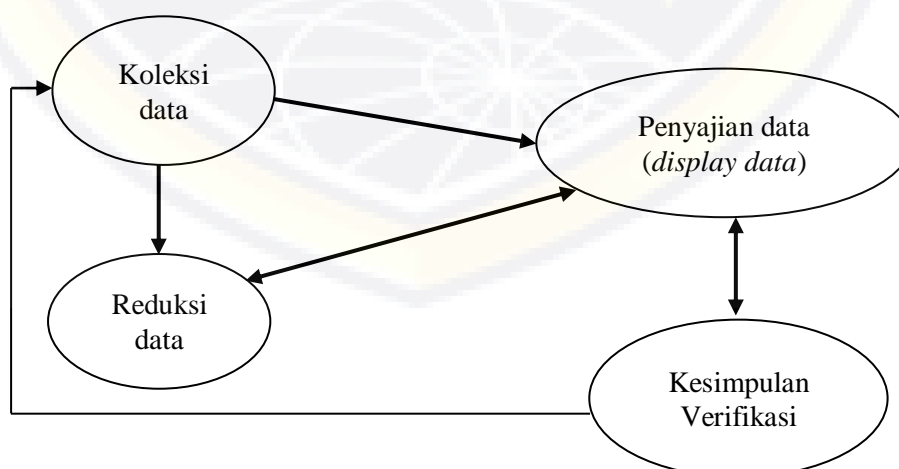
tahapan, yakni identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengolah dan menginterpretasikan data kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data (Moleong, 1999:51-52). Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam teknik analisa data pada penelitian ini disesuaikan dengan pokok permasalahan dan/atau tujuan penelitian, seperti berikut.

Tabel 3.2
Teknik Analisa Data

No.	Pokok permasalahan/ tujuan penelitian	Teknik analisa data
1	Evaluasi kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae	Deskriptif kualitatif, berdasarkan hasil survey
2	Evaluasi penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Analisa kualitatif terhadap pilihan-pilihan pola dan strategi penanganan permukiman kumuh
3	Mengevaluasi perubahan, manfaat dan dampak yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU	Analisa kualitatif, dengan studi komparatif atau membandingkan kondisi (fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi) sebelum dan pasca pelaksanaan program Kotaku.

H. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Tahapan pengabsahan data dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) digambarkan berikut.



Sumber : Miles dan Huberman (1984, 2012)

Gambar 3.1 Skema Analisis Data

Skema tersebut menunjukkan bahwa ada tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dalam mereduksi data. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justeru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan

reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), Tabel, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, histogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Beda halnya dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya.

Menurut Miles dan Huberman (2012) bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya

disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan *chart*.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (2012) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Alasannya bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

Pengolahan data dilakukan dengan cara klasifikasi, sistemasi dan penggolongan terhadap teori-teori yang terdapat dalam literatur dan hasil penelitian dan dokumen-dokumen resmi yang ada, kemudian dianalisis. Dalam penarikan kesimpulan, digunakan metode deduktif (dari hal khusus ke hal umum) - induktif (dari hal umum ke khusus)(Bodgan & Taylor. 1993:76). Yang pertama didasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi-proposisi sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) hipotesis yang bersifat umum. Yang kedua dilakukan dari hal-hal umum kepada hal-hal khusus.

I. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan variabel-variabel penelitian yang diteliti, dapat diuraikan operasionalisasi konsep sebagai berikut

1. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan program Kotaku

Yaitu kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Banggae setelah program Kotaku melakukan intervensi penanganan berdasarkan indikator-indikator keciptakaryaan yang menjadi fokus penelitian, yang meliputi: kondisi bangunan hunian, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum/bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, legalitas bangunan dan lahan, ruang terbuka publik (RTP), sosial ekonomi, dan sosial budaya.

a. Kondisi bangunan hunian

Yaitu kondisi rumah-rumah tinggal penduduk di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk mewujudkan keteraturan bangunan hunian, mengurangi kepadatan

bangunan, serta pemenuhan syarat kelayakan teknis sebagai rumah tinggal layak huni (RTLH).

1) Keteraturan bangunan hunian

Yaitu penataan atau pengaturan kembali posisi rumah penduduk sesuai dengan syarat keteraturan bangunan hunian dan pola persebaran. Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Jumlah unit bangunan hunian menghadap ke jalan
- (b) Jumlah unit bangunan hunian tidak berada diatas garis sempadan jalan dan sungai.

2) Kepadatan bangunan hunian

Yaitu penataan jarak antar rumah-rumah penduduk agar tidak terlalu rapat dan sesuai dengan standar perbandingan luas lahan terbangun (bangunan) dan luas ruang terbuka. Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Jarak antara bangunan hunian ≥ 3 m
- (b) Luas bangunan 40% : luas ruang terbuka 60%.

3) Kelayakan bangunan hunian

Yaitu perbaikan (rehab) rumah-rumah penduduk agar luas lantai dan kondisi Aladin (atap, lantai dan dinding) memenuhi syarat teknis rumah layak huni. Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Luas lantai bangunan hunian ≥ 7 m²/ orang
- (b) Bahan Aladin tidak mudah terbakar, tidak bocor, tidak rusak.

b. Kondisi Aksesibilitas Lingkungan

Yaitu kondisi kualitas jalan lingkungan di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk meningkatkan aksesibilitas lingkungan. Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Panjang jalan (meter) lingkungan yang tersedia mencakup seluruh wilayah kelurahan dan lingkungan permukiman penduduk.
- (b) Lebar jalan ≥ 3 m dan memudahkan akses mobil pemadam kebakaran

- (c) Jalan lingkungan yang tersedia telah mengalami pengerasan (aspal, beton)
- (d) Jalan lingkungan yang tersedia telah dilengkapi bangunan pelengkap terutama berupa saluran (drainase) samping
- (e) Jalan lingkungan yang tersedia berkualitas baik, tidak tergenang air, tidak berlubang, tidak rusak.

c. Kondisi Drainase Lingkungan

Yaitu kondisi kualitas drainase lingkungan di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk mengatasi genangan air dan banjir lingkungan permukiman. Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Panjang saluran drainase lingkungan yang tersedia mencakup seluruh wilayah kelurahan dan lingkungan permukiman penduduk.
- (b) Bangunan saluran drainase yang ada memiliki elevasi lebih rendah dari badan jalan
- (c) Saluran drainase yang ada mampu menampung dan mengalirkan air dengan lancar
- (d) Saluran drainase yang ada berkualitas baik, terpelihara dengan baik, tidak tergenang air, tidak bau, tidak kotor, tidak rusak
- (e) Saluran drainase yang ada berkualitas terhubung dengan sistem drainase kota
- (f) Saluran drainase yang ada terhubung dengan sistem drainase keseluruhan baik drainase kelurahan maupun lingkungan serta permukiman
- (g) Saluran drainase yang ada memenuhi kebutuhan yang ideal sesuai luas kelurahan, lingkungan dan kawasan permukiman.

d. Kondisi Penyediaan Air Bersih/ Minum

Yaitu kondisi pengelolaan dan pelayanan air bersih/ baku atau air minum di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk mengatasi masalah kebutuhan dan akses pelayanan air minum bagi sejumlah penduduk atau rumah tangga (RT). Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Tersedia saluran perpipaan dan non perpipaan terlindungi yang layak untuk kebutuhan air minum, mandi dan cuci
- (b) Tersedia akses untuk memperoleh air minum dari PDAM, sumur bor, sumur gali
- (c) Terpenuhinya kebutuhan minimal 60 liter/ orang/ hari untuk air minum, mandi dan cuci.

e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Yaitu kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga (RT) di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk mengatasi masalah kebutuhan dan akses komunal pelayanan jamban keluarga/ bersama bagi sejumlah penduduk atau rumah tangga (RT). Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Tersedia akses individu dan komunal bagi rumah tangga terhadap jamban keluarga/ bersama (5 KK/ jamban)
- (b) Tersedia jamban keluarga/ bersama memenuhi persyaratan teknis
- (c) Jumlah KK menggunakan kloset leher angsa tersambung ke septik tank meningkat
- (d) Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan.
- (e) Saluran pembuangan air limbah tidak menggenangi area permukiman.

f. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Yaitu kondisi pengelolaan persampahan di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk mengatasi masalah kebersihan lingkungan dan permukiman. Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Seluruh keluarga (KK) atau rumah tangga (RT) memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah (bak sampah) yang kondisinya baik, tidak rusak, terpelihara
- (b) Tersedia akses pelayanan pengangkutan sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman ke TPS/TPA minimum 2x seminggu.
- (c) Tersedia sarana pengangkutan sampah (gerobak sampah, tong sampah, truck sampah) setiap lingkungan.

g. Kondisi Proteksi Kebakaran

Yaitu kondisi perlindungan keamanan kebakaran di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk mengatasi masalah potensi ancaman bahaya kebakaran bagi rumah-rumah penduduk. Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Tersedia sarana prasarana perlindungan kebakaran pada setiap unit bangunan hunian

- (b) Tersedia akses jalan bagi pelayanan perlindungan kebakaran bagi setiap rumah tangga
- (c) Tersedia alat pemadam kebakaran (APAR) di setiap lingkungan.

h. Kondisi legalitas bangunan dan lahan

Yaitu kondisi penggunaan tanah/lahan dan bangunan yang memenuhi persyaratan kepemilikan surat-surat izin (IMB, SHM/ HGB) di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk mengatasi masalah legalitas bangunan dan lahan.

Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Kepemilikan surat izin mendirikan bangunan (IMB)
- (b) Kepemilikan surat izin penggunaan tanah/lahan (SHM/ HGB) yang diakui pemerintah.

i. Kondisi ruang terbuka publik (RTP)

Yaitu kondisi ruang terbuka publik sesuai standar di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk mengatasi masalah kebutuhan ruang terbuka hijau, taman bermain, fasilitas ruang terbuka bagi penduduk. Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Tersedia ruang terbuka hijau (RTH) dan taman bermain sesuai standar 250 m²per 10.000 jiwa penduduk
- (b) Tersedia fasilitas dan akses ruang terbuka publik untuk tempat berinteraksi, bersosialisasi, rekreasi, kegiatan olah raga bagi penduduk
- (c) Tersedia lapangan olah raga di setiap lingkungan.

j. Kondisi sosial budaya

Yaitu kondisi pelayanan sosial budaya bagi penduduk atau rumah tangga di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk mengatasi masalah kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Tersedia sarana prasarana pelayanan kesehatan bagi penduduk atau rumah tangga
- (b) Tersedia sarana prasarana pelayanan pendidikan bagi penduduk atau rumah tangga

- (c) Tersedia akses pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi setiap penduduk atau rumah tangga yang membutuhkan

k. Kondisi sosial ekonomi

Yaitu kondisi pelayanan sosial ekonomi di Kelurahan Banggae yang telah mendapat intervensi penanganan dari program Kotaku untuk mengatasi masalah kebutuhan pekerjaan/ mata pencaharian, penghasilan ekonomi dan energi listrik bagi penduduk atau rumah tangga. Indikator ukuran yang digunakan adalah:

- (a) Penduduk atau rumah tangga/ keluarga memiliki sumber mata pencaharian atau pekerjaan yang jelas
- (b) Tingkat penghasilan penduduk atau rumah tangga dalam kategori non-MBR
- (c) Tersedia akses dan kemampuan penggunaan sumber daya energi listrik ≥ 950 watt.

Berdasarkan seluruh uraian determinan dan indikator tersebut maka ditentukan kategori penilaian tingkat kekumuhan permukiman seperti berikut.

Tabel 3.3
Kategori Penilaian Tingkat Kekumuhan Pemukiman Pasca Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Banggae

Determinan Permukiman Kumuh	Kriteria penilaian		Kategori Kumuh
	%	Bobot	
1. Kondisi bangunan hunian 2. Aksesibilitas lingkungan 3. Drainase lingkungan 4. Pelayanan air minum/ bersih	Tinggi 76%-100%	5x11=55	Kumuh ringan
5. Pengelolaan air limbah 6. Pengelolaan persampahan 7. Proteksi kebakaran 8. Legalitas bangunan/lahan	Sedang 51%-75%	3x11=33	Kumuh sedang
9. Ruang terbuka publik (RTP) 10. Sosial budaya 11. Sosial ekonomi.	Rendah $\leq 50\%$	1x11=11	Kumuh berat

2. Penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan Program Kotaku

Yaitu pertimbangan-pertimbangan dan pilihan tindakan terhadap pola dan strategi penanganan permukiman kumuh yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae dalam melakukan intervensi program untuk menyelesaikan atau menuntaskan perencanaan dan pelaksanaan indikator-indikator fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Indikator yang digunakan adalah:

- a. Pola penanganan terpadu
- b. Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat (*Community-based development/ CBD*)
- c. *Redevelopment*
- d. Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya)
- e. Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood (SUN)*
- f. Penerapan konsep Kampung Tematik.

3. Perubahan, manfaat dan dampak yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan Program Kotaku

Yaitu perbandingan-perbandingan kondisi fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi berdasarkan indikator-indikatornya masing-masing sebelum dan sesudah program Kotaku melakukan intervensi atau dilaksanakan di Kelurahan Banggae. Indikator yang digunakan adalah:

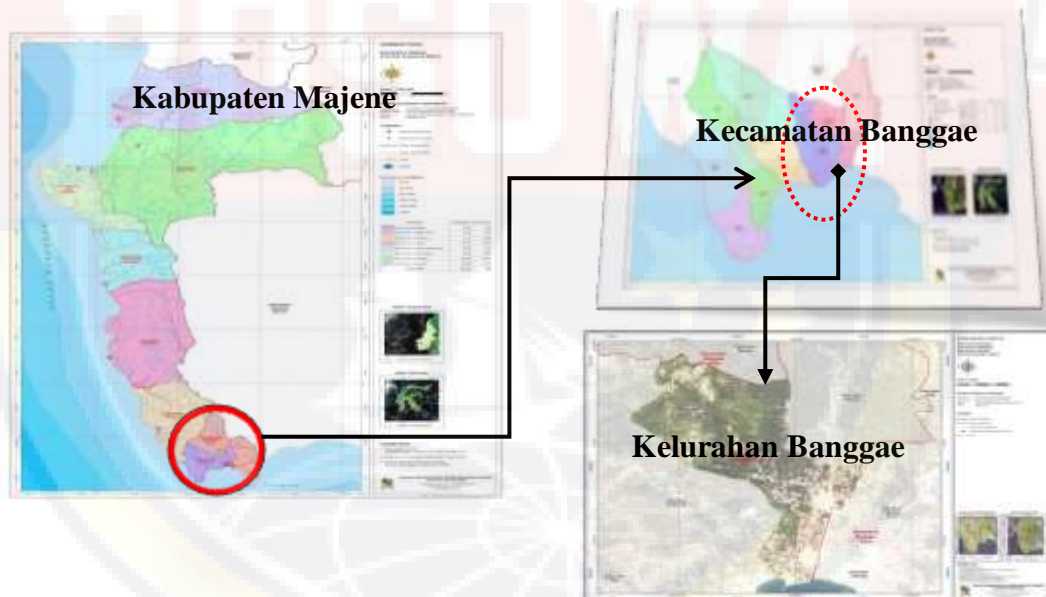
- a. Perubahan-perubahan yang terjadi pasca pelaksanaan program Kotaku dari penanganan indikator-indikator pemukiman kumuh (fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi)
- b. Manfaat yang ditimbulkan dari penanganan indikator-indikator pemukiman kumuh (fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi) melalui pelaksanaan program Kotaku
- c. Dampak positif dan negatif yang timbul pasca pelaksanaan program Kotaku dari penanganan indikator-indikator pemukiman kumuh (fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kedudukan Kelurahan Banggae di Kecamatan Banggae dan Kabupaten Majene

Kabupaten Majene mempunyai luas wilayah 947,84 km² terbagi ke dalam 8 kecamatan (yaitu Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammero'do Sendana, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda) dan 80 desa dan kelurahan. Kecamatan Banggae sebagai salah satu dari delapan kecamatan tersebut merupakan ibukota Kabupaten Majene, kemudian disebut Kota Majene. Berikut gambarannya.



Sumber: RPDA Prov.Sul-Bar, 2016

Gambar 4.1 Posisi Kecamatan Banggae dan Kelurahan Banggae dalam Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Majene

Selanjutnya, Kecamatan Banggae terbagi ke dalam 8 kelurahan/desa, termasuk salah satunya yang sangat vital dan strategis adalah Kelurahan Banggae, yang posisinya dapat disimak pada peta berikut.



Sumber: RPDA Prov.Sul-Bar, 2016

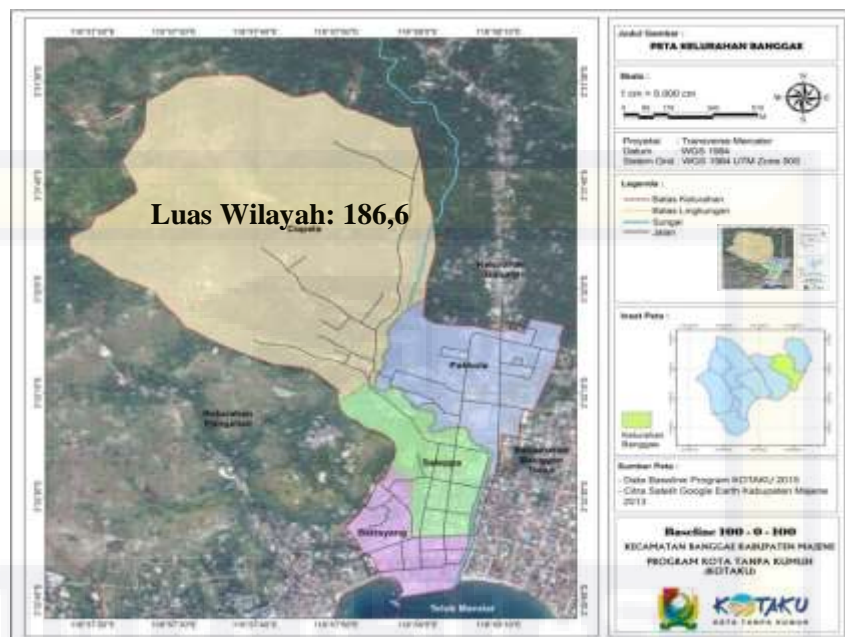
Gambar 4.2 Posisi Kelurahan Banggae dalam Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Banggae

Gambar peta tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Banggae menjadi bagian integral dari wilayah Kecamatan Banggae dengan posisi yang vital dan strategis karena merupakan ibukota kecamatan, dan juga sekaligus berkedudukan sebagai ibukota Kabupaten Majene. Posisi yang demikian memberikan manfaat dan keuntungan yang besar bagi Kelurahan Banggae dalam pengembangan wilayahnya untuk berbagai kegiatan vital dan strategis terutama sebagai pusat perkotaan (*core urban*) dan sekaligus pusat perekonomian, perdagangan dan industri.

B. Deskripsi Umum Kelurahan Banggae

1. Keadaan Wilayah Geografi dan Administrasi

Kelurahan Banggae sebagai pusat ibukota Kecamatan Banggae dan sekaligus pusat ibukota Majene memiliki profil wilayah seperti berikut.



Sumber: Data Baseline Program Kotaku, 2015

Gambar 4.3 Profil Wilayah Geografi Kelurahan Banggae

Kelurahan Banggae mempunyai luas wilayah 186,8ha yang terbagi dalam empat lingkungan yaitu: Lingkungan Saleppa, Pakkola, Battayang dan Copala, dengan perbandingan luas wilayah masing-masing lingkungan seperti pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Empat Lingkungan di Kelurahan Banggae

No.	Lingkungan	Luas wilayah		Keterangan
		(ha)	%	
1	Pakkola	28,3	15,1	II
2	Saleppa	18,6	10,0	III
3	Battayang	13,3	7,1	IV
4	Copala	126,6	67,8	I
	Total	186,8	100,0%	

Sumber : BPS Kelurahan Banggae, 2018

Data pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa Lingkungan Copala mempunyai luas wilayah paling besar yakni 126,6 ha atau 67,8% dari total luas wilayah Kelurahan Banggae, sedangkan paling kecil luas wilayahnya

adalah Lingkungan Battayang yakni 13,3 ha atau 7,1%. Keempat lingkungan dengan luas wilayah yang berbeda-beda tersebut sebagai satu kesatuan yang membentuk wilayah kelurahan tersebut.

Ditinjau dari aspek administrasi wilayah, batas-batas wilayah administratif Kelurahan Banggae adalah berbatasan dengan Kelurahan Galung di sebelah Utara, Teluk Mandar di sebelah Selatan, Kelurahan Pangaliali di sebelah Barat, serta di bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur. Untuk jelasnya dapat pula disimak pada peta berikut.



Sumber: Data Baseline Program Kotaku, 2015

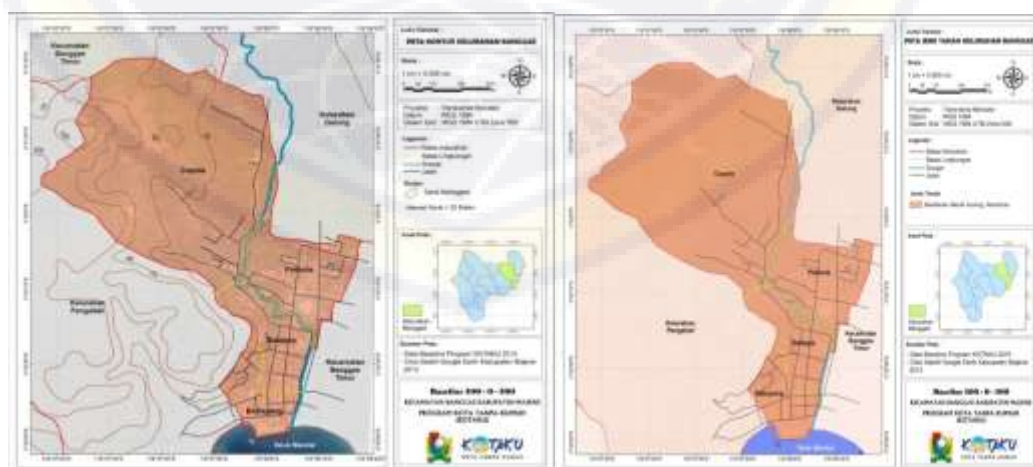
Gambar 4.4 Peta Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Banggae

Gambar peta tersebut menunjukkan bahwa posisi wilayah Kelurahan Banggae sangat strategis karena selain berbatasan dengan Teluk Mandar juga berada di jalur transportasi utama angkutan antar kota dan provinsi

yakni Jalan Trans-Sulawesi Polewali Mandar - Majene – Mamuju sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi serta sangat sesuai untuk pengembangan pusat-pusat perniagaan atau perdagangan dan jasa, industri maupun daerah tujuan wisata. Selain itu, wilayah Kelurahan Banggae juga dibelah oleh Sungai Mandar yang terhubung langsung dengan Teluk Mandar serta daerah hinterland-nya sehingga memungkinkan untuk pengembangan transportasi air (sungai) dan kegiatan wisata alam (sungai).

2. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

Kelurahan Banggae mempunyai topografi wilayah yang sebagian dataran rendah dan sebagian perbukitan. Hal ini tercermin dari letak wilayah geografisnya yang berada pada posisi koordinat $3^{\circ}31'31''$ - $3^{\circ}32'44''$ LS (Lintang Selatan) dan $118^{\circ}57'19''$ – $118^{\circ}58'18''$ BT (Bujur Timur) dengan ketinggian berkisar 0,5 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl) (BPS Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, 2018). Kondisi topografi wilayah yang demikian membentuk kontur dan jenis tanah/lahan seperti digambarkan berikut.



Sumber: Data Baseline Program Kotaku, 2015

Gambar 4.5 Peta Garis Kontur dan Jenis Tanah Kelurahan Banggae

Gambar peta tersebut menunjukkan bahwa kontur wilayah Kelurahan Banggae terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Garis ketinggian berada di Lingkungan Copala dengan garis kontur 25 meter. Dengan kata lain bahwa dataran rendah terutama pada lingkungan yang orientasi wilayahnya ke arah pesisir pantai seperti Lingkungan Battayang, Saleppa dan Pakkola, sedangkan dataran tinggi berupa perbukitan pada Lingkungan Copala yang orientasi wilayahnya lebih jauh masuk zona daratan dan pegunungan.

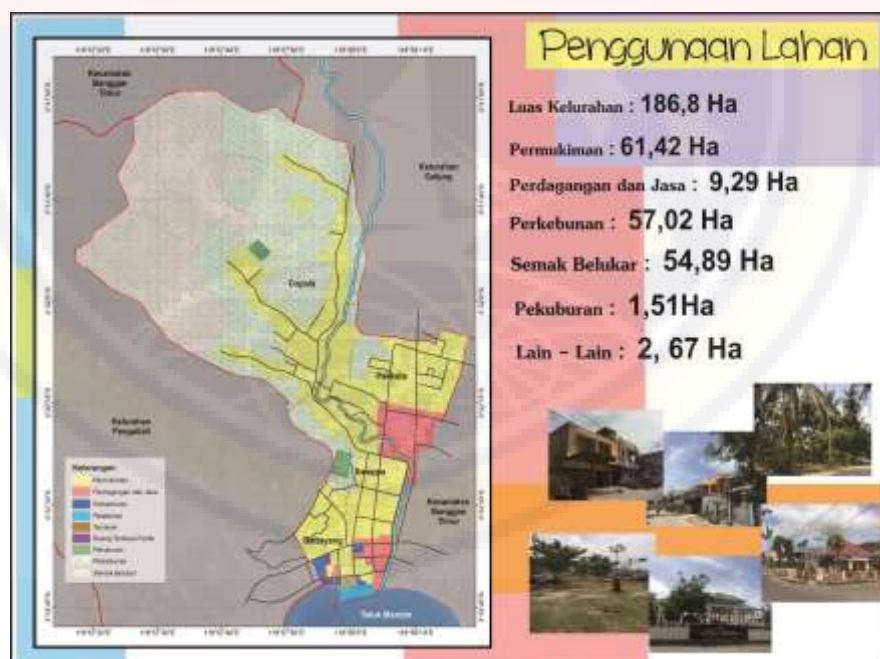
Wilayah Kelurahan Banggae memiliki kondisi geologi yang disusun oleh batuan sedimen kapur. Ciri-cirinya yaitu warna putih keabu-abuan, abu-abu, abu-abu gelap, hitam, kuning, coklat, dan lainnya yang disebabkan oleh adanya kotoran-kotoran. Jenis tanah atau lahan secara umum di Kelurahan Banggae adalah mediteranian merah kuning (*Rendzine*) sehingga cocok untuk kegiatan perkebunan dan peternakan. Batuan ini merupakan hasil pembetukan batu kapur keras. Tanah mediteran berwarna merah sampai coklat sedangkan Tanah Renzina warnanya merah. Tanah mediteran merupakan jenis tanah yang kurang subur namun cocok untuk tanaman palawija, jati, tembakau, dan jambu mente. Sedangkan Tanah Renzina memiliki sedikit unsur hara sehingga menyebabkan tanahnya tidak subur.

Terkait dengan aspek hidrologi, sumber daya air di Kelurahan Banggae ada dua jenis, yakni air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang ada di Kelurahan Banggae berupa sungai kecil yakni Sungai Majene

yang mana saat ini masih digunakan oleh sebagian kecil warga untuk keperluan mandi dan mencuci. Kondisi Sungai Majene beberapa tahun belakangan mengalami penyempitan akibat kurangnya air yang mengalir dari hulu sungainya. Sehingga pada musim kemarau Sungai Majene mengalami sering mengalami kekeringan. Untuk jenis air tanah di Kelurahan Banggae dapat dengan mudah diperoleh. Cukup hanya menggali dengan kedalaman 5 – 10 meter air tanah sudah didapatkan dan digunakan sebagai air bersih. Namun di beberapa titik air tanah yang dimanfaatkan sebagai sumur gali kondisi airnya agak berbau.

3. Pola Ruang dan Penggunaan Lahan

Kelurahan Banggae yang luas wilayahnya 186,8 ha telah mengalami pola ruang dan penggunaan lahan seperti tertera pada Gambar 4.5.



Sumber: Data Baseline Program Kotaku, 2015

Gambar 4.6 Peta Pola Ruang dan Penggunaan Lahan Kelurahan Banggae

Gambar peta tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kelurahan Banggae terbagi ke dalam sejumlah kegiatan penggunaan lahan

Tabel 4.2
Pola Ruang dan Penggunaan Lahan di Kelurahan Banggae

No.	Kegiatan	Luas Penggunaan Lahan		Keterangan
		ha	%	
1	Permukiman	61,42	32,88	Penggunaan lahan paling terbanyak
2	Perdagangan dan jasa	9,29	0,50	
3	Perkebunan	57,02	30,52	Penggunaan lahan terbanyak kedua
4	Semak belukar	54,89	29,38	Penggunaan lahan terbanyak ketiga
5	Tempat pemakaman umum (TPU)	1,51	0,08	Penggunaan lahan paling terkecil
6	Lain-lain	2,67	0,14	Perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga, jalan
	Total	186,8	100,0%	

Sumber: RTRW Kelurahan Banggae, 2018

Data pada Tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa dari total luas wilayah Kelurahan Banggae, 61,42 ha atau 32,88% digunakan oleh penduduk untuk lahan terbangun berupa permukiman, dan ini merupakan kegiatan penggunaan tanah atau lahan paling banyak. Selanjutnya, lahan seluas 57,02 ha (atau 30,52%) dipergunakan untuk kegiatan perkebunan terutama di Lingkungan Copala, dan ini merupakan kegiatan penggunaan tanah lahan terbanyak kedua. Kemudian lahan berupa semak belukar seluas 54,89 ha (29,38%) merupakan kegiatan penggunaan lahan terbanyak ketiga. Penggunaan lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa merupakan jenis penggunaan lahan paling kecil yakni 9,29 ha (0,5%). Sisanya 1,51 ha (0,08%) untuk tempat pemakaman umum (TPU) dan 2,67 ha (0,14%) lahan

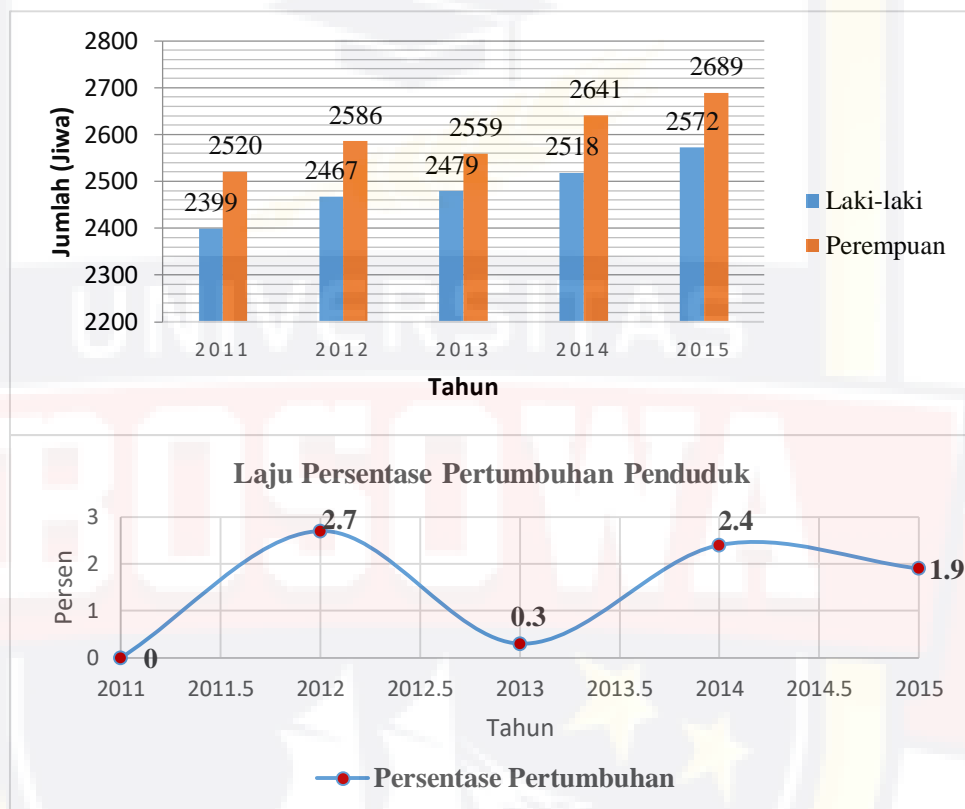
untuk kegiatan lainnya seperti kantor pemerintah dan swasta, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga dan lainnya.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa selain penggunaan lahan untuk kawasan permukiman yang besar, juga terdapat luas lahan lebih besar untuk ruang terbuka (dan RTH) seperti lahan perkebunan, semak belukar, dan TPU atau pekuburan. Dengan demikian dapat dibuat perbandingan secara keseluruhan bahwa terdapat lahan seluas 113,42ha (60,7%) sebagai lahan non-terbangun, dan 73,38 ha (39,3%) lahan terbangun. Hal ini juga berarti luas lahan non-terbangun masih jauh lebih besar daripada luas lahan terbangun. Luas lahan non-terbangun atau kawasan terbuka banyak terdapat di Lingkungan Copala yang wilayahnya merupakan kawasan perbukitan. Sedangkan Lingkungan Pakkola, Saleppa, dan Battayang yang terletak di wilayah dataran rendah sebagian besar penggunaan lahannya adalah untuk permukiman serta perdagangan dan jasa.

Kelurahan Banggae dengan demikian memiliki potensi sumber daya alam berupa perkebunan, pertanian, dan pertambangan sirtu. Hasil-hasil perkebunan terutama pohon kelapa cukup banyak dijumpai dan menjadi komoditi unggulan. Hasil perkebunan lainnya adalah ubi kayu, jagung, ubi jalar, kacang ijo, pisang, pepaya dan cabe. Sedangkan untuk pertambangan pasir, terdapat Sungai Mandar yang menjadi lokasi pengambilan pasir bagi para pengusaha pasir. Permasalahan yang masih menonjol adalah adanya lahan berupa semak belukar dan perbukitan yang belum dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

4. Keadaan Sosio-Demografi Penduduk

Kuantitas penduduk di Kelurahan Banggae sebanyak 4.826 jiwa (terdiri atas: 2.453 jiwa perempuan dan 2.373 jiwa laki-laki, ataudengan *sex ratio* sebesar 97), dengan laju pertumbuhan seperti pada histogram berikut.



Sumber: BPS Kecamatan Banggae, 2016

Gambar 4.7 Histogram dan Grafik Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Banggae

Kelurahan Banggae memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,35% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 104 jiwa setiap tahun. Pola penyebaran penduduk secara umum bersifat linear mengikuti jalan raya dan sungai, kecuali di Lingkungan Copala yang berada pada daerah perbukitan yang menunjukkan pola radial. Keberadaan sejumlah

penduduk pada empat lingkungan di Kelurahan Banggae dapat disimak pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Distribusi Jumlah Penduduk di Kelurahan Banggae

No.	Determinan	Lingkungan				Total
		Pakkola	Saleppa	Battayang	Copala	
1	Jumlah Penduduk (jiwa, %)	1.687 (34,8%)	1.484 (30,8%)	1.039 (21,5%)	916 (18,9%)	4.826 (100%)
	a. Laki-laki	815 (33,2%)	722 (29,4%)	372 (15,2%)	464 (18,9%)	2.453 (50,8%)
	b. Perempuan	872 (36,7%)	762 (32,1%)	367 (15,5%)	452 (19,0%)	2.373 (49,2%)
2	Kepadatan penduduk (jiwa/ha)	95	126	86	44	88
3	Jumlah rumah tangga (KK)	397 (36,0%)	340 (38,0%)	178 (15,9%)	203 (18,1%)	1.118 (100%)
4	Jumlah keluarga	433 (34,8%)	387 (31,1%)	207 (16,6%)	219 (17,6%)	1.245 (100%)

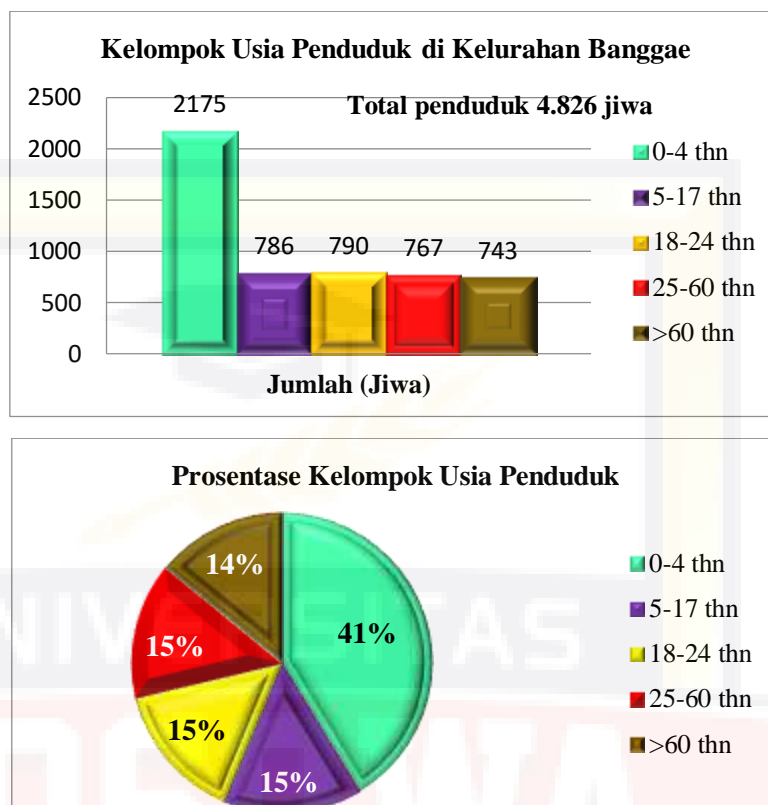
Sumber: Data Baseline 100-0-100 Program KOTAKU Tahun 2015

Data pada Tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kelurahan Banggae adalah di Lingkungan Pakkola, kemudian di Saleppa, sedangkan jumlah penduduk terendah di Lingkungan Copala. Fenomenanya bahwa walaupun jumlah penduduk masih lebih banyak di Pakkola namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi justru di Saleppa.

Keberadaan sejumlah penduduk yang ada pada empat lingkungan di Kelurahan Banggae tersebut mempunyai karakteristik terutama dari segi kelompok usia dan pendidikan, seperti diuraikan berikut.

a. Karakteristik penduduk berdasarkan Kelompok Usia

Keberadaan sejumlah penduduk di Kelurahan Banggae secara umum dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok usia seperti pada histogram dan diagram berikut.



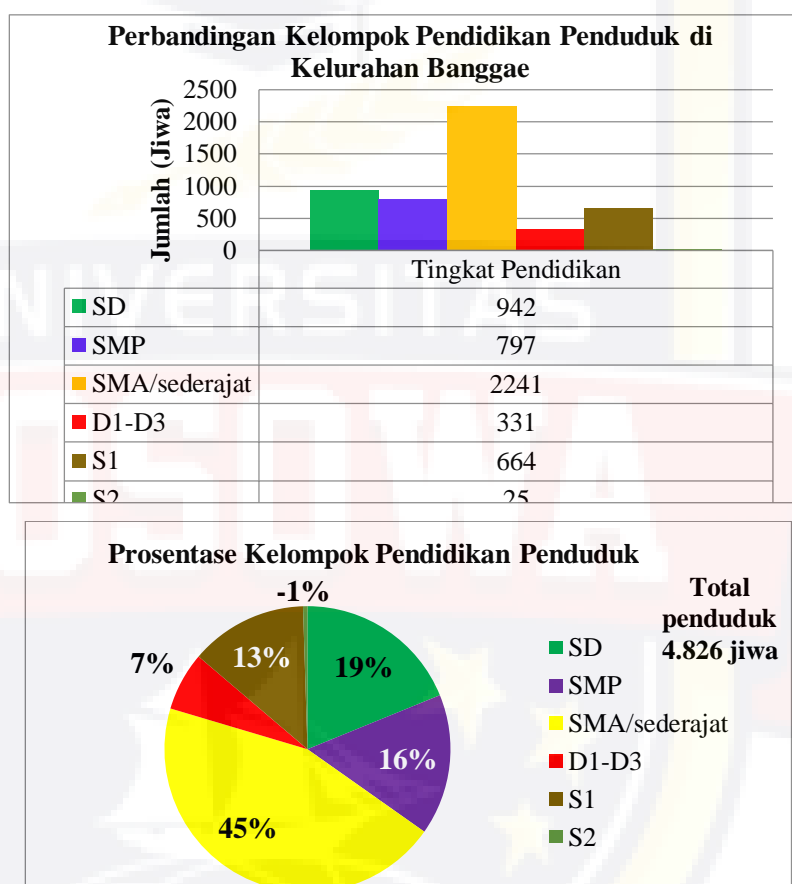
Sumber: UPTD BKKBD Kabupaten Majene, 2015

Gambar 4.8 Kelompok Usia Penduduk di Kelurahan Banggae

Data pada histogram dan diagram tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia penduduk terbanyak di Kelurahan Banggae adalah 0-4 tahun yakni 2.175 jiwa (atau 41% dari jumlah penduduk). Sedangkan kelompok usia 5-17 tahun, 18-24 tahun dan 25-60 tahun relatif tidak jauh berbeda atau hampir sama jumlahnya dengan persentase masing-masing 15%. Bahkan kelompok usia diatas 60 tahun pun relatif hampir sama kuantitasnya dengan kelompok usia dibawahnya 5-60 tahun. Hal ini berarti bahwa kebanyakan penduduk tergolong usia produktif dan usia pra sekolah.

b. Karakteristik penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk di Kelurahan Banggae mempunyai tingkat pendidikan yang beragam, dan secara umum dapat dikelompokkan seperti pada histogram dan diagram berikut.



Sumber: Data Monografi Kelurahan Banggae Tahun 2016

Gambar 4.9 Kelompok Pendidikan Penduduk di Kelurahan Banggae

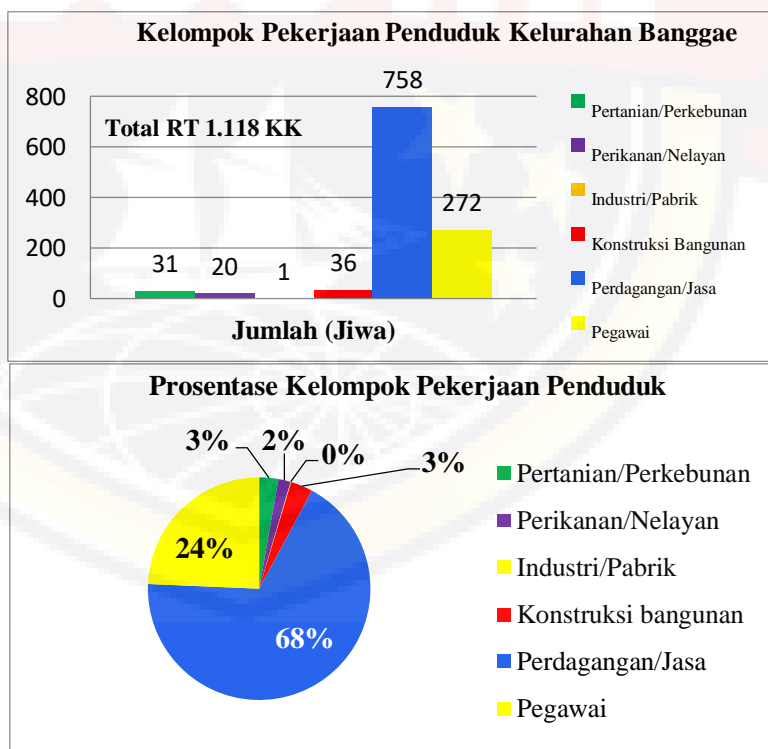
Data pada histogram dan diagram tersebut menunjukkan bahwa kelompok pendidikan penduduk di Kelurahan Banggae paling banyak adalah tamat SMA atau sederajat, dan terbanyak kedua adalah tamat SD, sedangkan kelompok pendidikan terendah jumlahnya adalah diploma. Dengan kata lain bahwa kelompok pendidikan terbanyak adalah level

pendidikan dasar dan menengah (SLTA, SMP, SD) yakni sebanyak 3.980 jiwa. Namun demikian, jumlah kelompok pendidikan untuk level pendidikan tinggi (sarjana S-1, diploma D1-D3 dan magister S-2) juga mengalami peningkatan menjadi 1.020 jiwa.

5. Keadaan Sosio Ekonomi dan Budaya

a. Pola pencaharian penduduk

Karakteristik wilayah dan lingkungan alam serta dinamika kehidupan sosial budaya dan ekonomi mempengaruhi pilihan-pilihan pola pencaharian atau pekerjaan/ profesi sejumlah penduduk atau rumah tangga di Kelurahan Banggae, yang secara umum dapat dikelompokkan seperti pada histogram dan diagram berikut.



Sumber: Data Baseline 100-0-100 Program KOTAKU Tahun 2015

Gambar 4.10 Kelompok Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Banggae

Data pada histogram dan diagram tersebut menunjukkan bahwa kelompok pekerjaan/profesi penduduk terbanyak di Kelurahan Banggae adalah bekerja di bidang perdagangan dan jasa, dan terbanyak kedua bekerja di pemerintahan sebagai aparatur sipil negara/ASN (baik sebagai pegawai negeri maupun tenaga honorer), termasuk TNI/Polri. Selibhnya, bekerja sebagai petani, nelayan, buruh harian. Banyaknyapenduduk yang bekerja di bidang perdagangan dan jasa disebabkan oleh faktor wilayah Kelurahan Banggae yang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Majene.

Karakteristik pola pencaharian atau pekerjaan/profesi tersebut paralel dengan perbedaan tingkat pendapatan penduduk atau rumah tangga/keluarga. Dari perbedaan-perbedaan pola pencaharian dan tingkat pendapatan tersebut kemudian menentukan status kemampuan penghasilan warga masyarakat yang secara umum dapat diklasifikasi ke dalam dua golongan yakni golongan masyarakat berpenghasilan rendah (disingkat MBR) dan golongan masyarakat berpenghasilan yang lebih baik atau disebut Non-MBR.

b. Sarana prasarana perekonomian

Di Kelurahan Banggae secara umum terdapat sejumlah sarana prasarana serta fasilitas perekonomian seperti pasar, pusat pertokoan dan perbelanjaan, tempat pelelangan ikan (TPI), pelabuhan, terminal, lembaga keuangan, hotel, rumah makan. Untuk jelasnya dapat diuraikan lebih lanjut berikut.

1) Pasar

Pasar yang ada di Kelurahan Banggae secara umum adalah pasar sentral, pasar TPI, dan pasar malam. Pasar sentral menjadi pusat perdagangan barang dan jasa sehari-hari dari seluruh wilayah Kabupaten Majene, sedangkan pasar TPI dan pasar malam (2 kali seminggu) hanya melayani skala Kecamatan Banggae dan sekitarnya.

2) Pusat pertokoan dan perbelanjaan

Kelurahan Banggae memiliki pusat pertokoan yang tidak dimiliki oleh kelurahan lainnya baik di Kecamatan Banggae maupun Kabupaten Majene secara keseluruhan. Pusat pertokoan tersebut memiliki posisi strategis karena berada di jalur transportasi utama yakni jalan trans-Sulawesi khususnya Polewali Mandar – Majene-Mamuju sehingga aksesnya sangat mudah. Selain itu, pusat pertokoan tersebut berdekatan dengan Pantai Majene serta fasilitas perekonomian dan perdagangan lainnya. Selain pusat pertokoan tersebut, juga terdapat pusat perbelanjaan lainnya seperti toko swalayan atau minimarket

3) Pelabuhan

Letak wilayah Kelurahan Banggae yang sebagian berada di wilayah pesisir pantai dan berbatasan langsung dengan Teluk Mandar menyebabkan arus lalu lintas perekonomian dan perdagangan melalui jalur transportasi air atau laut menjadi

bagian integral dari kegiatan perekonomian penduduk. Aktivitas tersebut didukung oleh keberadaan Pelabuhan Laut yang berada di Lingkungan Battayang. Pelabuhan tersebut terutama banyak digunakan oleh nelayan sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan ikan dari laut. Di pelabuhan tersebut hampir setiap hari ramai dikunjungi kalangan pedagang dan warga masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli ikan dari nelayan.

4) Terminal

Sarana prasarana atau fasilitas perekonomian lainnya yang dimiliki oleh Kelurahan Banggae adalah terminal angkutan umum yang letaknya cukup strategis karena berada di jalur transportasi utama yakni jalan trans-Sulawesi, berdekatan dengan pusat pertokoan dan Pantai Majene.

5) Lembaga keuangan/pembiayaan

Kedudukan Kelurahan Banggae sebagai ibukota Kecamatan Banggae sekaligus ibukota Kabupaten Majene serta pusat Kota Majene menyebabkan pemilik modal atau investor tertarik membangun atau mengembangkan lembaga keuangan/pembiayaan terutama perbankan, sehingga terdapat beberapa bank baik bank yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, seperti BRI, BNI, dan lainnya. Selain itu, juga berkembang lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya seperti Koperasi. Dengan demikian, keberadaan bank dan koperasi tersebut

semakin memudahkan kalangan warga masyarakat mengakses sumber modal untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan lainnya.

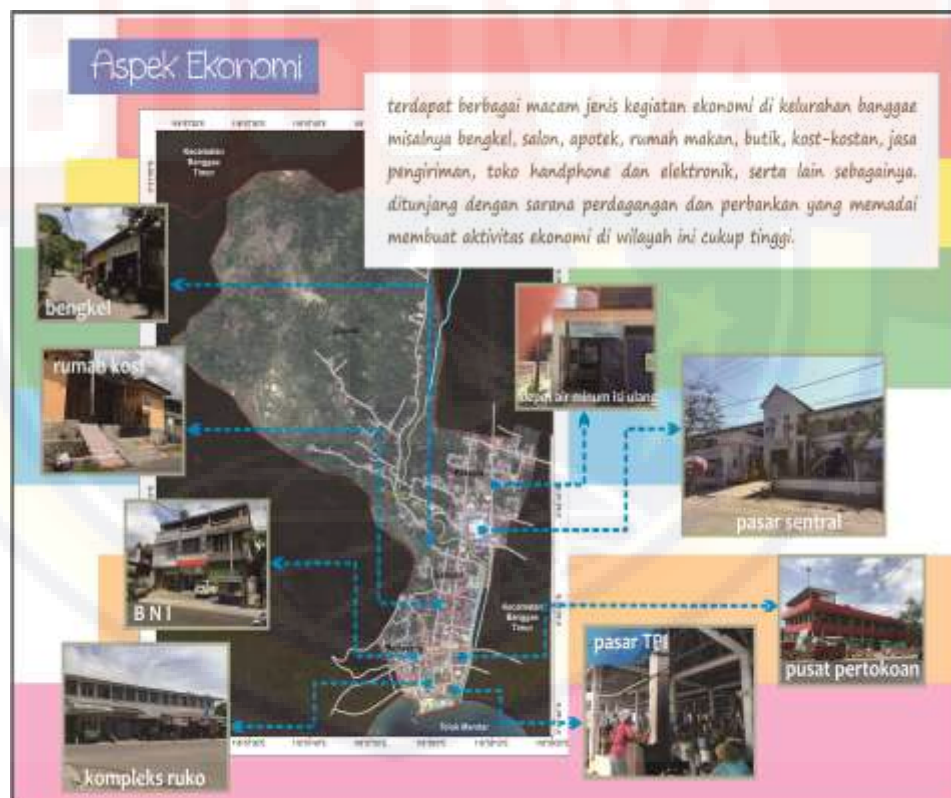
Khusus selama program Kotaku dilaksanakan, juga tersedia bantuan modal usaha berupa dana bergulir dari pengelola program Kotaku. Fasilitas bantuan modal usaha ini dimanfaatkan oleh kalangan pelaku usaha kecil menengah termasuk kalangan warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan miskin di Kelurahan Banggae. Bantuan modal usaha (BMU) tersebut dikelola oleh sejumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada.

Di Kelurahan Banggae terdapat 52 KSM yang dikelola langsung oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Assamaturuang dan aktif melayani pemberian BMU kepada warga masyarakat, walaupun dalam perkembangannya pengelolaan bantuan dana bergulir (BDG) tersebut masih menghadapi tantangan permasalahan karena tidak semua kelompok penerima manfaat (KPM) mengelola dan mengembalikan DBG tersebut dengan lancar, ada yang menunggak beberapa bulan dengan tingkat pengembalian mencapai 91%. Namun demikian, kehadiran BMU dalam bentuk DBG tersebut cukup membantu kalangan warga masyarakat mengatasi kebutuhan sumber modalnya.

6) Hotel dan rumah makan

Di Kelurahan Banggae berdiri sejumlah hotel, wisma atau penginapan sehingga memudahkan para pengunjung untuk memenuhi kebutuhannya atas fasilitas tempat menginap dan beristirahat ataupun melakukan kunjungan wisata. Demikian pula rumah makan cukup banyak tersedia terutama rumah makan dengan kuliner tradisional dan cita rasa Mandar.

Gambaran secara umum mengenai keberadaan sejumlah sarana prasarana serta aktivitas perekonomian masyarakat di Kelurahan Banggae dapat pula disimak pada gambar berikut.



Sumber: Data Baseline 100-0-100 Program KOTAKU

Gambar 4.11 Peta Eksisting Sarana Prasarana & Fasilitas serta Aneka Jenis Kegiatan Usaha Ekonomi dan Perdagangan di Kelurahan Banggae

Tantangan permasalahan lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi di Kelurahan Banggae adalah

- (1) Kurang memadainya kondisi infrastruktur pendukung sarana pasar sentral seperti jalan dan toilet. Pasar sentral yang menjadi pusat ekonomi kabupaten kondisi jalannya rusak di sebagian besar bagian sehingga menghambat aksesibilitas warga apalagi ketika turun hujan. Toilet yang ada juga tidak dimanfaatkan sehingga penjual dan pembeli yang ingin menggunakan sarana toilet memilih untuk ke masjid yang ada di dekat pasar.
- (2) Lapak pedagang yang berjualan di pasar malam tidak tertata dengan rapi menyebabkan kondisi pasar malam menjadi tidak teratur. Tidak adanya stand/tempat khusus untuk berjualan menyebabkan pedagang menggelar lapak seadanya di badan jalan yang menjadi lokasi pasar malam (Jl. Muh. Yusuf).
- (3) Tidak optimalnya fungsi Pasar TPI menjadi tempat khusus penjualan ikan di Kabupaten Majene. Banyak penjual yang berjualan ikan di pinggir jalan dibandingkan yang berjualan di dalam bangunan pasar. Hal ini terjadi karenakurangnya pembeli yang masuk ke dalam pasar dan lebih memilih untuk melakukan transaksi di pinggir jalan. Selain itu, jumlah penjual yang sedikit Sentral yang letaknya ± 500 meter dari pasar TPI.
- (4) Bangunan pusat pertokoan yang tidak berfungsi optimal sebagai sarana perdagangan dan jasa. Kondisi bangunan yang sudah tua, tidak terawat serta sedikitnya penjual yang ada menjadi penyebab hal tersebut. Penggunaan bangunan sebagian besar di lantai satu untuk berdagang sedangkan lantai dua dimanfaatkan sebagai kantor atau sejenisnya oleh beberapa lembaga/organisasi.

c. Keadaan Sosial Budaya

Di Kelurahan Banggae, seperti di Kecamatan Banggae dan Kabupaten Majene pada umumnya, penduduk atau masyarakat umumnya berasal dari etnis Mandar, disamping sejumlah kecil etnis lainnya seperti Bugis, Makassar, Toraja, Jawa dan lainnya. Etnis Mandar merupakan suku mayoritas yang masih mendominasi kehidupan sosial budaya masyarakat, sehingga penggunaan bahasa Mandar menjadi sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula tradisi dan adat

istiadat dari budaya Mandar masih cukup dominan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Merujuk kepada latar belakang sejarah, kehidupan sosial budaya masyarakat di Kelurahan Banggae (sekarang disebut sebagai pusat Kota Majene) sulit dilepaskan dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, tradisi dan adat istiadat serta pola perilaku budaya yang diwarisi dari Kerajaan Banggae yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Konfederasi Kerajaan Mandar yang wilayahnya mencakup Sulawesi Barat sekarang. Mayoritas penduduk di Kelurahan Banggae memeluk agama Islam dan memiliki hubungan kekerabatan yang kental serta mewarisi tanah adat dari para leluhurnya secara turun temurun, sehingga mereka sudah terbiasa menjadi hegemoni penggunaan tanah atau lahan dalam setiap lingkungan sehingga pola permukiman terbentuk dari kebiasaan hidup secara berdekatan dalam sistem kekerabatan atau kekeluargaan, dan hal inilah yang menyebabkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan sebagai suatu komunitas sosial keluarga selalu ada dan melekat.

C. Evaluasi Kondisi Permukiman Saat Ini Di Kelurahan Banggae Pasca Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

1. Evaluasi Perkembangan Permukiman dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Banggae

Kondisi perkembangan permukiman saat ini dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae dievaluasi dengan menggunakan determinan kriteria (fisik dan non-fisik) beserta parameter/ indikatornya dari Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yaitu:

- (1) Kondisi penataan (keteraturan) bangunan hunian
- (2) Kondisi aksesibilitas lingkungan
- (3) Kondisi drainase lingkungan
- (4) Kondisi pelayanan air minum/bersih/baku
- (5) Kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga
- (6) Kondisi pengelolaan persampahan
- (7) Kondisi perlindungan kebakaran
- (8) Kondisi legalitas pendirian bangunan hunian
- (9) Kondisi sosial budaya
- (10) Kondisi sosial ekonomi.

Gambaran menyeluruh mengenai kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae berdasarkan kesepuluh determinan parameter/ indikator tersebut dapat diformulasikan seperti pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Evaluasi Kondisi Permukiman Saat Ini dalam Pelaksanaan Program Kotaku
di Kelurahan Banggae, 2019

No.	Determinan/ Indikator	Kuantitas		Keterangan	EVALUASI Kondisi Sekarang (2019)
		Σ	%		
1	2	3	4	5	6
1	Penataan Bangunan				
	a. Keteraturan bangunan hunian			Luas wilayah : 186,80 ha	◎ Kondisi keteraturan bangunan hunian tergolong sedang. sehingga banyak rumah penduduk memerlukan penataan ◎ Kepadatan bangunan tergolong cukup rendah ◎ Sebagian besar luas lantai bangunan layak huni, namun masih ada pula perlu ditambah luas lantainya sesuai standar ◎ Kesesuaian syarat teknis kondisi ALADIN tergolong sedang, sehingga masih cukup banyak bangunan membutuhkan rehab. Simpulan: kondisi penataan bangunan di Kelurahan Banggae pada pelaksanaan program Kotaku belum sesuai yang diharapkan,
	1) Teratur (unit)	723	60,5%	Luas permukiman : 59,93 ha	
	2) Tidak teratur	473	39,5%		
	b. Kepadatan bangunan (unit/ha)	22		Σ total bangunan : 1.196 unit	
	c. Kelayakan				
	1) Luas lantai (m ²)				
	(a) $\geq 7,2$ m ² /jiwa	1.055	88,2%		
	(b) $< 7,2$ m ² /jiwa	141	11,8%		
	2) ALADIN				
	(a) Sesuai syarat teknis (unit)	794	66,4%		
	(b) Non-syarat teknis (unit)	402	33,6%		
2	Aksesibilitas Lingkungan				
	a. Syarat teknis jalan			Total panjang jaringan jalan lingkungan 15.822 m	◎ Panjang jalan lingkungan memenuhi syarat teknis tergolong rendah, sehingga masih banyak harus dibenahi, direkonstruksi. ◎ Sebahagian besar jalan mempunyai lebar $\geq 1,5$ m yang menunjang aksesibilitas. Namun demikian, masih panjang jalan yang memerlukan pelebaran. ◎ Sebahagian jalan lingkungan sudah mengalami pengerasan dengan aspal dan betonisasi, namun sebagian lagi kondisi permukaannya masih berupa tanah (belum diperkeras) ◎ Panjang Jalan tanpa bangunan pelengkap/saluran samping masih lebih banyak daripada yang memiliki saluran samping ◎ Panjang jalan dengan kualitas kurang baik masih jauh lebih banyak daripada yang tergolong berkualitas baik. Simpulan: kondisi aksesibilitas lingkungan di Kelurahan Banggae
	1) Sesuai (m)	5.221	33%	Jangkauan pelayanan jalan lingkungan 100%	
	2) tidak sesuai	10.600	67%		
	b. Panjang jalan dengan lebar (m)				
	1) $\geq 1,5$ m	10.824	68,4%		
	2) $< 1,5$ m	4.998	31,6%		
	c. Kondisi permukaan jalan				
	1) Pengerasan				
	(a) $\geq 1,5$ m	8.129	51,4%		
	(b) $< 1,5$ m	115	0,7%		
	2) Tanah				
	(a) $\geq 1,5$ m	7.693	48,6%		
	(b) $< 1,5$ m	4.882	30,8%		
	d. Panjang jalan dengan bangunan pelengkap				
	1) Saluran samping				
	(a) $\geq 1,5$ m	6.607	41,7%		
	(b) $< 1,5$ m	790	5,0%		
	2) Non-saluran samping (m)				
	(a) $\geq 1,5$ m	9.251	58,5%		
	(b) $< 1,5$ m	4.208	26,6%		
	e. Kualitas jalan				

<i>lanjutan</i>	1) Baik (m) 2) Kurang baik (m)	4.946 10.876	31,3% 68,7%		pada pelaksanaan program Kotaku belum sepenuhnya sesuai diharapkan.	
3	Drainase Lingkungan					
	a. Kualitas			- Panjang drainase 10.944 m	◎ Mayoritas panjang drainase yang ada berkualitas baik, namun demikian masih ada sebagian drainase yang memerlukan peningkatan kualitas ◎ Kondisi pemeliharaan sebagian besar saluran drainase yang ada masih kurang sehingga menjadi kotor dan berbau, tergenang air limbah Simpulan: Kondisi drainase lingkungan di Kelurahan Banggae pada pelaksanaan program Kotaku belum sesuai yang diharapkan.	
	1) Baik (m) 2) Kurang baik (m)	9.532 1.412	87,1% 12,9%	- Dibutuhkan 367 m (11%) drainase baru terhubung sistem drainase kota, dan 2.441 m (78%) untuk pelayanan drainase keseluruhan		
	b. Kondisi pemeliharaan					
	1) Bersih, tidak bau 2) Kotor, bau	3.818 7.126	34,9% 65,1%			
4	Pelayanan Air Minum (PAM)					
	a. Akses pelayanan rumah tangga/RT			- Σ rumah tangga (RT) yang ada sebanyak 1.118 KK	◎ Akses PAM tergolong baik, namun ketercukupan kebutuhan standar tergolong sedang. ◎ Mayoritas RT memperoleh akses PAM baik kepada PDAM, sumur gali, sumur bor. Namun demikian, masih ada sebagian kecil RT memerlukan perhatian untuk penuntasan masalah akses tersebut ◎ Sumber air dari PDAM, sumur gali dan sumur bor belum dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan RT atas air minum sesuai standar 60 liter/orang/hari Simpulan: Kondisi PAM di Kelurahan Banggae pada pelaksanaan program Kotaku belum sesuai yang diharapkan.	
	1) Berakses 2) Tidak berakses	1.039 79	92,9% 7,1%	- Akses pelayanan air minum RT melalui saluran perpipaan dan non perpipaan terlindungi yang layak untuk kebutuhan air minum, mandi dan cuci		
	b. Ketercukupan kebutuhan air minum					
	1) Tercukupi sesuai standar 60 lt/org/hr 2) Tidak tercukupi	887 231	79,3% 20,7%			
5	Pengelolaan Air Limbah (PAL)					
	a. Akses komunal (5 KK/jamban) RT			Seluruh (100%) rumah tangga dengan kondisi saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan	◎ Kondisi akses PAL maupun pemenuhan syarat teknis IPAL tergolong baik. Namun masih ada sebagian kecil RT yang memerlukan perhatian/ penuntasan kebutuhannya atas IPAL komunal dan individu ◎ Umumnya SPAL tersambung saluran drainase yang berdampak pada kondisi drainase yang buruk, tergenang air, kotor, berbau Simpulan: Kondisi pengelolaan air limbah	
	1) Berakses 2) Tidak berakses	1.029 89	92,0% 8,0%			
	b. Pemenuhan syarat teknis IPAL					
	1) Kloset leher angsa tersambung <i>septic tank</i> 2) Lainnya	1.079 39	96,5% 3,5%			

lanjutan					(PAL) di Kelurahan Banggae pada pelaksanaan program Kotaku belum sesuai yang diharapkan
6	Pengelolaan Persampahan				
	a. Kepemilikan RT atas sarana prasarana pengelolaan sampah yang baik dan terpelihara			- Kepemilikan rumah tangga (RT atas sarana prasarana pengelolaan sampah yang baik, tidak rusak dan terpelihara hanya terdapat di Lingkungan Battayang,	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Kondisi pengelolaan persampahan secara umum tergolong kurang/rendah. ⊙ Pengelolaan sampah yang baik bahkan dengan bank sampah masih terkonsentrasi di Battayang ⊙ Sarana prasarana persampahan seperti bak sampah, tong sampah, kontainer, motor pengangkutan sampah, dan lainnya masih minim/terbatas <p>Simpulan: Kondisi pengelolaan persampahan belum sesuai yang diharapkan.</p>
	1) Tersedia	207	18,5%		
	2) Tidak tersedia	911	81,5%		
	b. Akses dan frekuensi pelayanan angkutan sampah domestik (RT) dari TPS ke TPA			- Akses pelayanan angkutan sampah belum ada di Copala.	
	1) ≤ 2xseminggu	348	31,1%		
	2) tidak terlayani	770	68,9%		
7	Proteksi kebakaran				
	a. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan kebakaran			- Saprass proteksi kebakaran belum ada di setiap lingkungan dan RT	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Kondisi perlindungan kebakaran secara umum masih tergolong kurang/rendah. ⊙ Belum ada aprass perlindungan kebakaran skala lingkungan maupun kelurahan ⊙ Sebagian jalan memiliki lebar <1,5m (jalan setapak) menyulitkan akses masuk mobil Damkar <p>Simpulan: Kondisi proteksi kebakaran belum sesuai yang diharapkan</p>
	1) Tersedia	0	0		
	2) Tidak tersedia	1.118	100%		
	b. Akses memperoleh layanan proteksi kebakaran			- Akses layanan pemadaman kebakaran masih sepenuhnya bergantung pada instansi terkait/Damkar	
	1) Terlayani	1.118	100%		
	2) tidak terlayani	0	0		
8	Legalitas lahan dan bangunan				
	a. Legalitas bangunan hunian			- ∑ total bangunan hunian dan rumah tangga yang ada 1.118 unit RT	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Kondisi legalitas bangunan hunian dan lahan bangunan secara umum masih tergolong kurang/rendah. ⊙ Banyak bangunan/RT tidak memiliki izin pendirian resmi <p>Simpulan: Kondisi legalitas bangunan hunian dan lahan di Kelurahan Banggae pada program Kotaku belum sesuai diharapkan</p>
	1) Ada IMB (unit)	566	50,6%		
	2) Non-IMB	552	49,4%		
	b. Legalitas lahan				
	1) Ada SHM/HGB	753	67,4%		
	2) tidak ada (unit)	365	32,6%		
9	Ruang Terbuka Publik (RTP)				
	a. Kepadatan penduduk (jiwa/ha)	52			<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Kelurahan Banggae sebagai ibukota kecamatan dan kabupaten, belum didukung RTP yang sesuai dengan standar jumlah dan kepadatan penduduk serta luas permukiman ⊙ Fasilitas RTP (taman maupun RTH) masih sangat terbatas <p>Simpulan: Kondisi pengelolaan</p>
	b. Jumlah fasilitas RTP			- Luas wilayah 186,8 ha	
	1) Taman kota	√		- Luas permukiman 59,93 ha	
	2) Taman bermain	√		- ∑ penduduk 4.826 jiwa.	
	3) Lapangan olah raga	√			
	4) RTH	√			

lanjutan					
	c. Kemampuan penggunaan daya listrik				
	1) 450 watt	132	11,8%	koperasi, KSM), dan lainnya. - Jenis kegiatan usaha ekonomi beraneka ragam.	© Sebagian RT masih berstatus MBR dan menggunakan daya listrik ≤ 900 watt (bahkan ada yang masih menumpang), sehingga sangat baik diberdayakan kultur kewirausahaannya untuk meningkatkan penghasilan dan kemampuan ekonominya. Simpulan: Kondisi sosial ekonomi di Kelurahan Banggae pada program Kotaku belum sesuai diharapkan.
	2) 900 watt	719	64,3%		
	3) 1300 watt	180	16,1%		
	4) ≥ 2200 watt	11	1,0%		
	5) Menumpang/ tidak punya meteran sendiri.	76	6,8%		

Keterangan: MBR : masyarakat berpenghasilan rendah

Sumber: hasil survei Agustus – September 2019; data baseline Program Kotaku

Jelaslah bahwa kondisi saat ini permukiman di Kelurahan Banggae belum sepenuhnya menggembirakan walaupun sudah dilaksanakan program Kotaku sejak Tahun 2016 sampai sekarang (Tahun 2019). Dari sejumlah determinan indikator permukiman kumuh yang dievaluasi mulai dari aspek penataan bangunan hunian, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum/bersih/baku, pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan, perlindungan kebakaran, legalitas pendirian bangunan hunian, hingga aspek sosial budaya dan sosial ekonomi, semuanya menunjukkan kondisi yang didalamnya ada yang sudah baik namun tidak sedikit pula kekurangan/ kelemahan dan masalah yang tidak/belum tertuntaskan, sehingga Kelurahan Banggae belum dapat dikatakan steril dari kondisi permukiman kumuh sampai sekarang. Kondisi kekumuhan masih dapat dijumpai pada area-area permukiman tertentu pada empat lingkungan (terutama di Copala, disamping di Pakkola, Saleppa, termasuk Battayang). Jargon bebas kumuh 100-0-100 program Kotaku belum dapat terealisasi sepenuhnya baik secara kuantitas terlebih secara kualitas di Kelurahan Banggae.

2. Evaluasi Kondisi Permukiman Saat Ini Di Lingkungan Copala

Lingkungan Copala merupakan salah satu dari empat lingkungan yang ada di Kelurahan Banggae, dengan karakteristik wilayah, permukiman, penduduk dan bangunan hunian seperti berikut.

Tabel 4.5
Karakteristik Wilayah, Permukiman, Bangunan Hunian Dan Penduduk di Lingkungan Copala Tahun 2019

No.	Karakteristik	Jumlah	Keterangan
1	Luas wilayah	126,64 ha	67,8% dari luas wilayah Kelurahan Banggae
2	Luas permukiman	20,15 ha	10,8% dari luas wilayah
3	Jumlah penduduk a. Laki-laki b. Perempuan	916 jiwa 464 jiwa 452 jiwa% dari jumlah penduduk Kelurahan Banggae
4	Rumah tangga dan keluarga a. Jumlah rumah tangga b. Jumlah kepala keluarga	203 KK 219 jiwa	18,1% dari jumlah rumah tangga di Kelurahan Banggae
5	Jumlah bangunan hunian	207 unit	17,3% dari jumlah unit bangunan hunian di Kelurahan Banggae.

Sumber: hasil olahan data sekunder, 2019

Lingkungan Copala dengan karakteristik kawasan permukiman tersebut telah memperoleh perhatian khusus dalam penanganan dari pengelola atau pelaksana Program Kotaku. Sejak Tahun 2016 sampai sekarang (Tahun 2019), lingkungan tersebut telah menerima berbagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dari Program Kotaku dalam rangka penanganan permukiman kumuhnya yang masih berlangsung saat ini.

Berdasarkan hasil survei lapangan diperoleh gambaran mengenai kondisi perkembangan saat ini permukiman kumuh (*slum area*) di Lingkungan Copala dalam pelaksanaan program Kotaku sesuai dengan

determinan kriteria dan parameter/ indikator dari Direktur Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kemen PUPR seperti diformulasikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Evaluasi Kondisi Permukiman Saat Ini di Lingkungan Copala dalam Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Banggae

No.	Determinan/ Indikator	Kuantitas		Keterangan	EVALUASI Kondisi Sekarang (2019)
		Σ	%		
1	2	3	4	5	6
1	Penataan bangunan				
	a. Keteraturan bangunan hunian			Luas wilayah : 126,64 ha	◎ Kondisi keteraturan bangunan hunian tergolong rendah. sehingga memerlukan pemajajaan lingkungan permukiman ◎ Kepadatan bangunan tergolong sangat rendah ◎ Sebagian besar luas lantai bangunan layak huni, namun tidak sedikit pula yang masih memerlukan perluasan luas lantainya sesuai standar ◎ Kesesuaian syarat teknis kondisi ALADIN tergolong rendah, sehingga banyak bangunan membutuhkan rehab. Simpulan: kondisi penataan bangunan di Copala dalam pelaksanaan program Kotaku masih jauh dari yang diharapkan.
	1) Teratur (unit)	69	34,0%	Luas permukiman : 20,15 ha	
	2) Tidak teratur	138	66,0%		
	b. Kepadatan bangunan (unit/ha)	10		Σ total bangunan : 207 unit	
	c. Kelayakan bangunan				
	1) Luas lantai (m ²)				
	(a) $\geq 7,2$ m ² /jiwa	182	87,9%		
	(b) $< 7,2$ m ² /jiwa	25	12,1%		
	2) ALADIN				
	(a) Sesuai syarat teknis (unit)	114	55,1%		
	(b) Non-syarat teknis (unit)	93	44,9%		
2	Aksesibilitas lingkungan				
	a. Syarat teknis jalan			Total panjang jaringan jalan lingkungan 4.799 m	◎ Panjang jalan lingkungan memenuhi syarat teknis tergolong sangat rendah, sehingga banyak jalan yang harus dibenahi, diperbaiki, dikonstruksi ulang ◎ Sebahagian besar jalan lingkungan mempunyai lebar $\geq 1,5$ m sehingga menunjang aksesibilitas lingkungan. Namun demikian, masih panjang jalan yang memerlukan pelebaran. ◎ Sudah banyak jalan lingkungan mengalami pengerasan dengan aspal dan rabat beton, namun tidak sedikit yang kondisi permukaannya masih berupa tanah (belum diperkeras) ◎ Panjang Jalan tanpa
	1) Sesuai (m)	1.104	23%	Jangkauan pelayanan jalan lingkungan 100%	
	2) tidak sesuai	3.695	77%		
	b. Panjang jalan dengan lebar (m)				
	1) $\geq 1,5$ m	3.278	68,3%		
	2) $< 1,5$ m	1.521	31,7%		
	c. Kondisi permukaan jalan				
	1) Pengerasan				
	(a) $\geq 1,5$ m	2.426	50,6%		
	(b) $< 1,5$ m	2.373	49,4%		
	2) Tanah				
	(a) $\geq 1,5$ m	852	17,8%		
	(b) $< 1,5$ m	3.947	82,2%		
	d. Panjang jalan dengan bangunan pelengkap				
	1) Saluran samping				
	(a) $\geq 1,5$ m	833	17,4%		
	(b) $< 1,5$ m	3.966	82,6%		
	2) Non-saluran				

	samping (m) (a) $\geq 1,5$ m (b) $< 1,5$ m	2.445 2.354	50,9% 49,1%		bangunan pelengkap khususnya saluran samping masih lebih banyak daripada yang memiliki saluran samping
<i>lanjutan</i>	e. Kualitas jalan				⊙ Panjang jalan dengan kualitas kurang baik masih jauh lebih banyak daripada yang tergolong berkualitas baik.
	1) Baik (m) 2) Kurang baik (m)	1.089 3.710	22,7% 77,3%		Simpulan: Kondisi aksesibilitas jalan lingkungan di Copala dalam pelaksanaan program Kotaku belum sesuai yang diharapkan.
3	Drainase lingkungan				
	a. Kualitas			-Panjang drainase 1.181 m	⊙ Sebagian panjang drainase yang ada berkualitas baik, namun sebagian lainnya memerlukan peningkatan kualitas
	1) Baik (m) 2) Kurang baik (m)	555 626	47,0% 53,0%	-Dibutuhkan 131 m (5%) drainase baru terhubung sistem drainase kota, dan 1.679 m (59%) untuk keseluruhan	⊙ Tidak ada pemeliharaan saluran drainase sehingga drainase menjadi kotor dan berbau, tergenang air limbah domestik atau rumah tangga.
	b. Kondisi pemeliharaan			-Kebutuhan drainase ideal 2.860 m. -Area permukiman bebas genangan air/banjir	⊙ Kebutuhan pembangunan drainase baru dan ideal masih bersifat rencana yang <i>absurd</i> .
	3) Bersih, tidak bau 4) Kotor, bau	0 1.181	0 100%		Simpulan: Kondisi drainase lingkungan di Copala dalam pelaksanaan program Kotaku belum sesuai bahkan masih jauh dari yang diharapkan.
4	Pelayanan air minum (PAM)				
	a. Akses pelayanan rumah tangga/RT			- \sum RT 207 KK	⊙ Akses pelayanan air minum (PAM) tergolong baik, namun ketercukupan kebutuhan standar tergolong rendah.
	1) Berakses 2) Tidak berakses	207 -	100% -	- \sum keluarga 219 KK	⊙ Sumber air dari sumur gali belum dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan RT atas air minum sesuai standar 60 liter/orang/hari
	b. Ketercukupan kebutuhan air minum			- Akses pelayanan air minum RT umumnya melalui sumur gali	Simpulan: Kondisi pengelolaan dan pelayanan air minum di Copala dalam pelaksanaan program Kotaku belum sesuai bahkan masih jauh dari yang diharapkan.
	1) Tercukupi sesuai standar 60 lt/org/hr 2) Tidak tercukupi	83 120	41% 59%		
5	Pengelolaan air limbah (PAL)				

	a. Akses komunal (5 KK/jamban) RT			Seluruh (100%) rumah tangga dengan kondisi saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan. Tersedia 29 unit Jamban komunal untuk 145 KK. Dibutuhkan tambahan 12 unit jamban komunal.	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Kondisi akses PAL maupun pemenuhan syarat teknis IPAL tergolong baik. Namun demikian masih ada sebagian kecil RT yang memerlukan perhatian/penuntasan kebutuhannya atas IPAL komunal dan individu ⊙ Umumnya SPAL tersambung ke saluran drainase yang berdampak pada kondisi drainase yang buruk, tergenang air, kotor, berbau. <p>Simpulan: Kondisi PAL di Lingkungan Copala dalam pelaksanaan program Kotaku belum sesuai yang diharapkan.</p>	
	1) Berakses 2) Tidak berakses	145 58	71% 9,3%			
<i>lanjutan</i>	b. Pemenuhan syarat teknis IPAL					
	1) Kloset leher angsa tersambung <i>septic tank</i> 2) Lainnya	170 33	84% 16%			
6	Pengelolaan Persampahan					
	a. Kepemilikan RT atas sarana prasarana pengelolaan sampah yang baik dan terpelihara			- ∑ rumah tangga (RT) yang ada sebanyak 207 KK - ∑ keluarga 219 KK	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Kondisi pengelolaan persampahan tergolong rendah. ⊙ Saprass pengelolaan sampah dan kebersihan permukiman dan lingkungan masih sangat kurang ⊙ Perilaku membuang sampah di sembarang tempat dan membakar sampah masih menjadi kebiasaan ⊙ Tidak ada pengelolaan dan pengangkutan sampah di Copala <p>Simpulan: Kondisi pengelolaan sampah di Copala dalam pelaksanaan program Kotaku belum sesuai bahkan masih jauh dari yang diharapkan.</p>	
	1) Tersedia 2) Tidak tersedia	0 207	100%			
	b. Akses dan frekuensi pelayanan angkutan sampah domestik (RT) dari TPS ke TPA					
	1) ≤ 2xseminggu 2) tidak terlayani	0 207	100%			
7	Proteksi kebakaran					
	a. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan kebakaran			- Sarana prasarana perlindungan kebakaran skala lingkungan belum ada	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Kondisi perlindungan kebakaran tergolong rendah. ⊙ Belum ada sarana prasarana perlindungan kebakaran skala lingkungan ⊙ Sebagian jalan masih jalan setapak menyulitkan akses masuk mobil Damkar <p>Simpulan: Kondisi proteksi kebakaran di Copala dalam pelaksanaan program Kotaku belum sesuai bahkan masih jauh dari yang</p>	
	1) Tersedia 2) Tidak tersedia	0 207	0 100%			
	b. Akses memperoleh layanan proteksi kebakaran			- Akses pelayanan pemadaman kebakaran masih bergantung pada instansi		
	1) Terlayani 2) tidak terlayani	207 0	100% 0			

				terkait/Damkar	diharapkan.
8	Legalitas lahan dan bangunan				
	a. Legalitas bangunan hunian			- Total bangunan hunian dan rumah tangga yang ada 207 unit RT	◎ Kondisi legalitas bangunan hunian dan lahan bangunan tergolong sangat rendah. ◎ Jumlah bangunan/RT yang tidak memiliki izin pendirian bangunan masih jauh lebih banyak daripada yang memiliki. Simpulan: program Kotaku tidak optimal mengatasi masalah legalitas bangunan hunian dan lahan.
<i>tanjawan</i>	1) Ada IMB (unit)	22	11%		
	2) Non-IMB	185	89%		
	b. Legalitas lahan				
	1) Ada SHM/HGB	48	24%		
	2) tidak ada (unit)	159	76%		
9	Ruang Terbuka Publik (RTP)				
	a. Kepadatan penduduk (jiwa/ha)	10			
	b. Jumlah fasilitas RTP			- Luas wilayah 126,64 ha - Luas permukiman 20,15ha - \sum penduduk 916 jiwa.	◎ Belum ada RTP di Copala, kecuali hanya ruang terbuka berupa kebun, bantaran sungai, perbukitan, semak belukar. Simpulan: Kondisi pengelolaan RTP di Copala dalam pelaksanaan program Kotaku belum sesuai yang diharapkan.
	1) Taman kota	-			
	2) Taman bermain	-			
	3) Lapangan olah raga	√			
	4) RTH	√			
	5) Lainnya				
10	Kondisi Sosial Budaya				
	a. Akses pelayanan fasilitas pendidikan			- Kepadatan penduduk 10 jiwa/ha luas wilayah/permukiman - \sum penduduk 916 jiwa - \sum total rumah tangga 207 RT - \sum sekolah yang ada di Kelurahan Banggae :TK,SD, - \sum fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kelurahan Banggae:Puskesmas/Pustu,dukun,bidan/mantra.	◎ Akses fasilitas pendidikan masih terbatas ◎ Mayoritas penduduk/RT memanfaatkan pelayanan di Puskesmas/Pustu untuk berobat. ◎ Kegiatan sosialisasi pendidikan, kesehatan, PHBS serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masih sangat kurang. ◎ Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Mandar cenderung semakin banyak bergeser yang menyebabkan ketidakjelasan <i>position standing</i> dan <i>mindset</i> penduduk terutama kalangan generasi muda terhadap jati diri asli dan kebudayaannya terutama kaitannya dengan pemeliharaan lingkungan dan permukiman ◎ Belum ada kegiatan revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Mandar.
	1) \sum penduduk bersekolah dalam kelurahan/kecamatan yang sama (jiwa)	80	39,4%		
	2) \sum bersekolah di luar kecamatan	24	11,8%		
	3) \sum bersekolah di kota lain	0	0%		
	4) \sum penduduk tidak sekolah	0	0%		
	5) \sum RT tidak memiliki anak/anggota keluarga usia sekolah/wajib belajar.	99	48,8%		
	b. Akses pelayanan fasilitas kesehatan				
	1) Rumah sakit	0			
	2) Poliklinik	0			
	3) Puskesmas/ Pustu	203	98,1%		
	4) Dukun tradisional	0			
	5) Bidan/ mantri	0			

	6) Tidak pernah.	4	1,9%		Simpulan: Kondisi sosial budaya di Lingkungan Copala dalam pelaksanaan program Kotaku belum sesuai bahkan masih jauh dari yang diharapkan.
<i>lanjutan</i>					
11	Kondisi Sosial Ekonomi				
	a. Pola pencaharian penduduk/RT			- Σ penduduk 4.826 jiwa - Total rumah tangga 203 RT - Σ keluarga 219 KK - Fasilitas ekonomi yang ada sangat terbatas	◎ Kemiskinan masih menjadi ciri dominan penduduk atau rumah tangga di Lingkungan Copala ◎ Jumlah penduduk atau rumah tangga yang banyak bekerja pada bidang perdagangan dan jasa memerlukan pemberdayaan <i>livelihood</i> ◎ Sebagian besar RT masih berstatus MBR atau miskin yang memerlukan pemberdayaan sosial ekonomi. Simpulan: Kondisi sosial ekonomi penduduk di Lingkungan Copala dalam pelaksanaan program Kotaku belum sesuai bahkan masih jauh dari yang diharapkan.
	1) Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan	23	11,3%		
	2) Perikanan	9	4,4%		
	3) Konstruksi	21	10,3%		
	4) Perdagangan/jasa	122	60,1%		
	5) Pegawai pemerintah.	28	13,8%		
	b. Status Penghasilan				
	1) MBR	167	80,7%		
	2) Non-MBR.	36	17,7%		
	c. Daya listrik				
	1) 450 watt	46	22,7%		
	2) 900 watt	85	41,9%		
	3) 1300 watt	8	3,9%		
	4) ≥ 2200 watt	0			
	5) Menumpang/ tidak punya meteran sendiri.	64	31,5%		

Keterangan: MBR : masyarakat berpenghasilan rendah

Sumber: hasil survei Agustus – September 2019; data baseline Program Kotaku

Jelaslah bahwa kondisi perkembangan permukiman hingga saat ini dalam pelaksanaan program Kotaku saat ini di **Lingkungan Copala** masih menunjukkan kondisi yang tidak/kurang menggembirakan dalam berbagai aspek atau indikator baik dalam hal aspek penataan bangunan hunian, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum/bersih/baku, pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan, perlindungan kebakaran, legalitas pendirian bangunan hunian, maupun aspek sosial budaya dan sosial ekonomi. Semua aspek atau indikator tersebut menunjukkan kondisi tidak/kurang optimal realisasi pelaksanaannya, dan hal ini juga berarti bahwa pengelola program Kotaku

belum menunjukkan kinerja program yang efektif/optimal di dalam mewujudkan kondisi permukiman 100-0-100.

3. Penilaian Informan/Narasumber Tentang Kondisi Permukiman Saat Ini di Kelurahan Banggae dalam Pelaksanaan Program Kotaku

Sehubungan dengan kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae pada umumnya dan di Lingkungan Copala khususnya dalam pelaksanaan program Kotaku, dilakukan wawancara dengan sejumlah informan atau narasumber mulai dari kelompok penerima manfaat (kalangan warga masyarakat) di Kelurahan Banggae, unsur pengelola/ pelaksana program Kotaku di tingkat lingkungan dan kelurahan (relawan, KSM, TIPP, BKM/LKM, Lurah, Kepala Lingkungan), unsur Pemerintah Daerah tingkat kabupaten (Bappeda, Bupati) hingga pengamat, pakar, pemerhati, praktisi serta kelompok penekan, sebagaimana dipaparkan pada uraian berikut.

a. Penilaian kelompok penerima manfaat (KPM)

Warga masyarakat di Kelurahan Banggae khususnya pada empat lingkungan yang ada secara umum adalah merupakan kelompok atau bagian dari kelompok penerima manfaat (KPM) yang menjadi target sasaran pelaksanaan program Kotaku. Sehubungan dengan kondisi permukiman saat ini dalam pelaksanaan atau pasca implementasi program Kotaku, kalangan kelompok penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Banggae memberikan penilaian yang beragam terhadap berbagai aspek kondisional lingkungan permukiman saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara, kalangan KPM merasa puas dan senang melihat kondisi permukiman di lingkungan atau kelurahannya

saat ini, namun ada pula yang menyatakan kurang puas dengan alasan bahwa program-program yang sudah direncanakan belum dikerjakan/direalisasikan dengan merata. Diantara KPM tersebut menilai penataan bangunan hunian atau rumah tinggalnya saat ini semakin lebih baik, namun yang lainnya menyatakan rumah tinggalnya belum pernah tersentuh bantuan, perbaikan, pemugaran atau penataan (sumber: diolah dari data primer hasil wawancara tanggal 01-09-2019).

Terkait dengan aksesibilitas jalan lingkungan, kebanyakan KPM sepakat mengakui adanya kegiatan perbaikan dan pembangunan jalan yang dilakukan oleh program Kotaku dan mereka merasa senang atas adanya perubahan yang dikerjakan oleh program Kotaku dalam pembangunan jalan. Demikian pula halnya dengan drainase lingkungan, umumnya mereka merasa senang dengan adanya perbaikan, pemugaran dan pembangunan saluran drainase di lingkungan sekitarnya karena sudah tidak terganggu genangan air dan ancaman banjir. Umumnya mereka juga merasa senang dengan kondisi pelayanan air minum/bersih/baku-nya saat ini. (Hasil wawancara 01-09-2019).

Menarik dicermati bahwa ada sebahagian KPM menilai pengelolaan air limbah rumah tangga di lingkungannya saat ini masih kurang atau belum cukup, namun sebagian yang lainnya justeru menilai kondisi PAL di lingkungan permukimannya semakin baik. Demikian pula mengenai kondisi pengelolaan persampahan rumah tangga yang umumnya KPM menilai masih kurang memuaskan. Terkait dengan

kondisi perlindungan kebakaran, kebanyakan KPM menilai masih ada masalah terutama kondisi rumah yang jalannya sempit dan tidak ada akses jalanan masuk mobil ke dalam jalan setapak. Diantara mereka juga mengetahui bahwa bilamana terjadi bencana atau peristiwa kebakaran maka pihak yang harus dihubungi dan dimintai bantuan adalah Badan Penanggulangan Bencana (BPB) bagian pemadam kebakaran, dan kalangan KPM tersebut mengakui memiliki akses informasi nomor telepon pihak pemadam kebakaran bila suatu saat terjadi kebakaran.

Terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya saat ini, umumnya KPM sepakat dan mengakui bahwa kehidupan ekonomi keluarga atau rumah tangganya masih kurang atau belum baik. Kebanyakan warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, baik ibu rumah tangga maupun kepala keluarga menyatakan belum pernah dilibatkan ataupun terlibat menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan selama pelaksanaan program Kotaku di lingkungannya. Kebanyakan dari mereka menyatakan tidak mengalami peningkatan pendapatan dan kesulitan menabung, tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah, tidak pernah ambil kredit ataupun memanfaatkan bantuan dana bergulir. Namun demikian, mereka menyatakan tidak terlalu kesulitan menyekolahkan anak-anak atau anggota keluarganya ataupun berobat di puskesmas karena sudah mendapat bantuan seperti dana BOS, KIP, PKH, kartu KIS (sumber: diolah dari data primer hasil wawancara tanggal 02-09-2019).

Uraian penilaian KPM tersebut mengindikasikan bahwa pasca pelaksanaan program Kotaku, kondisi permukiman di Kelurahan Banggae secara umum saat ini belum sepenuhnya menggembirakan dalam berbagai aspek baik aspek sarana prasarana fisik dasar maupun sosial budaya dan ekonomi. Walaupun pengelola program Kotaku telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik namun belum merata di setiap lingkungan, bahkan masih terkesan timpang. Oleh karena itu kiranya wajar jika kalangan KPM (warga masyarakat) memberikan penilaian yang berbeda-beda.

b. Penilaian unsur pengelola/ pelaksana program Kotaku tingkat lingkungan dan kelurahan

1) Penilaian Relawan

Salah seorang relawan bernama Nursiah yang terlibat dalam kegiatan pendataan pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae mengemukakan bahwa:

Kondisi lingkungan permukiman yang telah disentuh oleh Program Kotaku sudah lebih baik namun yang belum disentuh masih harus dibenahi seperti drainase yang masih tergenang airnya. Kondisi bangunan hunian yang telah dikena rehab rumah sudah lebih baik namun masih ada rumah yang belum disentuh. Jalan di Kelurahan Banggae sudah semakin membaik.

Kondisi drainase saat ini masih banyak tergenang air, namun yang sudah disentuh program Kotaku sudah baik. Pelayanan air minum saat ini masih bagus, namun pengelolaan air limbah masih banyak yang tergenang karena tidak mempunyai SPAL. Pengelolaan sampah yang menjadi masalah adalah kurangnya armada pengangkut sampah. Perlindungan kebakaran rumah tangga tidak ada, hanya berharap pemadam kebakaran. (hasil wawancara tanggal 04-09-2019).

Kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga dan masyarakat saat ini di Kelurahan Banggae belum sepenuhnya membaik. Masih banyak warga kesulitan mendapatkan sumber dana yang murah dan cepat untuk modal usaha karena bantuan dana bergulir masih relatif

terbatas. Kalau menyangkut biaya pendidikan, sudah banyak keluarga atau rumah tangga yang tidak terlalu kesulitan karena sekarang sudah banyak program pemerintah seperti BOS, KIP, PKH yang kesemuanya menangani semua biaya sekolah. Demikian juga dalam hal pemeliharaan kesehatan atau biaya berobat di puskesmas, banyak warga masyarakat tidak lagi kesulitan karena sudah ada BPJS.

Kalau menyangkut perilaku berbudaya, walaupun sebagian warga sudah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, namun masih ada saja sebagian orang yang belum sadar atau tidak memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungan permukimannya. Mental dan perilaku kebiasaannya mereka yang buruk seperti membuang sampah di sembarang tempat masih sulit diubah atau dihilangkan sama sekali. Mereka bersikap acuh dan sibuk dengan urusan kepentingannya sendiri serta tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan warga. (hasil wawancara tanggal 25-09-2019).

Pandangan relawan tersebut mengindikasikan bahwa dari sekian banyak program kegiatan (*action plan*) yang direncanakan, belum seluruhnya direalisasikan pelaksanaannya. Permasalahan-permasalahan permukiman dan lingkungan yang sudah disentuh atau diintervensi oleh program dengan kegiatan pembangunan (perbaikan, pemagaran, penataan) infrastruktur atau prasarana dan sarana fisik dasar, umumnya sudah baik dan dapat diatasi. Sedangkan permasalahan lainnya yang belum ditangani oleh program Kotaku yang sifatnya masih perencanaan dan belum ada realisasi sampai sekarang, itulah yang masih tetap menjadi persoalan penilaian yang memerlukan penuntasan intervensi.

2) Penilaian KSM, TIPP, BKM/LKM

(a) Penilaian KSM

Unsur pelaksana kegiatan yang berperan langsung dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khususnya KSM

Assamaturuang, dan salah seorang dari KSM tersebut bernama Rosdiana memberikan penilaiannya dengan mengemukakan bahwa:

Saya senang melihat perkembangan yang ada setelah program Kotaku masuk lingkungan di wilayah kumuh terlihat bersih. Kondisi bangunan hunian saat ini sudah memadai. Jalanan sudah lumayan bagus, drainase juga sudah bagus, demikian pula pelayanan air minum sudah cukup bagus. Namun untuk pengelolaan air limbah rumah tangga, masih ada yang tergenang karena belum ada saluran pembuangan. Untuk pengelolaan sampah, masih banyak warga yang membakar sampah dan membuang di kebun (kesadaran kurang) dan tidak ada armada. Demikian juga tidak ada perlindungan kebakaran (hasil wawancara tanggal 06-09-2019).

Menyangkut kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga dan masyarakat saat ini, belum semua atau hanya sebagian kecil yang sudah menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan dari program Kotaku. Kalangan rumah tangga ada yang mengalami peningkatan pendapatan namun juga yang tidak, dan juga ada yang sudah bisa menyisakan penghasilannya untuk ditabung. Mengenai sumber modal, ada sejumlah warga atau rumah tangga yang memanfaatkan bantuan dana bergulir, namun semuanya juga belum lancar dalam mengembalikan bantuan tersebut.

Menyangkut pendidikan, bisa dikatakan banyak keluarga atau rumah tangga sudah tidak kesulitan menyekolahkan anak-anaknya atau anggota keluarganya karena sudah ada bantuan pertolongan dari pemerintah melalui BOS, KIP, PKH. Demikian pula untuk biaya kesehatan, banyak warga tidak kesulitan berobat di rumah sakit atau Puskesmas karena sudah ada BPJS. Kalau menyangkut akses sumber penerangan, saya kira semua keluarga atau rumah tangga sudah punya listrik masing-masing.

Menyangkut perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), tidak semua warga memiliki pengetahuan dan kesadaran yang baik mengenai pentingnya mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan permukiman. (hasil wawancara 27-09-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan KSM sebagai salah satu unsur pelaksana program Kotaku itu sendiri menilai kondisi permukiman di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah

masalah yang tidak/belum tertuntaskan. Walaupun merasa senang dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana (saprass) fisik dasar seperti jalan lingkungan, drainase dan pelayanan air minum, namun kondisi aspek-aspek lainnya seperti SPAL, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran masih dinilai bermasalah. Demikian pula dalam hal kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang dinilai masih menghadapi tantangan permasalahan dan belum sepenuhnya menggembirakan.

(b) Penilaian TIPP

Unsur pelaksana lainnya dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae adalah TIPP, dan salah seorang dari TIPP tersebut bernama Fatimah memberikan penilaiannya dengan mengemukakan bahwa:

Kondisi permukiman saat ini masih terbilang kumuh, kecuali yang diintervensi oleh program Kotaku. Bangunan hunian saat ini masih banyak rumah tidak layak huni. Akses jalan di Kel. Banggae sudah memadai. Kondisi drainase lingkungan masih ada yang rusak dan tidak terpelihara khususnya di wilayah perkotaan misalnya Lingk. Saleppa, Pakkola, dan apabila musim hujan masih terjadi genangan air. Kondisi pelayanan air minum/bersih/baku saat ini belum terlayani karena masih banyak warga yang kekurangan air apalagi saat ini musim kemarau. Masih banyak air tergenang di sekitar rumah warga karena tidak adanya saluran air limbah, khususnya di wilayah Pakkola dan Saleppa. Sarana prasarana persampahan saat ini belum memadai karena pengangkutan sampah dari TPS ke TPA tidak lancar, utamanya di wilayah pasar. Kondisi perlindungan kebakaran belum ada, yang ada hanya pemadam kebakaran, dan itupun jauh dari permukiman. (hasil wawancara tanggal 08-09-2019).

Kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga dan masyarakat saat ini belum sepenuhnya membaik. Belum semua warga atau rumah tangga menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan karena kurangnya program dari pemerintah. Pendapatan setiap rumah tangga belum

meningkat dan masih bervariasi. Kalau menyangkut menabung, saya kira tergantung pendapatan masyarakat. Untuk kebutuhan sumber modal dan keuangan bagi kegiatan usaha, sudah ada pinjaman dana bergulir, koperasi, KUR dan lainnya sehingga warga tidak kesulitan untuk mendapatkan modal. Untuk urusan pendidikan atau sekolah, banyak keluarga atau rumah tangga sudah tidak kesulitan menyekolahkan anak-anaknya karena sudah ada program pemerintah yaitu dana BOS dan KIP. Kalau urusan berobat di rumah sakit atau Puskesmas, saya kira banyak keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan karena ada program pemerintah khususnya warga miskin yaitu BPJS. Begitu juga urusan listrik sudah tidak ada kesulitan bagi mereka. Kalau dari segi perilaku, saya kira sudah banyak warga memiliki kesadaran dan mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan permukiman (hasil wawancara tanggal 29-09-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan TIPP yang juga sebagai salah satu unsur pelaksana program Kotaku itu sendiri menilai kondisi permukiman di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan program masih kumuh, terkecuali yang sudah ditangani atau diintervensi oleh program Kotaku. Hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi permukiman kumuh saat ini masih timpang, yakni ada yang sudah baik sapras-nya namun ada pula yang masih kumuh karena belum ada intervensi.

Kriteria fisik dan indikator permukiman kumuh yang dinilai sudah baik dan memadai adalah aksesibilitas jalan lingkungan, sedangkan drainase lingkungan, pelayanan air minum, pengelolaan sampah serta perlindungan kebakaran masih dinilai bermasalah. Untuk kriteria non-fisik, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat saat ini dinilai belum sepenuhnya membaik. Pelibatan warga masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan *livelihood* masih sangat kurang, dan status MBR banyak rumah tangga masih tetap

tidak berubah walaupun sudah ada bantuan modal usaha melalui dana bergulir. Sedangkan untuk aspek lainnya seperti akses pendidikan dan kesehatan dinilai tidak ada masalah karena sudah ada program bantuan dari pemerintah pusat melalui BOS, KIP, BPJS dan lainnya. Demikian pula halnya akses sumber daya listrik dinilai tidak ada masalah, termasuk adanya kecenderungan kalangan warga yang mengalami perubahan mental dan perilaku terhadap lingkungan permukimannya.

(c) Penilaian BKM/LKM

Unsur pelaksana program Kotaku lainnya di Kelurahan Banggae adalah badan atau lembaga keswadayaan masyarakat (BKM/LKM), dan salah seorang dari lembaga tersebut bernama Abd. Azis memberikan penilaiannya bahwa:

Dengan melihat kondisi lingkungan yang ada, kami BKM sangat senang dengan adanya program Kotaku, dimana program tersebut menangani kumuh yang ada di kelurahan kami. Kondisi bangunan saat ini cukup baik apalagi dengan masuknya program bedah rumah di wilayah kumuh. Akses jalan saat ini cukup bagus dengan adanya program Kotaku namun belum seluruhnya diperbaiki. Kondisi drainase lingkungan saat ini Alhamdulillah cukup bagus terutama di kawasan kumuh. Akses air minum cukup bagus. Kondisi pengelolaan SPAL masih ada warga yang tidak mempunyai akses SPAL. Dari segi persampahan, akses sarana prasarana persampahan masih kurang. Kondisi perlindungan kebakaran belum ada, utamanya di kawasan kumuh. (hasil wawancara tanggal 07-09-2019).

Dari segi sosial ekonomi, belum semua warga menerima pelatihan keterampilan usaha dari program Kotaku. Pendapatan setiap rumah tangga bervariasi. Banyak rumah tangga belum bisa menabung karena kebutuhannya banyak. Banyak rumah tangga masih kesulitan memenuhi kebutuhan sumber modal dan keuangan apalagi yang anggotanya banyak. Kalau masalah pendidikan, alhamdulillah karena ada bantuan pemerintah melalui dana BOS. Banyak keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan keuangan untuk biaya sekolah anak-anaknya atau anggota keluarganya.

Banyak keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan berobat di rumah sakit atau puskesmas karena ada BPJS, tapi masih ada warga yang kurang mampu belum punya BPJS. Alhamdulillah rata-rata keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber energi listrik-nya karena sudah punya listrik.

Dari segi sosial budaya, banyak keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin tahu dan sadar akan pentingnya mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan permukiman. Kalau mengenai motivasi dan partisipasi, ada sebagian warga masyarakat yang sudah mau terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, tapi ada juga yang tidak peduli (hasil wawancara tanggal 28-09-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan BKM/LKM sebagai bagian integral unsur pelaksana program Kotaku, merasa senang melihat perkembangan dan kemajuan kondisi permukiman di Kelurahan Banggae terutama dalam penataan bangunan, akses jalan, drainase, pelayanan air minum. Namun yang dianggap belum menyenangkan adalah kondisi pengelolaan air limbah (SPAL) dan persampahan, termasuk perlindungan kebakaran. Dalam penilaian BKM/BLM, kondisi sosial ekonomi warga masyarakat belum seluruhnya baik dan menggembirakan/menguntungkan. Demikian pula dalam hal sosial budaya, walaupun sudah ada kecenderungan kalangan warga masyarakat mengalami perubahan *mindset*, mental dan perilaku terhadap kebersihan dan kualitas kesehatan lingkungan dan permukimannya, namun sebagian warga lainnya masih tetap minim kepedulian, statusquo dan pragmatis serta oportunis.

Keseluruhan uraian mengenai penilaian ketiga unsur pelaksana program Kotaku menunjukkan bahwa KSM, TIPP dan BKM/LKM

belum sepenuhnya memiliki pandangan atau penilaian yang samamengenai kondisi permukiman saat ini pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae. Mereka memiliki persamaan dan perbedaan pendapat atau penilaian terhadap kondisi fisik lingkungan (infrastruktur, sarana prasarana fisik dasar). Namun untuk kondisi sosial ekonomi dan budaya, mereka memiliki kesamaan penilaian.

3) Penilaian Lurah dan Staf

(1) Penilaian Lurah

Lurah berperan penting sebagai penanggungjawab pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Banggae Muhammad Saupa Ajad S.Ag.,M.Pd, diperoleh gambaran mengenai penilaiannya tentang kondisi permukiman saat ini di wilayah kelurahannya sebagaimana dikemukakan bahwa:

Mengenai masalah kondisi permukiman kumuh khususnya di Lingkungan Copala, pada Tahun 2017 program Kotaku sudah mengintervensi pembangunan mulai dari pembangunan drainasenya, juga jalan. Alhamdulillah program ini berhasil dan tepat sasaran, meskipun masih perlu dilanjutkan. Tapi sasaran keseluruhan sudah bagus.

Kondisi bangunan hunian saat ini sudah baik dan menggembirakan terutama drainase dan jalan. Yang masih kurang dan menjadi masalah yakni masih ada sekelompok orang atau masyarakat yang kurang sadar mengenai kebersihan lingkungan. Kondisi aksesibilitas jalan dan drainase lingkungan serta pengelolaan air limbah saat ini sudah bagus tinggal mau dilanjutkan programnya seperti pembangunan jalan dan WC. Kalau pelayanan air minum/bersih/baku saat ini kondisinya masih sangat kurang. (hasil wawancara tanggal 10-09-2019).

Untuk pengelolaan persampahan saat ini, kebanyakan warga masyarakat pada dasarnya sudah sadar akan sampah, namun tempat atau sarana penampungan sampah masih sangat kurang.

Untuk perlindungan kebakaran bagi masyarakat saat ini masih bisa diatasi. Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sangat beragam atau bervariasi mulai dari yang tidak mampu sampai kelas menengah. Kondisi sosial budaya masyarakat sangat heterogen dan terdapat didalam sosiokulturalnya. Mereka sangat menghargai adat kebiasaan dan budi pekerti (hasil wawancara tanggal 07-10-2019).

Uraian pendapat atau penilaian Lurah tersebut menunjukkan bahwa dalam hal kriteria fisik, ada tiga indikator permukiman kumuh yang sudah mengalami perkembangan dan kondisinya baik yakni jalan lingkungan, drainase dan pengelolaan air limbah. Sedangkan indikator lainnya yakni pelayanan air minum, pengelolaan sampah, termasuk perlindungan kebakaran, kondisinya belum menggembirakan/ menguntungkan. Namun demikian, kelanjutan program masih sangat diharapkan baik dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana fisik dasar lingkungan maupun untuk menuntaskan rencana kegiatan yang belum terealisasi. Terkait kriteria non-fisik, kondisi sosial ekonomi warga masyarakat masih tetap ada kesenjangan. Sedangkan kondisi sosial budaya masih tetap dicirikan oleh kepatuhan kalangan warga masyarakat pada adat kebiasaan dan nilai-nilai moralitas. Yang masih menjadi permasalahan adalah *mindset*, kesadaran, sikap mental dan perilaku sejumlah warga yang belum sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya dalam berkebersihan lingkungan.

(2) Penilaian Staf Kantor Kelurahan

Kegiatan wawancara bukan hanya dilakukan kepada Lurah Banggae namun juga terhadap beberapa orang staf pemerintah kelurahan yang juga bagian dari unsur pelaksana program dalam rangka memperoleh tambahan informasi yang lebih jelas mengenai kondisi permukiman dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh gambaran bahwa kalangan staf pemerintah kelurahan cenderung mempunyai pandangan atau penilaian yang berbeda tentang kondisi permukiman saat ini di wilayah kelurahannya.

Diantara staf kelurahan berpendapat bahwa kondisi permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan saat ini di Kelurahan Banggae termasuk di Lingkungan Copala setelah program Kotaku dilaksanakan cukup memadai. Namun staf lainnya di pemerintahan kelurahan justru menilai kondisi permukiman pasca program Kotaku tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Terkait dengan kondisi bangunan hunian, diantara staf kelurahan berpendapat bahwa sebagian besar rumah penduduk telah diperbaiki dengan adanya bedah rumah walaupun masih ada sebagian kecil rumah penduduk perlu dibenahi/ diperbaiki. Sedangkan staf yang lainnya menilai ada perubahan bagi bangunan hunian atau rumah penduduk yang mendapat sentuhan program Kotaku, dan masih perlu ditambah jumlah penerima bantuan bedah rumah. (diolah dari hasil wawancara tanggal 10-09-2019)

Terkait dengan aksesibilitas jalan lingkungan, semua staf kelurahan sepakat bahwa kondisi akses jalan transportasi di Kelurahan Banggae pasca program Kotaku sudah baik dan tetap kondusif, walaupun pengelolaan lahan masih kurang serta kuantitas dan kualitas jalan lingkungan masih perlu ditingkatkan termasuk peningkatan jalan setapak (lorong). Dalam hal drainase lingkungan, semua staf kelurahan juga sepakat mengenai adanya perbaikan dan peningkatan pembangunan, namun masih perlu ada perbaikan tambahan dan peningkatan lagi.

Terkait pelayanan air minum, kalangan staf kelurahan menilai bahwa kondisi pasokan air minum/bersih cukup memadai dan sebahagian masyarakat sudah dapat menikmatinya, sementara staf yang lainnya menilai bahwa masih banyak warga yang belum terlayani air minum sesuai standar. Namun demikian, mereka sepakat bahwa pembagian pasokan air minum tersebut belum merata dan sebagian masyarakat tidak menikmatinya atau belum terlayani sesuai standar sehingga masih perlu ditingkatkan pelayanannya.

Terkait dengan pengelolaan air limbah (PAL) rumah tangga dan permukiman, kalangan staf kelurahan menilai sudah baik karena sudah ada perbaikan sebagian tanggul walaupun masih ada sungai yang belum dibuatkan tanggul sehingga sampah yang ada dipinggirnya jatuh ke dalam sungai. Sedangkan staf yang lainnya

menyatakan bahwa kondisi PAL tersebut belum menggembirakan dan masih perlu peningkatan sosialisasi dan penyadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan belum memadai. Dalam hal kondisi pengelolaan sampah, semua staf sepakat masih kurang sebab sebagian masyarakat masih membuang sampah di pinggir sungai, sehingga diperlukan ketersediaan armada pengangkut sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat. Demikian pula mengenai soal perlindungan kebakaran, kalangan staf kelurahan menilai masih kurang, dan juga menyatakan bahwa sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah sudah mendapat bansos berupa rastra, namun pembagiannya masih kurang dan tidak merata dan sebagian lagi mengeluh.

Umumnya staf kelurahan menilai kondisi sosial ekonomi warga masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku masih kurang menggembirakan, bahkan kondisinya masih stagnan sama seperti tahun-tahun yang lalu, dan oleh karena itu menurut mereka perlu dibuka atau dikembangkan ruang-ruang atau sarana untuk meningkatkan kuantitas ekonomi penduduk. Terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat saat ini, diantara staf kelurahan berbeda pandangan yakni ada yang menilai sudah lumayan baik, namun yang lainnya justru menyatakan masih belum menggembirakan. (hasil olahan data primer wawancara tanggal 11-09-2019).

4) Penilaian Kepala Lingkungan

Sehubungan dengan kondisi permukiman di setiap lingkungan, khususnya di Lingkungan Copala yang telah ditetapkan sebagai lokasi kawasan kumuh berat berdasarkan data baseline 100-0-100 program Kotaku di Kelurahan Banggae, dari hasil wawancara Kepala Lingkungan Copala A Rahim memberikan penilaiannya bahwa:

Kondisi permukiman secara umum di Lingkungan Copala belum memadai. Masih ada 36% bangunan hunian tidak layak huni. Aksesibilitas lingkungan masih kurang. Kondisi drainase lingkungan saat ini sudah baik. Kondisi pelayanan air minum/bersih/baku saat ini masih sangat minim. Kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga saat ini hanya 15%. Kondisi pengelolaan persampahan saat ini secara langsung tidak ada. Kondisi perlindungan kebakaran bagi warga saat ini tidak ada.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini memuaskan, namun kondisi sosial budaya kurang karena masih banyak masyarakat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari daripada mengikuti pelatihan-pelatihan tentang sosial budaya, apalagi masih ada sebagian kecil masyarakat tidak mengerti apa itu budaya. Singkatnya bahwa kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat saat ini di Lingkungan Copala pasca program Kotaku sejalan dengan apa yang dikehendaki masyarakat itu sendiri. (hasil wawancara tanggal 12-09-2019).

Uraian pendapat Kepala Lingkungan tersebut mengisyaratkan bahwa walaupun program Kotaku sudah diimplementasikan di Kelurahan Banggae, namun Lingkungan Copala yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan kumuh oleh SK Bupati dan tergolong kumuh berat berdasarkan hasil pendataan baseline 100-0-100 program Kotaku, masih tetap menghadapi masalah kumuh sampai sekarang. Capaian kriteria fisik terutama indikator kondisi penataan bangunan, aksesibilitas jalan lingkungan, PAL dan PAM semuanya masih sangat rendah dan bermasalah, bahkan pengelolaan sampah dan perlindungan kebakaran belum ada. Kecuali indikator drainase lingkungan yang

dinilai kondisinya sudah cukup baik dengan adanya sejumlah perbaikan, rehabilitas dan pemagaran maupun pembangunan baru.

Untuk kriteria non-fisik, kondisi sosial ekonomi dianggap sudah lebih baik, namun kondisi sosial budaya masyarakat belum sepenuhnya mengembirakan atau masih bermasalah.

Keseluruhan uraian mengenai penilaian unsur pelaksana program Kotaku di tingkat kelurahan tersebut menunjukkan bahwa antara Lurah, staf kelurahan dan kepala lingkungan, masih cenderung memiliki perbedaan-perbedaan disamping persamaan-persamaan pandangan atau penilaian tertentu terhadap kondisi terkini sejumlah kriteria fisik dan non-fisik serta indikator lingkungan, sosial ekonomi dan budaya. Namun terlepas dari semua itu, satu hal yang patut digarisbawahi dari penilaian mereka yang beragam tersebut mengisyaratkan dengan jelas adanya “ketidaktuntasan, ketidakmerataan, disparitas, ketimpangan atau kesenjangan” penanganan masalah fisik dan non-fisik yang dihadapi oleh lingkungan permukiman kumuh dan penduduknya, sehingga program Kotaku masih sangat dibutuhkan kelanjutan realisasi pelaksanaannya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang benar-benar steril dari kondisi kumuh (*freelsum area condition*).

c. Penilaian unsur pengelola/ pelaksana program di tingkat kabupaten

Di tingkat kabupaten, Kepala Daerah (khususnya Bupati) dan instansi terkait khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki status dan peran sebagai nahkoda dan

penanggungjawab tertinggi dalam pelaksanaan program Kotaku di tingkat daerah kabupaten, sehingga dipandang perlu diketahui atau diperoleh informasi lebih jelas mengenai kondisi permukiman di daerahnya khususnya di Kelurahan Banggae.

1) Penilaian Kepala Daerah

Bupati Majene sebagai Kepala Daerah merupakan nahkoda, ujung tombak serta pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Majene dan Kecamatan Banggae pada umumnya dan di Kelurahan Banggae khususnya, yang berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa :

Program Kotaku salah satu program pusat dalam rangka penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Majene. Khusus di Kecamatan Banggae dengan luasan kumuh 21,49 ha sudah hampir tuntas dan yang tersisa hanya pada Kelurahan Rangas. Secara keseluruhan dengan adanya program Kotaku, penanganan kumuh dengan 7 indikator kumuh mampu terselesaikan, dan khusus Kelurahan Banggae sejak Tahun 2017 sudah tidak masuk dalam kawasan kumuh karena dari 7 indikator sudah mampu terselesaikan secara menyeluruh. Dan dengan adanya program Kotaku maka penanganan kumuh sudah bisa terselesaikan.

Secara umum ada tiga aspek dari 7 indikator permukiman kumuh, yakni aspek lingkungan fisik, aspek sosial ekonomi dan aspek sosial budaya masyarakat. Yang pertama, kondisi fisik lingkungan dengan program Kotaku sudah mampu menyentuh perbaikan fisik lingkungan pada rumah-rumah masyarakat di permukiman kumuh melalui kolaborasi penanganan yang ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kedua, kondisi sosial ekonomi, program Kotaku melalui bantuan dana bergulir tujuannya memberikan bantuan keuangan dalam perbaikan ekonomi masyarakat di lingkungan kumuh. Ketiga, kondisi sosial budaya masyarakat, dengan adanya program Kotaku mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penghidupan berkelanjutan di wilayah kawasan kumuh. (hasil wawancara tanggal 12-10-2019).

Uraian pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae sebenarnya sudah dianggap

selesai sejak Tahun 2017. Tujuh indikator dalam kriteria fisik yaitu penataan bangunan, aksesibilitas jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pelayanan air minum, pengelolaan sampah, dan perlindungan kebakaran, maupun kriteria non-fisik yakni kondisi sosial ekonomi dan budaya semuanya sudah dianggap selesai penanganan masalahnya, dan kawasan kumuh sudah dianggap sudah tidak ada di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala. Namun demikian, jika pendapat atau penilaian tersebut dihubungkan dengan hasil analisis kondisi terkini (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara sistematis, runtut, runtun dan komprehensif) dan hasil survei dan observasi realitas empiris Tahun 2019, maka klaim tersebut tentu masih sangat perlu diluruskan.

2) Penilaian Bappeda

Penilaian lembaga atau instansi *leading sector* ini terhadap kondisi permukiman saat ini pasca program Kotaku di Kelurahan Banggae tercermin dari hasil wawancara dengan A.Irma T. Nilawati, Kabid FISPKA BAPPEDA yang menyatakan bahwa:

Setelah dilakukan intervensi di lokasi sasaran program maka sudah ada perubahan nyata baik secara fisik maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sudah ada perubahan kondisi bangunan hunian karena sudah ada intervensi dari dinas terkait. Sudah ada perubahan kondisi aksesibilitas lingkungan dengan adanya intervensi program. Kondisi drainase sudah memadai. Di Copala sudah terpenuhi air bersihnya. Kondisi limbah rumah tangga sudah bagus. Pengelolaan persampahan lumayan bagus karena ditambah lagi lokasi kelurahan dekat dengan TPS3R. Akses belum memadai untuk perlindungan kebakaran bagi warga. Menyangkut masalah ekonomi, dengan bantuan dana bergulir dari program Kotaku mampu membantu perekonomian masyarakat.

Sudah ada kesadaran masyarakat untuk berubah dari ketidaknyamanan di tempat kumuh menjadi tidak kumuh. Intinya, kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat saat ini di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala sangat sejalandengan harapan Pemerintah daerah karena mampu menjabarkan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah tentang masalah perkotaan (hasil wawancara tanggal 14-09-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa pihak Bappeda sebagai *leading sector* pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Majens menilai Kelurahan Banggae pada umumnya dan Lingkungan Copala khususnya sudah mengalami perubahan kondisi lingkungan permukiman dari kondisi kumuh menjadi non-kumuh setelah adanya intervensi pembangunan fisik sejumlah infrastruktur, prasarana dan sarana fisik dasar (mulai dari penataan bangunan hunian, jalan, drainase, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah hingga perlindungan kebakaran) maupun intervensi non-fisik (sosial ekonomi dan budaya). Namun bilamana pendapat atau penilaian tersebut dihubungkan dengan hasil analisis kondisi terkini (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara sistematis, runtut, runtun dan komprehensif), realitas empiris hasil survei dan observasi Tahun 2019, serta berbagai pendapat informan/narasumber lainnya, maka klaim yang sifatnya menggeneralisasi tersebut masih sangat perlu diluruskan, seperti halnya penilaian Kepala Daerah.

d. Penilaian pakar/akademisi, praktisi dan pemerhati/ pengamat

Upaya memperkaya informasi dari berbagai informan atau narasumber khususnya informasi mengenai kondisi permukiman di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan program Kotaku, maka dalam

penelitian inidilakukan wawancara dengan beberapa pihak di luar unsur pengelola/pelaksana program seperti pakar atau akademisi, praktisi, serta pemerhati atau pengamat di bidang terkait, seperti diuraikan berikut.

Dra Marjanah M.Pd, salah seorang dosen di Yayasan STAI-DDI

Majene mengemukakan pandangan atau penilaiannya bahwa:

Menurut penglihatan saya, situasi dan kondisi permukiman saat ini pasca pelaksanaan Kotaku belum ada perubahan yang signifikan, masih nampak permukiman kumuh biasa-biasa saja

Kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Banggae belum mengalami peningkatan, terutama disepertaran Lingkungan Pakkola yang masih banyak sampah yang dibuang ke selokan. Budaya bersih untuk lingkungan rumah masih jauh dari harapan. (hasil wawancara tanggal 16-09-2019).

Salah seorang pemerhati masalah sosiologi perkotaan di Majene,

Muh.Sabir mengemukakan bahwa:

Dari pengamatan, fakta membuktikan bahwa situasi dan kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae termasuk di Copala pasca pelaksanaan Kotaku dalam perspektif ilmu sosial atau sosiologi perkotaan masih tergolong baik dan ada perubahan yang cukup menggembirakan terlihat dari budaya dan sikap masyarakat yang mempertahankan '*siwali perri*' atau bersama dalam suka dan duka. Oleh karena itu, kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat tetap kondusif dan terkendali. (hasil wawancara tanggal 18-09-2019).

Supriadi, salah seorang pengamat/pemerhati masalah lingkungan perkotaan di Majene mengemukakan bahwa:

Situasi dan kondisi lingkungan permukiman saat ini di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan Kotaku sudah menunjukkan adanya perubahan dan perbaikan dengan dibangunnya jalan-jalan setapak dalam bentuk rabat beton serta rehabilitasi drainase dan juga perbaikan pada rumah-rumah sejumlah warga masyarakat di permukiman kumuh. Jadi kondisi fisik lingkungan di Kelurahan Banggae semakin membaik dengan adanya drainase, jalan setapak rabat beton, tempat sampah berpilah. Untuk kondisi sosial ekonomi, dengan adanya bantuan keuangan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, akan tetapi masih ada sebahagian yang belum merasakan bantuan tersebut sehingga program ini khususnya bantuan keuangan terus berkelanjutan. Untuk kondisi sosial budaya, pola dan gaya hidup masyarakat yang konsumtif perlu dibarengi dengan pemberian pemahaman dari pemerintah tentang pembangunan

berwawasan lingkungan sehingga di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae tidak nampak kumuh. (hasil wawancara tanggal 19-09-2019).

Syahrinullahi, salah seorang praktisi tata ruang wilayah dan kota di

Majene mengemukakan bahwa:

Terkhusus untuk permukiman daerah, sejak adanya program Kotaku sudah lebih tertata dengan baik, sudah ada kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan penanganan sampah. Khusus di Kelurahan Banggae, kondisi fisik lingkungan sudah mulai tertata dan telah tersentuh oleh beberapa program pemerintah terkait penataan ruang. (hasil wawancara tanggal 17-09-2019).

M.Afiat Mulwan ST MT, salah seorang praktisi tata ruang wilayah dan kota di Majene mengemukakan bahwa:

Situasi dan kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan Kotaku telah terjadi perubahan dalam perspektif tata ruang wilayah dan kota, khususnya dalam penataan jalan lingkungan, drainase, limbah rumah tangga dan pengolahan sampah rumah tangga.

Kondisi fisik lingkungan di Kelurahan Banggae menunjukkan adanya perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menjadi pencetus kekumuhan seperti kondisi jalan, drainase, ruang terbuka hijau, dan penempatan titik-titik simpul sampah.

Untuk kondisi sosial ekonomi, dengan penataan lingkungan maka berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian masyarakat khususnya bagi penjual makanan karena memenuhi aspek higienis terhadap makanan yang dijual. Untuk kondisi sosial budaya, terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang lebih peduli kebersihan lingkungan. (hasil wawancara tanggal 24-09-2019).

Muh.Alif Chalil, salah seorang birokrat dan praktisi tata ruang wilayah dan kota di Majene mengemukakan bahwa:

Situasi dan kondisi permukiman saat ini pasca pelaksanaan Kotaku telah menunjukkan terciptanya permukiman layak huni dan bebas kumuh skala lingkungan di wilayah Kelurahan Banggae. Demikian pula adanya upaya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh yang dilakukan.

Kondisi fisik lingkungan di Kelurahan Banggae menunjukkan adanya perubahan jangkauan jaringan jalan lingkungan. Untuk kondisi sosial ekonomi, mayoritas penduduk tetap memiliki potensi dan peluang mengelola dan menekuni pola pencaharian atau pekerjaan sebagai pedagang, petani, ataupun peternak. Untuk kondisi sosial budaya, menunjukkan peningkatan pemenuhan aspek pelayanan dasar. (hasil wawancara tanggal 31-09-2019).

Dr.Hj.Atika MM, salah seorang ilmuwan, birokrat dan praktisi sekaligus pemerhati/pengamat dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan ekonomi perkotaan di Majene mengemukakan bahwa:

Menurut hemat saya, melihat situasi dan kondisi permukiman saat ini sejak adanya intervensi dari program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), Kelurahan Banggae tampaknya mengalami perubahan khususnya dalam perspektif ekonomi perkotaan pasca pelaksanaan Kotaku. Perubahan yang dimaksud terutama pola pikir masyarakat (cara merubah kebiasaan) secara pelan-pelan atau perlahan, yang tadinya atau sebelumnya masih memiliki atau memelihara sifat untuk selalu dibantu (mengharapkan bantuan secara gratis), maka melalui sentuhan program ini diajak dan diarahkan untuk dapat mandiri dalam mengelola usahanya sendiri. Mereka diberikan bantuan dana bergulir namun disertai dengan pendampingan sehingga secara bertahap mereka dapat memperbaiki tingkat ekonomi keluarganya dan memajukan usaha ekonomi produktif. Program Kotaku dengan beberapa pendekatan yang dilakukan, memberikan cukup banyak manfaat ataupun kontribusi yang berarti kepada masyarakat terutama kelompok penerima manfaat (KPM), apalagi diketahui bahwa bukan hanya lingkungan fisik permukimannya yang direhabilitasi tetapi juga melakukan penataan dan penanganan terpadu berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). (hasil wawancara tanggal 01-10-2019).

Keseluruhan uraian pendapat atau penilaian beberapa pakar atau akademisi, praktisi, serta pemerhati atau pengamat menurut bidangnya masing-masing menunjukkan bahwa umumnya mereka sepakat melihat adanya perubahan kondisi lingkungan permukiman baik fisik maupun non-fisik. Namun demikian, ada salah seorang pakar/akademisi yang berpendapat lain atau memberikan penilaian yang berbeda yang melihat kondisi lingkungan permukiman (baik fisik maupun non-fisik) tidak atau belum mengalami perubahan yang signifikan, masih melihat kondisi permukiman kumuh tampak biasa-biasa saja, yang menilai kondisi fisik lingkungan serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Banggae belum mengalami peningkatan, serta melihat masih kurangnya

budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat pada kalangan warga masyarakat. Perbedaan penilaian tersebut tentu cukup beralasan dan wajar sebab hal itu juga terjadi pada sejumlah informan/narasumber lainnya yang menunjukkan sikap pro-kontra dalam melihat persoalan kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae.

D. Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Banggae

1. Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Keberlanjutan Penanganan

Kelurahan Banggae secara nyata menghadapi tantangan permasalahan permukiman kumuh pada sejumlah titik lokasi pada empat lingkungan yang ada (Pakkola, Saleppa, Battayang dan Copala). Atas permasalahan tersebut maka program Kotaku yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat melalui DJCK Kementerian PUPR sejak Tahun 2014 hadir melaksanakan rencana investasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal untuk melakukan intervensi penanganan atas berbagai permasalahan berdasarkan determinan kriteria fisik dan non-fisik serta sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Program Kotaku dengan sejumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan, menyusun mekanisme (sistem dan prosedur) serta rancangan atau rencana penanganan kawasan permukiman kumuh dengan berbagai strategi pendekatan pola penanganan yang ditetapkan dalam pedoman Program Kotaku Tahun 2014-2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka di Kabupaten Majene terutama di Kecamatan Banggae dan khususnya di Kelurahan Banggae, pengelola

program Kotaku menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Banggae Tahun 2016-2021 serta telah mengambil langkah-langkah tindakan penanganan berdasarkan hasil pendataan dan analisis kebutuhan penanganan permukiman kumuh seperti tertera pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Penanganan Permukiman Kumuh Oleh Program Kotaku Berdasarkan Analisis Kebutuhan Indikator Di Kelurahan Banggae Tahun 2016-2021

No	Aspek Penanganan Permukiman	Uraian Masalah	Faktor Penyebab	Potensi yang ada	Kebutuhan dan Proyeksi (5 tahun)
1.	Keteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan berdiri di atas sempadan jalan b. Bangunan berada di atas sempadan sungai dan membelakangi sungai. c. Orientasi bangunan tidak teratur. d. Bangunan hunian tidak mendapat akses jalan >1,5 meter e. Bangunan berdiri di lahan dengan kemiringan >15%. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Warga tidak paham tentang aturan pendirian bangunan b. Pengawasan pendirian bangunan tidak ketat c. Warga sudah bermukim sejak lama (turun temurun) d. Warga tidak mampu membeli lahan untuk bermukim. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia lahan seluas 54,89 ha untuk permukiman b. Dana APBD & APBN c. Swasta dan pihak lainnya d. Swadaya masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan jarak antar bangunan b. Penataan bangunan hunian tidak teratur sebanyak 591 unit c. Pemugaran permukiman dan peremajaan d. Sosialisasi tentang peraturan pendirian bangunan e. Pengawasan pendirian bangunan diperketat
2.	Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jarak antar bangunan yang rapat b. Bangunan terkonsentrasi pada kawasan dataran rendah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan warga tentang penataan bangunan masih kurang b. Luas lahan bangunan tidak sesuai standar (<100 m²/RT) c. Warga sudah bermukim sejak lama (turun temurun) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia lahan seluas 54,89 ha untuk permukiman b. Dana APBD & APBN c. Swasta dan pihak lainnya d. Swadaya masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan bangunan hunian pada kawasan dataran rendah b. Kebutuhan bangunan hunian sebanyak 49 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan 0,49 ha (proyeksi 5 tahun) c. Sosialisasi tentang peraturan pendirian bangunan dan AB d. Pengawasan pendirian bangunan diperketat.
3.	Kelayakan Bangunan Hunian	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagian rumah warga kondisi ALADIN (atap, lantai dan dinding) bangunan tidak layak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Ekonomi warga yang minim. b. Satu rumah tangga dihuni lebih dari satu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Swadaya masyarakat b. Dana APBD & APBN c. Swasta dan pihak lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rehab rumah sebanyak 377 unit RTLH b. Penambahan luas lantai bangunan hunian sebanyak 79

Lanjutan

		b. Luas lantai bangunan tidak sebanding dengan jumlah penghuni (< 7,2 meter/jiwa)	KK c. Warga menumpang di lahan milik orang lain d. Luas lahan terbatas		unit rumah tangga yang memiliki luas lantai < 7,2 meter/jiwa
4.	Aksesibilitas Jalan Lingkungan	a. Terdapat Jalan lingkungan dengan lebar <1,5 m b. Terdapat jalan lingkungan yang dalam kondisi rusak c. Terdapat jalan lingkungan yang tidak diperkeras	a. Tidak tersedia lahan untuk kegiatan pelebaran jalan b. Mutu/kualitas jalan kurang bagus. c. Jalan sering dilalui kendaraan berat. d. Jaringan jalan tidak dilengkapi bangunan pelengkap e. Minimnya anggaran untuk pemeliharaan jalan f. Tidak ada perencanaan jalan.	a. Swadaya masyarakat b. Dana APBD & APBN c. Swasta dan pihak lainnya	a. Penataan badan jalan sesuai dengan kondisi permukiman (<1,5 meter) b. Perbaikan jalan rusak sepanjang 5.132 meter c. Peningkatan kualitas jalan sepanjang 3.060 meter d. Perencanaan pengembangan jalan baru e. Sosialisasi tentang perencanaan jalan f. Aturan Bersama (AB).
5.	Drainase Lingkungan	a. Adanya genangan di beberapa titik area permukiman	a. Tidak ada saluran drainase b. Banyak timbunan sampah/material dalam saluran c. Saluran drainase rusak d. Konstruksi saluran drainase yang salah e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase f. Elevasi permukiman berada di bawah permukaan drainase (berupa cekungan).	a. Tersedia lahan b. Swadaya masyarakat c. Dana APBD & APBN- d. Swasta dan pihak lainnya	a. Pembuatan saluran drainase sepanjang 14.830 meter b. Perbaikan saluran drainase rusak sepanjang 2.897 meter c. Sosialisasi PHBS d. Aturan Bersama
6.	Pelayanan Air Bersih/Minum	a. Terdapat warga yang sulit mengakses air minum yang layak b. Keterpenuhan air bersih masih kurang 60 lt/hr/org	a. Faktor ekonomi warga b. Kurangnya potensi sumber air yang layak c. Tidak terlayani oleh PDAM d. Pasokan air PDAM tidak lancar.	a. PDAM b. Program pemerintah (PAMSIMAS) c. Swasta dan pihak peduli	a. 110 rumah tangga penyediaan akses air minum b. Ketercukupan air bersih 60 lt/org/hari untuk 297 rumah tangga adalah 555.384 m ³ kebutuhan air bersih (proyeksi 5 tahun).

Lanjutan

7.	Pelayanan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih ada warga yang buang hajat di sungai b. Mayoritas air limbah rumah tangga tercampur dengan drainase c. Air limbah menggenang di sekitar permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat rumah tangga yang belum memiliki jamban b. Tidak ada pengelolaan air limbah rumah tangga (IPAL komunal/individu) c. Kesadaran warga tentang PHBS masih kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. APBD dan APBN b. Program pemerintah c. Swadaya masyarakat d. Swasta dan pihak peduli 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jamban sebanyak 93 unit b. Penyediaan IPAL komunal atau individu c. Sosialisasi PHBS
8	Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. Tumpukan sampah di sembarang tempat b. Warga membakar sampah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya sarana persampahan b. Sampah belum dikelola dengan baik c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS. 	<ul style="list-style-type: none"> a. APBD dan APBN b. Program pemerintah c. Swadaya masyarakat d. Swasta dan pihak peduli 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan bak sampah untuk 510 rumah tangga b. Penyediaan sarana gerobak sampah sebanyak 4 unit c. Pelatihan pengelolaan sampah d. Sosialisasi PHBS e. Aturan Bersama..
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Rawan kebakaran di daerah padat permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Jarak antar bangunan yang rapat b. Material bangunan yang mudah terbakar c. Akses jalan <3 meter d. Tidak tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 	<ul style="list-style-type: none"> a. APBD dan APBN b. Swadaya masyarakat c. Swasta dan pihak peduli 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan tanggap bencana kebakaran b. Penyediaan alat pemadam kebakaran skala lingkungan c. Sosialisasi tentang penataan permukiman
10	Ruang Terbuka Publik	Interaksi sosial warga terbatas	Kurangnya Ruang Terbuka Publik (RTP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan b. APBD dan APBN c. Swadaya masyarakat d. Swasta dan pihak peduli. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Ruang Terbuka Publik (RTP) Skala Kelurahan b. Penataan tata ruang lingkungan
11	Sosial Ekonomi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana ekonomi (pasar, TPI) b. SDA kelapa c. Ternak (ayam dan kambing) d. Lembaga keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan <i>livehood</i> masyarakat b. Pelatihan kewirausahaan c. Bantuan Modal d. Perubahan <i>mindset</i> e. Pengembangan ekonomi lokal.
12	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Angka kemiskinan masih tinggi b. Layanan kesehatan belum optimal c. Luntturnya nilai kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pola pikir warga b. Sarana kesehatan, tenaga medis, dan biaya masih kurang c. Terjadi pergeseran budaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. APBD dan APBN b. Lembaga dan tokoh lokal c. BOS, BSM, BPJS, KIS, KIP 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi tentang pendidikan b. Penyediaan dan pengoptimalan sarana kesehatan c. Mendorong generasi lokal untuk mengenal budaya lokal d. Membudayakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Banggae Tahun 2016-2021

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut dapat dilakukan evaluasi perencanaan terhadap penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae berdasarkan sejumlah indikator sebagaimana diuraikan formulasi analisisnya pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh Oleh Program Kotaku Berdasarkan Indikator Di Kelurahan Banggae Tahun 2019

No	Aspek Penanganan Permukiman	Action Plan Penanganan Permukiman oleh Program Kotaku	EVALUASI	
			Realisasi Pelaksanaan	Penanganan yang dibutuhkan
1.	Keteraturan Bangunan	a. Penataan jarak antar bangunan b. Penataan bangunan hunian tidak teratur sebanyak 591 unit c. Pemugaran permukiman dan peremajaan d. Sosialisasi tentang peraturan pendirian bangunan e. Pengawasan pendirian bangunan diperketat	a. Tidak ada realisasi penataan jarak antar bangunan b. Rencana penataan 591 unit bangunan hunian tidak teratur, selain melebihi kebutuhan (473 unit), realisasi pelaksanaannya juga kurang jelas. c. Rencana pemugaran permukiman dan peremajaan kurang jelas realisasinya d. Sosialisasi peraturan dan pengawasan pendirian bangunan tidak optimal/efektif, serta kurang jelas realisasinya.	Pendekatan yang dibutuhkan dalam menciptakan keteraturan bangunan hunian adalah penanganan terpadu, relokasi, revitalisasi, pemberdayaan, penyadaran, penegakan hukum dan sanksi.
2.	Kepadatan Bangunan	a. Penataan bangunan hunian pada kawasan dataran rendah b. Kebutuhan bangunan hunian sebanyak 49 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan 0,49 ha (proyeksi 5 tahun) c. Sosialisasi tentang peraturan pendirian bangunan d. Pengawasan pendirian bangunan diperketat.	a. Penataan bangunan hunian pada kawasan dataran rendah kurang jelas realisasinya, serta kurang tepat metode pendekatannya b. Kebutuhan bangunan hunian sebanyak 49 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan 0,49 ha tidak jelas dasar datanya, maksud dan tujuannya c. Sosialisasi peraturan dan pengawasan pendirian bangunan kurang jelas realisasinya serta tidak optimal/efektif.	Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah kepadatan bangunan adalah relokasi, revitalisasi dan <i>redevelopment</i> .
3.	Kelayakan Bangunan Hunian	a. Rehab rumah sebanyak 377 unit RTLH b. Penambahan luas lantai bangunan hunian sebanyak 79 unit rumah tangga yang memiliki luas lantai < 7,2 meter/jiwa	a. Jumlah unit RTLH yang direhab kurang/tidak sesuai dengan kebutuhan yang berkembang, kurang konsisten pelaksanaannya, serta metode pendekatannya terbatas pada rehabilitasi b. Penambahan luas lantai 79 unit bangunan hunian kurang/tidak sesuai dengan kebutuhan yang berkembang, serta metode pendekatannya terbatas dan kurang sesuai.	Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah kepadatan bangunan adalah relokasi, pemberdayaan sosial ekonomi, partisipatif, keswadayaan, pola kemitraan.

Lanjutan

4.	Aksesibilitas Jalan Lingkungan	<p>a. Penataan badan jalan sesuai dengan kondisi permukiman (<1,5 meter)</p> <p>b. Perbaikan jalan rusak sepanjang 5.132 meter</p> <p>c. Peningkatan kualitas jalan sepanjang 3.060 meter</p> <p>d. Perencanaan pengembangan jalan baru</p> <p>e. Sosialisasi tentang perencanaan jalan</p> <p>f. Aturan Bersama (AB).</p>	<p>a. Masih terjadi kesenjangan dalam penataan jalan antar lingkungan, dan metode penataan belum menyentuh aspek lainnya</p> <p>b. Rencana perbaikan jalan rusak sepanjang 5.132 m kurang sesuai realitas perkembangan, serta tidak sesuai kebutuhan 10.888 m panjang jalan yang berkualitas buruk yang memerlukan perbaikan</p> <p>c. Rencana peningkatan kualitas jalan sepanjang 3.060 m tidak sesuai kebutuhan 7.808 m (10.888 m – 3.060 m) panjang jalan yang belum masuk rencana peningkatan kualitas.</p> <p>d. Perencanaan pengembangan jalan baru masih <i>overlapping</i> dan berkesenjangan dengan masih besarnya jumlah panjang jalan yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas</p> <p>e. Sosialisasi perencanaan jalan kurang jelas realisasinya</p> <p>f. Aturan Bersama (AB) kurang jelas realisasinya.</p>	<p>Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah aksesibilitas jalan lingkungan adalah pendekatan analisa kebutuhan yang tepat dan akurat serta dinamis. Selain itu juga dibutuhkan pendekatan penanganan terpadu, komprehensif dan holistik.</p>
5.	Drainase Lingkungan	<p>a. Pembuatan saluran drainase sepanjang 14.830 meter</p> <p>b. Perbaikan saluran drainase rusak sepanjang 2.897 meter</p> <p>c. Sosialisasi PHBS</p> <p>d. turan Bersama</p>	<p>a. Pembuatan saluran drainase yang direncanakan sepanjang 14.830 m melebihi kebutuhan yang ada sekarang maupun kebutuhan ideal 13.330 m.</p> <p>b. Dari 2.897 m panjang saluran drainase rusak yang hendak diperbaiki, masih ada 1.472 m panjang drainase yang memerlukan rehabilitasi, sehingga <i>action plan</i>-nya kurang cermat dan tepat. Selain itu pilihan pendekatan penanganannya terbatas</p> <p>c. Sosialisasi PHBS dan aturan bersama kurang jelas realisasinya.</p>	<p>Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah drainase lingkungan, selain pendekatan teknis pembangunan, rehabilitasi, pemugaran, juga perlu diintegrasikan dengan pendekatan partisipatori, mencegah alih fungsi drainase menjadi TPS, pemberdayaan masyarakat, serta <i>sustainability approach</i>.</p>
6.	Pelayanan Air Bersih/Minum	<p>a. 110 rumah tangga penyediaan akses air minum</p> <p>b. Ketercukupan air bersih 60 lt/org/hari untuk 297 rumah tangga adalah 555.384 m³ kebutuhan air bersih (proyeksi 5 tahun).</p>	<p>a. Penyediaan akses air minum bagi 110 KK rumah tangga belum optimal penanganannya, serta masih menyisakan 79 KK yang belum tersentuh penanganan. Selain itu metode pendekatan penanganan masih sangat terbatas</p> <p>b. Pemenuhan kecukupan air bersih 60 lt/org/hari untuk 297 rumah tangga belum optimal, dan masih menyisakan 131 KK yang belum tersentuh penanganan. Selain itu</p>	<p>Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah pelayanan air bersih/minum selain pendekatan teknis, juga memerlukan pendekatan pemberdayaan ekonomi, penyediaan sumber daya air yang layak,</p>

Lanjutan

			metode pendekatan penanganan juga masih terbatas.	koordinasi dan kerjasama dengan PDAM, optimalisasi program Pansimas, keswadayaan masyarakat, pola kemitraan dengan pihak swasta,
7.	Pengelolaan Air Limbah	a. Penyediaan Jamban sebanyak 93 unit b. Penyediaan IPAL komunal atau individu c. Sosialisasi PHBS	a. Penyediaan Jamban sebanyak 93 unit masih perlu dioptimalkan dengan penyediaan tambahan 10 unit jamban untuk melayani seluruh rumah tangga yang ada b. Penyediaan IPAL komunal atau individu sudah baik namun masih perlu dioptimalkan. Selain itu, penanganan masalah SPAL masih sangat kurang c. Sosialisasi PHBS tidak optimal.	Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah pengelolaan air limbah selain pendekatan teknis, juga memerlukan penanganan terpadu IPAL dan SPAL, pemeliharaan drainase, pemberdayaan.
8	Pengelolaan Sampah	a. Penyediaan bak sampah untuk 510 rumah tangga b. Penyediaan sarana gerobak sampah sebanyak 4 unit c. Pelatihan pengelolaan sampah d. Sosialisasi PHBS e. Aturan Bersama..	a. Realisasi penyediaan bak sampah untuk 510 rumah tangga maupun penyediaan sarana gerobak sampah sebanyak 4 unit belum memadai/optimal b. Pelatihan pengelolaan sampah masih kurang c. Sosialisasi PHBS dan Aturan Bersama masih kurang.	Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah selain pendekatan teknis, juga memerlukan penanganan terpadu, partisipasi, pemberdayaan, keswadayaan, teknologi dan ekonomi.
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	a. Pelatihan tanggap bencana kebakaran b. Penyediaan alat pemadam kebakaran skala lingkungan c. Sosialisasi tentang penataan permukiman.	a. Pelaksanaan pelatihan tanggap bencana kebakaran masih sangat kurang b. Penyediaan alat pemadam kebakaran skala lingkungan belum jelas realisasinya c. Sosialisasi tentang penataan permukiman masih terbatas dan tidak optimal.	Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah pengamanan kebakaran selain pendekatan teknis, juga memerlukan pendekatan aksesibilitas, pemberdayaan, pencegahan, relokasi dan <i>redevelopment</i> .
10	Ruang Terbuka Publik	a. Penyediaan Ruang Terbuka Publik (RTP) Skala Kelurahan b. Penataan tata ruang lingkungan	a. Penyediaan RTP Skala Kelurahan belum jelas realisasinya b. Penataan tata ruang lingkungan belum jelas realisasinya	Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah RTP selain pendekatan teknis, juga memerlukan pendekatan manajemen tata ruang dan standar RTH, swadaya.

Lanjutan

11	Ekonomi	a. Pelatihan kewirausahaan b. Bantuan Modal c. Perubahan <i>mindset</i> d. Pengembangan ekonomi lokal.	a. Kegiatan pelatihan kewirausahaan masih terbatas b. Bantuan modal berupa dana bergulir masih terbatas dan belum tepat sasaran c. Perubahan <i>mindset</i> belum jelas d. Pengembangan ekonomi lokal belum jelas.	Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah ekonomi adalah optimalisasi program pemberdayaan kultur kewirausahaan, pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP), pendekatan ekonomi terpadu, akses pemasaran.
12	Sosial Budaya	a. Sosialisasi tentang pendidikan b. Penyediaan dan pengoptimalan sarana kesehatan c. Mendorong generasi lokal untuk mengenal budaya lokal d. Membudayakan kegiatan sosial kemasyarakatan.	a. Sosialisasi tentang pendidikan masih terbatas dan belum tepat sasaran b. Penyediaan dan pengoptimalan sarana kesehatan masih stagnan c. Pengenalan budaya lokal kepada generasi lokal masih terbatas d. Kegiatan pembudayakan kegiatan sosial kemasyarakatan masih terbatas.	Pendekatan penanganan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah sosial budaya adalah pemberdayaan SDM penduduk, revitalisasi dan pelebagaan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, integrasi muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan.

Sumber :hasil analisis Tahun 2019

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae, ada empat aspek penting dan utama yang menonjol yakni (1) Perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan penanganan permukiman kumuh, (2) Skenario pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, (3) Skenario peningkatan kualitas permukiman kumuh pada kawasan prioritas penanganan, dan (4) Kebutuhan penanganan dan perencanaan teknis peningkatan kualitas permukiman kumuh prioritas Copala. Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa selain penanganan yang masih dominan bersifat *action plan* dan hanya sebahagian kecil *real action*-nya, juga pilihan pendekatan penanganan masih banyak bersifat tunggal dan monoton,

tidak terintegratif dan komprehensif dalam penyelesaian/ penuntasan akar masalah dan kebutuhan *problem solving*. Akibatnya, pola pendekatan penanganan dan pilihan intervensi menjadi tidak efektif serta tidak tuntas.

2. Penilaian Informan/Narasumber Tentang Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Banggae dalam Pelaksanaan Program Kotaku

Informasi lebih luas mengenai pola penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae pada umumnya dan di Lingkungan Copala khususnya dalam pelaksanaan program Kotaku, diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan atau narasumber mulai dari kelompok penerima manfaat (KPM), unsur pengelola/ pelaksana program tingkat lingkungan dan kelurahan (relawan, KSM, TIPP, BKM/LKM, Lurah, Kepala Lingkungan), unsur pengelola/pelaksana program tingkat kabupaten (Bappeda, Bupati) hingga pengamat, pakar, pemerhati, praktisi serta kelompok penekan, sebagaimana dipaparkan pada uraian berikut.

a. Penilaian kelompok penerima manfaat (KPM)

Berdasarkan hasil wawancara, umumnya warga masyarakat yang masuk dalam KPM (kelompok penerima manfaat) sepakat bahwa pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang dilakukan oleh program Kotaku di lingkungan permukimannya di Kelurahan Banggae masih belum cukup atau masih perlu penanganan, serta masih perlu kesadaran dan kerjasama yang baik dalam kegiatan tersebut. Namun dalam hal penanganan masalah

bangunan hunian atau rumah tinggal, kalangan KPM memberikan penilaian yang berbeda yakni ada yang menyatakan masih perlu adanya kesadaran dan kerjasama yang baik antara warga dengan pihak pengelola program dan aparat pemerintah daerah, sementara KPM lainnya menilai penanganan masalah bangunan hunian sudah dilaksanakan dengan baik. Umumnya KPM sepakat bahwa penanganan masalah aksesibilitas jalan lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, serta perlindungan kebakaran, serta penanganan masalah sosial ekonomi dan budaya semuanya sudah dilaksanakan oleh pengelola program Kotaku (diolah dari hasil wawancara tanggal 20-21 September-2019).

Uraian tersebut mengindikasikan bahwa umumnya KPM menilai penanganan masalah-masalah permukiman kumuh berdasarkan kriteria fisik dan non-fisik, serta sejumlah indikatornya sudah dilakukan oleh pengelola dan pelaksana program Kotaku di Kelurahan Banggae. Namun demikian, bilamana pendapat ini dihubungkan dengan penilaian sebelumnya mengenai kondisi permukiman saat ini pasca program, berarti masih ada inkonsistensi diantara KPM dalam memberikan penilaian atas penanganan masalah-masalah permukiman kumuh tersebut. Kalangan KPM sebelumnya menilai bahwa kondisi permukiman dengan sejumlah indikatornya belum sepenuhnya disentuh oleh program Kotaku. Hal ini juga berarti bahwa penanganan indikator-indikator masalah permukiman kumuh belum sepenuhnya tuntas dan sesuai.

b. Penilaian unsur pengelola/ pelaksana program Kotaku tingkat lingkungan dan kelurahan tentang pola penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae

1) Penilaian Relawan

Nursiah, salah seorang relawan yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae mengemukakan bahwa:

Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang dilakukan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae adalah bekerjasama Pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal tindakan pencegahan dilakukan sosialisasi. Untuk peningkatan kualitas permukiman, penanganan dilakukan secara langsung pada wilayah kumuh secara paket. Untuk pengelolaan lingkungan permukiman dilakukan dengan penanganan wilayah kumuh.

Kami sebagai relawan sering diundang ke kelurahan untuk dimintai bantuan pemikiran, pendapat, materi maupun tenaga terutama dalam hal pendataan. Kami dilibatkan dalam penanganan masalah-masalah teknis seperti aksesibilitas jalan, drainase, pengelolaan air limbah, pelayanan air minum, pengelolaan sampah sampai dengan masalah non-teknis sosial ekonomi dan budaya. Kami juga berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana dalam penanganan masalah-masalah tersebut. (hasil wawancara tanggal 04-09-2019).

Pandangan relawan tersebut mengindikasikan bahwa penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui pendekatan pola kemitraan atau kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pola penanganan pencegahan permukiman kumuh dilakukan melalui beragam kegiatan sosialisasi terutama sosialisasi PHBS dan sosialisasi aturan bersama (AB). Pola penanganan peningkatan kualitas permukiman dilakukan secara langsung pada wilayah kumuh secara paket, serta pola penanganan untuk pengelolaan lingkungan permukiman dilakukan

dengan penanganan wilayah kumuh. Dalam kaitan itu, kehadiran relawan juga memainkan fungsi dan peran penting dalam penanganan.

2) Penilaian KSM, TIPP, BKM/LKM

(a) Penilaian KSM

Salah seorang dari KSM Assamaturuang bernama Rosdiana memberikan penilaiannya dengan mengemukakan bahwa:

Kami KSM yang terjun langsung atas pengawasan masyarakat dalam pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae. Kami dimintai pendapat ataupun terlibat langsung dalam berbagai kegiatan penanganan masalah-masalah teknis seperti penataan bangunan, jalan, saluran drainase, pelayanan air minum dan lainnya. Kami biasanya berembuk dengan warga masyarakat mengenai rencana penanganan masalah teknis tertentu. Peningkatan kualitas permukiman langsung dikerjakan semua kegiatan. (hasil wawancara tanggal 27-09-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa KSM melakukan pola dan tindakan penanganan melalui pengawasan dan musyawarah dengan warga masyarakat dalam menyusun rencana maupun melaksanakan suatu kegiatan. Dengan demikian fungsi dan wewenang KSM lebih banyak sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator kegiatan dan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh.

(b) Penilaian TIPP

Salah seorang anggota TIPP bernama Fatimah memberikan penilaiannya dengan mengemukakan bahwa:

Dalam penanganan permukiman kumuh, kami terlibat langsung terutama dalam proses perencanaan yang ada di program Kotaku. Kami dilibatkan atau terlibat langsung dalam kegiatan pendataan dan diskusi kumuh, memberikan gagasan pemikiran dan

bantuan tenaga yang diperlukan (hasil wawancara tanggal 29-09-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa TIPP mengambil peran langsung dalam penanganan langsung melalui perencanaan dan pendataan, pemberian kontribusi pemikiran dan tenaga, mendiskusikan masalah-masalah permukiman kumuh selama pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae.

(c) Penilaian BKM/LKM

Salah seorang anggota BKM/LKM bernama Abd. Azis memberikan penilaiannya bahwa:

Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae cukup bagus karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat. Penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kawasan kumuh.

Penanganan bangunan hunian sudah cukup bagus. Alhamdulillah kami BKM selalu dilibatkan dalam proses pembangunan khususnya di program Kotaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada kegiatan monitoring. BKM selalu berkoordinasi dengan pihak luar khususnya OPD. BKM selalu berpartisipasi dan dilibatkan. BKM mendapatkan biaya operasional (BOP) dari program Kotaku pada saat administrasi anggaran dana dari 1. (hasil wawancara tanggal 28-09-2019).

Kami BKM/LKM sering dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan pembangunan fisik maupun non-fisik; kami dilibatkan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan; kami melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan permukiman kumuh dengan pihak instansi terkait; kami juga berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana yang diperlukan. (hasil wawancara tanggal 29-09-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae menggunakan pendekatan kolaborasi antara pemerintah dan

masyarakat. Penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kawasan kumuh. BKM/LKM terlibat memainkan peran penting dalam penanganan permukiman kumuh baik secara teknis maupun non-teknis, serta berkontribusi dalam pemberian bantuan pemikiran, tenaga, koordinasi dan kerjasama serta pengawasan.

Keseluruhan uraian mengenai penilaian ketiga unsur pelaksana program Kotaku menunjukkan bahwa KSM, TIPP dan BKM/LKM terlibat langsung dalam sejumlah kegiatan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan perannya masing-masing. Mereka berperan penting dalam menjembatani kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk pendataan, analisis kebutuhan penanganan, perencanaan, proyeksi penanganan serta pelaksanaan berbagai kegiatan dan tindakan penanganan permukiman kumuh.

3) Penilaian Lurah dan Staf

(a) Penilaian Lurah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Banggae Muhammad Saupa Ajad S.Ag.,M.Pd, diperoleh gambaran mengenai penilaiannya tentang pola penanganan permukiman kumuh di wilayah otoritasnya sebagaimana dikemukakan bahwa:

Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang dilakukan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae sangat bagus karena masyarakat dilibatkan mulai dari memulai suatu pekerjaan dengan cara musyawarah dan saling berkoordinasi satu sama lain.

Tindakan dan kegiatan yang dilakukan program Kotaku dalam penanganan bangunan hunian adalah saling koordinasi antara stakeholder terkait dengan OPD seperti PU, Perkim, dan lainnya, dan juga sering melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat. Penanganan aksesibilitas lingkungan sudah sangat bagus karena sudah memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas dari suatu tempat ke tempat lain.

Penanganan masalah drainase lingkungan sudah bagus namun masih perlu diperbaiki serta masih terdapat titik yang perlu diintervensi. Masalah pelayanan air minum/bersih sudah sangat memadai dan cukup. Pengelolaan air limbah perlu dibenahi dan diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dalam hal pengelolaan sampah, masalahnya adalah masih adanya warga masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dan masih ada yang membuang sampah di sungai. Peristiwa kebakaran belum pernah terjadi namun tetap perlu perlindungan kebakaran.

Masalah sosial ekonomi masyarakat sangat bervariasi, ada pengusaha, ASN, petani, dan lainnya. Tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial budaya masyarakat dengan cara musyawarah di tingkat kelurahan dengan melibatkan masyarakat. (hasil wawancara tanggal 07-10-2019).

Pola tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh adalah pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan. Selaku Lurah di Banggae, dalam mendukung, melaksanakan dan melancarkan pelaksanaan program Kotaku kami sering-sering terjun ke masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa program Kotaku ini sangat membantu program pemerintah untuk meningkatkan akses seperti jalan, bangunan hunian, drainase, wc dan lainnya. (hasil wawancara tanggal 08-10-2019).

Uraian pendapat atau penilaian Lurah tersebut menunjukkan bahwa pola penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae menggunakan pendekatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, koordinasi dan kerjasama antara stakeholder dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait baik *leading sector* maupun *lining sector*, pendekatan musyawarah mufakat dengan warga masyarakat, pendekatan teknis (seperti rehabilitasi atau perbaikan, pemugaran,

pembangunan sapsras baru, peremajaan), pencegahan dan peningkatan kualitas, serta pengelolaan. Selain itu, Lurah juga memainkan peran dan pengaruh *leadership*-nya dalam melakukan sosialisasi, transfer pengetahuan, pembinaan sikap mental dan perilaku, pendidikan kultur, pemberian motivasi, peningkatan kesadaran masyarakat setempat. Dengan demikian penilaian Lurah terhadap pola penanganan permukiman kumuh di kelurahannya bersifat terintegratif dan komprehensif.

(b) Penilaian Staf Kantor Kelurahan

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh gambaran bahwa kalangan staf pemerintah kelurahan cenderung mempunyai pandangan atau penilaian yang berbeda tentang pola penanganan permukiman kumuh di wilayah kelurahannya. Diantara staf kelurahan berpendapat bahwa pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae dilakukan melalui pemberian bantuan berupa bedah rumah, sedangkan staf yang lain hanya merekomendasikan perlunya peningkatan pola penanganan tersebut (sumber: diolah dari hasil wawancara tanggal 11-09-2019).

Kalangan staf kelurahan menilai bahwa tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah bangunan hunian yang tidak teratur dan padat adalah dengan penataan rumah, sementara staf lainnya menyatakan dilakukan dengan membersihkan sekitar rumah dan memasang

pagar sebagian pembatas rumah penduduk. Terkait penanganan masalah aksesibilitas lingkungan, kalangan staf menyatakan dilakukan dengan cara mengadakan perbaikan jalan demi lancarnya transportasi bagi penduduk, sementara staf lain menilai kurang maksimal.

Terkait penanganan masalah drainase lingkungan, umumnya staf di pemerintah Kelurahan Banggae memiliki penilaian yang sama yakni dilakukan dengan pendekatan pembangunan atau rehab drainase, atau dengan cara memperbaiki drainase untuk menanggulangi banjir supaya tidak masuk/merusak rumah penduduk. Demikian pula dalam hal penanganan masalah pelayanan air minum/bersih/baku umumnya staf kelurahan melihatnya dari pendekatan teknis dan pemberian bantuan sumur bor ataukah membuat sumur baru untuk memenuhi kebutuhan warga. (diolah dari hasil wawancara tanggal 07-10-2019).

Umumnya staf kelurahan menilai bahwa penanganan masalah pengelolaan air limbah dilakukan oleh pengelola dan pelaksana program Kotaku dengan cara diadakannya perbaikan tanggul sungai. Demikian pula dalam hal penanganan masalah pengelolaan sampah, umumnya mereka melihatnya dengan pendekatan teknis yakni pembangunan tanggul sungai supaya sampah-sampah yang ada dipinggir sungai tidak mencemar ke dalam air, ataukah menyiapkan sarana dan prasarana persampahan.

Terkait dengan penanganan masalah perlindungan kebakaran oleh pengelola/pelaksana program Kotaku, diantara staf kelurahan melihatnya dilakukan dengan pendekatan sosialisasi yakni mensosialisasikan masalah penyebab terjadinya kebakaran agar warga masyarakat lebih tahun dan paham mengenai hal itu dan agar mereka dapat melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Sementara staf kelurahan yang lain melihatnya dari pendekatan penghijauan dan pemeliharaan lahan/kebun.

Terkait penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Banggae termasuk di Lingkungan Copala, kalangan staf kelurahan melihat tindakan penanganan yang dilakukan oleh program Kotaku dengan cara mendorong masuknya bantuan sosial (bansos) berupa rastra serta yang lainnya. Untuk penanganan masalah sosial budaya masyarakat, dilakukan dengan cara menjaga kondisi budaya yang ada dan bisa mengembangkan hasil karya budaya yang lainnya (hasil olahan wawancara tanggal 07-10-2019).

Kalangan staf kelurahan menilai program Kotaku menerapkan pola tindakan pencegahan permukiman kumuh dengan cara mencegah terjadinya banjir, kebakaran dan pencemaran limbah. Untuk peningkatan kualitas, dilakukan melalui pendekatan kelancaran transportasi atau akses jalan lingkungan, kebersihan lingkungan, mengurangi faktor kemiskinan. Sedangkan untuk pengelolaan permukiman, dilakukan dengan cara menjaga dan

memelihara semua bantuan yang ada atau yang masuk. Akhirnya bahwa staf kelurahan menilai Lurah Banggae selalu membina dan mengarahkan kepada dampak yang positif dalam memainkan perannya, mengambil tindakan, melaksanakan komitmen dan tanggungjawabnya terhadap pengentasan permukiman kumuh di kelurahannya guna mendukung, melaksanakan dan melancarkan pelaksanaan program Kotaku. (hasil olahan data primer wawancara tanggal 08-10-2019).

4) Penilaian Kepala Lingkungan

Upaya mengetahui lebih spesifik mengenai pola penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala, dapat disimak hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan Copala A. Rahim yang mengungkapkan bahwa:

Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang dilakukan oleh program Kotaku di Lingkungan Copala cukup menggembirakan, terutama dengan adanya kegiatan bedah rumah, penataan aksesibilitas jalan, perbaikan drainase. Namun untuk penanganan masalah pelayanan air minum/bersih/baku masih kurang, bahkan penanganan masalah pengelolaan air limbah rumah tangga dan persampahan sampai sekarang tidak dilakukan atau belum ada. Demikian juga belum adanya penanganan masalah perlindungan kebakaran bagi warga masyarakat. Untuk penanganan masalah sosial ekonomi dan budaya masyarakat masih kurang komunikasi (hasil wawancara tanggal 12-09-2019).

Uraian pendapat Kepala Lingkungan tersebut mengisyaratkan bahwa penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pengelola program Kotaku masih sangat kurang atau terbatas realisasinya di Lingkungan Copala, terutama penanganan masalah air

minum, PAL dan sampah domestik, proteksi kebakaran serta sosial ekonomi dan budaya.

Keseluruhan uraian mengenai penilaian unsur pelaksana program Kotaku di tingkat kelurahan tersebut menunjukkan bahwa antara Lurah, staf kelurahan dan kepala lingkungan, masih cenderung memiliki perbedaan-perbedaan disamping persamaan-persamaan pandangan atau penilaian tertentu terhadap pola penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae pada umumnya dan di Lingkungan Copala khususnya. Namun terlepas dari persamaan dan perbedaan penilaian tersebut, dapat ditarik suatu konklusi bahwa pola penanganan permukiman kumuh masih diperhadapkan pada berbagai pilihan metode dan pendekatan, analisa kebutuhan serta tantangan dalam penerapannya. Konsep penanganan terpadu, penataan, rehabilitasi, pemugaran, peremajaan, sosialisasi, pengawasan, pemberian bantuan, pemberdayaan sosial ekonomi dan budaya, dan lainnya, kesemuanya belum konsisten dan tidak optimal/efektif direalisasikan.

c. Penilaian unsur pengelola/ pelaksana program di tingkat kabupaten mengenai pola penanganan permukiman kumuh

1) Penilaian Kepala Daerah

Informasi mengenai pola penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Majene dan Kecamatan Banggae pada umumnya, dan di Kelurahan Banggae

khususnya, dapat diperoleh dari hasil wawancara Bupati Majene berikut:

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan permukiman kumuh ada tiga yakni: (1) Kemudahan kebijakan penanganan melalui regulasi dan perencanaan serta penganggaran dalam pendampingan dana pusat; (2) Mempertegas pola kolaborasi penanganan melalui OPD terkait; (3) Membuat replikasi program untuk kawasan kumuh yang tidak masuk penanganan Kotaku.

Secara spesifik, yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pendekatan program pendampingan yang dikhususkan untuk kawasan yang sudah tidak masuk dalam kawasan kumuh, membuat Pokja Penanganan Kumuh Kabupaten Majene. (hasil wawancara...08-2019).

Secara spesifik pula, variasi strategis langkah-langkah tindakan adalah: (1) Masalah lingkungan, tetap menjaga kawasan-kawasan yang sudah keluar dari kumuh untuk tidak kembali kumuh lagi dengan memaksimalkan peran Pokja kabupaten dan BKM serta masyarakat yang ada di kawasan penanganan selama ini; (2) Sosial ekonomi, meningkatkan kawasan yang dulunya kumuh menjadi kawasan yang berpotensi mampu meningkatkan perekonomian melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada masyarakat di kawasan melalui BKM yang terbentuk selama ini.

Sebagai program prioritas penanganan kumuh (Kotaku), Pemerintah Kabupaten Majene dalam rangka berjalannya program telah melaksanakan : Pertama, memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan di dalam RPJMD Kabupaten Majene dan perencanaan formal lainnya; Kedua, mengarahkan kepada OPD terkait tentang penerapan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor. (hasil wawancara tanggal 12-10-2019).

Uraian hasil wawancara Kepala Daerah tersebut memberikan suatu gambaran yang jelas, sistematis dan menyeluruh mengenai pola penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Majene dan Kecamatan Banggae pada umumnya, dan di Kelurahan Banggae khususnya. Secara umum, ada tiga pendekatan dalam pola penanganan kawasan kumuh yaitu pendekatan kebijakan (*policy*), pendekatan kolaborasi, serta pendekatan replikasi. Perpaduan ketiga pendekatan

ini bersifat ideal, dan akan efektif jika realisasi pelaksanaannya juga terintegratif, komprehensif dan berkesinambungan.

2) Penilaian Bappeda

Hasil wawancara dengan A.Irma T. Nilawati, Kabid FISPKA

BAPPEDA mengungkapkan bahwa:

Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang dilakukan oleh program Kotaku di Kabupaten Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae adalah dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi masalah kekumuhan mulai dari pusat sampai kabupaten.

Penanganan masalah fisik lingkungan dan sosial ekonomi melalui kegiatan yang dilakukan adalah lebih pada pendekatan penanganan kumuh

Tiga prinsip pendekatan dalam penanganan permukiman kumuh, yaitu pencegahan kawasan kumuh baru, peningkatan kualitas permukiman, dan pengelolaan permukiman dilakukan melalui koordinasi yang intensif dengan OPD yang terkait guna penyelesaian kumuh. (hasil wawancara tanggal 11-10-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa pihak Bappeda menilai pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala dilakukan dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi masalah kekumuhan mulai dari pusat sampai kabupaten. Sedangkan penanganan masalah fisik lingkungan dan sosial ekonomi dilakukan melalui pendekatan penanganan kumuh. Pola penanganan baik pencegahan kawasan kumuh baru, peningkatan kualitas permukiman, maupun pengelolaan permukiman dilakukan melalui koordinasi yang intensif antara pengelola program dengan OPD terkait guna penyelesaian kumuh. Dengan demikian, pihak Bappeda menilai aspek koordinasi sebagai suatu pendekatan dalam pola penanganan permukiman kumuh.

d. Penilaian pakar/akademisi, praktisi dan pemerhati/ pengamat

Pola penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae termasuk di Lingkungan Copala dalam pelaksanaan program Kotaku juga mendapat perhatian dari kalangan pakar atau akademisi lokal, praktisi, serta pemerhati atau pengamat di bidang terkait, seperti diuraikan berikut.

Dra Marjanah M.Pd, salah seorang dosen di Yayasan STAI-DDI Majene mengemukakan pandangan atau penilaiannya bahwa:

Penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae belum nampak hasilnya baik dari segi sosial ekonomi dan budaya yang belum berdampak positif bagi masyarakat.

Pola penanganan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku secara rencana sangat bagus, namun kenyataan di lapangan belum terlihat berdasarkan harapan bersama dalam meningkatkan kualitas permukiman yang ada di wilayah tersebut.

Strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku sudah tepat, namun dalam realisasi masih sangat minim. Hal ini diperlukan pemerataan dalam menjalankan program tanpa pandang bulu.

Menurut saya, pendekatan paling tepat dan sesuai untuk diterapkan adalah penanganan terpadu, karena permasalahan yang ada pada masyarakat di permukiman kumuh tidak sama, ada yang perlu perbaikan atau pemugaran, peremajaan, dan bahkan relokasi demi mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan hunian yang kondusif. (hasil wawancara tanggal 16-09-2019).

Salah seorang pemerhati masalah sosiologi perkotaan di Majene,

Muh.Sabir mengemukakan bahwa:

Jika kita melihat kondisi yang ada, penerapan pola penanganan permukiman kumuh cukup memadai, tetapi perlu perhatian lebih.

Land use planning dan RTRWK tetap dipedomani dalam pola penanganan dan tindakanyang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku guna mencegah perluasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman khususnya di Kelurahan Banggae. Penanganan permukiman kumuh tetap merujuk pada pola penanganan dan tindakan seperti jalan lingkungan, perbaikan drainase, penyediaan air minum sampai fasilitas ruang terbuka publik (RTP) atau ruang terbuka hijau (RTH).

Strategi dan langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran kelebagaannya dalam menangani masalah lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pada

penanganan permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Banggae sudah tepat. Konsep penatagunaan lahan dan RTRWK yang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku mengacu kepada petunjuk dan pedoman dari Kementerian PUPR. Hanya perlu kesesuaian evaluasi dan kolaborasi keberlanjutan program.

Menurut saya, pendekatan paling tepat dan sesuai untuk diterapkan dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Banggae berdasarkan kebijakan dan konsep penatagunaan lahan dan RTRWK adalah penanganan terpadu (perbaikan/pemugaran, peremajaan, relokasi). Selain itu juga perlu pendekatan partisipatif dari warga masyarakat, kreatif dan inovatif. (hasil wawancara tanggal 18-09-2019).

Supriadi, salah seorang pengamat/pemerhati masalah lingkungan perkotaan di Majene mengemukakan bahwa:

Pola penanganan permukiman kumuh yang secara umum diterapkan oleh pelaksana program Kotaku khususnya di Kelurahan Banggae sudah disesuaikan dengan pembangunan berwawasan lingkungan tapi belum maksimal pelaksanaannya. Untuk pengembangan RTH masih belum nampak di Kelurahan Banggae karena berdasarkan regulasi yang ada bahwa RTH 30% dari luas wilayah yang ada. Pola yang digunakan dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan RTH belum maksimal. (hasil wawancara tanggal 19--09-2019).

Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dan jajaran kelembagaannya sudah tepat dalam menangani masalah lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat/stakeholder masih kurang, pemahaman masyarakat tentang program pemerintah dan tentang pembangunan berwawasan lingkungan juga masih kurang, dan masyarakat masih kurang pemahamannya tentang RTH.

Pendekatan paling tepat dan sesuai untuk diterapkan dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Banggae berdasarkan kebijakan dan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan pengembangan RTH adalah : penanganan terpadu (perbaikan/ pemugaran, peremajaan, relokasi), penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat, *Redevelopment*, revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya), serta penerapan konsep Kampung Tematik. (hasil wawancara tanggal 15-10-2019).

Syahrinullahi, salah seorang praktisi tata ruang wilayah dan kota di Majene mengemukakan bahwa:

Saya pernah terlibat di dalam pola penanganan permukiman kumuh, dan sejauh ini tidak sesuai dan berpedoman pada RTRWK kabupaten.

Betul, pembangunan berwawasan lingkungan dan pengembangan RTH dipedomani dalam pola penanganan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku guna mencegah perluasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman khususnya di Kelurahan Banggae.

Menurut saya, perencanaan kerja Kotaku sudah mengacu kepada RTRWK kabupaten, utamanya dalam penentuan target dan luasan penanganan kumuh perkotaan. (hasil wawancara tanggal 24-09-2019).

Menurut saya, strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran kelebagaannya dalam menangani masalah lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pada permukiman kumuh sudah sesuai, karena selain membangun kesadaran masyarakat, juga membantu implementasi di lapangan. Kegiatan Kotaku sudah cukup mengedukasi hingga ke level pemerintah daerah dalam penanganan kumuh.

Pendekatan paling tepat dan sesuai untuk diterapkan adalah penanganan terpadu (perbaikan/ pemugaran, peremajaan, relokasi, penataan), penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat, penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN) serta penerapan konsep Kampung Tematik.

Majene sebagai salah satu kota yang termasuk kota tua, memang memerlukan penanganan dan penataan kota yang lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang *sustainable*. (hasil wawancara tanggal 31-09-2019).

M.Afiat Mulwan ST MT, salah seorang praktisi tata ruang wilayah dan kota di Majene mengemukakan bahwa:

Pola penanganan permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Banggae telah disinergikan atau disesuaikan dengan arahan RTRW.

Land use planning dan RTRWK dipedomani untuk mencegah perluasan kawasan kumuh khususnya pada hal-hal seperti lebar dan kondisi permukaan jalan, sistem drainase yang mampu mengalirkan limpasan air hujan, penyediaan pengolah limbah rumah tangga, titik-titik penyediaan sarana persampahan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Tindakan program Kotaku sudah tepat dan sesuai dengan kebijakan penatagunaan lahan dan RTRWK karena dilakukan dengan langkah-langkah : identifikasi awal penyebab kekumuhan, penyusunan rencana kegiatan berdasarkan arahan *land use planning* dan RTRW dengan pelibatan masyarakat, termasuk pelibatan dalam pekerjaan fisik.

Pendekatan yang tepat dan sesuai adalah: (1) Penanganan terpadu, dengan melakukan intervensi berbasis permasalahan; (2) Revitalisasi, dengan mengembalikan fungsi-fungsi ruang sesuai arahan *land use planning* dan RTRW; (3) *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN), dengan mengembalikan fungsi ruang terbuka, pengolahan limbah dan persampahan. (hasil wawancara tanggal 31-09-2019).

Muh.Alif Chalil, salah seorang birokrat dan praktisi tata ruang wilayah dan kota di Majene mengemukakan bahwa:

Pola penanganan permukiman kumuh di perkotaan yang diterapkan oleh pelaksana program Kotaku di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) sudah disinergikan dan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Majene.

Land use planning dan RTRWK sudah dipedomani dan disinergikan antara proses pencegahan dan penanganan kumuh yang tertuang dalam RTRW Kabupaten seperti sistem pengelolaan limbah yang diarahkan menggunakan sistem off site pada wilayah padat permukiman. (hasil wawancara tanggal 17-09-2019).

Strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran kelebagaannya dalam menangani masalah lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pada penanganan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) sudah tepat dan sesuai dimana langkah-langkah tindakan program Kotaku sudah sejalan dengan perencanaan RTRWK Kabupaten serta pencapaian visi misi Bupati Majene dalam dokumen RPJMD tentang pencapaian target untuk kawasan kumuh hingga Tahun 2021 di Kota Majene.

Pendekatan paling tepat dan sesuai untuk diterapkan dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) berdasarkan kebijakan dan konsep penatagunaan lahan dan RTRWK adalah Penanganan terpadu, dimana jika dipandang perlu lokasi kawasan kumuh perlu perbaikan maka dilakukan perbaikan, ataupun pemagaran serta peremajaan dan relokasi yang sering dibutuhkan pada kawasan permukiman kumuh jika lokasinya berada pada zona merah atau terkurung. Misalnya berada ada wilayah sempadan..... yang nantinya akan menimbulkan dampak negatif pada kawasan tersebut. (hasil wawancara tanggal 24-09-2019).

Dr.Hj.Atika MM, salah seorang ilmuwan dalam bidang MSDM dan ekonomi, birokrat dan praktisi sekaligus pemerhati/pengamat masalah ekonomi perkotaan di Majene mengemukakan bahwa:

Saya menilai bahwa apa yang dilaksanakan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh disesuaikan dengan konsep pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan yang terhubung dengan pusat-pusat bisnis/perdagangan dan fasilitas perekonomian kota seperti pasar sentral, pusat pertokoan, dan lainnya sehingga progress yang merupakan tujuan akhir adalah bagaimana membangun dan mengembangkan kawasan ekonomi terpadu dapat terwujud. (hasil wawancara tanggal 01-10-2019).

Sangat jelas bahwa pola penanganan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku dalam rangka mencegah perluasan kawasan kumuh. Oleh karena itu masyarakat diberikan *skill* (keahlian atau keterampilan) yang sangat perlu dikembangkan guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Konsep pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan dapat menuai hasil dan berkelanjutan.

Menurut saya, strategi dan langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan di Pemerintahan Daerah bersama dan jajaran kelebagaannya sudah tepat dalam menangani berbagai macam permasalahan mulai dari masalah lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Namun dalam penerapan dan implementasinya belum maksimal sebab masih ada hal-hal yang perlu disentuh dengan pendekatan tertentu. Perlu ada monitoring dan evaluasi dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut saya, pendekatan paling tepat dan sesuai untuk diterapkan dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) berdasarkan kebijakan dan konsep pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan adalah penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN) mengingat keberlanjutan penanganan aneka masalah permukiman kumuh sangat diharapkan. Demikian pula penerapan konsep Kampung Tematik dalam rangka pemberdayaan SDM masyarakat setempat dengan produk unggulan yang ada. Selain itu juga diperlukan pendekatan kultural, yang bertujuan mengajak warga masyarakat keluar dari kemiskinan melalui pengamalan nilai-nilai kearifan lokal seperti *siwali perri*, *sipakale'biq* dan lainnya. (hasil wawancara tanggal 19-10-2019).

Keseluruhan uraian pendapat atau penilaian tersebut menunjukkan bahwa informan atau narasumber dari kalangan pakar atau akademisi, praktisi, serta pemerhati atau pengamat dengan bidang keilmuan dan keahliannya masing-masing melihat dan menerjemahkan pola penanganan permukiman kumuh khususnya dalam pelaksanaan program Kotaku di Kecamatan Banggae dan Kabupaten Majene secara keseluruhan. Mereka memiliki persamaan dan perbedaan pandangan atau penilaian tertentu terhadap kebijakan, perencanaan, dan aktualisasi pendekatan-pendekatan dalam pola penanganan permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Banggae. Berikut formulasi penilaiannya.

Tabel 4.9
Formulasi Penilaian Informan Ahli Tentang Aplikasi dan Strategi Pola Penanganan
Permukiman Kumuh Oleh Program Kotaku di Kelurahan Banggae

No	Nama Informan Ahli	Bidang Keilmuan/Keahlian	Evaluasi Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Banggae	
			Penilaian Informan ahli terhadap kinerja pengelola program Kotaku	Strategi pola penanganan yang disarankan
1	2	3	4	5
1	Dra Marjanah M.Pd	Manajemen Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penanganan permukiman kumuh belum nampak hasilnya baik dari segi lingkungan maupun sosbudek belum berdampak positif bagi masyarakat. ○ Pola penanganan dan tindakan secara rencana sangat bagus, namun realitas empiris di lapangan belum terlihat realisasi dan hasilnya. ○ Strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku sudah tepat, namun dalam realisasi masih sangat minim, sehingga diperlukan pemerataan dalam menjalankan program tanpa pandang bulu. 	Penanganan terpadu (perbaikan, pemugaran, peremajaan, relokasi)
2	Muh.Sabir	Sosiologi perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penerapan pola penanganan permukiman kumuh cukup memadai, tetapi perlu perhatian lebih ○ <i>Land use planning</i> dan RTRWK tetap dipedomani ○ Penanganan permukiman kumuh tetap merujuk pada pola dan tindakan penanganan jalan lingkungan, perbaikan drainase, penyediaan air minum sampai fasilitas RTP atau RTH. ○ Strategi dan langkah tindakan Pemerintah Daerah/kelembagaannya sudah tepat ○ Konsep penatagunaan lahan dan RTRWK dilakukan oleh pelaksana program Kotaku mengacu kepada petunjuk dan pedoman dari Kementerian PUPR, namun perlu kesesuaian evaluasi dan kolaborasi keberlanjutan program. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penanganan terpadu (perbaikan/pemugaran, peremajaan, relokasi). ✓ Pendekatan partisipatif, kreatif, inovatif
3	Supriadi	Lingkungan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pola penanganan permukiman kumuh yang diterapkan sudah disesuaikan dengan pembangunan berwawasan lingkungan tapi belum maksimal pelaksanaannya. ○ Untuk pengembangan RTH masih belum nampak, dan belum sesuai standar RTH 30% dari luas wilayah yang ada. ○ Pola yang digunakan dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan RTH belum maksimal ○ Strategi yang diterapkan oleh Pemda sudah tepat dalam menangani masalah LSEB masyarakat, namun kesadaran dan kepedulian masyarakat/stakeholder masih kurang, pemahaman masyarakat tentang program pemerintah dan pembangunan berwawasan lingkungan masih kurang, dan masyarakat masih kurang pemahamannya tentang RTH 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penanganan terpadu (perbaikan/pemugaran, peremajaan, relokasi) ✓ Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat ✓ <i>Redevelopment</i> ✓ Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya), ✓ Penerapan konsep Kampung Tematik.
4	Syahrinullah	Praktisi tata ruang wilayah dan kota (TRWK)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pola penanganan permukiman kumuh sejauh ini tidak sesuai dan berpedoman pada RTRWK kabupaten ○ Perencanaan kerja Kotaku sudah mengacu kepada RTRWK kabupaten, utamanya dalam penentuan target dan luasan penanganan kumuh perkotaan ○ Strategi dan langkah tindakan program Kotaku, 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penanganan terpadu (perbaikan/pemugaran, peremajaan, relokasi, penataan) ✓ Penerapan konsep

lanjutan

			<p>Pemda/ kelembagaannya menangani masalah LSEB permukiman kumuh sudah sesuai, yakni membangun kesadaran masyarakat, membantu implementasi di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Kegiatan Kotaku sudah cukup mengedukasi hingga ke level pemerintah daerah dalam penanganan kumuh. 	<p>pembangunan bertumpu pada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penerapan prinsip <i>Sustainable Urban Neighborhood</i> (SUN) ✓ Penerapan konsep Kampung Tematik.
5	M.Afiat Mulwan ST MT	Praktisi TRWK	<ul style="list-style-type: none"> o Pola penanganan permukiman kumuh telah disinergikan atau disesuaikan dengan arahan RTRW. o <i>Land use planning</i> dan RTRWK dipedomani untuk mencegah perluasan kawasan kumuh o Tindakan program Kotaku sudah tepat dan sesuai dengan kebijakan penatagunaan lahan dan RTRWK karena dilakukan dengan langkah-langkah : identifikasi awal penyebab kekumuhan, penyusunan rencana kegiatan berdasarkan arahan <i>land use planning</i> dan RTRW dengan pelibatan masyarakat, termasuk pelibatan dalam pekerjaan fisik. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penanganan terpadu, dengan melakukan intervensi berbasis permasalahan ✓ Revitalisasi, dengan mengembalikan fungsi-fungsi ruang sesuai arahan <i>land use planning</i> dan RTRW ✓ <i>Sustainable Urban Neighborhood</i> (SUN).
6	Muh.Alif Chalil	Praktisi TRWK	<ul style="list-style-type: none"> o Pola penanganan permukiman kumuh sudah disinergikan dan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Majene. o <i>Land use planning</i> dan RTRWK sudah dipedomani dan disinergikan antara proses pencegahan dan penanganan kumuh yang tertuang dalam RTRW Kabupaten seperti sistem pengelolaan limbah yang diarahkan menggunakan sistem off site pada wilayah padat permukiman. o Strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku, Pemda/ kelembagaan sudah tepat dan sesuai, serta sejalan dengan RTRWK Kabupaten serta pencapaian visi misi Bupati Majene dalam dokumen RPJMD tentang pencapaian target untuk kawasan kumuh hingga Tahun 2021 di Kota Majene. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penanganan terpadu (perbaikan, pemagaran, peremajaan)
7	Dr.Hj.Atika MM	Ekonomi, MSDM	<ul style="list-style-type: none"> o Penanganan permukiman kumuh disesuaikan dengan konsep pengembangan kawasan ekonomi terpadu (KET) perkotaan yang terhubung dengan pusat-pusat bisnis/perdagangan dan fasilitas perekonomian kota o Pola penanganan dan tindakan mencegah perluasan kawasan kumuh. menuntut pemberian <i>skill</i> (keahlian atau keterampilan), pengembangan SDM dan KET. o Strategi dan langkah tindakan pengambil kebijakan di Pemda sudah tepat dalam menangani berbagai macam permasalahan lingkungan, sosekbud masyarakat. Namun dalam penerapan dan implementasinya belum maksimal sebab masih ada hal-hal yang perlu disentuh dengan pendekatan tertentu. Perlu ada monitoring dan evaluasi dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penerapan prinsip <i>Sustainable Urban Neighborhood</i> (SUN) ✓ Penerapan konsep Kampung Tematik ✓ Pendekatan kultural.
Sumber : hasil analisis Tahun 2019				

Tabel 4.9 tersebut menunjukkan bahwa kalangan ahli di tingkat lokal di Kabupaten Majene mengemukakan pandangan atau penilaian tentang pola penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae yang beragam atau berbeda, bahkan ada yang saling bertolak belakang. Diantara ahli menilai penanganan permukiman kumuh belum jelas *output* dan *outcome*-nya bagi warga masyarakat dan lingkungan permukimannya. *Action plan* penanganan dinilai sangat bagus namun *real action*-nya dinilai sebaliknya, yakni *absurd*. Namun umumnya informan ahli tersebut sepakat bahwa strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae sudah tepat dan sesuai baik ditinjau dari segi manajemen, sosiologi perkotaan, lingkungan, tata ruang wilayah, maupun ekonomi dan MSDM. Yang dipersalahkan hanyalah realisasi dan implementasinya yang dianggap masih kurang jelas.

Umumnya informan ahli sepakat merekomendasikan pola penanganan terpadu sebagai strategi utama penanganan permukiman kumuh, yang diintegrasikan dengan penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat (*Community-based development/ CBD*), *Redevelopment*, Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya), penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN), penerapan konsep Kampung Tematik, termasuk pendekatan partisipatif dan pendekatan kultural. Dengan demikian maka jelaslah bahwa pola penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku di

Kelurahan Banggae sangat penting dilakukan secara terintegratif, komprehensif dan holistik.

E. Evaluasi Perubahan, Manfaat Dan Dampak Yang Dihasilkan Dari Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Banggae

1. Evaluasi perubahan, manfaat dan dampak berdasarkan indikator dan perbandingan kondisi permukiman kumuh sebelum dan pasca pelaksanaan program Kotaku

Kelurahan Banggae dengan empat lingkungannya (yakni Pakkola, Saleppa, Battayang dan Copala) secara nyata masih menghadapi tantangan permasalahan yang kompleks khususnya dalam hal lingkungan dan permukiman kumuh “*slum area*” sebelum program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) muncul atau diterapkan menggantikan program lama baik program nasional (terutama seperti PNPM Perkotaan) maupun program daerah. Tentu, dengan hadirnya program Kotaku melakukan intervensi secara langsung (*directly intervention*) baik teknis maupun non teknis, baik fisik maupun non-fisik melalui pendekatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi) pembangunan wilayah dan perkotaan yang diusung atau dipergunakan serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat lokal sangat berharap agar realisasi, aplikasi, aktualisasi dan implementasi program Kotaku tersebut benar-benar memberikan suatu perubahan yang signifikan atau berarti baik fisik maupun non-fisik, dan/ atau memberikan suatu manfaat atau dampak

positif yang lebih konkrit dan luas bagi Kelurahan Banggae dan masyarakatnya.

Program Kotaku sebagai program nasional yang diusung dan diterapkan sejak Tahun 2014 oleh Pemerintah Pusat terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) khususnya Direktur Jenderal Cipta Karya (DJCK), yang secara khusus diluncurkan untuk menangani segala persoalan mengenai kawasan permukiman kumuh perkotaan (*urban slum area*) benar-benar mampu menjadi instrumen dan dinamisor perubahan (*changer*) yakni mengubah permukiman kumuh menjadi permukiman non-kumuh atau bebas dari potensi kumuh, mengubah sikap mental dan perilaku kumuh menjadi mental dan perilaku PHBS, serta mengubah kondisi sosial ekonomi dan budaya yang tidak/kurang menguntungkan/menggembirakan menjadi kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang berkesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian dan uraian analisis pembahasan sub topik tersebut diatas, dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perubahan-perubahan manfaat dan dampak yang ditimbulkan atau diciptakan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae atas manajemen penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2016 sampai sekarang (Tahun 2019). Evaluasi ini dilakukan dengan cara memperbandingkan antara kondisi permukiman sebelum, selama dan pasca pelaksanaan program Kotaku berdasarkan determinan kriteria (fisik dan non-fisik) dan indikator-indikator yang ditetapkan yaitu:

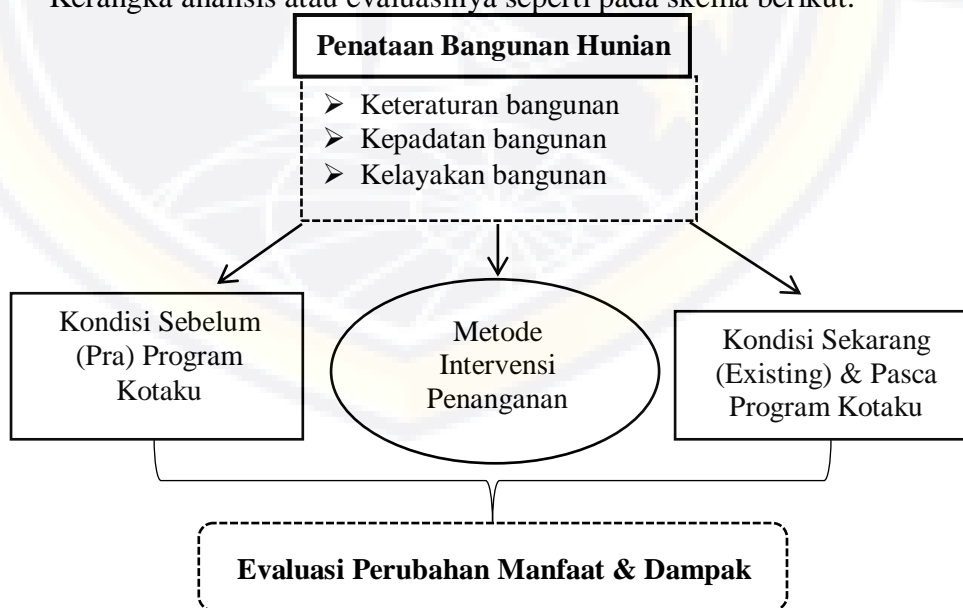
- (1) Perubahan Penataan (keteraturan dan kelayakan) bangunan hunian
- (2) Perubahan Aksesibilitas lingkungan
- (3) Perubahan Drainase lingkungan
- (4) Perubahan Pelayanan air minum/bersih/baku
- (5) Perubahan Pengelolaan air limbah rumah tangga
- (6) Perubahan Pengelolaan persampahan
- (7) Perubahan Perlindungan kebakaran
- (8) Perubahan Penataan Ruang Terbuka Publik
- (9) Perubahan Legalitas pendirian bangunan hunian
- (10) Perubahan Sosial budaya
- (11) Perubahan Sosial ekonomi.

Kesepuluh indikator tersebut diuraikan analisis perbandingan dan evaluasinya masing-masing seperti berikut.

a. Evaluasi perubahan Penataan Bangunan Hunian beserta manfaat dan dampaknya

Analisis atau evaluasi perubahan manfaat dan dampak penataan bangunan hunian dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi bangunan hunian sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan beserta dengan intervensi penanganan yang dilakukan.

Kerangka analisis atau evaluasinya seperti pada skema berikut.



Gambar 4.12 Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Bangunan Hunian di Kelurahan Banggae.

Berdasarkan skema tersebut, diuraikan analisis dan evaluasi perubahan manfaat dan dampak seperti tertera pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Bangunan Hunian
Pasca Pelaksanaan Program Kotaku, 2019

No.	Evaluasi perbandingan	Penataan bangunan hunian		
		Keteraturan bangunan	Kepadatan bangunan	Kelayakan bangunan
1	2	3	4	5
1	Kondisi pra program Kotaku (Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Versi I: 395 unit bangunan/ rumah tidak teratur : 810 unit teratur • Versi II: 591 (50%) unit bangunan/ rumah tidak teratur : 527 unit teratur 	<ul style="list-style-type: none"> • Versi I: 1.205 unit bangunan • Versi II : 1118 unit bangunan • Kepadatan bangunan hunian 37-81 unit/ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 324 unit RTLH : 881 unit layak huni (RLH). • 1.118 rumah tangga (RT), terdiri atas: 70 RT dengan luas lantai <7,2m²/orang : 1.046 RT dengan luas lantai ≥7,2m²/orang.
2	Metode intervensi penanganan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penataan 591 unit bangunan tidak teratur ○ Penataan jarak antar bangunan ○ Pemugaran. peremajaan ○ Sosialisasi peraturan pendirian bangunan (IMB dan SHM/HGB) ○ Memperketat pengawasan pendirian bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penataan bangunan hunian pada kawasan dataran rendah ○ Dibutuhkan 49 unit bangunan hunian dengan luas kebutuhan lahan 0,49 ha (proyeksi 5 tahun) ○ Sosialisasi dan pengawasan peraturan pendirian bangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rehab 377 unit RTLH ○ Penambahan luas lantai 79 unit rumah yang memiliki luas lantai < 7,2 m²/jiwa
3	Kondisi pasca program Kotaku (Tahun 2019)	473 unit bangunan tidak teratur : 723 unit teratur	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.196 unit bangunan ✓ Kepadatan bangunan 22 unit/ha 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 402 unit bangunan non syarat teknis : 794 unit bangunan memenuhi syarat teknis ✓ 1.055 unit bangunan dengan luas lantai ≥7,2 m²/orang : 141 unit dengan luas lantai <7,2 m²/orang.
4	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah bangunan tidak teratur bertambah 78 unit ✓ Jumlah bangunan teratur berkurang sebanyak 87 unit ✓ Masih terdapat 473 unit bangunan tidak teratur ✓ Sosialisasi dan pengawasan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah bangunan hunian berkurang sebanyak 9 unit ✓ Kepadatan bangunan berkurang 15 unit/ha ✓ Terjadi perubahan kepadatan bangunan hunian dari rendah menjadi lebih rendah lagi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah bangunan tergolong RTLH bertambah 78 unit ✓ Jumlah bangunan hunian tergolong layak huni atau memenuhi syarat teknis berkurang 87 unit ✓ Rencana rehab 377 unit RTLH tidak sesuai data jumlah RTLH Tahun 2015 ✓ Rencana penambahan luas lantai 79 unit rumah yang memiliki luas lantai <7,2 m²/jiwa kurang sesuai dengan data Tahun 2015 serta tidak sesuai perkembangan kebutuhan penanganan. ✓ Jumlah unit bangunan hunian dengan luas lantai ≥7,2 m²/orang bertambah 9 unit.
5	Manfaat dan dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rencana penataan bangunan hunian dan penanggulangan RTLH semakin baik ✓ Metode penanganan teknis tidak/kurang maksimal/ efektif 		

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 4.10 tersebut, dapat diformulasikan bahwa:

1) Kondisi bangunan hunian Pra-Program Kotaku

Pra-program Kotaku, kondisi bangunan hunian atau perumahan penduduk di Kelurahan Banggae umumnya jenis bangunan permanen dan semi permanen dengan bentuk bangunan pada umumnya berupa rumah panggung dan rumah batu serta sebagian juga berbentuk ruko. Rumah panggung yang ada umumnya merepresentasikan rumah tradisional etnis Mandar. Namun dalam perkembangannya ditambah dengan pasangan batu pada bagian bawah kolong rumah panggung atau dirubah konstruksinya menjadi rumah batu. Hal ini mengindikasikan adanya pola kecenderungan atau pergeseran kepada model atau bentuk konstruksi bangunan hunian modern. Pergeseran tersebut tentu cukup beralasan sebab bahan material bangunan rumah panggung terutama kayu semakin sulit diperoleh serta harganya mahal, dibanding dengan bahan bangunan berupa batu (batu bata, batu merah, batu gunung, pasir dan lainnya) yang semakin mudah diperoleh. Selain rumah jenis bangunan permanen dan semi permanen tersebut, juga berkembang bangunan rumah toko (Ruko) terutama di Lingkungan Pakkola, Saleppa dan Battayang sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan tempat usaha untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pasar dan

pertokoan sehingga rumah tinggal pun didesain sekaligus sebagai tempat usaha menjadi Ruko.

Terlepas dari situasi pergeseran bentuk bangunan tersebut, berkembang pula bangunan rumah yang tidak layak huni yang sering disebut RTLH terutama di Lingkungan Copala. RTLH tersebut umumnya dicirikan oleh kondisi atap, lantai dan dinding (ALADIN) yang rusak dan tidak memadai, terutamayang banyak dijumpai pada rumah panggungyang menggunakan atap dari daun rumbia atau daun nipah, dinding serta lantai dari bambu. Ketidaklayakan bangunan hunian tidak hanya dari kondisi material bangunan semata namun juga dari luas lantai hunian yang kurang dari 7,2 m²/orang.

Permasalahan lainnya adalah keteraturan bangunan hunian, dalam hal ini 50% dari total rumah di Kelurahan Banggae kondisinya tidak teratur. Banyak rumah yang tidak memiliki akses langsung atau menghadap ke jalan yang lebarnya minimal 1,5 meter. Mayoritas jalan lingkungan setapak lebarnya hanya 1,2 meter saja. Selain faktor tersebut, ketidakteraturan bangunan rumah di Kelurahan Banggae juga disebabkan oleh orientasi bangunan rumah yang seringkali disesuaikan dengan letak dan kondisi kavling bangunan. Semua situasi dan kondisi problematika tersebut memerlukan sentuhan program penataan terutama program Kotaku yang diimplementasikan di Kelurahan Banggae sejak Tahun 2016 dan rencananya hingga Tahun 2021.

2) Perubahan kondisi penataan bangunan Pasca-Program Kotaku

Kondisi perubahan penataan bangunan hunian selama atau pasca pelaksanaan program Kotaku berdasarkan data pada Tabel 4.10 tersebut, dapat diformulasikan sebagai berikut:

a) Perubahan keteraturan bangunan hunian

Jumlah bangunan hunian yang tidak teratur di Kelurahan Banggae justru meningkat selama atau pasca pelaksanaan program Kotaku (Tahun 2019) dibanding sebelum program Kotaku dilaksanakan Tahun 2015. Hal ini berarti bahwa metode intervensi penanganan tidak/kurang efektif, atau bahkan program penataan bangunan hunian tidak teratur, penataan jarak antar bangunan, pemugaran, peremajaan, sosialisasi dan pengawasan pendirian bangunan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. *Action plan* atau rencana aksi/tindakan yang sudah ditetapkan baik berdasarkan analisa kebutuhan penanganan masalah maupun berdasarkan RIK Tahun 2016-2021 dalam dokumen RPLP Kelurahan Banggae tidak dilaksanakan atau tidak ada realisasi yang konkrit.

b) Perubahan kepadatan bangunan

Jumlah unit bangunan hunian berkurang sebanyak 9 unit dari 1.205 unit pada Tahun 2015 menjadi 1.196 unit pada Tahun 2019. Demikian pula kepadatan bangunan berkurang 15 unit/ha. Hal ini berarti bahwa metode intervensi penanganan berupa

rencana dan kegiatan penataan bangunan hunian pada kawasan dataran rendah serta relokasi 49 unit bangunan hunian pada lahan seluas 0,49 ha berdampak pada pengurangan tingkat kepadatan bangunan hunian.

c) Perubahan kelayakan bangunan hunian

Jumlah bangunan hunian tergolong RTLH semakin bertambah dan sebaliknya jumlah bangunan hunian tergolong layak huni atau memenuhi syarat teknis justru berkurang. Rencana rehab sejumlah RTLH tidak sesuai dengan data jumlah RTLH Tahun 2015 dan juga tidak sesuai dengan perkembangan jumlah RTLH yang membutuhkan penanganan selama program Kotaku berlangsung.

Uraian tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, adanya program penataan bangunan hunian melalui program Kotaku di Kelurahan Banggae sangat bermanfaat di dalam menciptakan keteraturan bangunan hunian yang lebih baik sesuai dengan konsep dan arahan rencana tata ruang dan tata guna lahan, meningkatkan kuantitas bangunan yang layak huni, mengubah status dan kondisi RTLH (rumah tidak layak huni) menjadi RLH (rumah layak huni), serta mensetting kepadatan bangunan yang lebih teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan kebutuhan pelayanan akses lainnya.

Penataan bangunan hunian di Kelurahan Banggae melalui intervensi penanganan oleh program Kotaku bukannya meningkatkan

keteraturan bangunan dan juga tidak mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), malahan sebaliknya yakni jumlah bangunan tidak teratur dan rumah tidak layak huni justru meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kesalahan, kekeliruan atau ketidakcermatan pendataan awal, serta ada kelalaian dalam pembaharuan data selama pelaksanaan program oleh pengelola dan pelaksana program Kotaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal penataan keteraturan dan kelayakan bangunan hunian. Rencana intervensi penanganan dalam penataan bangunan melalui program Kotaku tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak memberikan manfaat dan dampak positif sebagaimana yang diharapkan.

Jumlah bangunan hunian yang teratur yang semula diharapkan dapat meningkat, pada kenyataannya justru berkurang. Demikian pula jumlah bangunan hunian yang tidak teratur yang semula diharapkan juga dapat berkurang, pada kenyataannya justru bertambah. Namun demikian, intervensi penanganan tersebut menimbulkan perubahan dan memberikan manfaat dan dampak terhadap berkurangnya tingkat kepadatan bangunan hunian.

b. Evaluasi perubahan Aksesibilitas lingkungan, manfaat dan dampaknya

Determinan utama dari aksesibilitas lingkungan adalah ketersediaan jalan dengan ukuran panjang dan lebar serta kondisinya

sebelum dan selama atau pasca program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae. Kondisi jalan lingkungan yang belum memadai dan bermasalah baik secara teknis maupun non-teknis, baik struktur maupun fungsionalnya, memerlukan intervensi penanganan yang tepat dan efektif. Karena itu, perubahan manfaat dan dampak terhadap aksesibilitas lingkungan diharapkan terjadi setelah adanya intervensi program dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi. Kerangka analisis atau evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam hal aksesibilitas jalan lingkungan tersebut seperti pada skema berikut.



Gambar 4.13 Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Aksesibilitas Jalan Lingkungan di Kelurahan Banggae.

Berdasarkan skema tersebut, dapat diuraikan analisis dan evaluasi perubahan manfaat dan dampak penataan aksesibilitas jalan lingkungan di Kelurahan Banggae seperti tertera pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Aksesibilitas Jalan
Lingkungan Pasca Pelaksanaan Program Kotaku, 2019

No.	Evaluasi perbandingan	Penataan aksesibilitas lingkungan		
		Ukuran panjang dan lebar jalan	Kondisi jalan dan akses	Kualitas jalan
1	2	3	4	5
1	Kondisi pra program Kotaku (Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Total panjang jalan 15.822 meter (m) • 10.060 m panjang jalan dengan lebar $\geq 1,5$ m • 3.060 m panjang jalan dengan lebar $< 1,5$ m. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian jalan telah diperkeras dengan aspal dan beton • Sebagian jalan pemukaannya masih berupa tanah, belum pengerasan, berdebu, tergenang air dan becek • Jangkauan pelayanan 100%, tidak dibutuhkan jalan baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang jalan rusak 10.728 m atau 10.876 m (68,74%) • Sebagian jalan tidak dilengkapi bangunan pelengkap/saluran samping serta kualitasnya kurang baik/buruk.
2	Metode intervensi penanganan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penataan badan jalan sesuai dengan kondisi permukiman ($< 1,5$ meter) ○ Perbaikan jalan rusak sepanjang 5.132 meter ○ Rehab jalan sepanjang 10.577 m (RIK 2016-2021) ○ Peningkatan kualitas jalan sepanjang 3.060 meter ○ Perencanaan pengembangan jalan baru; khusus Copala 53 m ○ Sosialisasi tentang perencanaan jalan dan Aturan Bersama (AB). 		
3	Kondisi pasca program Kotaku (Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Total panjang jalan 15.822 m ✓ 10.824 m panjang jalan dengan lebar $\geq 1,5$ m ✓ 4.458 m panjang jalan dengan lebar $< 1,5$ m 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 8.129 m panjang jalan (lebar $\geq 1,5$m) dan 115 m ($< 1,5$m) permukaannya pengerasan ✓ 6.607 m panjang jalan (lebar $\geq 1,5$m) dan 790 m ($< 1,5$m) memiliki saluran samping ✓ 9.215 m panjang jalan (lebar $\geq 1,5$m) dan 3.368 m ($< 1,5$m) tanpa saluran samping 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 4.946 m panjang jalan memiliki kualitas baik. ✓ 33% panjang jalan memenuhi syarat teknis ✓ 10.888 m panjang jalan masih tergolong non-kualitas.
4	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada penambahan jalan baru ✓ Panjang jalan dengan lebar $\geq 1,5$ m bertambah 764 m ✓ Panjang jalan dengan lebar $< 1,5$ m bertambah 396 m ✓ Ketersediaan jalan lingkungan cukup memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Panjang jalan lingkungan dan jalan setapak yang mengalami pengerasan aspal dan beton semakin meningkat yakni sebanyak 8.129 m (lebar $\geq 1,5$m) dan 115 m (lebar $< 1,5$m) ✓ Panjang jalan yang dilengkapi bangunan pelengkap semakin meningkat yakni 6.607 m (lebar $\geq 1,5$m) dan 790 m ($< 1,5$m) ✓ Masih terdapat 9.215 m panjang jalan (lebar $\geq 1,5$m) dan 115 m (lebar $< 1,5$m) yang memerlukan bangunan pelengkap terutama saluran samping 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jalan sepanjang 4.946 m mengalami peningkatan kualitas ✓ 33% panjang jalan memenuhi syarat teknis, dan atau 67% panjang jalan masih memerlukan persyaratan teknis ✓ Jalan sepanjang 10.888 m masih memerlukan peningkatan kualitas.
5	Manfaat dan dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aksesibilitas jalan lingkungan semakin meningkat yang mendukung berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk mendukung akses layanan Damkar. ✓ Penataan jalan semakin meningkat dan lebih baik namun belum merata ✓ Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana serta fasilitas jalan lingkungan semakin meningkat dan lebih baik, namun belum sepenuhnya tuntas/komprehensif ✓ Pelayanan jalan tetap menjangkau seluruh lingkungan dan kelurahan ✓ Analisa kebutuhan penanganan dan <i>real action</i>-nya masih perlu disinkronisasikan ✓ Penduduk menikmati hasil dan manfaat proyek peningkatan pembangunan jalan ✓ Program pembangunan jalan lingkungan masih tetap berkelanjutan ✓ Pelaksanaan program Kotaku masih tetap perlu dilanjutkan. 		

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Keseluruhan data pada Tabel 4.11 tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kotaku memberikan perubahan yang lebih baik terhadap penataan aksesibilitas jalan lingkungan di Kelurahan Banggae yang ditandai oleh berkurangnya panjang jalan rusak, meningkatnya panjang jalan mengalami pengerasan (aspal dan beton) dan peningkatan kualitas, memenuhi syarat teknis dan memiliki bangunan pelengkap saluran samping. Walaupun masih ada sebagian jalan lingkungan yang masih memerlukan peningkatan kualitas dan pemenuhan syarat teknis serta bangunan pelengkap, namun secara umum masyarakat lokal menikmati manfaat dari hasil-hasil pembangunan jalan yang sudah dibangun, direhab/diperbaiki, dipugar, dilengkapi bangunan pelengkap ataupun ditingkatkan kualitasnya. Penataan jalan lingkungan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur/prasarana dan fasilitas jalan lingkungan, meningkatnya aksesibilitas dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat lokal termasuk meningkatnya akses pelayanan mobil pemadam kebakaran (Damkar) memasuki lingkungan permukiman bilamana terjadi bencana kebakaran, serta meningkatnya penataan lingkungan permukiman. Sedangkan dampak negatifnya adalah masih adanya keluhan, kecemburuan sosial dan persepsi negatif kalangan warga masyarakat terhadap pelaksanaan program karena proyek pembangunan/perbaikan/pengerasan jalan tidak/ belum tuntas hingga didepan rumahnya.

c. Evaluasi perubahan pengelolaan Drainase lingkungan beserta manfaat dan dampaknya

Perubahan manfaat dan dampak terhadap drainase lingkungan diharapkan terjadi setelah adanya intervensi program dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi. Kerangka analisis atau evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam hal aksesibilitas jalan lingkungan tersebut seperti pada skema berikut.



Gambar 4.14 Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Penataan Drainase Lingkungan di Kelurahan Banggae.

Berdasarkan skema tersebut, dapat diuraikan analisis perbandingan dan evaluasi perubahan manfaat dan dampak penataan drainase lingkungan di Kelurahan Banggae seperti tertera pada Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Drainase
Lingkungan Pasca Pelaksanaan Program Kotaku, 2019

No.	Evaluasi perbandingan	Penataan Drainase Lingkungan		
		Ukuran panjang drainase	Kondisi dan kualitas	Kebutuhan ideal
1	2	3	4	5
1	Kondisi pra program Kotaku (Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Total panjang drainase 10.944 meter (m) 	<ul style="list-style-type: none"> • Versi I: 1.462 m (13,30%) panjang drainase rusak • Versi II: 2.897 m drainase rusak • 8.469 m (88,85%) panjang drainase tidak terpelihara. • Luas permukiman 61,42 ha semuanya bebas genangan air 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.808 m (25,54%) rencana panjang drainase.
2	Metode intervensi penanganan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembuatan drainase sepanjang 14.830 m ○ Pembuatan drainase baru 1.763 m (RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae) ○ Perbaiki saluran drainase rusak sepanjang 2.897 meter ○ Rehab drainase sepanjang 1.462 m (RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae) ○ Sosialisasi PHBS dan Aturan Bersama (AB) 		
3	Kondisi pasca program Kotaku (Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Total panjang drainase 10.994 m 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 9.532 m panjang saluran drainase tergolong kualitas baik, dan atau 1.462 m panjang saluran drainase kategori rusak ✓ 3.818 m panjang drainase dengan kondisi bersih dan tidak bau, dan atau 7.176 m panjang drainase kotor, dipenuhi sampah, tergenang buangan air limbah serta berbau (tidak terpelihara) ✓ 58,92 ha (94,25% dari total luas permukiman 59,93 ha) luas area permukiman tanpa genangan air/banjir, dan/atau 1,01 ha area permukiman masih tergenang air. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 367 m (11%) drainase baru dibutuhkan untuk terhubung sistem drainase kota ✓ 2.441 m drainase baru dibutuhkan untuk pelayanan drainase keseluruhan ✓ 13.435 m kebutuhan drainase ideal
4	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada penambahan 50 m panjang drainase 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendataan awal panjang drainase Tahun 2015 tidak/kurang akurat, terjadi kesimpang siuran dan <i>overlapping</i> data ✓ Jika menggunakan data versi II mengenai panjang drainase rusak, berarti terjadi pengurangan panjang drainase rusak sepanjang 1.435 m. dengan kata lain, terjadi peningkatan kualitas 1.426 m panjang drainase setelah perbaikan/ rehab ✓ Jika mengacu kepada data versi II, berarti 2.897 meter panjang drainase rusak telah ditangani melalui perbaikan dan menjadi baik ✓ Terjadi peningkatan 1.293 m panjang drainase bersih, tidak bau, terpelihara ✓ Terdapat 3.818 m panjang drainase dengan kondisi bersih dan tidak bau ✓ Masih terdapat 7.176 m panjang drainase kotor, dipenuhi sampah, tergenang buangan air limbah serta berbau (tidak terpelihara) ✓ Masih ada genangan air 1,01 ha area 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisa kebutuhan total panjang drainase baru sebelum dan selama atau pasca program Kotaku masih tetap sesuai ✓ Analisa kebutuhan drainase ideal pada Tahun 2015 (pra program) adalah 13.752 m (10.944 + 2.808), sedangkan pasca program 13.435 m, sehingga ada selisih atau berkurang sepanjang 317 m. ✓ Rencana pembuatan drainase 14.830 m melampaui jumlah panjang drainase ideal berdasarkan hasil analisis

Lanjutan

		permukiman (terjadi peningkatan luas genangan air pada area permukiman).	kebutuhan.
5	Manfaat dan dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penambahan panjang drainase selama atau pasca program tidak signifikan ✓ Data awal (pra program) tentang panjang drainase rusak simpangsiur dan membingungkan ✓ Terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur/prasarana dan pemeliharaan saluran drainase ✓ Analisa kebutuhan penanganan drainase lingkungan dan <i>real action</i>-nya masih perlu disinkronisasikan baik data perencanaan maupun realisasinya ✓ Penduduk menikmati hasil dan manfaat proyek peningkatan pembangunan drainase ✓ Sosialisasi PHBS dan AB tidak jelas <i>real action</i> pelaksanaan dan realisasinya ✓ Perilaku pembuangan sampah dan limbah domestik ke dalam saluran drainase masih sering dan banyak terjadi pada setiap lingkungan dan kawasan permukiman ✓ Program pembangunan drainase lingkungan masih tetap perlu berkelanjutan ✓ Pelaksanaan program Kotaku masih tetap perlu dilanjutkan. 	

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Keseluruhan data pada Tabel 4.12 tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kotaku memberikan perubahan terhadap pembangunan drainase lingkungan di Kelurahan Banggae yang ditandai oleh adanya penanganan berupa perencanaan awal untuk pembuatan drainase sepanjang 14.830 m dan rencana perbaikan drainase rusak 2.897 m. Total panjang drainase pra program Kotaku adalah 10.944 m dan direncanakan pembangunan 2.808 m (25,54%) panjang drainase. Selain itu, juga teridentifikasi 8.469 m (88,85%) panjang drainase tidak terpelihara, atau dengan kata lain terdapat 2.475 m panjang drainase yang masih terpelihara. Permasalahan pada fase awal tersebut adalah kesimpangsiuran data awal mengenai panjang drainase yang rusak. Realitas perkembangannya pasca program Kotaku, walaupun panjang drainase bertambah 50 m dari 1.944 m menjadi 1.994 m secara keseluruhan namun pertambahan panjang tersebut tidak signifikan.

Panjang saluran drainase tergolong kualitas baik adalah 9.532 m, dan atau 1.462 m kategori rusak. Hal ini berarti perubahan jumlah panjang drainase yang mendapat pemeliharaan adalah 1.063 m,

sehingga jumlah panjang drainase yang terpelihara meningkat menjadi 7.057 m (9.532 m – 2.475 m). Demikian pula bahwa perbaikan drainase rusak yang semula direncanakan 2.897 m, dalam perkembangannya terjadi perubahan yakni jumlah panjang saluran drainase rusak berkurang sebanyak 1.435 m sehingga hanya tersisa 1.462 m drainase kategori rusak pada pelaksanaan program Kotaku.

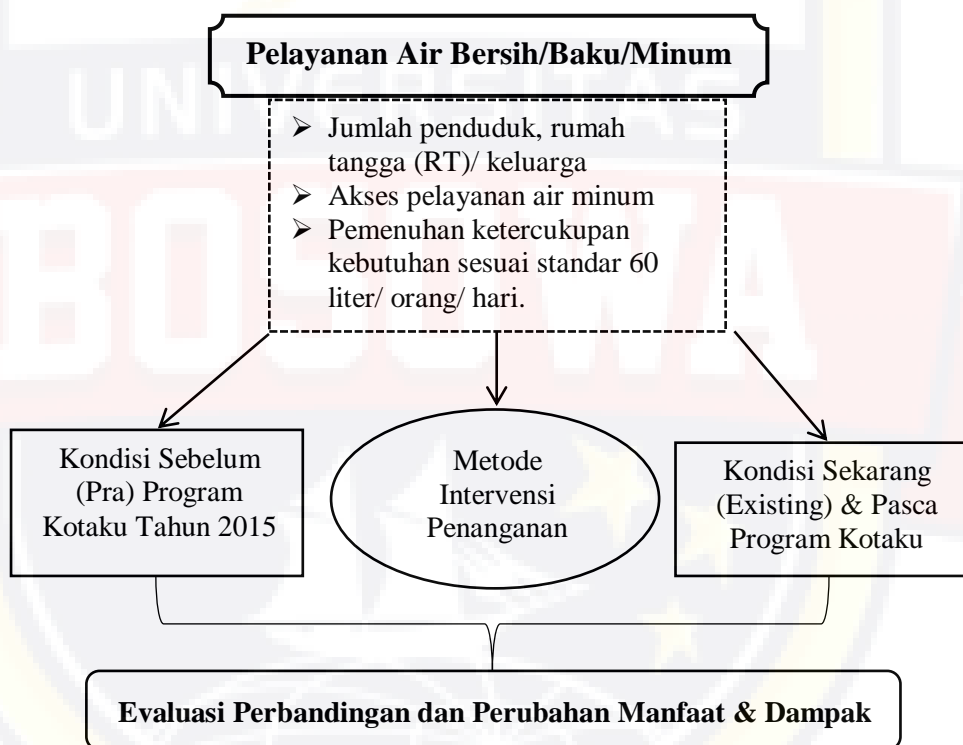
Perubahan lainnya adalah terdapat 3.818 m panjang drainase dengan kondisi bersih dan tidak bau, walaupun jumlah panjang drainase yang kotor, dipenuhi sampah, tergenang buangan air limbah serta berbau (tidak terpelihara) masih cukup besar yakni 7.176 m. Terkait dengan perencanaan drainase baru, pra program direncanakan 2.808 m (25,54%) pembangunan/pembuatan panjang drainase baru. Namun analisa kebutuhan pembangunan drainase baru pada masa pelaksanaan program Kotaku terjadi perubahan jumlah yakni agak lebih kecil atau berkurang 30 m dari 2.808 m menjadi 2.778 m (terdiri atas 367 m (11%) drainase baru untuk terhubung sistem drainase kota dan 2.441 m drainase baru untuk pelayanan drainase keseluruhan). Demikian pula analisa kebutuhan drainase ideal yang semula (Tahun 2015 atau pra program) ditetapkan sebanyak 13.752 m, berkurang 317 m sehingga menjadi 13.435 m pada masa atau pasca pelaksanaan program. Hal menarik juga dicermati bahwa dalam metode intervensi penanganan, rencana pembuatan drainase 14.830 m melampaui jumlah panjang drainase ideal berdasarkan hasil analisis kebutuhan yakni 13.435 m.

Terkait dengan genangan air, baik sebelum maupun selama atau pasca pelaksanaan program Kotaku, hampir tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali bahwa muncul genangan air pada 1,01 ha (6,75%) area permukiman. Meskipun luas genangan air tersebut masih tergolong sangat kecil namun tetap perlu mendapat perhatian dalam penanganan saluran drainase lingkungan agar tidak berkembang luas, terutama dengan penanganan saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat teknis (tersambung ke septik tank) agar air limbah dari rumah tangga tidak tertampung di saluran drainase dan meluber ke area permukiman yang bisa menimbulkan areal kumuh baru.

Perubahan-perubahan tersebut memberikan manfaat dan dampak positif bagi peningkatan *action plan* pembangunan infrastruktur/prasarana, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan drainase di Kelurahan Banggae, sehingga lingkungan permukiman dapat mengalami peningkatan kualitas dan warga masyarakat juga dapat menikmati manfaat dan memenuhi kebutuhannya atas saluran drainase. Namun demikian, kesimpangsiuran data perencanaan dan analisa kebutuhan drainase berdampak negatif terhadap ketidakakuratan dan ketidaktuntasan realisasi pelaksanaan (*real action*) pembangunan drainase secara keseluruhan. Hal ini dapat berimplikasi luas terhadap ketidakmerataan dan kesenjangan pembangunan drainase pada setiap lingkungan permukiman sehingga kalangan warga masyarakat pun dapat timbul ketidakpuasan/kekecewaan dan kecemburuan sosial.

d. Evaluasi perubahan Pelayanan air bersih/baku/minum beserta manfaat dan dampaknya

Perubahan manfaat dan dampak terhadap pelayanan air bersih/baku/minum diharapkan terjadi setelah adanya intervensi program dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi. Kerangka analisis atau evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam hal pelayanan air bersih/baku/minum tersebut seperti pada skema berikut.



Gambar 4.15 Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pelayanan Air Bersih/Baku/Air Minum di Kelurahan Banggae

Berdasarkan skema tersebut, dapat diuraikan analisis perbandingan dan evaluasi perubahan manfaat dan dampak pelayanan air bersih/baku/air minum di Kelurahan Banggae seperti tertera pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pelayanan Air Bersih/Baku/Air Minum Pasca Pelaksanaan Program Kotaku, , 2019

No.	Evaluasi perbandingan	Pelayanan Air Bersih/Baku/Air Minum		
		Jumlah Penduduk (RT, KK)	Akses pelayanan air minum	Ketercukupan kebutuhan sesuai standar 60 lt/hr/orang
1	2	3	4	5
1	Kondisi pra program Kotaku (Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Total penduduk 4.826 jiwa • \sum rumah tangga 1.118 KK • \sum keluarga 1.245 KK. 	<ul style="list-style-type: none"> • 87 KK (6,99%) tidak terakses air minum aman, dan/atau 1.031 KK (93,01%) terakses air minum aman 	<ul style="list-style-type: none"> • 256 KK (20,56%) tidak tercukupi kebutuhan air minum 60 liter/ hari/ orang • 989 KK (79,94%) tercukupi kebutuhan air minum 60 liter/ hari/ orang.
2	Metode intervensi penanganan	<ul style="list-style-type: none"> o 110 rumah tangga penyediaan akses air minum o Sambungan rumah 189 m (RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae) o Pembuatan sumur gali 12 unit di Copala o Ketercukupan air bersih 60 lt/org/hari untuk 297 rumah tangga adalah 555.384 m³ kebutuhan air bersih (proyeksi 5 tahun). 		
3	Kondisi pasca program Kotaku (Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ \sum rumah tangga 1.118 KK ✓ \sum keluarga 1.245 KK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.039 KK (85%) terlayani saluran perpipaan dan non perpipaan terlindungi yang layak untuk kebutuhan air minum, mandi dan cuci ✓ 79 KK (15%) tidak memiliki akses layanan air minum 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 358 KK (24%) tidak tercukupi kebutuhan air minum 60 liter/ hari/ orang. ✓ 887 KK (76%) tercukupi kebutuhan air minum 60 liter/ hari/ orang.
4	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada perubahan dalam hal jumlah penduduk, jumlah RT dan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah KK rumah tangga yang tidak memiliki akses atau tidak terlayani air minum berkurang 8 KK (87-79 KK), ataukah 8 KK yang sebelumnya tidak berakses menjadi berakses ke pelayanan air minum aman ✓ Terjadi peningkatan sebanyak 8 KK (15%) rumah tangga berakses atau terlayani air minum aman. ✓ Rencana penanganan penyediaan akses air minum bagi 110 KK rumah tangga melebihi jumlah 87 KK yang tidak terakses air minum aman. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terjadi peningkatan sebanyak 102 KK keluarga yang tidak tercukupi kebutuhan air minumnya sesuai standar. ✓ Rencana pemenuhan ketercukupan air bersih 60 lt/org/hari untuk 297 rumah tangga melebihi jumlah 256 KK yang tidak tercukupi kebutuhan air minum 60 liter/ hari/ orang pra program. ✓ Jumlah rumah tangga (358 KK) yang tidak tercukupi kebutuhan air minumnya sesuai standar pada masa pelaksanaan atau pasca program lebih banyak daripada jumlah 297 KK yang direncanakan penanganannya
5	Manfaat dan dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program penyediaan air minum bermanfaat kepada sejumlah rumah tangga untuk memiliki akses pelayanan air minum yang aman selama atau pasca program Kotaku dilaksanakan ✓ Program penanganan pemenuhan kecukupan kebutuhan air minum sesuai standar 60 liter/ hari/ orang yang tidak dilaksanakan sesuai perencanaan yang akurat dan analisa perkembangan kebutuhan menyebabkan atau berdampak pada peningkatan jumlah rumah tangga yang tidak tercukupi kebutuhan air minumnya sesuai standar tersebut. ✓ Jumlah rumah tangga yang kesulitan air minum terus meningkat akibat <i>real action</i> penanganan sangat kurang bahkan <i>absurd</i> realisasi pelaksanaannya. 		

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Keseluruhan data pada Tabel 4.13 tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kotaku memberikan perubahan terhadap akses pelayanan penyediaan air minum di Kelurahan Banggae, namun jumlah individu dan kelompok penerima manfaat masih relatif terbatas atau kurang dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang masih membutuhkan bantuan. Ketidakefektifan *real action* penanganan penyediaan akses dan ketercukupan kebutuhan sesuai standar 60 liter/hari/orang berdampak luas pada peningkatan jumlah rumah tangga yang tidak mampu memenuhi ketercukupan kebutuhan air minum sesuai standar tersebut.

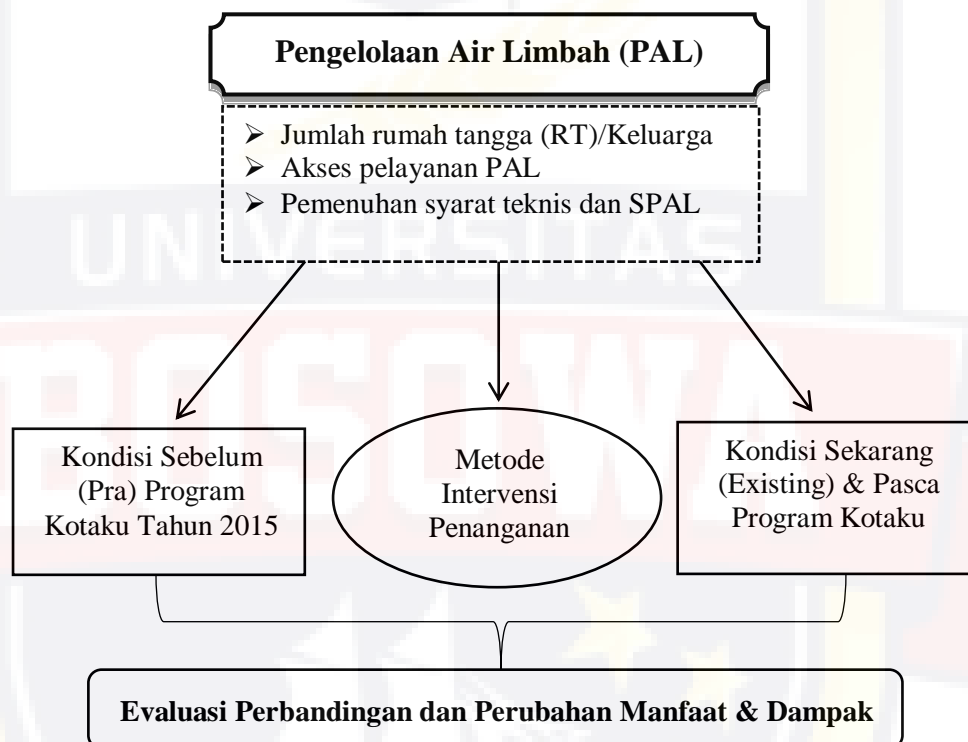
Kondisi ketersediaan air minum dan sumber air yang mayoritas digunakan oleh warga masyarakat di Kelurahan Banggae berasal dari PDAM, sumur gali, dan sumur bor. Problemnnya bahwa warga masyarakat atau rumah tangga yang tidak terlayani sumber air bersih yang baik dan aman terpaksa memanfaatkan air galon (AMIU) untuk dikonsumsi atau memenuhi kebutuhannya atas air minum. Walaupun telah ada bantuan sejumlah unit sumur gali dari pengelola program Kotaku namun debit air sumur gali tersebut berkurang pada musim kemarau sehingga tetap banyak rumah tangga atau keluarga kesulitan mengakses dan memenuhi kebutuhannya atas air minum, apalagi sumur gali yang ada airnya berbau dan tidak layak dikonsumsi untuk air minum kecuali untuk keperluan mandi dan mencuci. Demikian pula persoalan ketercukupan kebutuhan air minum sesuai standar, masih

banyak rumah tangga atau keluarga juga masih kesulitan memenuhi kecukupan air minum minimal 60 liter/hari/orang apalagi dalam kondisi musim kemarau yang panjang. Selain itu, walaupun telah ada program bantuan sambungan rumah sebanyak 189 unit rumah tangga namun sumber air yang berasal dari sambungan pipa PDAM juga mengalami penurunan debit air pada musim kemarau bahkan di musim hujan pun airnya sering keruh sehingga masalah kekurangan air bersih sulit dihindarkan.

Metode intervensi penanganan dalam rangka mengatasi masalah pelayanan dan kebutuhan air minum yang tercukupi tersebut dilakukan oleh pengelola program Kotaku melalui *action plan* kegiatan berupa penyediaan akses air minum bagi 110 rumah tangga, penyediaan sambungan rumah 189 m (RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae), pembuatan sumur gali 12 unit di Copala, serta ketercukupan air bersih 60 lt/org/hari sebanyak 555.384 m³ untuk 297 rumah tangga, kesemuanya belum memberikan manfaat yang signifikan atau berarti bagi sejumlah kelompok penerima manfaat yang menjadi target sasaran program. Metode intervensi penanganan masalah akses pelayanan dan kecukupan air minum sesuai standar dalam pelaksanaan program Kotaku belum sepenuhnya berdampak positif dalam mengatasi persoalan klasik tersebut, sehingga diperlukan inovasi-inovasi baru dalam pencarian sumber air baru selain PDAM dan sumur gali yang bisa mengatasi masalah kebutuhan air minum untuk jangka panjang.

e. Evaluasi perubahan Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga beserta manfaat dan dampaknya

Kerangka analisis atau evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam hal pengelolaan air limbah rumah tangga di Kelurahan Banggae seperti pada skema berikut.



Gambar 4.16 Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan Banggae

Berdasarkan skema tersebut, dapat diuraikan analisis perbandingan dan evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam pengelolaan air limbah (PAL) di Kelurahan Banggae yang diharapkan setelah adanya intervensi program dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi, seperti tertera pada Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Air Limbah (PAL)
Pasca Pelaksanaan Program Kotaku, 2019

No.	Evaluasi perbandingan	Pengelolaan Air Limbah (PAL)		
		Jumlah Penduduk (RT)	Akses pelayanan PAL	Pemenuhan syarat teknis dan SPAL
1	2	3	4	5
1	Kondisi pra program Kotaku (Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> Total penduduk 4.826 jiwa ∑ rumah tangga 1.118 KK ∑ keluarga 1.245 KK 	<ul style="list-style-type: none"> Antara 96 (7,1%) s/d 357 rumah tangga/RT tidak memiliki akses jamban/MCK komunal, dan/ atau antara 761 s/d 1.022 RT memiliki akses 36,85% rumah tangga tidak memiliki jamban/MCK 	<ul style="list-style-type: none"> Antara 41 (3,29%) s/d 145 (17,37%) RT tidak memiliki kloset (leher angsa) yang terhubung dengan tangki septik dan/ atau 973 RT memiliki IPAL sesuai syarat teknis 884 unit rumah tangga memiliki SPAL tercampur dengan drainase lingkungan. 100% SPAL tercampur dengan drainase lingkungan.
2	Metode intervensi penanganan	<ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan Jamban sebanyak 93 unit o Pembangunan jamban keluarga 15 unit (RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae) o Penyediaan IPAL komunal atau individu 4 unit (RIK 2016-2021 Kel. Banggae) o Sosialisasi PHBS 		
3	Kondisi pasca program Kotaku (Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ∑ rumah tangga 1.118 KK ✓ ∑ keluarga 1.245 KK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.029 (90,7%) RT memiliki akses komunal kepada jamban keluarga/bersama/JKB (5 KK per jamban komunal), dan/ atau 99 (9,3%) RT tidak/belum memiliki akses JKB ✓ Jamban komunal tersedia 203 unit, sehingga masih dibutuhkan 19 unit jamban komunal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.079 (95,4%) RT menggunakan kloset leher angsa tersambung ke septik tank, dan/atau 39 (4,6%) menggunakan IPAL lainnya ✓ 100% SPAL masih tercampur dengan drainase lingkungan
4	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada perubahan dalam hal jumlah penduduk, jumlah RT dan keluarga terkait pengelolaan pembuangan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terjadi peningkatan yang tidak signifikan yakni hanya 7 RT (dari 1.022 menjadi 1.029 RT) memiliki akses ke jamban komunal ✓ Terjadi peningkatan 93 unit jamban, namun belum sesuai kebutuhan ✓ Tersedia 203 unit jamban komunal, namun belum memenuhi kebutuhan seluruh RT sebab masih dibutuhkan 19 unit jamban komunal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terjadi peningkatan sebanyak 106 unit RT memiliki IPAL memenuhi syarat teknis, namun masih ada 39 unit RT yang memerlukan peningkatan syarat teknis kebutuhan IPAL-nya ✓ Kondisi SPAL yang tersambung atau tercampur dengan drainase lingkungan belum berubah sebelum dan pasca program Kotaku.
5	Manfaat dan dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program pengelolaan air limbah (PAL) bermanfaat kepada sejumlah rumah tangga untuk memiliki akses pelayanan Jamban komunal selama/ pasca program Kotaku ✓ Program penanganan PAL belum tuntas melayani 100% RT sehingga berdampak pada perilaku sebagian warga masyarakat membuang air limbah di luar jamban ✓ Kondisi SPAL yang umumnya masih tercampur dengan drainase lingkungan berdampak pada kondisi drainase yang tergenang air limbah, kotor dan berbau, bahkan meluber ke area permukiman penduduk. 		

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 4.14 tersebut dapat diuraikan perbandingan dan perubahan kondisi pengelolaan air limbah (PAL) serta manfaat dan dampaknya seperti berikut.

1) Kondisi PAL sebelum program Kotaku

Di Kelurahan Banggae, kondisi pengelolaan limbah rumah tangga (jamban dan SPAL) secara umum belum memadai. Hal ini disebabkan oleh masih adanya sekitar 96 (7,1%) sampai dengan 357 rumah tangga/RT yang tidak memiliki akses kepada jamban/MCK komunal, walaupun sebenarnya sudah banyak (sekitar 761 sampai dengan 1.022 RT) memiliki akses tersebut, bahkan masih tercatat 36,85% rumah tangga tidak memiliki jamban/MCK. Indikasi lainnya adalah terdapat sekitar 41 (3,29%) sampai dengan 145 (17,37%) RT yang IPAL-nya tidak memenuhi syarat teknis yakni tidak memiliki kloset (leher angsa) yang terhubung dengan tangki septik (*septic tank*), walaupun sudah banyak (973 RT) memiliki IPAL sesuai syarat teknis. Selain itu juga terdapat 884 hingga 100% rumah tangga memiliki SPAL tercampur dengan drainase lingkungan.

Pra atau sebelum program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae, masih banyaknya warga masyarakat atau rumah tangga yang tidak memiliki sarana jamban untuk pengelolaan limbah *black water*, terutama di Lingkungan Copala. Dampak atau akibat dari ketiadaan sarana jamban yang

dimiliki tersebut maka kalangan warga masyarakat tetap melakukan kebiasaannya membuang air besar (BAB) di luar jamban terutama seperti di sungai, semak belukar, area perkebunan, ataukah menumpang di jamban tetangga. Selain itu, sarana jamban yang ada yang dimiliki sejumlah rumah tangga juga belum sepenuhnya sesuai standar teknis yang dipersyaratkan, jambannya masih sangat sederhana yakni klosetnya tidak terhubung ke *septic tank*. (RPLP 2016-2021).

Kondisi yang tidak/ kurang menguntungkan/ menggembirakan lainnya adalah pengelolaan limbah buangan *grey water* dan sarana SPAL juga belum seluruhnya memadai. Sebagian besar warga atau rumah tangga masih terbiasa membuang limbah air buangan dari dapur dan kamar mandi langsung ke saluran drainase. Air buangan dan sisa makanan ataupun sampah ikut terbang bersama kedalam saluran drainase. Situasi dan kondisi inilah yang sering dan banyak menyebabkan terjadinya pendangkalan atau sedimentasi saluran drainase di lingkungan sekitarnya. Perkataan lainnya drainase menjadi TPS limbah domestik. Dalam kaitan itu, penggunaan bak kontrol pada SPAL rumah tangga hanya dilakukan oleh sebagian kecil warga karena masih sedikit warga yang mengetahui standar teknis SPAL yang baik.

Problem lainnya adalah sebagian warga atau rumah tangga membuang air limbah domestiknya langsung ke sekitar rumah dengan saluran berupa tanah yang digali, bahkan ada pula rumah tangga yang tidak menggunakan saluran sama sekali. Implikasi atau dampak dari perilaku kebiasaan tersebut tentu berakibat atau menyebabkan terjadinya air genangan di sekitar rumah atau area permukiman yang menimbulkan bau dan pemandangan yang kotor dan tidak menyenangkan alias kumuh.

2) Perubahan kondisi PAL serta manfaat dan dampaknya pasca program Kotaku

Sehubungan permasalahan yang terjadi secara riil pra program Kotaku di Kelurahan Banggae tersebut maka pengelola program menetapkan beberapa *action plan* intervensi penanganan terutama penyediaan jamban sebanyak 93 unit, pembangunan jamban keluarga 15 unit (sebagaimana dituangkan dalam RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae), penyediaan IPAL komunal atau individu 4 unit (juga tercantum dalam RIK), termasuk sosialisasi PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat).

Metode intervensi penanganan dengan beberapa *action plan* kegiatan tersebut dalam perkembangannya menimbulkan sejumlah perubahan seperti terjadinya peningkatan (walaupun tidak signifikan) yakni dari 1.022 menjadi 1.029 RT (selisih 7

RT) memiliki akses ke jamban komunal (5 KK/ JKB), terjadinya peningkatan sebanyak 93 unit jamban walaupun hal ini belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. Demikian pula tersedianya 203 unit jamban komunal walaupun belum memenuhi kebutuhan seluruh RT sebab masih dibutukan tambahan 19 unit jamban komunal. Perubahan lainnya adalah terjadinya peningkatan sebanyak 106 unit RT memiliki IPAL memenuhi syarat teknis, walaupun masih ada 39 unit RT lainnya yang masih memerlukan peningkatan syarat teknis kebutuhan IPAL-nya.

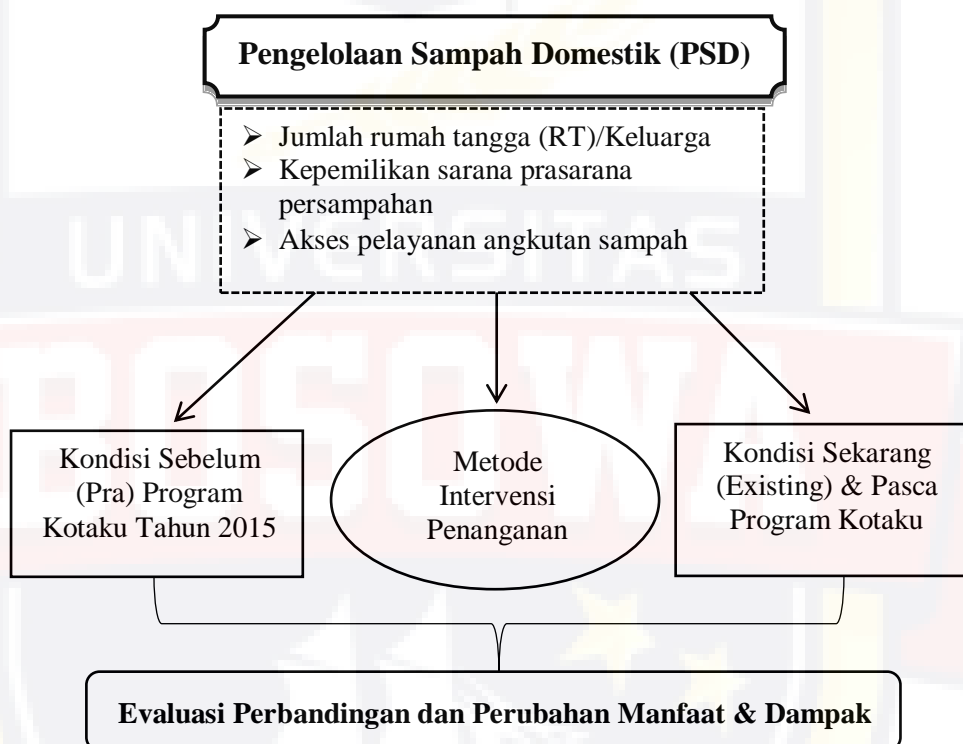
Sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut, dampak permasalahan yang timbul adalah justeru pada penanganan SPAL yang tidak berubah (sebelum dan pasca program) yakni kondisi SPAL tetap tersambung atau tercampur dengan drainase lingkungan. Perilaku kebiasaan warga masyarakat atau rumah tangga membuang limbah air buangan (termasuk sisa-sisa makanan dan kotoran sampah domestik) dari dapur dan kamar mandi langsung ke saluran drainase tetap tidak berubah. Saluran drainase menjadi TPL (tempat pembuangan limbah) dan mengalami penumpukan limbah air buangan, sisa makanan dan sampah sehingga cepat atau lambat saluran drainase tersebut pasti mengalami sedimentasi, menampung air genangan, terlihat kotor dan berbau tidak sedap. Pengelola program tampaknya tidak mampu melakukan perubahan dan

mengatasi dampak dari situasi dan kondisi SPAL yang tersambung dengan saluran drainase serta perilaku kebiasaan warga masyarakat menjadikan drainase sebagai TPL tersebut.

Keseluruhan data pada Tabel 4.14 dan uraian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kotaku memberikan perubahan terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana atau fasilitas pengelolaan air limbah melalui pendekatan penanganan atau intervensi yang dilakukan seperti penyediaan bantuan jamban dan IPAL dalam jumlah unit tertentu. Namun hal itu belum didukung sosialisasi PHBS yang maksimal, sehingga pengelolaan air limbah (PAL) tetap disertai perilaku kebiasaan hidup kumuh. Program PAL tersebut memberikan manfaat kepada sejumlah kelompok penerima manfaat terutama rumah tangga untuk memiliki akses pelayanan jamban komunal. Namun demikian, program penanganan PAL tersebut belum tuntas melayani 100% RT sehingga berdampak pada perilaku sebagian warga masyarakat membuang air limbah di luar jamban. Kondisi penanganan SPAL yang tidak berubah yakni umumnya masih tetap tercampur dengan saluran drainase lingkungan berdampak atau menyebabkan kondisi drainase tergenang air limbah buangan, terlihat kotor atau tidak bersih serta tidak elok dipandang mata, berlumpur dan menimbulkan bau tidak sedap, bahkan air limbah buangan yang dibuang ke dalam saluran drainase tersebut terkadang meluber ke area permukiman penduduk.

f. Evaluasi perubahan Pengelolaan Sampah beserta manfaat dan dampaknya

Kerangka analisis atau evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam hal pengelolaan sampah domestik atau rumah tangga di Kelurahan Banggae seperti pada skema berikut.



Gambar 4.17 Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Sampah Domestik di Kelurahan Banggae.

Berdasarkan skema tersebut, dapat diuraikan analisis perbandingan dan evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam pengelolaan sampah domestik (PSD) di Kelurahan Banggae yang diharapkan setelah adanya intervensi program dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi, seperti tertera pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Sampah Domestik (PSD) Pasca Pelaksanaan Program Kotaku, 2019

No.	Evaluasi perbandingan	Pengelolaan Sampah Domestik (PSD)		
		Jumlah Rumah Tangga (RT)	Kepemilikan sarana prasarana persampahan	Akses pelayanan angkutan sampah
1	2	3	4	5
1	Kondisi pra program Kotaku (Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Σ rumah tangga 1.118 KK • Luas permukiman : 59,74 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 510 (46%) rumah tangga (RT) tidak memiliki tempat sampah, dan/ atau 605 RT memiliki tempat sampah • 716 RT tidak memiliki pengelolaan sampah domestik (PSD) yang layak, dan/ atau 402 RT memiliki PSD layak 	<ul style="list-style-type: none"> • 343 (30%) rumah tangga tidak terlayani pengangkutan sampah minimal 2x seminggu, dan/ atau 778 RT memiliki akses/ terlayani.
2	Metode intervensi penanganan	<ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan bak sampah untuk 510 rumah tangga o Penyediaan sarana gerobak sampah sebanyak 4 unit o Pengadaan motor sampah 4 unit (RIK 2016-2021 Kel.Banggae) o Pengadaan kontainer sampah 4 unit (RIK 2016-2021 Kel.Banggae) o Pelatihan pengelolaan sampah 5 kali (RIK 2016-2021 Kel.Banggae) o Sosialisasi PHBS o Aturan Bersama. 		
3	Kondisi pasca program Kotaku (Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Σ rumah tangga 1.118 KK ✓ Σ keluarga 1.245 KK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 207 (25%) RT memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah yang baik, dan/ atau 911 RT (1.039 KK) tidak memiliki sarana prasarana persampahan yang baik. ✓ - 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 348 (.....%) RT terangkut sampah domestiknya minimal 2x seminggu, dan/atau 770 (.....%) RT atau 898 KK tidak terlayani angkutan sampah domestik minimal 2x seminggu.
4	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada perubahan dalam hal jumlah RT dan keluarga terkait pengelolaan sampah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terjadi peningkatan 401 RT yang tidak memiliki sarana prasarana persampahan yang baik selama/pasca pelaksanaan program Kotaku ✓ Rencana penyediaan bak sampah bagi 510 RT yang tidak memiliki tempat sampah tidak terealisasi . ✓ Pra program, ada 605 RT memiliki tempat sampah, namun pasca program hanya 207 RT memiliki PSD yang baik. Ini berarti terjadi penurunan kepemilikan sarana sampah sebanyak 398 RT ✓ 716 RT tidak memiliki PSD pra program, namun pasca program meningkat menjadi 911 RT non-PSD ✓ Pra program, ada 402 RT memiliki PSD layak, namun pasca program berkurang menjadi 207 RT/ KK. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terjadi peningkatan sebanyak 555 (898-348) unit RT tidak terlayani angkutan sampah domestik minimal 2x seminggu ✓ Terjadi penurunan sebanyak 430 (778 – 348) unit RT jumlah RT memiliki akses atau terlayani angkutan sampah 2x seminggu.
5	Manfaat dan dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program PSD bermanfaat kepada sejumlah kelompok penerima manfaat (rumah tangga) yang tidak/belum memiliki sarana prasarana maupun layanan angkutan persampahan ✓ <i>Action plan</i> penanganan melalui beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPLP dan RIK 2016-2021 Kel.Banggae tidak terlaksana/terrealisasi, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah RT yang tidak memiliki sarana prasarana persampahan maupun akses pelayanan angkutan sampah ✓ Dampak luas dari <i>action plan</i> yang tidak berjalan adalah perilaku pembuangan sampah di sembarang tempat (sungai, jalan, drainase, area permukiman), dan kembali kumuh. 		

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 4.15 tersebut dapat diuraikan perbandingan dan perubahan kondisi pengelolaan sampah domestik (PSD) serta manfaat dan dampaknya seperti berikut.

1) Kondisi PSD sebelum program Kotaku

Pra atau sebelum program Kotaku diimplementasikan di Kelurahan Banggae, pengelolaan persampahan umumnya dilakukan oleh warga masyarakat atau rumah tangga dengan dua cara yakni secara individu dan komunal. Mayoritas warga masyarakat (khususnya Lingkungan Copala dan Pakkola) atau rumah tangga mengelola sampah domestiknya sendiri dengan beragam cara seperti ada yang mengumpulkan di tanah kosong kemudian membakarnya, ada yang membuangnya di lahan kosong lalu dibiarkan membusuk, ada pula yang membuang sampah domestiknya di sungai sehingga sampah bertumpuk baik di bantaran maupun di dalam sungai, bahkan ada pula yang membuangnya di sembarang tempat lainnya (seperti saluran, jalan, lingkungan permukiman). Cara-cara tradisional PSD tersebut dilakukan oleh kebanyakan warga masyarakat atau rumah tangga karena tidak memiliki sarana prasarana persampahan, tidak memiliki bak sampah ataupun tong sampah serta TPS (dokumen RPLP Kelurahan Banggae, 2016-2021).

Faktor penyebab lainnya adalah terbatasnya pelayanan armada pengangkutan sampah sebagai akibat dari terbatasnya

sarana pengangkutan sampah yang tersedia sehingga tidak menjangkau seluruh wilayah di Kelurahan Banggae. Armada pengangkut sampah yang ada hanya melayani rumah-rumah yang ada di pinggir jalan secara komunal yang diangkut sebanyak dua kali seminggu dengan retribusi sebesar Rp. 5000,- setiap bulan.

Sebenarnya, Instansi Pemerintah Daerah terkait khususnya Dinas Perkimber (Permukiman dan Kebersihan) mempekerjakan sejumlah petugas kebersihan dan menyediakan armada sampah berupa truk sampah untuk mengumpulkan sampah rumah tangga secara langsung dari tong sampah yang terdapat di depan rumah warga untuk kemudian dibawa ke TPA. Namun pelayanan dari instansi terkait tersebut relatif terbatas dan tidak/belum menjangkau seluruh wilayah lingkungan dan kawasan permukiman-perumahan yang ada di Kelurahan Banggae.

Di Lingkungan Saleppa dan Battayang misalnya, kalangan warga masyarakat atau rumah tangga melakukan pengelolaan sampah secara komunal dengan cara membawa langsung sampah domestiknya ke kontainer sampah ataupun bak sampah (TPS) yang terdapat di beberapa titik lokasi. Kemudian kumpulan sampah yang ada di TPS tersebut selanjutnya akan diangkut oleh mobil sampah untuk dibawa ke TPA yang terdapat di

Lingkungan Tande (diluar wilayah Kelurahan Banggae)
(dokumen RPLP Kelurahan Banggae, 2016-2021).

2) Perubahan kondisi PSD serta manfaat dan dampaknya pasca program Kotaku

Sehubungan dengan permasalahan pengelolaan sampah pra program Kotaku di Kelurahan Banggae tersebut, mendorong pengelola program menetapkan sejumlah rencana aksi atau tindakan penanganan berdasarkan hasil pendataan dan analisis kebutuhan penanganan awal seperti penyediaan bak sampah untuk 510 rumah tangga, penyediaan sarana gerobak sampah sebanyak 4 unit, pengadaan motor sampah 4 unit, pengadaan kontainer sampah 4 unit, pelatihan pengelolaan sampah 5 kali, serta sosialisasi PHBS dan Aturan Bersama (AB).

Metode intervensi penanganan dengan beberapa *action plan* kegiatan tersebut dalam perkembangannya menimbulkan beberapa perubahan seperti kepemilikan sarana prasarana pengelolaan sampah yang baik oleh 207 (25%) RT terutama di Lingkungan Battayang. Demikian pula bahwa terdapat 348 rumah tangga (terutama di Pakkola, Saleppa dan Battayang) yang terangkut sampah domestiknya minimal 2x seminggu.

Problematikanya bahwa sebagian besar yakni 911 RT (1.039 KK) pada tiga lingkungan lainnya (Pakkola, Saleppa dan Copala) tidak atau belum memiliki sarana prasarana PSD yang

baik. Demikian pula halnya dalam pelayanan pengangkutan sampah yakni masih banyak (770 rumah tangga atau 898 KK) tidak atau belum terlayani angkutan sampah domestik minimal 2x seminggu, bahkan di Copala belum ada kegiatan pelayanan angkutan sampah sehingga warga masyarakat atau rumah tangga masih tetap melakukan kebiasaan membakar sampah atau membuangnya di tanah kosong dan sungai.

Selama atau pasca pelaksanaan program Kotaku, justeru terjadi peningkatan 401 RT yang tidak memiliki sarana prasarana persampahan yang baik disebabkan rencana penyediaan bak sampah bagi 510 RT yang tidak memiliki tempat sampah tidak terealisasi. Bila diperbandingkan, pra program, ada 605 RT memiliki tempat sampah, namun pasca program hanya 207 RT memiliki PSD yang baik. Ini berarti terjadi penurunan kepemilikan sarana sampah sebanyak 398 RT. Demikian pula terdapat 716 RT tidak memiliki PSD pra program, namun pasca program meningkat menjadi 911 RT non-PSD. Pra program, ada 402 RT memiliki PSD layak namun pasca program justeru berkurang menjadi 207 RT/ KK.

Terkait dengan akses pelayanan angkutan sampah, terjadi peningkatan sebanyak 555 unit RT yang tidak terlayani angkutan sampah domestik minimal 2x seminggu. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebanyak 430 unit RT jumlah RT

memiliki akses atau terlayani angkutan sampah 2x seminggu. Semua kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelola program Kotaku tidak melaksanakan atau merealisasikan *action plan* sebagaimana mestinya yang sudah dibuat atau ditetapkannya, sehingga rencana tinggal rencana dengan aplikasi atau implementasi yang *absurd*.

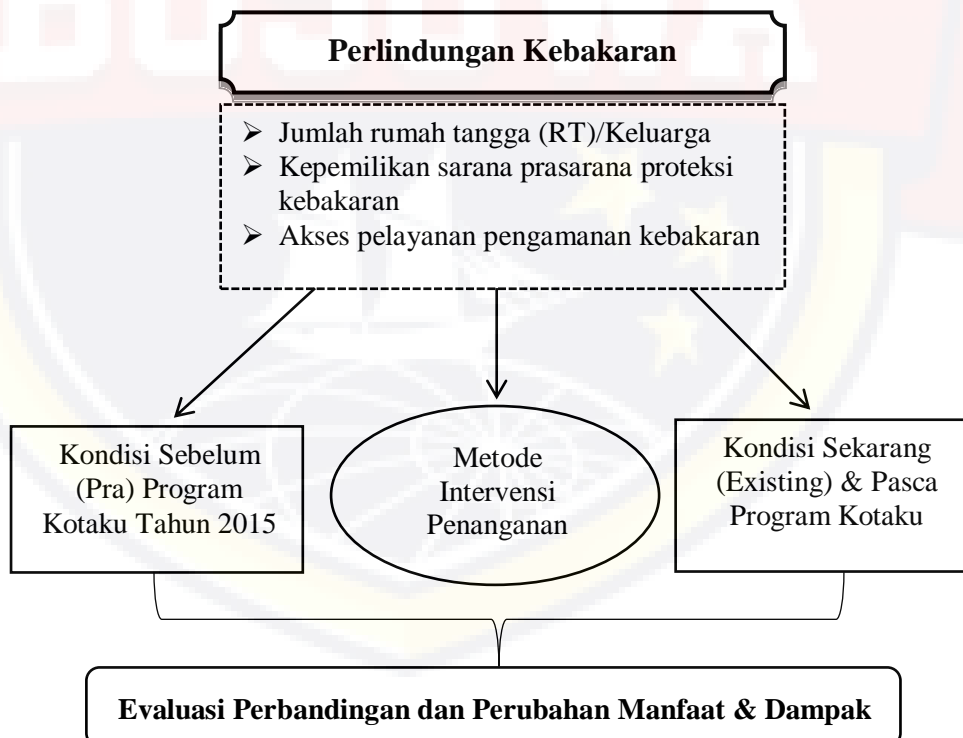
Permasalahan-permasalahan tersebut tentu berimplikasi atau berdampak terhadap timbulnya ketimpangan dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae. Intervensi penanganan yang sudah ditetapkan baik berdasarkan hasil pendataan, identifikasi masalah maupun analisis kebutuhan penanganan masalah persampahan, pada kenyataannya tidak direalisasikan sebagaimana mestinya sehingga sewajarnya atau sudah menjadi konsekuensi logis untuk sulit menghindarkan timbulnya aneka permasalahan yang tidak teratasi dalam pengelolaan persampahan di kelurahan tersebut.

Keseluruhan data pada Tabel 4.15 dan uraian tersebut menunjukkan bahwa program PSD pada esensinya bermanfaat kepada sejumlah kelompok penerima manfaat (rumah tangga) yang tidak atau belum memiliki sarana prasarana maupun layanan angkutan persampahan. Namun problemnya bahwa *action plan* intervensi penanganan melalui beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPLP dan RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae tidak

terlaksana/terrealisasi sebagaimana mestinya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki sarana prasarana persampahan maupun akses pelayanan angkutan sampah. Dampak luas dari *action plan* yang tidak berjalan adalah perilaku pembuangan sampah di sembarang tempat (sungai, jalan, drainase, area permukiman), dan kembali kumuh.

g. Evaluasi perubahan Perlindungan Kebakaran beserta manfaat dan dampaknya

Kerangka analisis atau evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam hal proteksi atau perlindungan keamanan dari bahaya kebakaran di Kelurahan Banggae seperti pada skema berikut.



Gambar 4.18 Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Perlindungan Keamanan Kebakaran di Kelurahan Banggae.

Berdasarkan skema tersebut, dapat diuraikan analisis perbandingan dan evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam perlindungan keamanan dari bahaya kebakaran di Kelurahan Banggae yang diharapkan setelah adanya intervensi program dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi, seperti tertera pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Perlindungan Keamanan Dari Bahaya Kebakaran Pasca Pelaksanaan Program Kotaku, 2019

No.	Evaluasi perbandingan	Pengelolaan Sampah Domestik (PSD)		
		Jumlah Rumah Tangga (RT)	Kepemilikan sarana prasarana proteksi keamanan dari bahaya kebakaran	Akses pelayanan pengamanan kebakaran
1	2	3	4	5
1	Kondisi pra program Kotaku (Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Σ rumah tangga 1.118 KK • Luas permukiman : 59,74 ha. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.118 (100%) rumah tangga tidak memiliki sarana penanganan bahaya kebakaran yang layak 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua rumah tangga memiliki akses untuk memperoleh bantuan pelayanan perlindungan dan pengamanan kebakaran
2	Metode intervensi penanganan	<ul style="list-style-type: none"> o Pelatihan tanggap bencana kebakaran o Penyediaan alat pemadam kebakaran skala lingkungan o Sosialisasi tentang penataan permukiman 		
3	Kondisi pasca program Kotaku (Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Σ rumah tangga 1.118 KK ✓ Σ keluarga 1.245 KK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.118 (100%) rumah tangga tidak memiliki sarana penanganan bahaya kebakaran yang layak 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semua rumah tangga memiliki akses untuk memperoleh bantuan pelayanan perlindungan dan pengamanan kebakaran
4	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada perubahan dalam hal jumlah RT dan keluarga terkait pelayanan perlindungan dari bahaya kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semua rumah tangga bergantung pada Pemerintah Daerah terutama instansi terkait khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dalam memperoleh bantuan pelayanan perlindungan dan pengamanan bahaya kebakaran. ✓ Pelatihan tanggap bencana kebakaran sangat kurang atau jarang dilaksanakan ✓ Belum tersedia alat pemadam kebakaran skala lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum tersedia alat pemadam kebakaran skala lingkungan ✓ Sosialisasi tentang penataan permukiman dalam rangka perlindungan bahaya kebakaran masih sangat kurang.
5	Manfaat dan dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program proteksi atau perlindungan keamanan dari bahaya kebakaran bermanfaat kepada sejumlah kelompok penerima manfaat (rumah tangga) yang tidak/belum memiliki sarana prasarana perlindungan kebakaran ✓ Realisasi pelaksanaan <i>action plan</i> penanganan masalah kebakaran melalui beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPLP Kelurahan Banggae masih sangat kurang, sehingga berdampak pada peningkatan ancaman bahaya kebakaran ✓ Dampak luas dari <i>action plan</i> yang tidak berjalan adalah meningkatnya potensi bahaya kebakaran seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. 		

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 4.16 tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam pelaksanaan program Kotaku, sudah ada rencana kegiatan berupa pelatihan tanggap bencana kebakaran, penyediaan alat pemadam kebakaran skala lingkungan, serta sosialisasi tentang penataan permukiman. Konsep perencanaan ini didasarkan pada hasil identifikasi masalah yakni ancaman dan bahaya kebakaran rawan terjadi di daerah padat permukiman, disebabkan jarak antar bangunan yang rapat, bahan material bangunan yang mudah terbakar, akses jalan <3 meter serta tidak tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Action plan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas atau kemampuan warga masyarakat atau rumah tangga untuk tanggap terhadap bencana kebakaran, memiliki keterampilan dalam mencegah dan mengatasinya, mudah mengakses sarana atau peralatan pemadam kebakaran yang ada di lingkungannya, serta bersedia menata lingkungan permukimannya untuk meminimalisir resiko ancaman dan bahaya kebakaran tersebut.

Rencana kegiatan atau tindakan (*action plan*) tersebut tentu dapat memberikan manfaat yang baik dan besar kepada para kelompok penerima manfaat khususnya warga masyarakat atau rumah tangga yang ada di setiap lingkungan di Kelurahan Banggae untuk memperoleh bantuan pelayanan dan akses perlindungan keamanan dari potensi ancaman dan bahaya kebakaran, serta dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesadaran, pengetahuan dan

keterampilan warga masyarakat atau rumah tangga dalam mencegah maupun mengatasi/ meminimalisir risiko bahaya kebakaran tersebut.

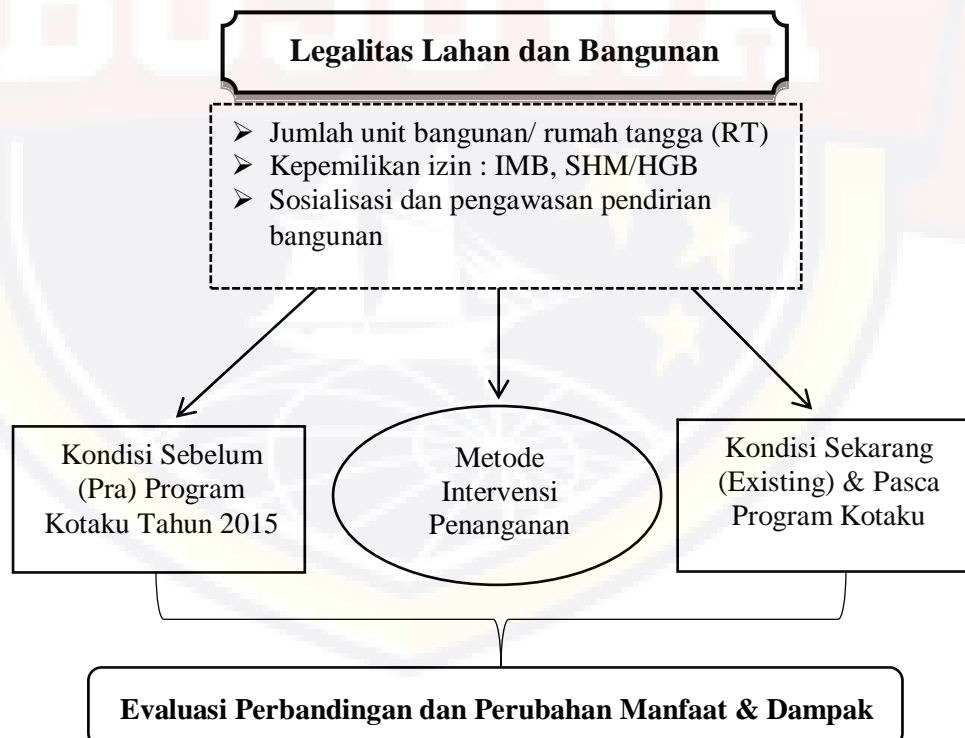
Program perlindungan kebakaran dalam pelaksanaan program Kotaku sangat bermanfaat mengingat Kelurahan Banggae memiliki potensi bencana alam (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene), termasuk potensi bencana sosial atau bahaya kebakaran. Kondisi lingkungan permukiman yang padat dan saling berdekatan satu sama lain menciptakan potensi kerawanan bahaya kebakaran. Hal ini tentu bukan tanpa sebab, karena pengalaman menunjukkan telah beberapa kali terjadi peristiwa kebakaran di Kelurahan Banggae yang menghancurkan rumah warga dan pasar (terakhir terjadi pada Tahun 2010). Oleh karena itu, penanganan permukiman kumuh dengan proteksi kebakaran menjadi hal yang penting diperhatikan.

Keseluruhan data pada Tabel 4.16 dan uraian tersebut menunjukkan bahwa program perlindungan kebakaran cukup bermanfaat kepada sejumlah kelompok penerima manfaat (rumah tangga) yang tidak atau belum memiliki sarana prasarana maupun akses layanan pemadaman kebakaran. Namun problemnya bahwa *action plan* intervensi penanganan melalui beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPLP 2016-2021 Kelurahan Banggae tidak terlaksana/terrealisasi sebagaimana mestinya sehingga berdampak pada peningkatan potensi ancaman dan bahaya kebakaran tersebut.

h. Evaluasi perubahan Legalitas Lahan dan Bangunan beserta manfaat dan dampaknya

Aspek legalitas lahan dan bangunan pada dasarnya merupakan salah satu bagian penting dari upaya peningkatan pengawasan perkembangan pembangunan permukiman yang bertujuan untuk memastikan keabsahan atau legalitas kepemilikan surat izin mendirikan bangunan dan izin mengenai hak-hak penggunaan tanah atau lahan bangunan pada seluruh unit bangunan dan rumah tangga yang ada.

Kerangka analisis atau evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam hal legalitas lahan dan bangunan di Kelurahan Banggae seperti pada skema berikut.



Gambar 4.19 Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak legalitas Lahan dan Bangunan di Kelurahan Banggae.

Berdasarkan skema tersebut, diuraikan analisis perbandingan dan evaluasi perubahan manfaat dan dampak terkait legalitas lahan dan bangunan di Kelurahan Banggae pasca program Kotaku, seperti tertera pada Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Legalitas Lahan dan Bangunan Pasca Pelaksanaan Program Kotaku, 2019

No.	Evaluasi perbandingan	Jumlah Bangunan & Rumah Tangga	Kepemilikan surat izin mendirikan bangunan dan lahan
1	2	3	4
1	Kondisi pra program Kotaku (Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • \sum bangunan hunian 1.096 unit • \sum RT: 1.118 KK • Luas permukiman : 59,74 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 552 (49%) unit bangunan rumah tangga tidak memiliki IMB • 365 (33%) unit bangunan rumah tangga tidak memiliki SHM/HGB
2	Metode intervensi penanganan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sosialisasi pengaturan pendirian bangunan, legalitas lahan dan persoalan permukiman (RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae) ❖ Pengawasan pendirian bangunan diperketat (RIK). 	
3	Kondisi pasca program Kotaku (Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ \sum bangunan hunian 1.196 unit ✓ \sum rumah tangga 1.118 KK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 566 (51%) rumah tangga/RT pemilik bangunan hunian tidak memiliki IMB, dan atau 552 (49%) RT memiliki izin ✓ 753 (67%) RT pemilik bangunan hunian tidak memiliki SHM/HGB, dan atau 365 (33%) RT memiliki SHM/HGB
4	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada perubahan dalam hal jumlah RT dan jumlah unit bangunan hunian terkait legalitas bangunan dan lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terjadi peningkatan sebanyak 14 RT yang tidak memiliki IMB ✓ Terjadi peningkatan sebanyak 388 RT yang tidak memiliki SHM/HGB ✓ Sosialisasi pengaturan pendirian bangunan, legalitas lahan dan persoalan permukiman tidak optimal/efektif ✓ Pengawasan pendirian bangunan sangat kurang dan tidak optimal/efektif
5	Manfaat dan dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program legalitas lahan dan bangunan dapat memberikan manfaat kepada sejumlah kelompok penerima manfaat terutama bagi para pemilik bangunan hunian atau rumah tangga ✓ Kurangnya atau tidak optimal/efektifnya pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan berdampak pada peningkatan jumlah bangunan/RT tidak memiliki IMB dan SHM/HGB ✓ Kurangnya realisasi intervensi penanganan yang sudah ditetapkan atau direncanakan menyebabkan pengawasan perkembangan pembangunan permukiman menjadi lemah dan rendah ✓ Kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan perkembangan pembangunan permukiman menyebabkan pelanggaran terhadap izin pendirian bangunan dan lahan semakin meningkat. 	

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 4.17 tersebut dapat diuraikan perbandingan dan perubahan kondisi pengelolaan sampah domestik (PSD) serta manfaat dan dampaknya seperti berikut.

1) Kondisi legalitas bangunan dan lahan sebelum program Kotaku

Pra program Kotaku, persoalan legalitas bangunan dan lahan di Kelurahan Banggae belum optimal mendapatkan perhatian baik dari Pemerintah Daerah/instansi terkait maupun kalangan warga masyarakat. Bahkan sebagian besar atau lebih dari setengah dari total jumlah unit bangunan hunian dan rumah tangga yang ada pada empat lingkungan (yakni Pakkola, Saleppa, Battayang dan Copala) tidak atau belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Umumnya pemilik bangunan hunian atau rumah tangga yang tidak memiliki IMB tersebut kurang paham kewajibannya dan tidak mengetahui arti penting dan kegunaan dari IMB sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi sebelum membangun. Mereka juga kurang paham tentang aturan dan mekanisme pendirian bangunan.

Situasi dan kondisi serupa juga terjadi dalam hal banyaknya warga masyarakat atau rumah tangga yang tidak memiliki SHM (sertifikat Hak Milik) dan HGB (Hak Guna Bangunan) sebagai dokumen legal atas kepemilikan lahan dan bangunan. Faktor penyebab secara umum adalah karena mereka menumpang tinggal di lahan milik orang lain, ataukah lahan yang ditempati

merupakan tanah warisan yang sertifikatnya masih sertifikat induk dari Pemerintahan Belanda. Akibatnya, konflik antar warga karena sengketa lahan biasa terjadi di Kelurahan Banggae. (dokumen RPLP 2016-2021 Kelurahan Banggae).

2) Perubahan kondisi PSD serta manfaat dan dampaknya pasca program Kotaku

Sehubungan dengan permasalahan legalitas lahan dan bangunan pra program Kotaku di Kelurahan Banggae tersebut, mendorong pengelola program menetapkan beberapa rencana aksi atau tindakan penanganan berdasarkan hasil pendataan dan analisis kebutuhan penanganan awal seperti sosialisasi pengaturan pendirian bangunan, legalitas lahan dan persoalan permukiman, dan pengawasan pendirian bangunan diperketat (dituangkan dalam RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae).

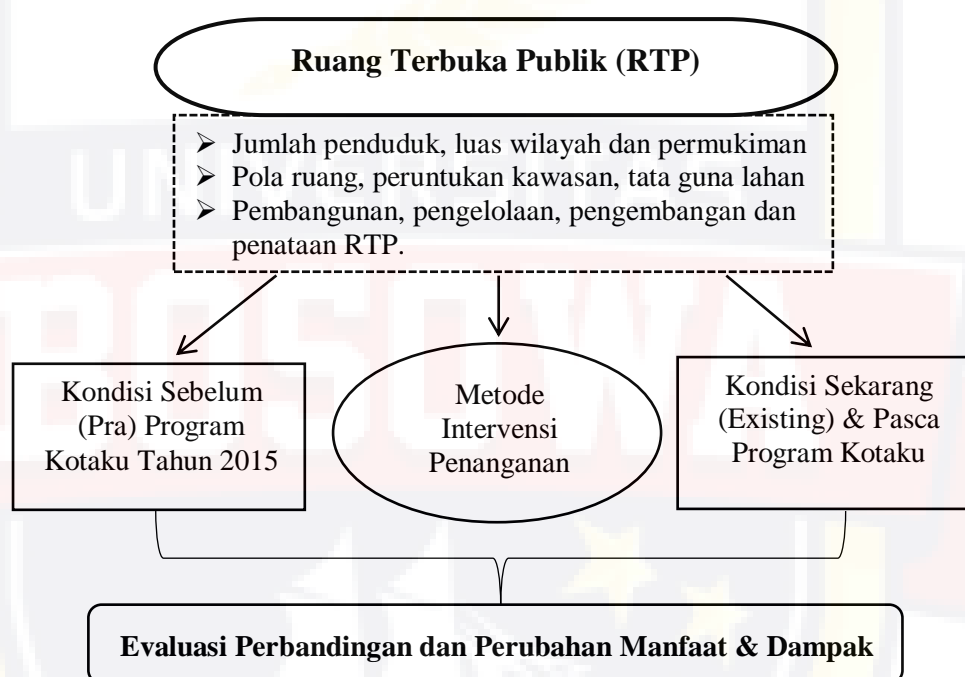
Fenomenanya selama (pasca) pelaksanaan program Kotaku bahwa terdapat 566 (51%) rumah tangga/RT pemilik bangunan hunian tidak memiliki IMB dan 753 (67%) RT pemilik bangunan hunian tidak memiliki SHM/HGB. Dengan kata lain, hanya 552 (49%) RT memiliki izin mendirikan bangunan dan 365 (33%) RT memiliki SHM/HGB. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 14 RT yang tidak memiliki IMB dan juga terjadi peningkatan sebanyak 388 RT yang tidak memiliki SHM/HGB.

Perubahan yang tidak/ kurang menguntungkan/ mengembirakan tersebut disebabkan oleh tidak optimal/ efektifnya realisasi atau pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengaturan pendirian bangunan, legalitas lahan dan persoalan permukiman., serta lemahnya pengawasan dan sanksi atas pelanggaran izin pendirian bangunan.

Keseluruhan data pada Tabel 4.17 dan uraian tersebut menunjukkan bahwa program legalitas lahan dan bangunan dapat memberikan manfaat kepada sejumlah kelompok penerima manfaat terutama bagi para pemilik bangunan hunian atau rumah tangga. Namun kurangnya atau tidak optimal/efektifnya pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan berdampak pada peningkatan jumlah bangunan/RT tidak memiliki IMB dan SHM/HGB. Kurangnya realisasi intervensi penanganan yang sudah ditetapkan atau direncanakan menyebabkan pengawasan perkembangan pembangunan permukiman menjadi lemah dan rendah. Kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan perkembangan pembangunan permukiman menyebabkan pelanggaran terhadap izin pendirian bangunan dan lahan semakin meningkat. Selain itu, belum ada sanksi yang jelas yang diterapkan terhadap para pelanggar izin pendirian bangunan dan penggunaan lahan tersebut, dan juga belum ada pendekatan solusi yang efektif dalam menertibkan bangunan-bangunan hunian yang tidak memiliki izin membangun.

i. Evaluasi perubahan Ruang Terbuka Publik, manfaat dan dampaknya

Kerangka analisis atau evaluasi perubahan manfaat dan dampak dalam hal pembangunan, pengelolaan dan pengembangan serta penataan ruang terbuka publik (RTP) di Kelurahan Banggae seperti pada skema berikut.



Gambar 4.20 Kerangka Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kelurahan Banggae.

Berdasarkan skema tersebut, dapat diuraikan analisis perbandingan dan evaluasi perubahan manfaat dan dampak terkait pembangunan, pengelolaan dan pengembangan serta penataan ruang terbuka publik (RTP) di Kelurahan Banggae yang diharapkan setelah adanya intervensi program dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi, seperti tertera pada Tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Pengelolaan Ruang Terbuka
Publik (RTP) Pasca Pelaksanaan Program Kotaku, 2019

No.	Evaluasi perbandingan	Pengelolaan Ruang Terbuka Publik (RTP)		
		Determinan penduduk, wilayah, permukiman	Pola ruang, peruntukan kawasan, tata guna lahan	Pengelolaan RTP
1	2	3	4	5
1	Kondisi pra program Kotaku (Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Σ penduduk: 4.826 jiwa • Σ rumah tangga 1.118 KK • Luas wilayah: 186,8 ha • Luas permukiman : 59,74 ha – 61,42 ha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman: 61,42 ha • Perdagangan dan jasa : 9,29 ha • Perkebunan : 57,02 ha • Semak belukar : 54,89 ha • Tempat pemakaman umum (TPU): 1,51 ha • Penggunaan lahan lainnya: 2,67 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan RTP seperti taman bermain, taman kota, RTH, lapangan olah raga, tempat rekreasi masih sangat kurang • Interaksi sosial warga masyarakat terbatas.
2	Metode intervensi penanganan	<ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan Ruang Terbuka Publik (RTP) Skala Kelurahan o Penataan tata ruang lingkungan o Penataan taman kota di Battayang (RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae) o Penataan pelataran <i>Boyang Assalamaweung</i> di Battayang o Penataan DAS Sungai Saleppa dan Copala 		
3	Kondisi pasca program Kotaku (Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Σ penduduk: 4.826 jiwa ✓ Luas wilayah: 186,8 ha ✓ Luas permukiman : 59,74 ha – 61,42 ha. ✓ Σ rumah tangga 1.118 KK ✓ Σ keluarga 1.245 KK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Permukiman: 61,42 ha ✓ Perdagangan dan jasa : 9,29 ha ✓ Perkebunan : 57,02 ha ✓ Semak belukar : 54,89 ha ✓ Tempat pemakaman umum (TPU): 1,51 ha ✓ Penggunaan lahan lainnya: 2,67 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rencana penyediaan RTP Skala Kelurahan ✓ Rencana penataan ruang lingkungan ✓ Rencana penataan taman kota di Battayang ✓ Rencana penataan pelataran <i>Boyang Assalamaweung</i> di Battayang ✓ Rencana penataan DAS Sungai Saleppa dan Copala
4	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada perubahan jumlah penduduk, luas wilayah dan permukiman terkait pengelolaan RTP 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia dokumen rencana tata ruang wilayah dan kota (RTRWK) untuk RTP ✓ Tersedia program penataan ruang dan tata guna lahan perkotaan untuk RTP pada empat lingkungan di Kelurahan Banggae ✓ Tersedia program peruntukan kawasan untuk RTP 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia program penataan RTP skala kelurahan dan lingkungan ✓ Tersedia program penataan taman kota ✓ Tersedia program penataan pelataran fasilitas umum ✓ Tersedia program penataan DAS sungai.
5	Manfaat dan dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program penataan RTP sangat bermanfaat dalam meningkatkan ketersediaan taman kota, taman bermain, RTH sungai, tempat rekreasi di Kelurahan Banggae ✓ Realisasi pelaksanaan <i>action plan</i> penanganan masalah RTP melalui beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPLP Kelurahan Banggae masih sangat kurang, sehingga berdampak pada ketersediaan RTP yang terbatas ✓ Dampak luas dari <i>action plan</i> yang tidak berjalan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan perkotaan atas ruang interaksi sosial, tidak meningkatnya estetika perkotaan dan pelayanan publik, tidak efektifnya pola ruang dan tata guna lahan perkotaan. 		

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Data pada Tabel 4.18 tersebut menunjukkan bahwa kondisi RTP sebelum (pra) program Kotaku masih sangat kurang atau terbatas. Setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae maka berkembang program penataan RTP berupa penyediaan RTP skala kelurahan, penataan ruang lingkungan, penataan taman kota di Battayang, penataan pelataran *Boyang Assalamaweuang* di Battayang, serta penataan DAS Sungai Saleppa dan Copala.

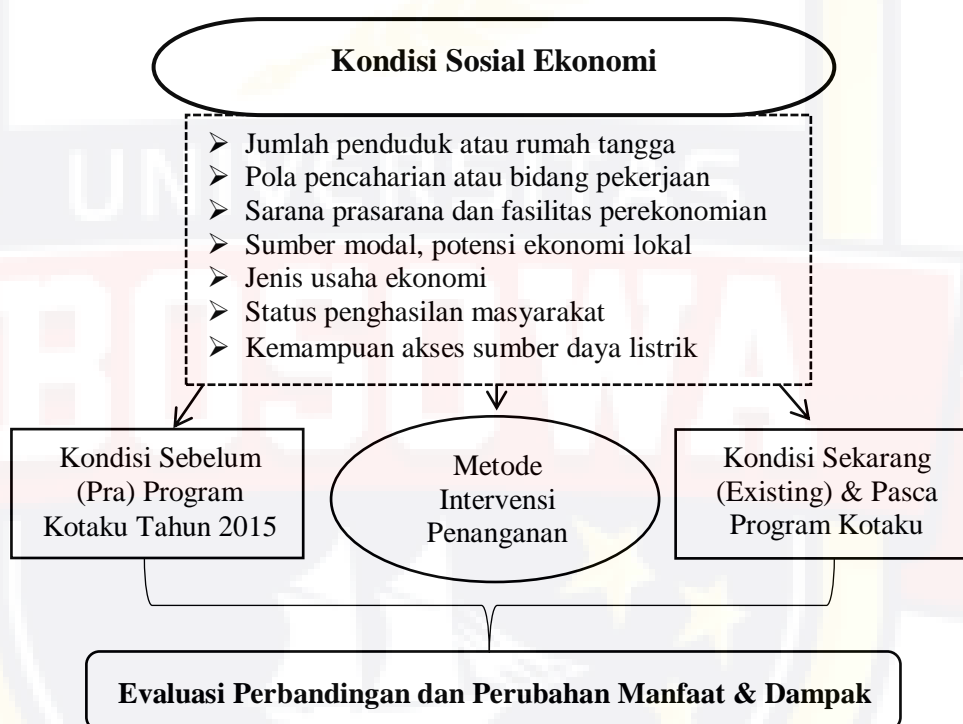
Program penataan RTP tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan ketersediaan taman kota, taman bermain, RTH sungai, tempat rekreasi di Kelurahan Banggae. Namun realisasi pelaksanaan *action plan* penanganan masalah RTP melalui beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPLP Kelurahan Banggae masih sangat kurang bahkan masih *absurd* sehingga berdampak pada ketersediaan RTP yang terbatas. Dampak luas dari *action plan* yang tidak berjalan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan perkotaan atas ruang interaksi sosial, tidak meningkatnya estetika perkotaan dan pelayanan publik, tidak efektifnya pola ruang dan tata guna lahan perkotaan.

j. Evaluasi perubahan Sosial Ekonomi, manfaat dan dampaknya

Salah satu penekanan penting dalam pelaksanaan program Kotaku adalah peningkatan keberdayaan ekonomi penduduk atau rumah tangga. Dengan intervensi penanganan masalah sosial ekonomi yang ada, maka diharapkan akan ada perubahan, manfaat dan dampak

yang menguntungkan/menggembirakan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal di Kelurahan Banggae.

Kerangka analisis atau evaluasi perbandingan terhadap perubahan manfaat dan dampak dalam hal sosial ekonomi penduduk atau rumah tangga pra dan pasca program Kotaku di Kelurahan Banggae seperti pada skema berikut.



Gambar 4.21 Kerangka Evaluasi, Perubahan Manfaat dan Dampak Sosial Ekonomi Pasca Program Kotaku di Kelurahan Banggae.

Berdasarkan skema tersebut, dapat diuraikan analisis perbandingan dan evaluasi perubahan manfaat dan dampak terkait perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Banggae yang diharapkan setelah adanya intervensi program dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi, seperti tertera pada Tabel 4.19 berikut.

Tabel 4.19
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Sosial Ekonomi Pasca
Pelaksanaan Program Kotaku, 2019

No.	Determinan/ indikator sosial ekonomi	Evaluasi Perbandingan	
		Kondisi Pra Program Kotaku	Kondisi Pasca Program Kotaku
1	Eksistensi penduduk dan rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Σ penduduk: 4.826 jiwa • Σ rumah tangga (RT): 1.118 KK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Σ penduduk: 4.826 jiwa ✓ Σ RT: 1.118 KK
2	Pola pencaharian/ bidang pekerjaan RT	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang perdag. & jasa: 758 RT • B. pemerintahan: 272 RT • B. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan: 31 RT • B. perikanan: 20 RT • B. konstruksi: 36 RT • B.industri/pabrik: 1 RT. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ B. perdagangan & jasa: 753 RT ✓ B. pemerintahan: 287 RT ✓ B. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan: 24 RT ✓ B. perikanan: 14 RT ✓ B. konstruksi: 34 RT ✓ B.industri/pabrik: 0 RT.
3	Sarana prasarana dan fasilitas perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar, TPI • Pusat pertokoan dan perbelanjaan • Pelabuhan, Terminal • Lembaga keuangan (bank, koperasi). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasar, TPI, minimarket ✓ Pusat pertokoan dan perbelanjaan ✓ Pelabuhan, Terminal ✓ Lembaga keuangan (bank, koperasi).
4	Akses sumber modal	<ul style="list-style-type: none"> • Bank, koperasi • Rentenir 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bank, koperasi, rentenir ✓ Bantuan dana bergulir dari program Kotaku
5	Potensi ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Ternak kambing dan ayam • Minyak kelapa, <i>Home industry</i> • Pengolahan ikan • Produk sarung Mandar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ternak kambing ✓ Minyak kelapa, <i>Home industry</i> ✓ Pengolahan ikan ✓ Produk sarung Mandar
6	Jenis kegiatan usaha ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Hotel, penginapan • Rumah makan • Depot air minum • Usaha bengkel • Usaha elektronik • Usaha butik, salon • Usaha pertukangan • Rumah kost • Kegiatan usaha ekonomi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hotel, penginapan ✓ Rumah makan ✓ Depot air minum ✓ Usaha bengkel ✓ Usaha elektronik ✓ Usaha butik, salon ✓ Usaha pertukangan ✓ Rumah kost ✓ Kegiatan usaha ekonomi lainnya
7	Status penghasilan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • MBR • Non-MBR 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 491 RT MBR ✓ 672 Non-MBR
8	Penggunaan energi/daya listrik	<ul style="list-style-type: none"> • 450 - 900 watt: ...RT • 1300 watt:.... RT • \geq2200 watt: ... RT • Menumpang: ... RT 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 450 - 900 watt: 851 RT ✓ 1300 watt:180 RT ✓ \geq2200 watt: 11 RT ✓ Menumpang: 76 RT
EVALUASI			
A	Metode intervensi penanganan program	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemberdayaan <i>livehood</i> masyarakat, pelatihan kewirausahaan ❖ Pengadaan sarana penunjang <i>livehood</i> ❖ Bantuan modal usaha, dana bergulir dari program Kotaku ❖ Pengembangan ekonomi lokal ❖ Perubahan <i>mindset</i> 	
B	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pola pencaharian penduduk antara pra dan pasca program Kotaku secara umum tetap tidak berubah, kecuali jumlah RT yang bekerja pada setiap bidang usaha/pekerjaan berkurang peminatnya namun tidak signifikan. Bidang pekerjaan yang bertambah jumlah peminatnya adalah pemerintahan. ✓ Sarana prasarana dan fasilitas perekonomian relatif tidak berubah baik 	

Lanjutan

		<p>kuantitas maupun kualitasnya antara pra dan pasca program</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Akses sumber modal juga tetap sama, kecuali kehadiran bantuan dana bergulir (BDG) selama pelaksanaan program Kotaku ✓ Potensi sumber daya ekonomi (SDE) dan jenis kegiatan usaha ekonomi (KUE) juga relatif tidak berbeda atau tidak berubah antara sebelum dan selama/sesudah program Kotaku ✓ Status penghasilan masyarakat atau rumah tangga (RT) dalam perbandingan komposisi MBR dan Non-MBR juga relatif tidak berubah selama/sesudah program Kotaku ✓ Kemampuan dan akses penggunaan sumber energi/daya listrik oleh rumah tangga relatif tidak berubah selama/sesudah program Kotaku.
C	Manfaat dan Dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sejumlah rencana intervensi penanganan masalah sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pengelola program Kotaku dalam RPLP dan RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae akan sangat bermanfaat bagi sejumlah kelompok penerima manfaat terutama golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah ✓ Program-program seperti pemberdayaan <i>livelihood</i> masyarakat (dengan melalui sejumlah kegiatan pelatihan keterampilan khusus), pelatihan kewirausahaan, pengadaan sarana penunjang <i>livelihood</i> (berupa pengadaan peralatan pertukangan dan rumah produktif, pembangunan TPST dan bank sampah), bantuan modal usaha/ BMU berupa dana bergulir, pengembangan ekonomi lokal, serta program perubahan <i>mindset</i> masyarakat, semuanya sangat baik, berguna/bermanfaat untuk mengatasi masalah ketidakberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal di Kelurahan Banggae ✓ Problematikanya bahwa berbagai jenis kegiatan pelatihan keterampilan (mulai dari pelatihan menjahit, tata boga, kewirausahaan, permesinan dan perbengkelan, komputer, percetakan sablon, usaha ternak ayam, fermentasi pakan ternak, hingga pelatihan hidroponik, pembuatan pupuk kompos serta pelatihan pengolahan sampah), semuanya belum dilaksanakan secara konsisten maksimal, bahkan ada yang hanya bersifat rencana tanpa realisasi yang jelas. ✓ Akibat tidak/kurang berjalan optimal/efektifnya sejumlah rencana intervensi penanganan masalah sosial ekonomi tersebut menyebabkan hampir tidak ada perubahan dan dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal ✓ Akibat kurangnya realisasi dari sejumlah <i>action plan</i> penanganan masalah sosial ekonomi yang sudah ditetapkan dalam RPLP dan RIK 2016-2021 tersebut, berdampak luas terhadap tidak efektifnya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae. ✓ Masyarakat lokal di Kelurahan Banggae khususnya mereka yang berada di kawasan kumuh sebagai target sasaran kelompok penerima manfaat program, belum bisa menerima manfaat yang berarti dari sejumlah rencana kegiatan yang ada. Kecuali bahwa ada sebagian kecil warga atau rumah tangga yang dapat memanfaatkan dana bantuan bergulir untuk tambahan modal usaha ataupun untuk kebutuhan lain serta bank sampah. Selain itu, warga masyarakat lokal hanya bisa memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur untuk memudahkan aktivitasnya sehari-hari. ✓ Sejumlah program atau rencana kegiatan yang telah ditetapkan belum bisa memberikan manfaat yang berarti dan dampak yang signifikan dalam pemberdayaan sosial ekonomi warga masyarakat lokal karena realisasinya sangat kurang/terbatas, bahkan ada yang tidak jelas nasib pelaksanaannya sampai sekarang.

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Data pada Tabel 4.19 tersebut menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) determinan atau indikator sosial ekonomi yang dievaluasi yakni: pola pencaharian atau bidang pekerjaan, sarana prasarana dan fasilitas perekonomian, sumber modal, potensi ekonomi lokal, jenis kegiatan usaha ekonomi, status penghasilan masyarakat, serta kemampuan akses sumber daya listrik, kesemuanya tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae. Demikian pula sejumlah rencana kegiatan atau tindakan (*action plan*) dalam bidang sosial ekonomi yang telah dirumuskan oleh pengelola program dalam RPLP dan RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae, sangat minim realisasi, sehingga tidak/kurang mampu memberikan manfaat dan dampak perubahan yang signifikan terhadap keberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal di kelurahan tersebut.

k. Evaluasi perubahan Sosial Budaya, manfaat dan dampaknya

Aspek sosial budaya pada dasarnya sangat penting, urgen dan strategis dalam program penanganan permukiman kumuh beserta penanggulangan berbagai permasalahan dan faktor penyebabnya. Aspek sosial budaya tersebut menyangkut nilai-nilai dan norma-norma, etika, tradisi dan kepercayaan, adat istiadat, perilaku kebiasaan, kesadaran, pola hubungan sosial dan kekeluargaan/kekerabatan, gotong royong, dan lainnya.

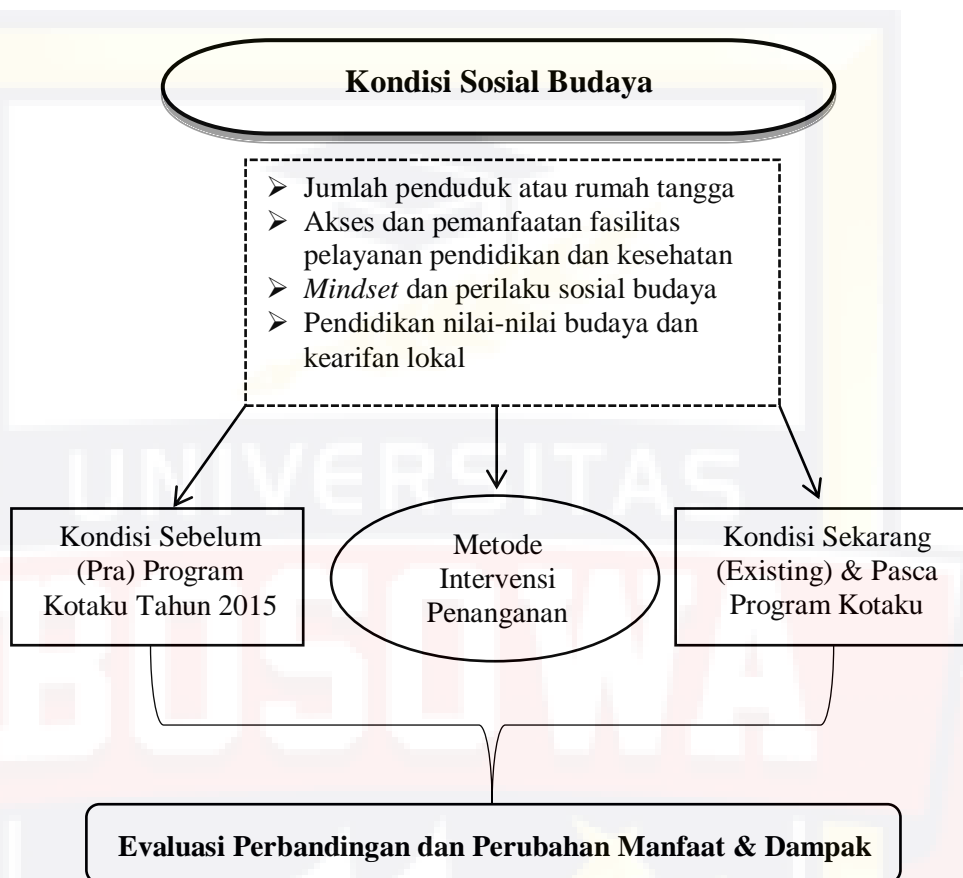
Di Kelurahan Banggae, kehidupan sosial budaya masyarakat pada dasarnya masih kental dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya

Mandar seperti *siwali perri*, *sipakale'biq*, dan lainnya. Nilai-nilai kearifan lokal dan kultur - semangat gotong royong masih terpelihara dengan baik walaupun pada kalangan warga masyarakat sudah mengalami pergeseran dan berakulturasi dengan budaya modern. Demikian pula simbol-simbol budaya masih terpatri dalam beragam kegiatan masyarakat lokal termasuk dalam pembangunan rumah, pemeliharaan kebersihan lingkungan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan perilaku sosial lainnya. Oleh karena itu, kiranya sangat wajar dan logis bila pengelola program Kotaku memasukkan aspek sosial budaya tersebut sebagai salah satu program dalam intervensi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae dengan tujuan dan harapan agar masalah-masalah permukiman kumuh dan faktor penyebabnya dapat diatasi ataupun diminimalisir.

Atas dasar itu, pelaksanaan program Kotaku dalam bidang sosial budaya tersebut diharapkan akan mampu menciptakan suatu perubahan, manfaat dan dampak yang lebih baik, menguntungkan/menggembirakan terhadap peran sosial budaya masyarakat lokal dalam mengentaskan masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta membangun budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk dalam mengubah pola pikir (*mindset*) dan mental ketergantungan pada bantuan menjadi sikap mental yang mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kerangka analisis atau evaluasi perbandingan terhadap perubahan manfaat dan dampak dalam

hal sosial budaya pra dan pasca program Kotaku di Kelurahan Banggae seperti pada skema berikut.



Gambar 4.22 Kerangka Evaluasi, Perubahan Manfaat dan Dampak Sosial Budaya Pasca Program Kotaku di Kelurahan Banggae.

Berdasarkan skema tersebut, dapat diuraikan analisis perbandingan dan evaluasi terhadap perubahan-perubahan manfaat dan dampak terkait perkembangan sosial budaya masyarakat di Kelurahan Banggae yang diharapkan setelah adanya intervensi program dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi dalam bidang sosial budaya tersebut, seperti tertera pada Tabel 4.20 berikut.

Tabel 4.20
Evaluasi Perubahan Manfaat dan Dampak Sosial Budaya Pasca Pelaksanaan
Program Kotaku, 2019

No.	Determinan/ indikator sosial budaya	Evaluasi Perbandingan	
		Kondisi Pra Program Kotaku	Kondisi Pasca Program Kotaku
1	Eksistensi penduduk dan rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Σ penduduk: 4.826 jiwa • Σ rumah tangga (RT): 1.118 KK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Σ penduduk: 4.826 jiwa ✓ Σ RT: 1.118 KK
2	Tingkat pendidikan dan akses pemanfaatan fasilitas pelayanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tamat SD: 942 jiwa • SLTP/ sederajat: 797 jiwa • SLTA/ sederajat: 2.241 jiwa • Diploma: 331 jiwa • Sarjana S-1: 664 jiwa • Magister S-2: 25 jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 631 jiwa bersekolah di Kelurahan Banggae maupun kelurahan lain di Kecamatan Banggae ✓ 118 jiwa bersekolah di luar Kec. Banggae ✓ 3 jiwa bersekolah di kota lain ✓ 23 jiwa tidak bersekolah ✓ 343 RT tidak mempunyai anggota keluarga usia wajib belajar.
3	Akses pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan	Sebelum program Kotaku dilaksanakan, kebanyakan warga masyarakat atau rumah tangga memanfaatkan Puskesmas/Pustu untuk memeriksakan kesehatan, berobat, bersalin dan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Puskesmas/Pustu : 928 RT ✓ Rumah sakit : 102 RT ✓ Praktek dokter/poliklinik: 37 RT ✓ Bidan/mantra : 32 RT ✓ Dukun/pengobatan tradisional: 13 RT ✓ Tidak pernah : 6 RT
4	<i>Mindset</i> dan pola perilaku kebiasaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jiwa dan semangat gotong royong (<i>siwali perri</i>) • Konflik/ sengketa lahan antar keluarga • Kurangnya pola pikir warga tentang hidup sehat dan bersih. • Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan permukiman • Kurangnya perhatian terhadap kebersihan drainase • Perilaku kebiasaan sebagian warga membuang sampah di sembarang tempat terutama sungai dan area permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Warga masyarakat atau rumah tangga menjadi target sasaran kelompok penerima manfaat untuk berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik dasar lingkungan dan permukiman ✓ Warga masyarakat atau rumah tangga menjadi target sasaran sosialisasi pendidikan, PHBS dan Aturan bersama (AB) ✓ Warga masyarakat atau rumah tangga menjadi target sasaran penyediaan sarana kesehatan ✓ Warga masyarakat atau rumah tangga menjadi target sasaran pembudayaan kegiatan sosial kemasyarakatan ✓ Generasi muda lokal menjadi target sasaran pengenalan budaya lokal.
EVALUASI			
A	Metode intervensi penanganan program	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemberdayaan masyarakat untuk membangun perubahan sikap dan perilaku melalui kegiatan sosialisasi PHBS dan aturan bersama (AB) ❖ Sosialisasi tentang pendidikan ❖ Penyediaan dan pengoptimalan sarana kesehatan ❖ Mendorong generasi lokal untuk mengenal budaya lokal ❖ Membudayakan kegiatan sosial kemasyarakatan 	
B	Perubahan, manfaat dan dampak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penanganan masalah sosial budaya melalui intervensi program dapat memberikan manfaat bagi warga masyarakat dan rumah tangga dalam mengatasi masalah pendidikan, kesehatan, <i>mindset</i> serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ✓ Rancangan intervensi program belum dilaksanakan secara konsisten dan maksimal sehingga belum mampu mengubah <i>mindset</i> dan perilaku yang tidak/kurang sesuai PHBS, dan hal itu berdampak terhadap peningkatan masalah permukiman kumuh. ✓ Sentuhan program Kotaku dalam menangani masalah permukiman kumuh masih dominan bersifat <i>action plan</i>, dan belum sepenuhnya menjadi <i>real action</i> dalam pendekatan sosial budaya mengatasi persoalan kawasan kumuh. 	

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder, 2019

Tabel 4.20 tersebut menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) determinan atau indikator sosial budaya yang dievaluasi yakni: tingkat pendidikan dan akses pemanfaatan fasilitas pelayanan pendidikan, akses pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, serta *mindset* dan pola perilaku kebiasaan, kesemuanya tidak/belum mengalami perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae. Demikian pula sejumlah rencana kegiatan atau tindakan (*action plan*) dalam bidang sosial budaya yang telah dirumuskan oleh pengelola program dalam RPLP dan RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae masih relatif kurang/ terbatas realisasinya, sehingga tidak/kurang mampu memberikan manfaat dan dampak perubahan yang signifikan terhadap keberdayaan sosial budaya masyarakat lokal.

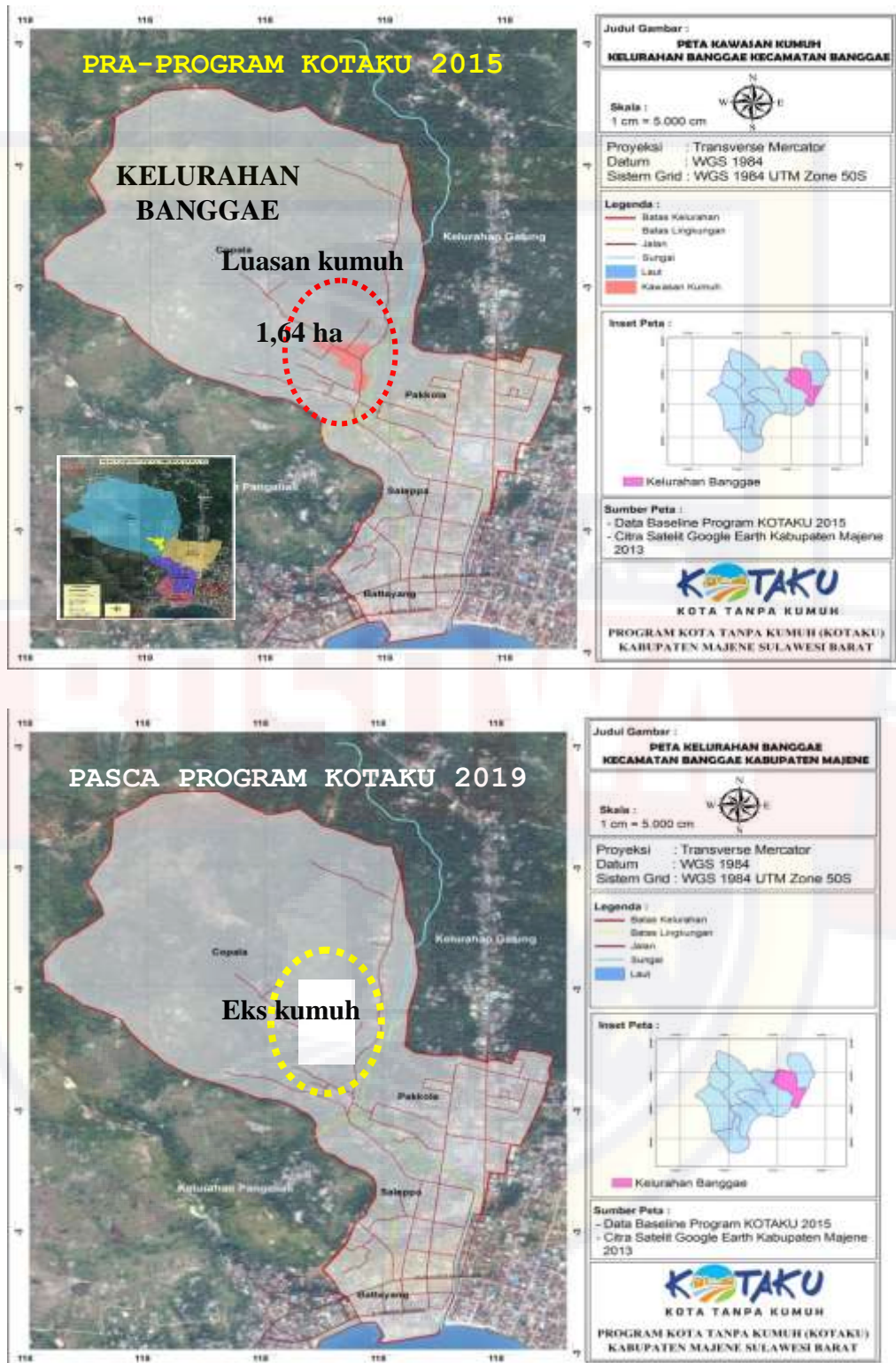
Keseluruhan uraian mengenai evaluasi perubahan, manfaat dan dampak berdasarkan indikator dalam perbandingan kondisi permukiman kumuh sebelum dan pasca pelaksanaan program Kotaku tersebut menunjukkan bahwa aneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal dan lingkungan permukiman di Kelurahan Banggae belum sepenuhnya terentaskan atau teratasi dengan baik dan benar serta maksimal oleh program Kotaku. Berbagai konsep perencanaan dan *action plan* yang ditetapkan dalam rangka penanganan setiap determinan atau indikator pada dasarnya cukup bagus, namun selain belum komprehensif juga masih minim realisasi, sehingga masih sulit menghasilkan perubahan, manfaat dan dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah

permukiman kumuh tersebut. Perubahan yang dominan menonjol dalam penanganan permukiman kumuh tersebut adalah dalam hal pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar terutama jalan lingkungan dan drainase, namun untuk indikator-indikator lainnya masih tetap stagnan atau tidak tampak perubahannya secara jelas dan nyata. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan atau ketimpangan realisasi antar indikator, serta belum tuntasnya penanganan semua indikator permukiman kumuh.

2. Evaluasi Perubahan Luasan Kawasan Kumuh

Salah satu tujuan utama dan mendasar dari pelaksanaan program Kotaku adalah menciptakan kota tanpa kawasan kumuh, kota yang bebas dari cengkeraman kumuh (*free slum area*), dan hal ini juga berarti luasan kawasan kumuh akan berkurang dan bahkan hilang dalam peta wilayah permukiman. Di Kelurahan Banggae, SK Bupati Majene Nomor: 1583/HK/KEP-BUP/VIII/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh menetapkan Lingkungan Copala sebagai kawasan kumuh perkotaan, dan selanjutnya berdasarkan hasil pendataan Baseline 100-0-100 oleh BKM Assamaturuang dan TIPP Tahun 2015 menetapkan status Copala dalam kategori kumuh berat, dengan luasan kumuh 1,64 ha.

Seiring berjalannya waktu, program Kotaku menyusun berbagai *action plan* yang dituangkan dalam RPLP dan RIK Tahun 2016-2021 untuk mengentaskan kawasan kumuh tersebut, dan hasilnya dapat disimak pada gambar peta berikut.



Sumber : hasil olahan data sekunder dan primer, 2019

Gambar 4.23 Peta Perbandingan Perubahan Luasan Kawasan Kumuh Pasca Program Kotaku di Kelurahan Banggae.

Kedua gambar peta di atas menunjukkan bahwa luasan kawasan kumuh 1,64 ha (kumuh berat) yang terletak di Lingkungan Copala (Gambar 11 atas), telah berubah menjadi kawasan permukiman non-kumuh (Gambar 11 bawah) setelah program Kotaku melakukan intervensi melalui berbagai program penanganan mulai dari penataan bangunan permukiman dan perumahan, pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana fisik dasar (seperti jalan lingkungan, saluran drainase, jamban komunal) hingga legalitas bangunan dan lahan. Namun demikian, luasan kumuh tersebut belum benar-benar hilang karena selain pembangunan prasarana dan sarana fisik dasar belum tuntas dan tidak merata, juga karena *mindset* dan PHBS masih kurang.

3. Penilaian Informan/Narasumber Tentang Perubahan Manfaat dan Dampak Penanganan Permukiman Kumuh dalam Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Banggae

Pelaksanaan program Kotaku khususnya di Kelurahan Banggae sudah sepantasnya menciptakan perubahan serta menimbulkan manfaat dan dampak sebagai konsekuensi atau implikasi dari adanya pola penanganan dan tindakan intervensi program terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh lingkungan permukiman kumuh dan penduduknya sesuai dengan indikator-indikator permukiman itu sendiri. Tentu yang lebih mengetahui dan merasakan langsung perubahan, manfaat dan dampak tersebut adalah masyarakat atau kelompok penerima manfaat (KPM). Dan, tentu pihak yang tahu dan paham segala seluk beluk perencanaan dan realisasi

penanganannya adalah unsur pengelolaan/ pelaksana program. Demikian pula bahwa seluruh sistem (input, proses dan *output-outcome*) penanganan permukiman kumuh tidak lepas dari pengamatan atau pantauan kalangan ahli dan praktisi bidang keilmuan tertentu (khususnya manajemen, lingkungan, tata ruang wilayah, sosiologi perkotaan, ekonomi perkotaan).

Sehubungan dengan konsepsi tersebut, maka dilakukan wawancara dengan sejumlah informan atau narasumber mulai dari kelompok penerima manfaat (KPM), unsur pengelola/ pelaksana program tingkat lingkungan dan kelurahan (relawan, KSM, TIPP, BKM/LKM, Lurah, Kepala Lingkungan), unsur pengelola/pelaksana program tingkat kabupaten (Bappeda, Bupati) hingga pakar/ akademisi, praktisi, pemerhati/ pengamat, sebagaimana dipaparkan pada uraian berikut.

a. Penilaian kelompok penerima manfaat (KPM)

Berdasarkan hasil wawancara, kalangan warga masyarakat atau KPM (kelompok penerima manfaat) menilai pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di lingkungannya cukup memberikan perubahan dan manfaat, bahkan ada yang menyatakan memuaskan karena memperoleh sejumlah bantuan seperti rumahnya direhab, jalannya diperbaiki, dibuatkan jamban dan lainnya. Namun demikian, KPM lainnya memberikan penilaian yang berbeda yakni menganggap biasa saja dan tidak ada perubahan, merasa tidak atau kurang memperoleh manfaat sebab di lingkungan sekitarnya belum ada

kegiatan program dan realisasi.(hasil olahan wawancara tanggal 03 dan 04-Oktober-2019).

Kalangan KPM menilai ada perbedaan atau perubahan yang berarti kondisi lingkungan permukimannya sebelum dan sesudah program Kotaku dilaksanakan. Di Tahun 2014, mereka menilai banyak bantuan dan kegiatan dilaksanakan, sedangkan di Tahun 2019 sudah kurang karena sudah banyak kegiatan dilakukan. Namun KPM lainnya menyatakan kondisi lingkungan permukimannya sama saja dan tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah program Kotaku dilaksanakan.

Kalangan KPM mengungkapkan bahwa manfaat perubahan fisik lingkungan yang dialami dan dirasakan adalah kondisi bangunan hunian menjadi lebih baik, drainase semakin baik, dan pelayanan air bersih lebih terjamin dan pengelolaan air limbah dapat diatasi. Begitu juga dengan persampahan dan proteksi kebakaran. Namun KPM lainnya menyatakan program-program kegiatan yang direncanakan di lingkungan permukimannya sejak awal Tahun 2016 dan 2017 sampai sekarang belum dilaksanakan, janji perbaikan jalan dan drainase belum terealisasi. Begitu juga janji bantuan pelayanan air minum, tempat sampah dan pengangkutan sampah, WC dan lainnya sampai sekarang belum ada realisasi, jadi tidak ada perubahan sama sekali. (hasil olahan wawancara tanggal 16 dan 17 Oktober-2019).

Kalangan KPM menyatakan dilibatkan dalam kegiatan pelatihan, mendapat pembinaan usaha serta menerima suntikan modal berupa

bantuan dana bergulir dari KSM Assamaturuang sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Namun KPM lainnya menyatakan tidak/ belum pernah didaftar/ diikuti dalam kegiatan pelatihan keterampilan usaha, dan juga belum pernah menerima bantuan dana bergulir ataupun mengambil kredit dari KSM.(hasilolahan wawancara 04-10-2019).

Uraian hasil wawancara dengan KPM tersebut mengindikasikan bahwa dalam pandangan atau penilaian masyarakat lokal, program Kotaku dapat menciptakan perubahan serta memberikan manfaat dan dampak positif yang berarti terhadap lingkungan permukiman yang diintervensi dan terhadap kelompok penerima manfaat yang menerima bantuan. Artinya, *action plan* berupa kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana fisik dasar lingkungan (seperti penataan bangunan hunian atau perbaikan/rehab/bedah rumah, perbaikan/pemugaran dan pembangunan jalan lingkungan dan drainase, pengadaan jamban komunal atau IPAL, pembuatan sumur gali dan lainnya) maupun kegiatan pemberdayaan (sosial ekonomi) yang berhasil direalisasikan atau dilaksanakan, secara nyata memberikan perubahan wajah lingkungan permukiman dari kumuh menjadi non-kumuh, serta memberikan manfaat dan dampak positif langsung terhadap peningkatan kualitas permukiman dan kehidupan sosial ekonomi kalangan warga masyarakat. Sebaliknya, *action plan* yang mengalami penundaan *real action* atukah batal dilaksanakan karena berbagai faktor (terutama anggaran), secara otomatis tidak memberikan perubahan manfaat dan

dampak apapun terhadap lingkungan permukiman dan sejumlah warganya. Dengan demikian masih ada ketimpangan perubahan dan kesenjangan manfaat dan dampak dalam penanganan permukiman.

b. Penilaian unsur pengelola/ pelaksana program Kotaku tingkat lingkungan dan kelurahan tentang perubahan, manfaat dan dampak penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae

1) Penilaian Relawan

Nursiah, salah seorang relawan yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae mengemukakan bahwa:

Pada Tahun 2014, belum terfokus pada penanganan kumuh dengan pemberdayaan dan program Kotaku belum masuk. Pada Tahun 2017-2019, program Kotaku masuk khusus melaksanakan kegiatan infrastruktur. Kendalanya, masih ada saja masyarakat yang tidak peduli

Penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku bermanfaat sekali, sekarang jalan setapak, drainase, rehab rumah bagi rumah tidak layak hunisudah memadai.

Perubahan yang sangat signifikan di wilayah kumuh yang ada di lingkungan Copala yang sudah terlihat bersih.

Ada perbedaan antara kondisi lingkungan permukiman kumuh sebelum dan setelah program Kotaku diberlakukan/ dilaksanakan. Dulunya tidak tertata atau kumuh, sekarang tidak lagi.

Manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan terutama adanya perbaikan rumah tidak layak huni, jalanan sudah diperbaiki, drainase sudah terbangun, pelayanan air bersih, pembuatan SPAL. Namun untuk pengelolaan persampahan masih harus ada penambahan armada pengangkut sampah, demikian juga perlu adanya proteksi kebakaran apalagi di wilayah padat(hasil wawancara tanggal 04-09-2019).

Terkait manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi dalam pelaksanaan program Kotaku seperti kegiatan usaha ekonomi berjalan lancar dengan adanya akses jalan, kalangan warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik sehingga mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan, warga masyarakat memperoleh bantuan modal usaha berupa dana bergulir di UPK sehingga mengalami peningkatan pendapatan usaha. Selain itu, sarana

dan prasarana perekonomian di Kelurahan Banggae lancar karena adanya pasar.

Manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi lainnya seperti akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah karena adanya bantuan pemerintah (BPJS), demikian juga akses pelayanan fasilitas pendidikan dengan adanya bantuan melalui BOS, PKH, KIP. Dalam kaitan itu, sejumlah rumah juga memperoleh bantuan pemasangan gratis listrik dari pemerintah sehingga rumah tangga atau keluarga yang dulunya tidak punya meteran sendiri dan menumpang di tetangga sudah dapat memiliki meteran daya listrik sendiri.

Kebutuhan fasilitas umum dan sosial juga sudah dapat terpenuhi dengan adanya bantuan pemerintah. Kecuali untuk pemenuhan kebutuhan ruang publik/ ruang terbuka hijau bagi masyarakat sampai sekarang belum ada atau masih dalam perencanaan (hasil wawancara tanggal08-2019).

Terkait manfaat dan dampak perubahan sosial budaya dalam pelaksanaan program Kotaku seperti adanya perubahan perilaku sebagian warga masyarakat yang sudah menyadari hak dan kewajibannya berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan melalui kerjabakti setiap hari Jumat dan hari minggu, sehingga budaya bersih dan sehat menjadi kebiasaan masyarakat (hasil wawancara tanggal 25-09-2019).

Pandangan relawan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program Kotaku secara nyata menciptakan perubahan fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya di Kelurahan Banggae termasuk dan terutama di Lingkungan Copala. Kalangan penduduk dan kawasan permukimannya dapat memperoleh manfaat dan dampak positif yang berarti atas perubahan-perubahan fisik dan non-fisik yang diciptakan oleh program Kotaku. Kalangan warga masyarakat dapat memanfaatkan dan menikmati bangunan hunian yang sudah direhab dan ditata, jalan lingkungan yang sudah diperbaiki dan diperkeras dengan aspal dan rabat beton maupun yang dilengkapi bangunan pelengkap saluran samping, drainase yang sudah dibangun ataupun diperbaiki dan dipugar, jamban komunal atau IPAL yang sudah dibangun, bantuan dana bergulir, akses pelayanan kesehatan dan

pendidikan, bahkan bantuan meteran listrik secara gratis. Selain itu, perubahan mindset, mental dan perilaku hidup bersih (PHBS) juga semakin meningkat pada kalangan warga masyarakat. Semua perubahan, manfaat dan dampak tersebut mengisyaratkan satu hal, yakni bertransformasi atau berhijrah dari kondisi kehidupan kumuh menjadi kehidupan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya yang lebih baik.

2) Penilaian KSM, TIPP, BKM/LKM

(a) Penilaian KSM

Salah seorang dari KSM Assamaturuang bernama Rosdiana memberikan penilaiannya dengan mengemukakan bahwa:

Setelah adanya program Kotaku masuk di Kelurahan Banggae, lingkungan permukiman mengalami perubahan, dan ada perbedaan dengan kondisi sebelumnya, seperti di wilayah kumuh sudah terlihat bersih. Namun demikian, kendala yang masih ada adalah ada saja kalangan warga masyarakat yang belum sadar untuk berpartisipasi.

Penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku memberikan manfaat dan perubahan yang signifikan di Kelurahan Banggae karena sekarang sudah ada terlihat bersih. Ada perbedaan sebelum masuk program Kotaku, lingkungan Copala yang terlihat kumuh sekarang tidak lagi. (hasil wawancara tanggal 04-09-2019).

Manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan ditandai oleh adanya penataan bangunan hunian melalui rehab rumah yang memadai, akses jalan sudah memadai, drainase juga sudah bagus di wilayah kumuh, pelayanan air bersih cukup, di wilayah kumuh pengelolaan air limbah sudah bagus. Kecuali pengelolaan persampahan masih bermasalah karena tidak adanya armada di wilayah kumuh, serta perlu adanya proteksi kebakaran.

Terkait perubahan sosial ekonomi serta manfaat dan dampaknya tercermin dari berbagai kegiatan ekonomi lancar dengan adanya sarana prasarana ekonomi terutama pasar, kegiatan usaha ekonomi lancar dengan bagusnya jalan, adanya kegiatan yang masuk di lingkungan kumuh berarti membuka lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat, ada dana bergulir, pendapatan kalangan warga meningkat, ada BPJS yang memudahkan akses berobat bagi

sejumlah penduduk di Puskesmas, ada KIP dan PKH yang memudahkan kalangan keluarga menyekolahkan anaknya, akses pelayanan sumber energi listrik terpenuhi. Yang belum ada/tersedia adalah pemanfaatan fasilitas umum dan sosial, pemanfaatan ruang publik/ruang terbuka hijau.

Terkait perubahan sosial ekonomi serta manfaat dan dampaknya tercermin dari budaya hidup bersih kalangan masyarakat sudah meningkat dengan kerja bakti tiap Jumat dan Minggu (hasil wawancara 13-10-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan atau penilaian KSM, masuknya program Kotaku merencanakan dan mengimplementasikan berbagai kegiatan fisik dan non-fisik, secara nyata dan langsung maupun tidak langsung menimbulkan suatu perubahan, manfaat dan dampak positif yang berarti baik pada aspek lingkungan maupun sosial budaya dan ekonomi bagi lingkungan permukiman dan penduduk di Kelurahan Banggae.

(b) Penilaian TIPP

Salah seorang anggota TIPP bernama Fatimah memberikan penilaiannya dengan mengemukakan bahwa:

Penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku sangat bermanfaat apalagi terbangunnya fasilitas jalan, drainase, sanitasi, dan lainnya. Ada perubahan yang sangat signifikan, khususnya di Lingkungan Copala yang masuk dalam wilayah kumuh.

Ada perbedaan antara kondisi lingkungan permukiman kumuh Tahun 2014 sebelum program Kotaku diberlakukan dengan Tahun 2019 setelah program Kotaku dilaksanakan. Perbedaannya yakni dulunya kumuh sekarang kelihatan bersih, karena adanya partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan. (hasil wawancara tanggal 29-09-2019).

Manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan terutama terlihat dari adanya perbaikan rumah warga melalui BSP 5, jalan sudah diperbaiki walaupun masih ada yang rusak, drainase sudah terbangun khususnya di wilayah yang padat penduduknya, layanan air bersih terbilang cukup, perbaikan SPAL. Kecuali masih perlu

penambahan armada sampah, serta perlunya proteksi kebakaran khususnya di wilayah yang padat penduduknya.

Manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi terutama terlihat dari keberadaan warga masyarakat yang sudah bisa mengakses pinjaman dana bergulir melalui program Kotaku. Sedangkan dari segi sosial budaya, manfaat dan dampak perubahannya terutama tercermin dari perilaku warga masyarakat sudah terbiasa melakukan gotong royong khususnya kerja bakti setiap hari Jumat. Jadi, perbandingan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2017-2019) program Kotaku dilaksanakan ditandai oleh adanya perubahan, walaupun masih perlu pembenahan bukan saja di wilayah kumuh melainkan di luar lokasi kumuh sehingga pembangunan bisa merata. Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dengan melihat permasalahan yang mendesak. (hasil wawancara tanggal 13-10-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam penilaian TIPP, kehadiran program Kotaku melakukan intervensi pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana fisik maupun menyelenggarakan kegiatan non-fisik (sosial ekonomi dan budaya) melalui program perencanaan dan pola penanganan yang sudah ditetapkan, secara eksplisit dan implisit menciptakan suatu perubahan wajah lingkungan permukiman dengan bagian-bagiannya (bangunan hunian, jalan, drainase, SPAL, jamban komunal, sarana PAM) serta menggairahkan kehidupan perekonomian masyarakat melalui bantuan modal usaha (dana bergulir) maupun proyek pembangunan sarana prasarana lingkungan dan permukiman. Selain itu juga mendorong peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui pembudayaan tradisi gotong royong khususnya kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat dan Ahad.

(c) Penilaian BKM/LKM

Salah seorang anggota BKM/LKM bernama Abd.Azis memberikan penilaiannya bahwa:

Penanganan kumuh oleh program Kotaku sangat memberikan manfaat terhadap kondisi lingkungan, dimana lingkungan yang dulunya tidak mempunyai akses jalan, drainase, rehab rumah bisa diatasi. Pelaksanaan program Kotaku, alhamdulillah sudah memberikan perubahan yang sangat besar, terutama dalam penanganan kumuh khususnya di Kel. Banggae, karena melalui intervensi program bisa mengurangi luasan kumuh sebesar 1,64 ha di Kel. Banggae. Perbedaan kondisi lingkungan dulu dan sekarang sangat berbeda dimana sebelum Tahun 2014 kondisi lingkungan sangat kumuh, namun dengan masuknya program Kotaku maka masalah kumuh dapat teratasi walaupun belum seluruhnya terrealisasi (hasil wawancara tanggal 07-09-2019).

Manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan terutama ditandai oleh adanya bantuan terhadap beberapa rumah warga yang mendapatkan perbaikan rumah, akses jalan sudah memadai, drainase lingkungan sudah bagus dan tidak terjadi lagi genangan, air minum sudah mencukupi. Kecuali dari segi pengelolaan air limbah, masih terdapat genangan di sekitar rumah warga karena tidak adanya SPAL. Demikian pula sarana prasarana persampahan masih kurang terutama pengangkutan sampah yang tidak lancar, termasuk proteksi kebakaran khususnya di kawasan kumuh belum ada. (hasil wawancara tanggal 28-09-2019).

Manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi ditandai oleh ketersediaan sarana prasarana perekonomian terutama pasar yang mendukung kelancaran kegiatan transaksi dan memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Selain itu, tersedia akses jalan yang memadai sehingga usaha ekonomi bisa berjalan lancar, membuka lapangan pekerjaan terutama pada saat pelaksanaan kegiatan fisik karena melibatkan masyarakat, sumber permodalan bisa didapatkan melalui dana bergulir untuk program Kotaku yang dikelola oleh UPK BKM, pendapatan sudah meningkat, pelayanan pendidikan, kesehatan, energi listrik, fasilitas umum sudah terlayani dengan adanya bantuan dari pemerintah. Kecuali yang masih kurang adalah belum ada RTH/RTP yang dibangun.

Manfaat dan dampak perubahan sosial budaya terutama karena masyarakat sudah berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan melalui kerja bakti setiap Jumat. Disamping itu masyarakat juga telah memelihara sarana prasarana yang telah dibangun dan membentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP). Hasil evaluasi terhadap program Kotaku Tahun 2014 – 2019 adalah: pada Tahun 2014 belum berfokus pada penanganan kumuh karena masih kental dengan dunia pemberdayaan. Tahun 2017-2019, dengan masuknya program Kotaku di Banggae yang secara khusus melaksanakan kegiatan infrastruktur, sehingga permasalahan bisa

diatasi. Alhamdulillah. Adapun kendalanya: masih kurangnya partisipasi warga, masih ada egosektoral antar OPD, belum sinkronnya kegiatan (perencanaan) masyarakat dengan Pemda (*bottom up vs top down*). (hasil wawancara 29-09-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam penilaian BKM/LKM, program Kotaku hadir melakukan perubahan fisik lingkungan, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal di Kelurahan Banggae. Program Kotaku telah hadir melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana fisik lingkungan maupun kegiatan sosial ekonomi dan budaya sehingga perubahan wajah permukiman pun semakin tampak jelas dan bisa diperbandingkan dengan kondisi sebelumnya. Bukan hanya perubahan yang terjadi, namun juga manfaat dan dampak positif menyertainya yang dirasakan ataupun dinikmati oleh kelompok masyarakat pemanfaat dan pemelihara (KMPP). Walaupun diakui bahwa kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik dasar lingkungan belumlah seluruhnya terselesaikan/tuntas sesuai yang direncanakan, namun tetap tidak mengurangi nilai perubahan, manfaat dan dampak positifnya.

Keseluruhan uraian mengenai penilaian ketiga unsur pelaksana program Kotaku (yakni KSM, TIPP dan BKM/LKM) menunjukkan bahwa umumnya mereka (ketiga unsur pelaksana) sepaham dan sepakat mengenai peran vital dan strategis program Kotaku dalam menciptakan perubahan wajah lingkungan permukiman beserta dengan bagian-bagian pendukung utamanya (bangunan hunian, jalan,

drainase, IPAL/SPAL, sarana air minum, sarana persampahan, sarana proteksi kebakaran, sarana perekonomian, sarana sosial budaya).

Mereka juga sepakat mengenai masih adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan kebutuhan yang tidak/belum tuntas. Mereka juga sepakat mengenai adanya manfaat dan dampak positif dari perubahan tersebut.

3) Penilaian Lurah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Banggae Muhammad Saupa Ajad S.Ag.,M.Pd, diperoleh gambaran mengenai penilaiannya tentang perubahan, manfaat dan dampak penanganan permukiman kumuh oleh program Kotaku di wilayah otoritasnya sebagaimana dikemukakan bahwa:

Perbandingan perubahan permukiman kumuh sangat signifikan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2017.

Pelaksanaan program sangat memberikan manfaat pada masyarakat karena pada saat ini sudah diintervensi oleh program Kotaku dan memperbaiki hal-hal yang tidak bagus dipandang mata oleh masyarakat. Di Lingkungan Copala, ada beberapa titik kumuh yang bisa dilihat walaupun tidak semuanya dapat dilihat pandangan mata. (hasil wawancara tanggal 07-10-2019).

Manfaat perubahan fisik lingkungan yang ada di Lingkungan Copala secara garis besarnya sudah bagus mulai dari hunian, aksesibilitas lingkungan, drainase, air bersih dan lainnya.

Manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi adalah adanya kegiatan usaha kecil seperti UP2K, pemberdayaan masyarakat yang bisa menghasilkan dan memenuhi kebutuhannya.

Manfaat dan dampak perubahan sosial budaya adalah masyarakat sudah bisa memahami dan mulai ada kesadaran atas kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh program Kotaku.

Saran saya, masih perlu dilanjutkan dan dibenahi oleh pemerintah dalam hal ini organisasi perangkat daerah yang terkait mulai dari Dinas PU, Dinas Permukiman. Dan perangkat daerah yang terkait yang bisa menganggarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh program Kotaku, semoga ke depan lebih baik. (hasil wawancara tanggal 08-10-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa selaku kepala pemerintahan kelurahan, pemimpin tertinggi di tingkat kelurahan sekaligus penanggungjawab kemaslahatan pembangunan dan masyarakat di wilayah otoritasnya, Lurah Banggae menilai program Kotaku sebagai reparator dan bengkel permukiman kumuh perkotaan khususnya di Lingkungan Copala dan di Kelurahan Banggae pada umumnya. Program Kotaku dengan sejumlah paket rencana kegiatan dan penanganan kumuh baik fisik maupun non-fisik yang diusung ataupun ditawarkan, berperan penting sebagai dinamisator perubahan, pemberi manfaat dan kemaslahatan dampak yang baik-positif bagi pemulihan penyakit kumuh lingkungan permukiman.

4) Penilaian Kepala Lingkungan

Salah satu lingkungan permukiman di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang ditetapkan oleh SK Bupati sebagai lingkungan permukiman kumuh adalah Lingkungan Copala, dan lingkungan ini merupakan pusatnya kawasan kumuh di Kelurahan Banggae. Atas status dan kondisinya yang demikian maka Copala ditetapkan sebagai kawasan prioritas (sebagaimana juga telah disinggung sebelumnya) penanganan kawasan kumuh sekaligus menjadi target jargon 100-0-100 program Kotaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui lebih spesifik mengenai perubahan, manfaat dan dampak penanganan permukiman kumuh di Lingkungan Copala, dapat disimak hasil

wawancara dengan Kepala Lingkungan Copala A. Rahim yang mengungkapkan bahwa:

Pelaksanaan program Kotaku memberikan perubahan, manfaat dan dampak dalam penanganan masalah permukiman kumuh di lingkungan kami, dan menurut saya perubahan itu baik. Jika dibandingkan Tahun 2014, Tahun 2019 sudah ada perubahan. Jujur kami katakan sebelum Kotaku masuk, Lingkungan Copala sangat ketinggalan, tetapi setelah Kotaku menangani dari Tahun 2017 sangat memuaskan manfaat dan hasilnya. Namun demikian, kepuasan kami berkurang karena program Kotaku tersebut tidak berlanjut di Lingkungan Copala padahal masih banyak permasalahan fisik lingkungan maupun non-fisik yang membutuhkan penanganan. Terlepas dari itu, saya pribadi mengakui banyak perubahan sosial ekonomi yang terjadi jika dibandingkan sebelum Kotaku masuk di Lingkungan Copala. Demikian pula dalam hal perubahan sosial budaya, penanganannya sangat memuaskan atas adanya kerjasama masyarakat dengan Kotaku, terkecuali dari sisi kebersihan karena tong-tong sampah setiap KK dan transporting (angkut sampah) tidak terealisasi sehingga masyarakat buang sampah merata di berbagai tempat.

Manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku di lingkungan kami belum sepenuhnya sesuai dengan harapan atau hanya sekitar 25%. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Lingkungan mewakili warga kami di Copala meminta atau sangat mengharapkan agar program Kotaku dilanjutkan di Lingkungan Copala, sebab lingkungan permukiman kami masih sangat memerlukan pembangunan sarana prasarana fisik dasar terutama penataan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), akses jalan, air bersih, drainase dan lainnya. (hasil wawancara tanggal 09-10-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam penilaian Kepala Lingkungan Copala, program Kotaku pada dasarnya sudah menunjukkan dirinya untuk memberikan tawaran bantuan solusi atas aneka permasalahan lingkungan fisik maupun masalah sosial ekonomi dan budaya yang dihadapi oleh lingkungan permukiman dan penduduknya di Lingkungan Copala tersebut. Unjuk diri program Kotaku tersebut ditunjukkan dalam aneka ragam rencana aksi (*action plan*) yang sudah disusun, namun sayangnya sebagian kecil dari

action plan itu yang terwujud menjadi *real action*. Oleh karena itu, kiranya cukup wajar dan beralasan jika Kepala Lingkungan merasa puas atas tindakan penanganan dan perubahan yang sudah dilakukan, dan/atau atas sarana prasarana dasar fisik lingkungan yang sudah dibangun yang hasilnya baik dan bermanfaat serta berdampak positif dalam mengubah sebagian wajah permukiman kumuh. Namun kepuasan tersebut berubah menjadi ketidakpuasan karena ternyata program Kotaku berhenti melakukan unjuk diri dan tidak lagi melakukan kegiatannya di Copala tanpa alasan yang jelas, sementara masih banyak persoalan yang tidak mampu diatasi/diselesaikan oleh masyarakat lokal dan pemerintah setempat yang membutuhkan bantuan langsung dari program Kotaku.

Keseluruhan uraian mengenai penilaian unsur pelaksana program Kotaku di tingkat kelurahan tersebut menunjukkan bahwa baik Lurah maupun kepala lingkungan (Kaling) memberikan penilaian yang relatif tidak berbeda substansinya yakni sama-sama mengakui kontribusi nyata dan besar dari peran dan kontribusi program Kotaku dalam mengubah wajah pucat permukiman kumuh menjadi wajah permukiman yang ceria dan menggembirakan melalui aneka paket program penanganan masalah fisik lingkungan maupun sosial ekonomi dan budaya. Namun mereka (Lurah dan Kaling) merasa kurang puas (jika tidak bisa dikatakan sangat kecewa) karena program Kotaku dinyatakan sudah henggang dari Kelurahan Banggae maupun Lingkungan Copala tanpa diketahui alasan

dan sebabnya secara jelas. Mereka sudah mengetahui dan merasakan dengan jelas bahwa segala sesuatu yang sudah disentuh oleh program Kotaku nyata perubahannya, dinikmati manfaat dan dampak positifnya, sehingga persoalan atau permasalahan yang dianggap masalah sesungguhnya adalah aspek-aspek kehidupan (lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi) yang belum tersentuh penanganan program Kotaku.

c. Penilaian unsur pengelola/ pelaksana program di tingkat kabupaten mengenai perubahan, manfaat dan dampak penanganan permukiman kumuh

1) Penilaian Kepala Daerah

Informasi mengenai pola penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Majene dan Kecamatan Banggae pada umumnya, dan di Kelurahan Banggae khususnya, dapat diperoleh dari hasil wawancara Bupati Majene berikut:

Kecamatan Banggae yang selama ini kawasan kumuhnya 21,49 ha dan dengan adanya program Kotaku maka luasan kawasan kumuh berkurang menjadi 3,08 ha.

Pemerintah Kabupaten Majene telah mampu melakukan replikasi penanganan kawasan kumuh diluar kawasan yang ditangani oleh program Kotaku.

Perubahan-perubahan yang spesifik dengan adanya program Kotaku antara lain: (1) Fisik lingkungan permukiman, yakni menurunnya luas permukiman kumuh, dan 7 (tujuh) indikator kumuh dapat diselesaikan; (2) Kondisi sosial ekonomi penduduk, yaitu meningkatnya penghasilan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk melakukan pencegahan permukiman kumuh. (hasil wawancara tanggal 12-10-2019).

Uraian hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam penilaian Kepala Daerah atau Bupati Majene, program Kotaku telah mampu melakukan perubahan yakni berhasil mereduksi luas kawasan kumuh di Kelurahan Banggae dari 21,49 ha Tahun 2015 menjadi 3,08 ha Tahun 2017-2019. Dengan perubahan tersebut maka program Kotaku dapat membantu/menfalisitasi Pemerintah Kabupaten melakukan replikasi penanganan kawasan kumuh diluar kawasan yang ditangani oleh program Kotaku. Penurunan atau pengurangan luas kawasan kumuh secara drastis tersebut disebabkan oleh peningkatan pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana dasar fisik lingkungan yang selanjutnya memberikan manfaat dan dampak positif terhadap perubahan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang ditandai oleh peningkatan aksesibilitas, peningkatan kegiatan usaha dan penghasilan kalangan warga masyarakat, perubahan mental dan perilaku (PHBS). Dengan demikian perubahan fisik lingkungan memberikan manfaat, dampak dan efek domino terhadap aspek kehidupan lainnya terutama sosial ekonomi dan budaya.

2) Penilaian Bappeda

Hasil wawancara dengan A.Irma T. Nilawati, Kabid FISPKA

BAPPEDA mengungkapkan bahwa:

Pelaksanaan program Kotaku di Majene terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae sangat memberikan manfaat dan dampak perubahan yang berarti pada aspek fisik lingkungan (penataan bangunan, pembangunan jalan dan drainase, pengelolaan air limbah dan sampah, pelayanan air minum dan lainnya) dalam rangka penanganan kawasan kumuh dan pengurangan kawasan kumuh.

Manfaat dan dampak perubahan sosial budaya dan ekonomi terutama adanya kebersihan lingkungan, perubahan pola pikir masyarakat serta peningkatan ekonomi. Perubahan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2017-2019) program Kotaku dilaksanakan ditandai dengan pengurangan luasan kumuh.

Manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku khususnya di Kelurahan Banggae masih memerlukan pembenahan di beberapa indikator kumuh (7 indikator kumuh). Oleh karena itu, disarankan agar program Kotaku dapat berlanjut dan dapat mengintervensi lokasi lainnya yang tidak masuk dalam kawasan kumuh (hasil wawancara tanggal 11-10-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam penilaian pihak Bappeda, pelaksanaan program Kotaku berperan penting dalam penanganan dan perubahan atau pengurangan luasan kawasan kumuh. Selain itu, program Kotaku juga mampu menciptakan atau mendorong perubahan sosial budaya dan ekonomi terutama peningkatan PHBS, kebersihan lingkungan, perubahan *mindset* atau pola pikir masyarakat serta peningkatan ekonomi. Namun demikian, perubahan-perubahan tersebut belum menjadi representasi ketuntasan penyelesaian 7 (tujuh) indikator permukiman kumuh, pelaksanaan berbagai program atau rencana kegiatan, maupun penanganan aneka permasalahan baik lingkungan maupun sosial budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pihak Bappeda berharap agar program Kotaku masih tetap berlanjut atau dapat dilanjutkan di masa berikutnya.

d. Penilaian pakar/akademisi, praktisi dan pemerhati/ pengamat

Perubahan, manfaat dan dampak penanganan permukiman kumuh melalui program Kotaku di Kelurahan Banggae termasuk di Lingkungan Copala juga mendapat perhatian dari kalangan pakar atau akademisi

lokal, praktisi, serta pemerhati atau pengamat di bidang terkait, seperti diuraikan berikut.

Dra Marjanah M.Pd, salah seorang dosen di Yayasan STAI-DDI

Majene mengemukakan pandangan atau penilaiannya bahwa:

Pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae belum nampak manfaat yang berarti bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari kondisi bangunan, jaringan jalan tidak berpola dan drainase tidak berfungsi.

Perubahan-perubahan sejak adanya program Kotaku belum begitu nyata dan belum ada yang dapat dilihat secara nyata di Kelurahan Banggae.

Menurut saya, perubahan yang paling berarti bagi masyarakat yakni perubahan pikir sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk merubah kebiasaan buruk dalam bermasyarakat.

Perubahan yang harus dihasilkan program Kotaku terhadap fisik lingkungan permukiman yakni kondisi bangunan yang tidak rapat, kualitas konstruksi bangunan hunian yang kuat, kondisi jalan yang berpola, sanitasi umum, drainase yang berfungsi baik, serta adanya pengelolaan sampah yang baik.

Manfaat dan dampak perubahan yang harus dihasilkan program Kotaku terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk yakni diperlukan peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang bermukim, norma sosial yang beradab dan bermartabat.

Manfaat dan dampak dalam kondisi sosial budaya masyarakat yakni budaya kemiskinan yang selama ini dialami dapat dirubah dengan sikap dan perilaku yang optimistis untuk berusaha memperbaiki perekonomian keluarganya.

Tidak ada perubahan yang begitu berarti dengan adanya program Kotaku di Kelurahan Banggae. Belum nampak perubahan yang berarti. Hal ini terlihat dari pembangunan dalam kawasan permukiman kumuh yang belum ada perubahan yang berarti.

Pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, khususnya di Kelurahan Banggae memerlukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan penanganan yang matang dari rancangan yang ada, serta dilaksanakan secara demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabel dan desentralisasi untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang sejalan dengan menciptakan lingkungan hunian yang kondusif, dibutuhkan komunikasi yang efektif terhadap semua pelaku program.(hasil wawancara tanggal 18-10-2019).

Salah seorang pemerhati masalah sosiologi perkotaan di Majene,

Muh.Sabir mengemukakan bahwa:

Pada tahap implementasi program merujuk kepada rencana yang diawali dengan tahapan yaitu survei lokasi untuk mengetahui keadaan lingkungan seperti pembedahan rumah, dan ini benar-benar memberikan manfaat nyata.

Terkait perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku, bilamana dilihat dari proses kondisi mengalami sedikit perubahan fisik lingkungan permukiman warga, teratur, drainase lingkungannya cukup, penyediaan air bersih yang dapat memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Secara ilmiah kondisi sosial ekonomi dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat mendukung pembangunan, potensi kesejahteraan masyarakat dilihat dari adanya kegiatan perdagangan dan jasa yang menjadi pola pencaharian warga sekitar.

Perubahan sosial budaya masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku jelas memberikan manfaat dan efek pengaruh terhadap perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat perkotaan yang dilihat dari partisipasi dan kontribusi kultur dari masyarakat. (hasil wawancara tanggal 18-09-2019).

Jika memperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku, sudah mulai ada perubahan yang semakin baik. Sebelum ada intervensi program di Kelurahan Banggae dari Kotaku, kondisi masyarakat belum mendapat perhatian, namun setelah program Kotaku dilaksanakan semakin tampak kepedulian terhadap perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Prinsip pencegahan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, serta pengelolaan permukiman sementara ini masih tetap dalam proses, dan saya yakni akan benar-benar terwujud dalam menciptakan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat perkotaan yang lebih baik khususnya di Kelurahan Banggae.

Program Kotaku memberikan manfaat dan dampak perubahan dalam penanganan permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Banggae sebab hubungan sosial terhadap lingkungan dan masyarakat meningkat dan juga dibuktikan oleh adanya budaya gotong royong atau kerjasama diantara warga masyarakat.

Saya melihat ada peningkatan hubungan silaturahmi atau semangat kebersamaan kalangan warga masyarakat selama program Kotaku dilaksanakan yang mendorong terjadinya perubahan sosial dan berdampak pada warga sekitarnya

Saya menyarankan agar dilakukan evaluasi untuk tindak lanjut keberlanjutan program Kotaku. Saya berharap agar program ini dapat berlanjut untuk mengatasi masalah ataupun fenomena terkait kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Perlu ada *roadmap* atau tahapan penanganan lingkungan permukiman untuk keluar dari kekumuhan.(hasil wawancara tanggal 14-10-2019).

Supriadi, salah seorang pengamat/pemerhati masalah lingkungan

perkotaan di Majene mengemukakan bahwa:

Penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku sangat memberikan dampak yang berarti karena pemahaman masyarakat tentang pola hidup teratur, mengerti tentang lingkungan yang bersih, serta ruang bermain untuk anak-anak tersedia.

Perubahan fisik lingkungan permukiman pasca pelaksanaan program Kotaku sangat memberikan manfaat karena adanya tempat sampah terpilah, drainase dan MCK ditengah permukiman, serta adanya ruang terbuka untuk aktivitas santai di tempat permukiman.

Perubahan sosial ekonomi masyarakat sangat memberikan manfaat karena dengan adanya program Kotaku masyarakat diberikan bantuan dana bergulir untuk dapat melakukan perbaikan ekonomi.

Perubahan sosial budaya masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku sangat memberikan manfaat karena tingkat kepedulian masyarakat terhadap pola hidup bersih dan teratur sudah nampak. (hasil wawancara tanggal 19-09-2019).

Memperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan, jelas ada perubahan dibanding sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya masyarakat di Kelurahan Banggae dalam bergotong royong menjaga kebersihan lingkungannya.

Prinsip pencegahan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, serta pengelolaan permukiman benar-benar terwujud di Kelurahan Banggae dengan diberikannya bantuan dana bergulir, tempat sampah terpilah, ruang dan sarana bermain untuk anak serta penataan lingkungan permukiman termasuk rehabilitasi drainase dan MCK.

Saya berharap agar ke depannya program Kotaku benar-benar lebih maksimal lagi.

Penilaian saya secara keseluruhan bahwa: perencanaan harus matang, program bantuan dana bergulir harus tepat sasaran, pengadaan sarpras kebersihan harus benar-benar terencana dengan berkoordinasi dengan OPD terkait, serta tenaga fasilitator program Kotaku harus betul-betul yang profesional. (hasil wawancara tanggal 15-10-2019).

Syahrinullahi, salah seorang praktisi tata ruang wilayah dan kota di

Majene mengemukakan bahwa:

Menurut saya, program Kotaku cukup bermanfaat dalam merubah wajah kota yang kumuh menjadi lebih tertata.

Penataan kawasan lingkungan dengan program Kotaku cukup memberikan sumbangsih terhadap penatagunaan lahan dan ruang di perkotaanyang lebih baik.

Perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku terutama dengan adanya perbaikan perilaku masyarakat, adanya kesadaran akan kebersihan lingkungan, dan adanya penataan ruang yang lebih baik.

Perubahan sosial budaya masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku sangat bermanfaat sebab masyarakat dapat lebih faham dan mengerti tentang pentingnya penataan wilayah permukiman.

Jika diperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae, baik tata guna lahan maupun penataan ruang dan fungsi kawasan semakin lebih baik, karena penataan tersebut didasarkan pada indikator kumuh, sehingga dan luasan kumuh juga sudah berkurang.

Pelaksanaan program Kotaku yang disertai kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat dan dampak positif bagi peningkatan pemahaman kalangan warga masyarakat mengenai penataan lingkungan permukimannya.

Saran saya, agar diperluas intervensi terhadap kawasan kumuh. Selain itu, dibutuhkan pengawasan lebih lanjut terhadap kawasan kumuh yang sudah diintervensi oleh program Kotaku. (hasil wawancara 24-09-2019).

M.Afiat Mulwan ST MT, salah seorang praktisi tata ruang wilayah dan kota di Majene mengemukakan bahwa:

Program Kotaku memberikan manfaat dan dampak perubahan terhadap penataan ruang dan lahan perkotaan karena memberikan arahan sekaligus menunjukkan dampak nyata perubahan penataan lingkungan terhadap kondisi lingkungan masyarakat.

Perubahan fisik lingkungan permukiman pasca pelaksanaan program Kotaku nyata memberikan dampak terhadap penataan lingkungan di wilayah lokus program khususnya pada penataan jalan, pembentukan jaringan drainase, penataan titik kumpul sampah, penataan ruang terbuka hijau.

Perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat khususnya pada aktivitas jual beli makanan jadi di lokus wilayah program Kotaku.

Perubahan sosial budaya masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan dampak terhadap perubahan kesadaran perilaku hidup bersih masyarakat. (hasil wawancara 31-09-2019).

Bila diperbandingkan dengan kondisi sebelum program, setelah program Kotaku dilaksanakan terjadi peningkatan tata guna lahan, penataan ruang dan fungsi kawasan semakin baik. Perubahan mendasar yang terjadi adalah penataan jalan lingkungan, penataan drainase, peruntukan ruang terbuka, serta penanganan persampahan.

Prinsip pencegahan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, serta pengelolaan permukiman diwujudkan dalam penciptaan tata guna lahan, penataan ruang dan fungsi kawasan yang lebih baik, karena prinsip penanganan kawasan kumuh akan sinergi dalam penciptaan tata guna lahan.

Manfaat dan dampak perubahan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuhantara lain: (1) menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat; (2) Merubah pola hidup masyarakat yang sadar akan kebersihan dan keindahan lingkungannya; (3) Mengurangi kawasan kumuh perkotaan.

Saran dan rencana tindak lanjut adalah (1) Perluasan intervensi lokus penanganan kawasan kumuh perkotaan agar terjadi penurunan luasan kumuh secara signifikan; (2) Perlu proses monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap lokus yang telah diintervensi, agar perilaku hidup masyarakat yang sadar terhadap penciptaan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dapat terus terpelihara. (hasil wawancara tanggal 16-10-2019).

Muh.Alif Chalil, salah seorang birokrat dan praktisi tata ruang wilayah dan kota di Majene mengemukakan bahwa:

Dari perspektif tata ruang, penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku sangat memberikan manfaat dan dampak perubahan, dimana kondisi ini berpengaruh pada proses terjadinya perbaikan kampung dari segi bangunan fisik lingkungan maupun wajah lingkungan. Perubahan fisik lingkungan permukiman pasca pelaksanaan program Kotaku sangat memberikan manfaat dan dampak yang berarti karena terjadi suatu proses penatagunaan lingkungan fisik maupun bangunan sehingga memberikan ruang perkotaan menjadi layak dan efektif.

Perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku sangat memberikan manfaat dan dampak positif karena terjadi suatu perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar dimana lokasi tersebut bisa dijadikan sebagai obyek wisata baru terhadap penataan kawasan kumuh dengan pencegahan dan peningkatan kualitas.

Perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku sangat memberikan manfaat dimana masyarakat sekitar lebih bisa menjaga kawasan permukiman agar tidak kembali menjadi kumuh (meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akses terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman).

Memperbandingkan dengan sebelumnya, setelah program Kotaku dilaksanakantata guna lahan dan penataan ruang dan fungsi kawasan semakin lebih baik karena kembalinya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman.

Prinsip pencegahan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, serta pengelolaan permukiman dapat terwujud dalam menciptakan tata guna lahan, penataan ruang dan fungsi kawasan yang lebih. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas permukiman berbasis masyarakat.

Manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae belum sepenuhnya sudah sesuai dengan harapan karena masih terdapat titik kawasan kumuh yang belum sepenuhnya diselesaikan sehingga perlu dilakukan skala prioritas penyelesaian kekumuhan pada wilayah tersebut.

Saran saya, pelaksanaan program Kotaku sangat membutuhkan keterlibatan dari masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mampu atau dapat berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan. (hasil wawancara tanggal 16-10-2019).

Dr.Hj.Atika MM, salah seorang ilmuwan dalam bidang MSDM dan ekonomi, birokrat dan praktisi sekaligus pemerhati/pengamat masalah ekonomi perkotaan di Majene mengemukakan bahwa:

Secara umum dapat dikatakan penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku memberikan pengaruh dan manfaat (*impact*) karena kalangan warga masyarakat yang kondisi sosial ekonominya belum menggembirakan secara perlahan dapat keluar dari kemiskinannya yang resisten. Dengan program Kotaku kalangan warga masyarakat dapat semakin termotivasi atau terdorong untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif (UEK).

Secara ilmiah, perubahan fisik lingkungan permukiman pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat yang cukup berarti terhadap pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan yang lebih baik. Hal ini ditandai oleh adanya penanganan terpadu (perbaikan, pemugaran, penataan dan revitalisasi) permukiman. Secara praktikal, dampak perubahan jelas ada, dan hal ini dibuktikan oleh adanya semangat antusias dan keaktifan dari warga masyarakat untuk lebih memelihara kondisi fisik lingkungannya.

Secara ilmiah, perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak positif terhadap peningkatan harga tanah dan bangunan permukiman serta daya beli yang makin baik atau lebih tinggi. Secara praktikal, berdampak positif terhadap peningkatan semangat untuk mengembangkan pola usaha ekonomi yang produktif. (hasil wawancara tanggal 01-10-2019).

Secara ilmiah, perubahan sosial budaya masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan kontribusi yang tinggi karena masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai budayanya yang senantiasa saling membantu (*Siwali perri*) serta memiliki jiwa sosial yang tinggi diantara mereka. Secara praktikal, bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, seperti terlihat dari sikap dan perilaku kerjasama dan rasa persatuan diantara mereka.

Bilamana diperbandingkan dengan kondisi sebelumnya, kehidupan ekonomi masyarakat mulai membaik seiring waktu dan proses berjalannya aneka ragam kegiatan program Kotaku terutama sejak adanya bantuan dana bergulir dan pelatihan keterampilan (*life skill*) yang diharapkan dapat semakin mendorong gairah usaha dan pertumbuhan usaha ekonomi produktif. (hasil wawancara tanggal 19-10-2019).

Melihat kondisi lingkungan permukiman dan masyarakat yang ada, tampaknya semuanya masih tetap terus berproses menuju peningkatan kualitas permukiman dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan yang lebih baik.

Jika dilihat secara keseluruhan, sisi manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae bisa dikatakan belum optimal dan masih jauh dari harapan, sebab sebagian masyarakat selain belum tersentuh kegiatan

pemberdayaan program juga belum didukung kualitas SDM yang memadai serta belum tergerak hatinya/belum termotivasi untuk mendayagunakan dan mengelola potensi sumber daya alam/SDA (produk unggulan) yang ada atau dimiliki di lingkungannya.

Menurut saya, sejatinya masyarakat memperluas pengelolaan dan pengembangan potensi SDA dan sumber daya ekonomi lokal (SDEL) serta penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mewujudkan keberdayaan *livelihood* masyarakat serta lingkungan permukiman yang sehat, bersih, nyaman, aman dan ramah lingkungan, serta keluar atau terbebas dari kekumuhan.

Berdasarkan hasil evaluasi saya selaku pengamat, saya berkesimpulan bahwa pelaksanaan program Kotaku khususnya di Kelurahan Banggae belum maksimal di dalam melakukan intervensi penanganan permukiman kumuh, masyarakat setempat masih sangat memerlukan edukasi dan advokasi (pembinaan) guna mencapai tujuan dari program Kotaku tersebut. Selain itu, *monitoring* (pemantauan), *controlling* (pengawasan) dan evaluasi juga sangat penting diintensifkan dan diekstensifkan dalam mencegah tumbuhnya kembali *slum area* tersebut. Saran konstruktif lebih spesifik atau khusus bahwa penguatan kapasitas, intervensi yang lebih luas, serta sikap proaktif dan kerjasama (kolaborasi) pemerintah dan masyarakat juga sangat penting ditingkatkan terutama dalam menyamakan persepsi dan langkah bersama, serta menyatukan visi ke depan agar lebih produktif dan profesional. (hasil wawancara tanggal 20-10-2019).

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa sejumlah informan ahli dari kalangan pakar atau akademisi, praktisi, serta pemerhati atau pengamat dengan bidang keilmuan dan keahliannya masing-masing secara umum dan keseluruhan sepakat bahwa program Kotaku dengan berbagai *action plan*, paket kegiatan dan program, metode intervensi penanganan masalah, mampu menciptakan perubahan, manfaat dan dampak positif yang lebih baik dari kondisi lingkungan permukiman sebelumnya yang tidak/kurang lebih baik. Kecuali hanya ada satu informan ahli yang masih konsisten mempertahankan penilaiannya bahwa belum ada perubahan, manfaat dan dampak dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae.

Umumnya informan ahli mengakui adanya perubahan, manfaat dan dampak baik secara fisik lingkungan maupun sosial budaya dan ekonomi yang dihasilkan oleh pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae. Dengan cara pandang manajemen tata ruang dan tata guna lahan, lingkungan, sosiologi serta ekonomi perkotaan mereka melihat adanya perubahan, manfaat dan dampak dari intervensi program Kotaku terhadap kondisi lingkungan permukiman dan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, mereka juga mengakui bahwa intervensi penanganan oleh program Kotaku belum maksimal/optimal sehingga berharap agar ada kejelasan dan kepastian untuk dilanjutkannya program tersebut.

Keseluruhan uraian pendapat atau penilaian sejumlah informan tersebut mengindikasikan bahwa penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae melalui pendekatan program Kotaku menghasilkan suatu perubahan, manfaat dan dampak positif nyata baik terhadap berkurangnya luasan kawasan kumuh secara kuantitas maupun perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan masyarakatnya melalui berbagai kegiatan intervensi pembangunan infrastruktur, sarana prasarana fisik dasar lingkungan, bantuan akses sumber modal, sosialisasi dan pendidikan mental dan perilaku, pemberdayaan *livelihood* masyarakat, dan lainnya. Pokok persoalan yang masih mengemuka adalah belum merata dan tuntasnya intervensi tersebut yang berimplikasi pada terjadinya

kesenjangan (*gap*) perubahan antar indikator permukiman dan lingkungan, antar sektor pembangunan fisik dan non-fisik maupun kesenjangan antar lingkungan.

F. Pembahasan

1. Evaluasi Kondisi Permukiman Saat Ini di Kelurahan Banggae Pasca Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Program harus diakhiri dengan evaluasi, guna memastikan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya (Issac dan Michael, 1984). Evaluasi program merupakan penerapan model, teknik dan pengetahuan tentang evaluasi, untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan efektivitas program secara sistematis (Langbein dan Felbinger, 2006). Evaluasi program adalah suatu kegiatan yang membutuhkan metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program dengan tujuan untuk membuat keputusan (Rutman, 1984).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae, memerlukan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh atau komprehensif atas kondisi permukimannya saat ini. Hal ini sesuai pendapat Wang (2014) mengenai tujuan evaluasi yang ingin mengetahui sesuatu kondisi sehingga evaluasi program menjadi salah satu bentuk penelitian evaluatif. Dalam evaluasi program, pelaksana berpikir serta menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian.

Temuan hasil penelitian (sebagaimana tertera pada Tabel 5.1) menunjukkan bahwa kondisi permukiman saat ini berdasarkan kriteria fisik dan non fisik serta sejumlah indikator di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan program Kotaku dicirikan oleh data seperti pada Tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21
Hasil Evaluasi Kondisi Permukiman Saat Ini di Kelurahan Banggae Pasca Pelaksanaan Program Kotaku, 2019

No.	Determinan/ indikator permukiman	Kondisi permukiman saat ini pasca program Kotaku	Kategori Kumuh
1	Bangunan hunian	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 473 (39,5% dari 1.196 unit) bangunan tidak teratur ⊙ Kepadatan bangunan 22 unit/ha ⊙ 141 (11,8%) bangunan tidak memenuhi syarat luas lantai (<7,2 m²/orang) ⊙ 402 (33,5%) unit bangunan tidak penuhi syarat teknis ALADIN-nya 	Kumuh sedang dan ringan
2	Aksesibilitas jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 10.600 m (67% dari total panjang jalan 15.822 m) panjang jalan tidak memenuhi syarat teknis ⊙ 4.988 m panjang jalan yang lebarnya <1,5 m ⊙ 7.693 m (48,6%) panjang jalan dengan lebar ≥1,5m permukaannya tidak/belum diperkeras ⊙ 4.882 m (97,9%) panjang jalan dengan lebar <1,5m permukaannya tidak/belum diperkeras ⊙ 9.251 m (58,5%) panjang jalan dengan lebar ≥1,5m tidak/belum memiliki bangunan pelengkap saluran samping ⊙ 4.208 m (84,4%) panjang jalan dengan lebar <1,5m tidak/belum mempunyai saluran samping ⊙ 10.876 m (68,7%) panjang jalan dengan kualitas kurang baik. 	
3	Drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 1.412 m (12,9% dari 10.944m) panjang drainase kualitasnya kurang baik ⊙ 7.126 m (65,1%) panjang drainase yang kondisinya kotor, bau, tidak terpelihara 	
4	Pelayanan air minum (PAM)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 168 (15%) unit RT tidak/belum memiliki akses pelayanan air minum ⊙ 231 (20,7%) RT tidak/belum tercukupi kebutuhannya sesuai standar 60 lt/org/hr. 	
5	Pengelolaan Air Limbah (PAL)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 89 (9,3%) unit RT tidak/belum memiliki akses pengelolaan air limbah (PAL) atau jamban komunal (5 KK per jamban bersama) ⊙ 4,6% RT tidak/belum memiliki IPAL penuhi syarat teknis. 	
6	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 911 (81,5% dari 1.118 unit RT) unit RT tidak/belum memiliki sarana prasarana persampahan ⊙ 770 (68,9%) RT tidak/belum memiliki akses pelayanan angkutan sampah minimal 2x seminggu. 	
7	Proteksi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 1.118 (100%) unit RT tidak/belum memiliki sarana perlindungan kebakaran 	
8	Legalitas bangunan/ lahan	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 552 (46,7% dari 1.118 RT) tidak memiliki IMB ⊙ 365 (32,6% dari 1.118 RT) tidak memiliki SHM/HGB 	
9	Ruang Terbuka Publik (RTP)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Belum ada RTP (taman, RTH) ⊙ 1.118 (100%) RT tidak/belum memiliki akses ke RTP 	

10	Kondisi Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Akses pelayanan fasilitas pendidikan di Kelurahan Banggae masih terbatas ⊙ 928 (83%) RT berobat di Puskesmas/Pustu 	
11	Kondisi Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 753 (67,4% dari total 1.118 RT) menekuni pola pencaharian di bidang perdagangan dan jasa ⊙ 287 (25,7% dari total 1.118 RT) menekuni pola pencaharian di bidang pemerintahan ⊙ 627 (56,1% dari total 1.118 RT) berstatus MBR ⊙ 851 (76,1% dari total 1.118 RT) menggunakan energi atau daya listrik 450 watt – 900 watt 	

Sumber: hasil analisis Tahun 2019

Tabel 4.21 tersebut menunjukkan bahwa kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan program Kotaku masih berkategori kumuh sedang dan ringan dengan berbagai permasalahan fisik lingkungan dan sosial ekonomi serta budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat E.E. Bergel (1970, Wirotomo, 1997) bahwa permukiman kumuh sebagai daerah *slum* yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial. Demikian pula pendapat Carrasco & Ochiai (2016) mengenai definisi permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya.

Menelaah lebih jauh, Kelurahan Banggae dengan kondisi permukimannya saat ini yang masih tergolong kumuh sedang dan ringan pasca pelaksanaan program Kotaku, diperhadapkan pada aneka tantangan permasalahan sebagai berikut.

1. Tantangan permasalahan dalam hal penataan bangunan hunian terutama masih adanya 473 atau 39,5% unit bangunan yang kondisinya tidak teratur (tidak menghadap jalan dan tidak mengikuti pola yang ada), 141 (11,8%) unit bangunan mempunyai luas lantai (<7,2 m²/orang) yang tidak memenuhi syarat teknis, serta 402 (33,5%) unit bangunan yang mempunyai atap, lantai dan dinding (ALADIN) tidak memenuhi syarat teknis dalam artian bahan materialnya dari bambu dan kayu yang mudah rusak dan terbakar serta bocor. Kondisi bangunan hunian demikian masih memerlukan penanganan terpadu lebih lanjut baik penataan, rehabilitasi, pemugaran, maupun relokasi. Selain itu juga memerlukan pendekatan penanganan lain dalam bentuk

penegakan aturan mendirikan bangunan, pemberdayaan ekonomi terutama bagi rumah tangga yang kondisi bangunan huniannya masih dalam kategori RTLH (rumah tidak layak huni) agar mereka dapat memiliki kemampuan ekonomi menata rumah dan permukimannya sendiri.

2. Tantangan permasalahan dalam hal aksesibilitas lingkungan terutama karena adanya 10.600 m (67% dari total panjang jalan 15.822 m) panjang jalan tidak memenuhi syarat teknis. Demikian pula keberadaan 7.693 m (48.6%) panjang jalan dengan lebar $\geq 1,5$ m yang permukaannya tidak/belum diperkeras (dengan aspal atau rabat beton), 4.882 m (97,9% dari 4.988 m panjang jalan yang lebarnya $< 1,5$ m) yang permukaannya tidak/belum diperkeras, 9.251 m (58,5%) panjang jalan dengan lebar $\geq 1,5$ m tidak/belum memiliki bangunan pelengkap saluran samping, 4.208 m (84,4%) panjang jalan dengan lebar $< 1,5$ m tidak/belum mempunyai saluran samping, serta 10.876 m (68,7%) panjang jalan dengan kualitas kurang baik. Semua kondisi jalan tersebut masih memerlukan penanganan secara tuntas dari program Kotaku guna meningkatkan aksesibilitas lingkungan.
3. Tantangan permasalahan dalam hal drainase lingkungan terutama masih adanya 1.412 m (12,9% dari 10.944 m) panjang drainase yang kualitasnya kurang baik, serta 7.126 m (65,1%) panjang drainase yang kondisinya kotor, bau, tidak terpelihara. Kondisi saluran drainase yang tidak/ kurang menggembirakan/ menguntungkan tersebut masih memerlukan penanganan yang tuntas dari program Kotaku
4. Tantangan permasalahan dalam hal pelayanan air minum adalah masih adanya 168 (15%) unit RT tidak/belum memiliki akses pelayanan air minum, dan 231 (20,7%) RT tidak/belum tercukupi kebutuhannya minimal 60 lt/org/hr. Walaupun sudah banyak rumah tangga yang memiliki akses pelayanan dan tercukupi kebutuhan air minumnya sesuai standar, namun program Kotaku perlu menuntaskan masalah yang dihadapi oleh sejumlah rumah tangga yang minim akses dan minus kebutuhan tersebut.
5. Tantangan permasalahan dalam hal pengelolaan air limbah (PAL) terutama masih adanya 89 (9,3%) unit RT tidak/belum memiliki akses jamban komunal (5 KK per jamban bersama), dan 4,6% RT tidak/belum memiliki IPAL yang memenuhi syarat teknis. Program Kotaku perlu melanjutkan dan menuntaskan penanganan masalah tersebut sebab berdampak pada kondisi lingkungan permukiman yang kotor, tidak bersih, berbau dan merusak pemandangan, serta mengurangi kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman.
6. Tantangan permasalahan dalam hal pengelolaan sampah terutama keberadaan 911 (81,5% dari 1.118 unit RT) unit RT yang tidak/belum memiliki sarana prasarana persampahan, serta 770 (68,9%) RT yang tidak/belum memiliki akses pelayanan angkutan sampah minimal 2x seminggu. Masalah ini masih merupakan problem serius yang harus

dan perlu dilanjutkan dan dituntaskan penanganannya oleh program Kotaku sebab berdampak pada masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman.

7. Tantangan permasalahan dalam hal proteksi kebakaran masih bersifat umum sebab dari 1.118 RT yang ada semuanya tidak/belum memiliki sarana perlindungan kebakaran. Oleh karena itu, program Kotaku sangat penting melanjutkan dan merealisasikan *action plan* mengenai penyediaan sarana pemadam kebakaran (APAR) skala lingkungan serta menuntaskan program pelebaran jalan ataupun pembangunan jalan baru untuk memenuhi akses mobil pemadam kebakaran memasuki lingkungan permukiman bila sewaktu-waktu terjadi peristiwa kebakaran.
8. Tantangan permasalahan dalam hal legalitas bangunan dan lahan terutama karena masih terdapat 552 (46,7% dari 1.118 RT) tidak memiliki IMB dan 365 (32,6% dari 1.118 RT) tidak memiliki SHM/HGB. Program Kotaku perlu menuntaskan masalah tersebut dengan merealisasikan rencana kegiatan sosialisasi dan pengawasan serta mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait seperti Kantor Pertanahan, Instansi Pengawas Bangunan, dan lainnya.
9. Tantangan permasalahan dalam hal ruang terbuka publik (RTP) adalah karena belum ada RTP (taman, RTH) yang terealisasi perencanaannya, dan oleh karena itu program Kotaku sangat penting melanjutkan dan menuntaskan masalah tersebut dengan merealisasikan rencana penataan DAS Sungai Saleppa dan Copala, rencana pengadaan taman kota, dan lainnya.
10. Tantangan permasalahan dalam hal sosial budaya terutama karena tingkat pendidikan kebanyakan penduduk masih rendah, ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan akses pelayanan fasilitas pendidikan di Kelurahan Banggae masih terbatas. Demikian pula dalam hal bidang kesehatan, yang sebagian besar (928 atau 83%) RT hanya bisa berobat di Puskesmas/Pustu. Masalah lainnya adalah *mindset*, mental, sikap dan perilaku sebagian warga masyarakat yang mengabaikan PHBS dan aturan bersama (AB). Oleh karena itu, program Kotaku masih perlu dilanjutkan dan menuntaskan persolan sosial budaya tersebut.
11. Tantangan permasalahan dalam hal sosial ekonomi terutama karena masih terdapat cukup banyak yakni 627 atau 56,1% dari total 1.118 RT yang berstatus MBR alias miskin atau tidak berdaya secara keuangan dan ekonomi. Demikian pula besarnya jumlah rumah tangga bergantung pada sektor informal yakni 753 (67,4% dari total 1.118 RT) menekuni pola pencaharian di bidang perdagangan dan jasa yang umumnya belum memiliki keterampilan manajemen usaha dan keuangan serta minim kultur kewirausahaan dan memelihara mental ketergantungan pada bantuan pemerintah. Problem lainnya adalah keberadaan 851 (76,1% dari total 1.118 RT) menggunakan energi atau daya listrik 450 watt – 900 watt. Semua persoalan sosial

ekonomi tersebut masih memerlukan kehadiran program Kotaku untuk melanjutkan dan menuntaskan berbagai agenda perencanaan yang tidak/belum terlaksana guna mengatasi dan menuntaskan masalah ketidakberdayaan ekonomi tersebut.

Hasil evaluasi sejumlah tantangan permasalahan atas kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae tersebut sejalan atau sesuai pendapat sejumlah ahli mengenai arti dan kondisi kumuh, yaitu

- (1) suatu daerah yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat. *Slum's* yaitu daerah penduduk yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat kesehatan (Soerjono, 1985)
- (2) daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat (Nuissl, 2013; Nisanth, 2015)
- (3) lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman (Utomo, 2000 dalam Syaiful. A, 2002)
- (4) permukiman diatas lahan yang sah yang sudah sangat merosot (kumuh) baik perumahan maupun permukimannya (Herlianto, 1985; Odxyundo, 2009; Syahriartato, 2016)
- (5) kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah (Nuissl, 2013)
- (6) tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim (Adisasmita, 2005), kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Putro, 201).

Kondisi permukiman saat ini yang masih tergolong kumuh di Kelurahan Banggae sesuai pendapat sejumlah ahli mengenai ciri permukiman kumuh, yaitu:

- (1) suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak terstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, dan

MCK), bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler mengalami banjir tiap tahunnya (Santosa, 2007),

- (2) permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011),
- (3) ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah (Charter Adam, 1984),
- (4) bagian dari kota yang bangunan-bangunannya tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan fasilitas tempat pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan (Soemadi, 1990),
- (5) sebagai tempat dimana anggota masyarakat kota di wilayah permukiman mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim (Adisasmita, 2005),
- (6) permukiman kumuh tidak hanya menekankan pada kondisi fisik yang tidak layak, namun juga pada aspek kehidupan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut yang tergolong masyarakat miskin. Permukiman kumuh dengan unit rumah yang mempunyai ukuran kecil-kecil, serta kondisi fisik lingkungan buruk. Permukiman kumuh dalam kaitannya dengan masalah perkotaan, apabila dilihat dari kondisi fisik lingkungan yang tidak memadai, sedangkan kondisi geografisnya layak untuk huni, bersifat legal atau secara hukum diakui kepemilikannya (Drakakish, 2002).

Kondisi permukiman saat ini yang masih tergolong kumuh di Kelurahan

Banggae sesuai pendapat sejumlah ahli mengenai kriteria permukiman kumuh, antara lain:

- (1) terletak pada tempat yang perlu dibenahi, keadaan fisik hunian minim dan perkembangannya lambat serta terbatas namun masih dapat ditingkatkan, penghuni umumnya bermata pencaharian tidak tetap dalam usaha non formal dengan tingkat pendidikan rendah, mengalami kemacetan mobilitas (Nuisl, 2013).
- (2) berada di lokasi tidak legal, keadaan fisik yang substandard dan penghasilan penghuninya amat rendah (miskin), tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota, tidak diinginkan kehadirannya oleh umum (kecuali yang berkepentingan) (Nisanth, 2015).

Kondisi permukiman saat ini yang masih tergolong kumuh di Kelurahan

Banggae sesuai karakteristik atau ciri permukiman kumuh antara lain:

- (1) diwarnai oleh tingginya kepadatan hunian, kualitas rumah yang sangat rendah, tidak memadainya sarana atau fasilitas (yang meliputi air

bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan sebagainya), serta diwarnai oleh rendahnya kemampuan ekonomi atau pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, dan kohesivitas komunitas masyarakat yang rendah (Syahriartato, 2016)

- (2) diwarnai oleh kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut (Purnomo D, 2012).
- (3) bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang rendah, tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah (Conyers, 1991)
- (4) keadaan rumah dibawah standar rata-rata 6 m²/orang, fasilitas perkotaan secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia (Johan Silas, 1996).

Kondisi permukiman kumuh pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh antara lain:

- (1) jalan-jalan yang sempit sehingga tidak dapat diakses atau dilalui oleh roda empat, fasilitas drainase yang tidak memadai dan bahkan terdapat jalan-jalan yang tidak memiliki drainase sehingga apabila hujan kawasan tersebut tergenang oleh air, fasilitas pembuangan kotoran/tinja sangat minim sekali, sehingga masyarakat membuangnya di sungai-sungai terdekat, serta fasilitas penyediaan air bersih yang minim (Sinulingga, 2005)
- (2) daerah permukiman dengan lingkungan yang tidak sehat, daerah permukiman yang dihuni oleh warga kota yang gagal dalam bidang ekonomi, fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai, kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin, adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya, secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, berlaku pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda, sebagian besar

penghuni bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal (Suparlan 1997; Putro, 2011).

Kondisi permukiman kumuh pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh antara lain:

- (1) kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin, penggunaan ruang berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman seperti muncul pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) (Ridwan dkk, 2008)
- (2) penghuninya yang kurang mampu untuk membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi, permukiman muncul dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik yang mengancam kondisi kesehatan penghuni, permukiman yang berada pada kawasan sempadan sungai (Purnomo D.,2012).

Ditinjau dari segi sosial ekonomi, kondisi permukiman kumuh pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae sesuai dengan ciri-ciri permukiman atau daerah perkampungan kumuh dan miskin yang dikemukakan oleh Ditjen Bangda Depdagri antara lain: sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, memiliki sistem sosial yang rentan, berusaha atau bekerja di sektor informal, lingkungan permukiman dan rumah beserta fasilitas dan prasarananya dibawah standar minimal sebagai tempat bermukim, permukiman rawan (banjir, kebakaran, penyakit dan keamanan, serta berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya (Ridwan dkk,2008).

Hasil evaluasi menyeluruh mengenai kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan program Kotaku berdasarkan kesebelas

determinan parameter/ indikator mengisyaratkan bahwa: Pertama, Kelurahan Banggae masih mengalami kondisi kumuh sebahagian lingkungan permukimannya pada empat lingkungan yang ada (Pakkola, Saleppa, Battayang dan Copala) walaupun kondisi kumuh tersebut masih dikategorikan “kumuh sedang dan ringan”. Kedua, kondisi lingkungan permukiman di Kelurahan Banggae pada empat lingkungan yang ada masih menghadapi tantangan permasalahan kondisi fisik lingkungan baik dalam hal penataan bangunan, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum (PAM), pengelolaan air limbah (PAL), pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, legalitas lahan dan bangunan, ruang terbuka publik (RTP) maupun sosial ekonomi dan budaya.

Semua uraian hasil evaluasi tersebut dengan jelas menunjukkan kondisi permukiman dan penduduk di Kelurahan Banggae saat ini “belum steril dari kondisi kekumuhan baik dari aspek fisik lingkungan maupun sosial budaya dan ekonomi”. Kondisi yang demikian terjadi disebabkan oleh tidak/ belum tuntasnya aneka ragam agenda program yang telah dituangkan dalam RPLP dan RIK 2016-2021 Kelurahan Banggae. Tidak tuntasnya agenda tersebut disebabkan keterbatasan sumber pembiayaan/ anggaran baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun dari swadaya masyarakat dan partisipasi pihak swasta.

Menarik dicermati bahwa walaupun program Kotaku mengusung konsep Kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat, namun baik perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun pembiayaan masih dominan bergantung pada

kemampuan keuangan Pemerintah. Segala kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana dasar fisik masih sangat bergantung pada APBN yang alokasinya terbatas, dan hanya sebagian kecil dari APBD. Sedangkan sumber pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat maupun bantuan pihak swasta masih sangat kurang. Kondisi demikian menyebabkan segala perencanaan kegiatan yang telah disusun program Kotaku hanya sebagian kecil yang bisa direalisasikan pelaksanaannya, sehingga banyak *real action* tidak bisa menjadi *real action*, dan akibatnya banyak rencana tinggal rencana.

Besarnya ketergantungan sumber pembiayaan program dari Pemerintah Pusat dengan alokasi APBN yang terbatas, serta minimnya sumber pembiayaan dari Pemerintah daerah (APBD) dan masyarakat (swadaya, swasta) menyebabkan konsep “Kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat” yang sesungguhnya sangat bagus menjadi tersandung. Adalah benar bahwa masyarakat melalui kelembagaannya seperti KSM, TIPP, BKM/LKM terlibat langsung dalam proses pendataan, persiapan, pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan, namun berbagai rencana aksi yang didasarkan pada hasil identifikasi masalah, hasil analisa kebutuhan penanganan masalah, usulan dan hasil kesepakatan dari hasil musyawarah dengan warga masyarakat, tidak bisa direalisasikan seluruhnya sebab terbentur pada persoalan biaya atau anggaran yang terbatas. Peran dan partisipasi masyarakat (swadaya dan swasta) dalam hal penyediaan sumber biaya atau anggaran untuk pelaksanaan kegiatan program sangat minim dan terbatas, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan

masyarakat dalam hal pembiayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Implikasinya, selain menyebabkan banyak pekerjaan program tidak terselesaikan/tuntas juga menyebabkan kalangan warga masyarakat merasa kecewa dan menyalahkan program Kotaku atas pekerjaan program yang tidak terselesaikan/tuntas tersebut.

Pekerjaan program yang tidak terselesaikan/tuntas karena faktor konsep dan praktek kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang diusung oleh program Kotaku tidak berjalan optimal dan efektif, berimplikasi luas pada ketidaktuntasan penanganan permukiman kumuh, ketidakefektifan peningkatan kualitas permukiman serta ketidakjelasan pencegahan tumbuhnya kembali kawasan kumuh. Hal ini berimplikasi lebih lanjut pada tidak tercapainya jargon bebas kumuh 100-0-100 program Kotaku baik secara kuantitas terlebih secara kualitas di Kelurahan Banggae.

Merunut lebih jauh, tidak tercapainya jargon bebas kumuh 100-0-100 program Kotaku menyebabkan kondisi permukiman pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae masih tetap belum bisa lepas (non-steril) dari stigma dan realitas kekumuhan. Oleh karena itu wajarlah kiranya jika dari hasil evaluasi menyeluruh ditemukan masih banyak permasalahan pada indikator (bangunan, jalan, drainase, air limbah, air bersih/minum, sampah, kebakaran, legalitas lahan dan bangunan, RTP, sosial ekonomi dna budaya) yang mempengaruhi kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae. Perkataan lain, walaupun program Kotaku sudah dilaksanakan, namun karena intervensi penanganannya tidak merata/tuntas, karena sumber

dan ketersediaan anggarannya terbatas, serta karena kolaborasinya timpang, maka kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae masih tetap tidak/belum steril dari kondisi kekumuhan. Dan, walaupun kondisi kekumuhan itu tidak lagi terkonsentrasi di kawasan prioritas Copala namun titik-titik kumuh masih mudah ditemui dimana-mana pada sejumlah area permukiman, bangunan hunian, jalan, saluran drainase, area pembuangan air limbah, area pembuangan sampah, dan lainnya.

Kondisi permukiman kumuh saat ini di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan program Kotaku yang menampakkan pola persebaran di titik-titik area atau lokasi tertentu serta tidak semata-mata terkonsentrasi di kawasan prioritas Copala tersebut sesuai pendapat Odexyundo (2009, 2016) mengenai pembicaraan tentang dimana terdapat pemukiman kumuh dan dimana tidak terdapat permukiman kumuh dalam suatu wilayah, bagaimana terjadinya permukiman kumuh, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran permukiman kumuh. Oleh karena itu, evaluasi mengenai kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Banggae saat ini haruslah mencakup identifikasi lokasi penyebaran, proses terjadinya serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran permukiman kumuh tersebut.

Keseluruhan hasil evaluasi terhadap kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae pasca program Kotaku diimplementasikan mengarah kepada suatu analisa kebutuhan dan saran rekomendasi yakni “perlu nya program Kotaku dilanjutkan” dalam menuntaskan berbagai rencana kegiatan atau program yang belum terselesaikan ataupun belum terealisasi. Hal ini

sesuai pendapat kalangan ahli bahwa ada tiga tahap rangkaian evaluasi program, yang salah satunya menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan program tersebut (Issac & Michael, 1984; Tayibnapis, 2000), tujuan dan hasil evaluasi program penting untuk mengambil keputusan mengenai keberlanjutan sebuah program (Mulyatiningsih, 2011), manfaat yang bisa didapatkan pada evaluasi program antara lain: berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program yang dilaksanakan, melanjutkan program karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat (Tayibnapis, 2008).

2. Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Banggae

Permukiman kumuh telah dipandang sebagai salah satu permasalahan kronis, klasik dan terkini perkotaan baik secara global terlebih secara nasional dan lokal, sehingga harus ditangani secara kolektif - kolaboratif oleh Pemerintah dan masyarakat, dan hal inilah yang melahirkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai salah satu langkah strategis nasional mengatasi problem tersebut. Program tersebut menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan (dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya), serta bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku

kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Program Kotaku sebagai “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Penanganan kumuh meliputi aspek pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Oleh karena itu, program Kotaku hendak mewujudkan konsep “100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum dan sanitasi, serta 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen hibah sanitasi (Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh 2016).

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat aspek penting dan utama yang menonjol pada penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae, yakni

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan penanganan permukiman kumuh (lihat Tabel 5.21 dan 5.22)
- (2) Skenario pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh (lihat Tabel 5.23, 5.24, dan Tabel 5.25)
- (3) Skenario peningkatan kualitas permukiman kumuh pada kawasan prioritas penanganan (penetapan kawasan prioritas dan pengurangan luasan kumuh) (lihat Tabel 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 dan Tabel 5.30)
- (4) Kebutuhan penanganan dan perencanaan teknis peningkatan kualitas permukiman kumuh prioritas Copala (Tabel 5.31, 5.32, 5.33 dan Tabel 5.34).

Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa selain penanganan yang masih dominan bersifat *action plan* dan hanya sebahagian kecil *real action*-nya, juga strategi pilihan pendekatan penanganan masih banyak bersifat tunggal dan monoton, tidak terintegratif dan komprehensif dalam penyelesaian/ penuntasan akar masalah dan kebutuhan *problem solving*. Akibatnya, pola pendekatan penanganan dan pilihan intervensi menjadi tidak efektif serta tidak tuntas. Program Kotaku dalam penanganan kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Banggae masih diperhadapkan pada pilihan-pilihan strategi penanganan permukiman kumuh yang memerlukan kesesuaian, ketepatan dan efektivitas guna mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasarannya 100-0-100.

Berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap persoalan pola penanganan yang diterapkan oleh program Kotaku yang dipadukan dengan penilaian sejumlah informan ahli, diperoleh suatu formulasi mengenai strategi utama penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae secara terintegratif, komprehensif dan holistik yaitu: Pola penanganan terpadu, yang diintegrasikan dengan penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat (*Community-based development/ CBD*), *Redevelopment*, Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya), penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood (SUN)*, penerapan konsep Kampung Tematik, termasuk pendekatan partisipatif dan pendekatan kultural.

Temuan hasil penelitian berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektifitas program Kotaku dalam penanganan kondisi permukiman kumuh di Kelurahan

Banggae tersebut sejalan atau sesuai pendapat kalangan ahli mengenai pilihan-pilihan strategi penanganan permukiman kumuh yang tepat berdasarkan persebaran kawasan kumuh ataupun berdasarkan kebutuhan *problem solution* atau pemecahan masalah dengan pendekatan *collaborative governance* (Dawes & Prefontaine, 2003; Ansell & Gash, 2007). Pilihan-pilihan strategi penanganan tersebut adalah: (1) penanganan terpadu yakni perbaikan dan pemugaran, peremajaan, relokasi (Emerson, 2011); (2) Penataan (Supriyatno, 2014); (3) Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat (Conyers, 1991; Daljoeni, 1997; Isbandi, 2008; Hardian, 2016) (4) *Redevelopment* (Priatmodjo, 2003); (5) Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya) (Nuissl & Heinrichs, 2013; Wirotomo, 1997); (6) Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN) (Sandy, 1984; Tarigan R, 2005; Bratakusumah dkk, 2009; Sadyohutomo, 2009); (7) Penerapan konsep Kampung Tematik (Majewski dan Zmyslony dalam Tamara dkk, 2018).

3. Evaluasi Perubahan, Manfaat dan Dampak yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Banggae

Hakikat, tujuan dan sasaran paling mendasar atau fundamental dari pelaksanaan program Kotaku khususnya di Kelurahan Banggae adalah: pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen (sasaran RPJMN 2015-2019), ataukah mewujudkan konsep “100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum dan sanitasi, serta 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen hibah sanitasi melalui penanganan kumuh yang meliputi aspek

pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh (Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh 2016).

Atas dasar itu maka perubahan, manfaat dan dampak yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Banggae sangat diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perubahan-perubahan manfaat dan dampak yang ditimbulkan atau diciptakan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae atas manajemen penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2016 sampai sekarang (Tahun 2019). Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi permukiman sebelum dan pasca pelaksanaan program Kotaku berdasarkan determinan kriteria (fisik dan non-fisik) dan indikator-indikator yang ditetapkan yaitu: (1) Perubahan Penataan (keteraturan dan kelayakan) bangunan hunian, (2) Perubahan Aksesibilitas lingkungan, (3) Perubahan Drainase lingkungan, (4) Perubahan Pelayanan air minum/bersih/baku, (5) Perubahan Pengelolaan air limbah rumah tangga, (6) Perubahan Pengelolaan persampahan, (7) Perubahan Perlindungan kebakaran, (8) Perubahan Penataan Ruang Terbuka Publik, (9) Perubahan Legalitas pendirian bangunan hunian, (10) Perubahan Sosial budaya, dan (11) Perubahan Sosial ekonomi.

Temuan hasil penelitian berdasarkan hasil evaluasi secara terintegratif dan menyeluruh (lihat Tabel 5.36 s/d Tabel 5.46) terhadap kesebelas

determinan indikator tersebut menunjukkan bahwa evaluasi perubahan, manfaat dan dampak berdasarkan indikator dalam perbandingan kondisi permukiman kumuh sebelum dan pasca pelaksanaan program Kotaku tersebut menunjukkan aneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal dan lingkungan permukiman di Kelurahan Banggae belum sepenuhnya terentaskan atau teratasi dengan baik dan benar serta maksimal oleh program Kotaku. Berbagai konsep perencanaan dan *action plan* yang ditetapkan dalam rangka penanganan setiap determinan atau indikator pada dasarnya cukup bagus, namun selain belum komprehensif juga masih minim realisasi, sehingga masih sulit menghasilkan perubahan, manfaat dan dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah permukiman kumuh tersebut. Perubahan yang dominan menonjol dalam penanganan permukiman kumuh tersebut adalah dalam hal pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar terutama jalan lingkungan dan drainase, namun untuk indikator-indikator lainnya masih tetap stagnan atau tidak tampak perubahannya secara jelas dan nyata. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan/ketimpangan realisasi antar indikator, serta belum tuntasnya penanganan semua indikator kumuh.

Temuan hasil penelitian berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tersebut sejalan dengan tiga model evaluasi program yang dikenal secara luas dalam prakteknya, yaitu: (1) *Provus Evaluation Model* atau mode evaluasi kesenjangan program, yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara *standard* yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Model *discrepancy Provus* terbagi menjadi

lima aspek, yaitu: *program design*, *program installation*, *program process*, *program product* dan *cost* (Arikunto, dan Abdul Jabar, 2009:5; Widoyoko, 2010:14). (2) *CSE-UCLA Evaluation Model*, dengan lima tahapan evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. Model ini juga dapat dibagi ke dalam empat tahapan evaluasi, yaitu: (1) *Needs assessment*, (2) *Program planning*, (3) *Formative evaluation*, dan (4) *Sumatife evaluation* (Fernandes, 1984 dalam Tayibnapis, 2000:8). (3) *CIPP (Context, Input, Process, Product) Evaluation Model*.

Model evaluasi yang paling sesuai terhadap evaluasi perubahan, manfaat dan dampak berdasarkan indikator dalam perbandingan kondisi permukiman kumuh sebelum dan pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae adalah model evaluasi *CIPP*, yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (1985, (Kirkpatrick, 1998, 2009; Tayibnapis, 2000). Model evaluasi *CIPP* terdiri dari beberapa aspek atau dimensi yakni: *Contex evaluation*, *Input evaluation*, *Processevaluation*, dan *Product evaluation* (Partner C. 2009). Model ini lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga konteks, masukan, proses, dan hasil.

Hasil penelitian ini relevan dengan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang tercantum pada Tabel 2.1, namun sejumlah hasil penelitian terdahulu tersebut pengkajiannya jauh lebih sempit, tidak terintegratif dan komprehensif, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diperbandingkan dengan temuan hasil penelitian mutakhir ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diformulasikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Evaluasi kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) belum sepenuhnya menggembirakan walaupun sudah dilaksanakan sejak Tahun 2016 sampai sekarang (Tahun 2019). Sejumlah determinan indikator permukiman kumuh yang dievaluasi menunjukkan ada yang sudah baik namun tidak sedikit pula kekurangan/ kelemahan dan masalah yang tidak/belum tertuntaskan, sehingga Kelurahan Banggae belum dapat dikatakan steril dari kondisi pemukiman kumuh sampai sekarang. Kondisi kekumuhan masih dapat dijumpai pada area-area permukiman tertentu sehingga jargon bebas kumuh 100-0-100 program Kotaku belum terealisasi sepenuhnya baik kuantitas terlebih secara kualitas.
2. Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa selain penanganan yang masih dominan bersifat *action plan* dan hanya sebahagian kecil *real action*-nya, juga pilihan pendekatan penanganan masih banyak bersifat tunggal dan monoton, tidak terintegratif dan komprehensif dalam penyelesaian/ penuntasan akar masalah dan kebutuhan *problem solving*. Akibatnya, pola pendekatan penanganan dan pilihan intervensi menjadi tidak efektif serta tidak tuntas.

3. Evaluasi perubahan, manfaat dan dampak berdasarkan indikator dalam perbandingan kondisi permukiman kumuh sebelum dan pasca pelaksanaan program Kotaku menunjukkan bahwa aneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal dan lingkungan permukiman di Kelurahan Banggae belum sepenuhnya terentaskan atau teratasi dengan baik dan benar serta maksimal oleh program Kotaku. Berbagai konsep perencanaan dan *action plan* yang ditetapkan dalam rangka penanganan setiap determinan atau indikator pada dasarnya cukup bagus, namun selain belum komprehensif juga masih minim realisasi, sehingga masih sulit menghasilkan perubahan, manfaat dan dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah permukiman kumuh tersebut. Perubahan yang dominan menonjol dalam penanganan permukiman kumuh tersebut adalah dalam hal pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar terutama jalan lingkungan dan drainase, namun untuk indikator-indikator lainnya masih tetap stagnan atau tidak tampak perubahannya secara jelas dan nyata. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan atau ketimpangan realisasi antar indikator, serta belum tuntasnya penanganan semua indikator permukiman kumuh.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Program Kotaku perlu dilanjutkan di Kelurahan Banggae dalam rangka menyelesaikan atau menuntaskan berbagai *action plan* yang belum

menjadi *real action* guna mensterilkan empat lingkungan (Pakkola, Saleppa, Battayang dan Copala) dari kondisi permukiman kumuh yang saat ini masih dijumlah secara tersebar pada berbagai titik lokasi permukiman.

2. Penanganan permukiman kumuh secara terintegratif, komprehensif dan holistik di Kelurahan Banggae dalam pelaksanaan program Kotaku di masa datang perlu menerapkan pola penanganan terpadu sebagai strategi utama penanganan permukiman kumuh, yang diintegrasikan dengan penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat (*Community-based development/ CBD*), *Redevelopment*, Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya), penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN), penerapan konsep Kampung Tematik, termasuk pendekatan partisipatif dan pendekatan kultural. Dengan demikian maka jelaslah bahwa pola penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae sangat penting dilakukan secara terintegratif, komprehensif dan holistik.
3. Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian PUPR), Pemerintah Daerah (khususnya Pemerintah Kabupaten Majene) dan jajaran kelembagaannya yang terkait serta masyarakat perlu duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh bersama baik terhadap kelanjutan program, penuntasan aneka masalah indikator permukiman kumuh, penerapan strategi pendekatan pola penanganan permukiman kumuh maupun dalam rangka menciptakan perubahan, manfaat dan dampak pelaksanaan program Kotaku dalam

pengentasan permukiman kumuh baik dari aspek fisik lingkungan terlebih dari aspek sosial budaya dan ekonomi. Selain itu, prinsip kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat benar-benar diseimbangkan serta pendekatan *top down* disesuaikan proporsinya dengan pendekatan *bottom-up*.



DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., *et al.*, ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Abidin, Irianto. 2004. *Kebijakan Publik, Teori dan Praktek*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- _____. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus, Erwan dan Dyah Ratih, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Grava Media, Cet. I.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, CV Alfabeta.
- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*, New York
- Ansell, C., Gash, A (2007). "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume 18, page 543- 571
- Arifin, Zaenal. 2009. *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, dan Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta
- Bani Perdatawati Hasanuddin. Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas hukum universitas Hasanuddin Makassar. 2014
- Bodgan, Robert and Steven J.Taylor. 1993. *Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Penerbit Usaha Nasional.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT Rineka Cipta,

- Bratakusumah, Deddy Supriyadi, Riyadi. 2009. *Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pustaka Karya.
- Bungin, B. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Carrasco, S., Ochiai C. (2016). “Disaster Induced Resettlement: Multi-Stakeholder interaction and decision making following Tropical Storm Washy in Cagaya de Oro, Philippines”. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 218: 35-49
- Cholid dan Abu Ahmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Cet. ke-11. Jakarta: Bumi Aksara
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Creswell, John.W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, Terjemahan Landung. USA: Sage Publication. 1998
- Dawes, S, S., Prefontaine, L (2003). “Understanding New Models of Collaboration for Delivering Government Services”. *Journal Communications of The ACM* Vol.46, No. I
- Drakakish, Persoalan Permukiman Kumuh. *Jurnal Geografi* Nomor 4/Juli 2002).
- Doxiadis, Constantinos A. 1968, *An Introduction To The Science Of Human Settlements- Ekistics*, London: Hutchinson of London
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- _____. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiningrum, Utaman dan Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dye, Thomas R.1981.*Understanding Public Policy*. Prentice Hall: New Jersey
- Elly Luchritia Nova. (2010). Peremajaan Permukiman Kumuh di Kelurahan Gunung Elai, Lok Tuan, dan Guntung Kota Bontang. Semarang: *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota*. Universitas Diponegoro.
- Emerson, K.Nabatchi T.,Balogh S. (2011).“An Integrative Framework for Collaborative Governance”. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access* published May 2, 2011.

- Enike Mentari Uli S. Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota. Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Farid M.A. 2008. *Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Firman Tommy (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga), Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
- GC. Edwards III. George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington Congressional Quarterly.Inc
- Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997). *Organization*. Terjemahan Djarkasih, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Erlangga Jakarta
- Gibson, J.L, 2003. *Perilaku Manajemen Organisasi*, Erlangga. Jakarta
- _____. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Erlangga. Jakarta.
- Grindle, Merilee S.1980. *Politic and A Policy Implementation In The Third World*. New Jersey. Princetown University Press
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadi, Sudharto P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Metedologi Research II*. Yogyakarta: Psikologi UGM
- Hafidzita Eka Putri Irvan. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 5 No. 1- April 2018. Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Bandung. Trigena Karya
- Hardian Wahyu Widiyanto. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan, Sebuah Pendekatan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hasan Alwi. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Pertama Edisi III*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR dan UUPH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendriks, Frank. 2014. Understanding good urban governance: Essentials, Shift, and Values. *Journal Urban Affairs Review*. Vol 50 No 4
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Herman Hermit. 2007. *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007), Dilengkapi dengan Permasalahan Dalam Perencanaan Tata Ruang di Beberapa Negara Latin*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hetifah, Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governace*. Jakarta: Penerbitan Yayasan Obor Indonesia.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A Gunn. 1986. *Policy Analyses for the Real World*. Oxford University Press
- Hunger, J David & Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Husein H. M. 1992. *Berbagai Aspek Analisis Mengeai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imas Widiyanti. Implementasi Program Kotaku Dalam Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh Di Kricak Yogyakarta. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Indah Ambar Arum dan Dra. Meirinawati, M.AP. Manajemen Strategi Dalam Menanggulangi Permasalahan Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kawasan Kenjeran Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017. *Jurnal Publika*, Vol.6 No.6 2018

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Intania Irfani dan F. Winarni, M.Si. Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Program PPS Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Islamy, M.Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Ed 14. Jakarta, Bumi Aksara.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____.2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Keban, T. Jeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta: Grava Media.
- Kirkpatrick, D. L. 2009. *Kirkpatrick's Training Evaluation Model. The Four Levels*. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.
- _____. 1998. *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.
- Koestoer, Raldi Hendro. 2001. *Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Khomarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo
- Lester, James P.,& Joseph Stewart Jr.2000. *Public Policy:An Evolutionary Approach*. Belmont Wadsworth.
- Mazmanian, Daniel H & Paul A. Sebatier (1983). *Implementation and Public Policy*. New York. HarperCollins
- Merly Mutiara Saputri, Imam Hanafi, Mochamad Chazienul Ulum. Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah (Studi di Bank Sampah Sumber Rejeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11, Hal. 1804-1808|1804. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles B. Matthew, Huberman Michael, A.. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- _____.1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Yogyakarta: UIN Press.
- _____.1984. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan. New Delhi: SAGE Publication India.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. *Penelitian Kualitatif*. Obor Indonesia, 1999
- Muchsin dan Putra, Fadillah (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averoes Press
- Muhajir Syam. Identifikasi kawasan kumuh dan strategi penanganannya pada permukiman di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Sains Dan Teknologi Program PPS UIN Alauddin Makassar 2017.
- Muslim, Aziz. 2008. *Metedologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Nawawi, Hadari M. 1994. *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nazir, Muhammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nisanth, M., Dr. Rajeev (2015). "Urban Governance and Slum issue in Kollam Corporation (Kerala State): A case Study from an Indian State". *International Journal of Advanced Research*, Volume 3, Issue 5,801-811.
- Nugroho, Eko. 2008. *Partisipasi Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Andi
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2014. *Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuissl, H., Heinrichs, D. (2013). "Slums: perspectives on the definition, the appraisal and the management of an urban phenomenon". *Journal of the Geographical Society of Berlin* Vol. 144, No. 2

- Paramita, Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Partner, C. 2009. *Implementing the Kirkpatrick Evaluation Model Plus. The Four Levels*. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pierre, Jon. 1999. Models of Urban Governance, The Institutional Dimension of Urban Politics. *Jurnal Urban Affairs Review* Vol 34 No 3
- Putro, Jawas Dwijo. 2011. Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil Untan*. Volume 11 Nomor 1-Juni 2011
- Randy R. Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Ratu Aliyati. Permukiman Kumuh Di Bantaran Ci-Liwung (Studi Kasus Kelurahan Manggarai- Srengseng Sawah Dan Kelurahan Kampung Melayu- Kalisari). Tesis Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Geografi Universitas Indonesia
- Richard E. Stren dalam Pierre, Jon. 1999. Models of Urban Governance, The Institutional Dimension of Urban Politics. *Jurnal Urban Affairs Review* Vol 34 No 3.
- Ridwan, Juniarso. 2008. *Hukum Tata Ruang*, Nuansa. Bandung, 2008.
- Ridwan, Juniarso, Sodik, Achmad. 2008. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa.
- Rihana, Paskah Suzetta. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin*. Jakarta, SMERU.
- Riko Avesiena Lazuardi Ahmad, Aufarul Marom, Titik Djumiarti. Evaluasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Alih Fungsi Lahan Hijau Menjadi Kawasan Industri Candi Kota Semarang. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2013.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Safaruddin, Taufiq Saidi, Izziah. (2015). Penataan Perumahan Kumuh Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Teknik Sipil*. Vol.5, No 1.61-70
- Sahria Apriliana. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan). Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. *eJournal Administrasi Negara*, Volume 6, Nomor 1, 2018 : 7034-7048 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2018
- Salim E. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Sandy I.M. 1984. *Land Use Planning*. Jakarta: Departemen Luar Negeri
- _____. 1985. *Perencanaan Tata Guna Lahan*. Jakarta: Departemen Luar Negeri
- _____. 1978. *Land Use Planning*. Jakarta: Departemen Luar Negeri
- Santosa, D.P. 2007. Penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *Jurnal Universitas Pasundan*. Bandung.
- Sarosa, S. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta : Indeks
- Saraswati, D.T. (2004). Analisis Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di D.K.I Jakarta (Studi Kasus Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat)
- Syakrani dan Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siagian, Sondang.P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- _____. 2008. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Sinulingga, B.D. 2005. *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Yayasan Obor.
- Sobirin. 2001. Distribusi Permukiman dan Prasarana Kota Studi Kasus Dinamika Pembangunan Kota Indonesia dalam R.H Koestoer, R.P Tambunan, H.T Budianto, Sobirin, *Dimensi Keruangan Kota Teori Dasar*. UI Press: Jakarta.

- Soerjono, Soekanto, 1985. *Karl Mannheim. Sosiologi Sistematis*. Jakarta. Rajawali
- Soetomo. 2010. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 2010
- Solichin, Abdul Wahab, 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sri Yuliani, Gusty Putri Dhini Rosyida. Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. *Jurnal Wacana Publik*, Vol.1 No.2 2017
- Steers, Richard M. 1985. *Introduction to organizational behavior*. 3rd edition, Glevew III. Scott, Foresman and Company
- Stevanni Imelda Christianingrum, Titik Djumiarti. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kecamatan Semarang Timur. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2018.
- Sudarmo (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____.2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refia Aditama
- Sulista Yuniati dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si. *Peningkatan Kualitas Permukiman Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kabupaten Wonosobo*. FIS, UNY, 2017/2018
- Suparlan Parsudi. 1997. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Perspektif Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Supriyatno, Budi. (2014). "Role of Government in Jakarta Organize Slum Area". Scientific Research *Journal* (SCIRJ), Vol II, Issue V

- Sutiarti, Eny Endang. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman kumuh di kawasan pusat kota (Studi kasus pada kawasan pancuran Kota Salatiga). Tesis Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Syaiful. A (2002).” *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan*”, Permukiman Marjinal amat Liar. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Vol 9 No 4.
- Tahir, Muchlas M. 2015. Good urban governance: peran pemerintah dalam pembangunan wilayah kecamatan di Kota Makasar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 8 No 1
- Tamara, Anindya Putri dan Mardwi Rahdriawan. 2018. Kajian pelaksanaan konsep kampung tematik di kampung hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Vol 6 No 1.
- Tarigan, Henry Guntur. 2009. *Pengkajian Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- _____. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wang, S. (2014). “Research on the Collaborative Governance Model in the Charity Organization under Polycentric Perspective”. *Open Journal of Social Sciences*, 2014, 2, 263-26
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- _____.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widoyoko, Eko Putro. 2010. *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- _____.2009. *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

_____.2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Cetakan Kedua. Media Press: Yogyakarta.

_____.2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Cetakan Kedua. Media Press: Yogyakarta.

Wirotnomo, Paulus. 1997. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tata Cara Pemugaran Permukiman Kumuh/Perkotaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

W.J.S. Poerdarminta, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. VIII

Yusuf, Muri. 2005. *Evaluasi Pendidikan. Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian, Penjaminan serta Penetapan Mutu Pendidikan Terhadap Berbagai Komponen Pendidikan*. Padang: Universitas Negeri Padang.

Zulyanti, Dewi (2017). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan

Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 88/SE/DC/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Dokumen

1. Bappeda. RTRW Kabupaten Majene Tahun 2012-2032
2. BPS. Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2017.
3. BPS. Kecamatan Banggae Dalam Angka Tahun 2017.
4. Dokumen Profil Permukiman Kabupaten Majene. Pengelola Program KOTAKU Kabupaten Majene, 2015

5. Draft Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
6. Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Cipta Karya, Penetapan Lokasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
8. Pedoman Umum, KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Direktorat Jendral Cipta Karya 2016

Internet

- Aditama Simorangkir Eduardo. Detik Finance, Banyak Penduduk Miskin Pindah Ke Kota Bikin Kawasan Kumuh Bertambah, <https://finance.detik.com/beritaekonomibisnis/3629137/banyak-pendudukmidkin-pindah-kota-bikin-kawasan-kumuhbertambah>
- Alifiano Rezka Adi, Penataan Kawasan Bantaran Sungai Menjadi Lebih Ekologis, Kasus Bantaran Sungai Code, <http://www.kompasiana.com/AlifianRezkaAdi/penataan-kawasan-bantaransungai-code>
- Ardian, B. (2015). Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta. Diperoleh Pada enin, 5 September 2016, dari <http://www.slideshare.net/bogeSi/paparam-perda-penanganan-permukiman-kumuh-kotas-surakarta#!>
- Badan Pusat Statistik, Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan PermukimanKumuh,<https://www.bps.go.id/statictable/2015/02/09/1762/banyaknya-desa-kelurahan-menurutkeberadaan-permukiman-di-bantaran-sungai-dibawah-saluran-udara-tegangan-ekstra-tinggisutet-dan-permukiman-kumuh-2014-.html>
- Budi H. (2014). Mengatasi Masalah Pemukiman Kumuh di Perkotaan. Diperoleh Pada Senin, 5 September 2016, dari <http://www.academia.edu/10495395/>
- Dedi M. Masykur Riyadi, “Panduan Penataan Ruang” <https://www.slideshare.net>.
- Dimas Handoko, “Pemukiman Kumuh”, Blog Dimzone Planner. <http://dimashandoko09.blogspot.com/2012/07/pemukiman-kumuh.html> (8 Agustus 2016)
- Eka Arifa Rusqiyati, “12 Kelurahan Prioritas ‘Kotaku’ 2017 di Yogyakarta”, <http://www.antaraneews.com/berita/616518/12-Kelurahan-Prioritas-Kotaku2017-di-Yogyakarta>
- Erawan, A. (2012). Luas Permukiman Kumuh di Indonesia 57.800 Hektar. Diperoleh Pada Senin, 5 September 2016, dari <http://www.rumah.com/berita-properti/2012/10/20809/luas-permukiman-kumuh-di-indonesia-57-800-hektar>
- Giyanto, A. (2015). Berlanjut, PNPM Mandiri Perkotaan Berubah Jadi P2KP Kota. Diperoleh Pada Senin, 5 September 2016, dari <http://surakartadaily.com/2015/07/berlanjut-pnpm-mandiri-perkotaan-berubah-jadi-p2kp-kota>
- Masroni, R. (2014). Merumuskan Formulasi Perencanaan Kebijakan Publik. Diperoleh pada Sabtu, 29 April 2017, dari <http://rifki94.blogspot.co.id/2014/09/merumuskan-formulasi-perencanaan.html?m=1>

- Novalius, Feby. Masih Ada 90% Kawasan Kumuh di Indonesia, Kementerian PUPR: Masalahnya Komunikasi Tidak Lancar, berita online <http://economy.okezone.com/read/2017/09/05/470/1769577>
- Odexyundo, “Pengertian Permukiman”, Blog Odexyundo. <http://odexyundo.blogspot.com/2009/08/pengertian-permukiman.html> (5 Agustus 2016)
- Odexyundo, “Permukiman Kumuh”, Blog Odexyundo. <http://odexyundo.blogspot.com/2009/08/permukiman-kumuh.html> (8 Agustus 2016).
- Odexyundo, “Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman”, Blog Odexyundo. <http://odexyundo.blogspot.com/2009/08/faktor-penyebab-tumbuhnyapermukiman.html> (5 Agustus 2016)
- Pratama, A.H (2015). Pemerintah Target 2019 RI Bebas Permukiman Kumuh. Diperoleh Pada Senin, 5 September 2016, dari <http://finance.detik.com/read/2015/10/01/163240/3033293/4/pemerintah-target-2019-ri-bebas-permukiman-kumuh>
- Purnomo, D. (2012). Pemukiman Kumuh, Pengertian dan Ciri-cirinya. Diperoleh Pada Senin, 5 September 2016, dari <http://pinterdw.blogspot.co.id/2012/03/Permukiman-kumuh-pengertian-dna-ciri.html#tcmcbck>
- Prokotaku, Paket Informasi Program Kotaku, <http://prokotaku.blogspot.co.id/2016/04/informasi-program-kotaku>, diakses tanggal 10 Oktober 2017.
- Prokotaku.blogspot.co.id, diakses tanggal 25 November 2017
- Saripudin, D (2016). Program Kotaku. Diperoleh pada Selasa, 6 Desember 2016, dari <http://www.karanganyarkab.go.id/20160411/program-kotaku/>
- Syahriartato's, “PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN”, Blog Syahriartato's. <http://syahriartato.wordpress.com/2013/10/02/permukiman-kumuhperkotaan/> (5 Agustus 2016)
- Syaiful. A (2002).” Kampung Surabaya Menuju Metropolitan”, Permukiman Marjinal amat Liar.
- UN-Habitat. 2000. The Global Campaign for Good Governance Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/294756761_UNCHS_Habitat_the_global_campaign_for_good_urban_governance Hal 20 pada 12 April 2018
- Usman, Tunreng. Pola Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Di Kawasan Bantaran Sungai Palu, <http://eprints.undip.ac.id>
- <https://tepenr06.wordpress.com/2012/10/02/model-model-evaluasi-program/> diakses pada tanggal 2 April 2019
- <https://yudistiadewisilvia.wordpress.com/2013/04/24/evaluasi-program/> diakses pada tanggal 2 April 2019
- <https://goenable.wordpress.com/tag/manfaat-evaluasi-program/> diakses pada tanggal 2 April 2019
- <http://www.volume1.penanganan.kawasan.permukiman.kumuh.html/>. diakses pada hari Senin, 3 Juli 2017 pada pukul 15.08 WIB



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

*Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpolitik2@gmail.com*

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 486 / VII / 2019

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 Pedoman Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dalam lingkup Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Majene perlu adanya Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Nomor: 472/B.03/PPs/Unibos/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi/Izin Kepada :

Nama : **NUR RATIKA SYAMSIAR**
 NIM : 4617102002
 Pekerjaan : Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Bosowa
 Alamat : Jl. R.A Kartini No. 23 Garo'go Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene

Untuk melakukan penelitian di **Kelurahan Banggae Kab. Majene** yang dilaksanakan selama 2 (Dua) bulan, dengan Proposal berjudul :

“EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)“

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksampul foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabila telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 23 Juli 2019

An. KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK

SEKRETARIS

Uk. Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

/ **SUKRI, S.Pd**

NIP. 19700110 199210 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Majene (Sbg. Laporan);
2. Dan Dim 1401 Majene;
3. Kapolres Majene;
4. Camat Banggae;
5. Direktur Prog. Pascasarjana Universitas Bosowa;
- ✓ 6. Sdri. **Nur Ratika Syamsiar**;
7. Arsip.

Nomor Register Sah :

--



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

Researcher/ Investigator

NUR RATIKA SYAMSIAR

(4617102002)

Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/ Ibu, Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

IDENTITAS INFORMAN/ RESPONDEN WARGA MASYARAKAT

No.	Identitas	Uraian	Kode
1	Nama lengkap/inisial	:	
2	Jenis kelamin	: Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/>	
3	Usia	:tahun	
4	Status perkawinan	: <input type="checkbox"/> Kawin; <input type="checkbox"/> belum kawin; <input type="checkbox"/> janda/duda	
5	Jumlah anak/ anggota/ tanggung jawab keluarga	: <input type="checkbox"/> Tidak ada; <input type="checkbox"/> 1 orang; <input type="checkbox"/> 2 orang <input type="checkbox"/> 3 orang; <input type="checkbox"/> 4 orang; <input type="checkbox"/> ≥5 orang	
6	Pendidikan	: Tidak pernah sekolah <input type="checkbox"/> tidak tamat SD <input type="checkbox"/> Tamat SD/ sederajat <input type="checkbox"/> tidak tamat SLTP <input type="checkbox"/> Tamat SLTP/ sederajat <input type="checkbox"/> ; tidak tamat SLTA <input type="checkbox"/> Tamat SLTA/ sederajat <input type="checkbox"/> ; diploma/sarjana <input type="checkbox"/>	
7	Status pendidikan anak/ anggota keluarga	: <input type="checkbox"/> Tidak bersekolah; <input type="checkbox"/> bersekolah; <input type="checkbox"/> lulus	
8	Pekerjaan	: <input type="checkbox"/> Nelayan ; <input type="checkbox"/> Petani; <input type="checkbox"/> buruh harian <input type="checkbox"/> Pedagang/ wiraswasta ; <input type="checkbox"/> karyawan swasta	

- Sopir angkutan ; tukang ojek; IRT
 Guru ; tenaga medis; pegawai pemerintah
 Aparat TNI/Polri; Pensiunan (ASN)
- 9 Pendapatan (Rp./bulan) : < Rp. 1 juta/bln; Rp. 1 juta s/d 1,5 juta/bln
 Rp.1,5 s/d 2 juta/bln; Rp. 2 juta s/d 2,5 juta/bln
 Rp.2,5 s/d 3 juta/bln; Rp. 3 juta s/d 3,5 juta/bln
 Rp.3,5 s/d 4 juta/bln; Rp. 4 juta s/d 4,5 juta/bln
 Rp. 4,5 s/d 5 juta/bln; Rp. >Rp.5 juta/bln
- 10 Sumber modal/keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan rumah tangga : Milik sendiri; Sanak family/teman; Tetangga
 Koperasi; Bank; Jasa keuangan lain
 Jasa Rentenir/ orang lain
- 11 Kepemilikan kendaraan : Mobil; motor; sepeda, tidak ada
- 12 Akses pelayanan kesehatan (Yankes) : Rumah sakit; Puskesmas/ Pustu; Dukun
- 13 Kepemilikan kartu BPJS : Ada; tidak ada; kartu Yankes lainnya
- 14 Sumber penerangan/ energi listrik : PLN; mesin genset; penerangan tradisional
- 15 Jumlah penggunaan daya listrik : 450 watt; 900 watt; >900 watt; tidak ada
- 16 Tipe bangunan hunian : Rumah panggung (kayu); Rumah kayu berlantai tanah
 Rumah batu semi permanen; Rumah batu permanen
- 17 Status kepemilikan bangunan hunian/ rumah tinggal : Milik sendiri ; milik sanak family/ teman
 Sewa/kontrak; lainnya
- 18 Kepemilikan izin mendirikan bangunan : IMB; SHM/HGB; surat lainnya; tidak ada
- 19 Status kepemilikan tanah/lahan yang ditempati : Milik sendiri ; milik sanak family/ teman
 Sewa/kontrak; milik Negara/ Pemerintah
 Milik Adat; tidak tahu; lainnya
- 19 Alamat :

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Warga Masyarakat (KPP)

Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/	Kode
----	----------------------	----------	------

		Tanggapan/ Penjelasan	
1	Selaku penerima manfaat, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat kondisi lingkungan permukimannya secara umum dan keseluruhan saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah puas atau kurang puas? Dimohon penjelasannya !	Jawaban/ tanggapan ditulis dikertas lain tersendiri!	
2	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi bangunan hunian atau rumah tinggalnya saat ini semakin lebih baik atau biasa saja setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah rumah tinggalnya tersentuh bantuan, perbaikan, pemugaran atau penataan? Dimohon penjelasannya !		
3	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi aksesibilitas lingkungannya saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah senang dengan adanya perbaikan dan pembangunan jalan atau bagaimana?. Dimohon penjelasannya !		
4	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi drainase lingkungannya saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah sudah tidak terganggu oleh genangan air dan ancaman banjir, atau bagaimana? Apakah ada penyuluhan atau bagaimana? Apakah ada bantuan, perbaikan, pemugaran, penataan atau pembangunan drainase baru? Apakah merasa senang atau bagaimana?. Dimohon penjelasannya !		
5	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi pelayanan air minum/bersih/baku-nya saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah ada bantuan, perbaikan, penataan sambungan atau pembangunan saluran perpipaan baru? Apakah sudah merasa tidak kesulitan dengan kebutuhan air minum/bersih/baku setiap hari atau bagaimana? Apakah merasa senang atau bagaimana?. Dimohon penjelasannya !		
6	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungannya saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah ada bantuan kloset? Apakah ada pembangunan MCK atau bagaimana? Apakah sudah merasa senang ataukah masih ada yang kurang, atau masih ada masalah? Dimohon penjelasannya !		
7	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi pengelolaan persampahan rumah tangga dan lingkungannya saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah ada bantuan bak sampah, kantong plastik, gerobak sampah, TPS atau bagaimana? Apakah pelayanan angkutan sampah sudah baik, lancar dan rutin atau bagaimana? Apakah sudah merasa senang ataukah masih ada		

	yang kurang, atau masih ada masalah? Dimohon penjelasannya !		
8	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi perlindungan kebakaran bagi rumah tinggal dan lingkungannya saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah sudah mengetahui siapa yang harus dihubungi atau dimintai bantuan, ataukah sudah memiliki akses informasi nomor telepon pihak pemadam kebakaran bila suatu saat terjadi kebakaran atau bagaimana? Apakah ada bantuan peralatan pemadam kebakaran atau bagaimana? Apakah sudah tidak merasa cemas ataukah masih ada yang kurang, atau masih ada masalah? Dimohon penjelasannya !		
9	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangganya saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan? a. Apakah sudah menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan atau bagaimana? b. Apakah pendapatan keluarga sudah meningkat atau bagaimana? c. Apakah sudah bisa menabung atau bagaimana? d. Apakah sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber modal dan keuangan bagi rumah tangga dan kegiatan usaha, atau bagaimana? e. Apakah sudah tidak kesulitan menyekolahkan anak-anaknya atau anggota keluarganya, atau bagaimana? f. Apakah sudah tidak kesulitan keuangan untuk biaya sekolah anak-anaknya atau anggota keluarganya, atau bagaimana? g. Apakah sudah tidak kesulitan berobat di rumah sakit atau puskesmas atau bagaimana? h. Apakah sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber energi listrik-nya atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !		
10	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi sosial budaya rumah tangga/keluarga dan lingkungan masyarakatnya saat ini semakin baik (atau bagaimana) setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya untuk pertanyaan-pertanyaan berikut! a. Apakah sudah semakin leluasa mengamalkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, adat istiadat, tradisi kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur, atau bagaimana? b. Apakah sudah semakin leluasa menjalankan syariat agama atau mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, atau bagaimana? c. Apakah sudah semakin tahu dan sadar akan pentingnya mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan permukiman, atau bagaimana? d. Apakah sudah semakin tahu arti penting hidup sehat dan layak, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan atau bagaimana? e. Apakah sudah semakin sadar pentingnya mengambil inisiatif dan memotivasi diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan		

	perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam penanganan permukiman kumuh terutama pada pelaksanaan program Kotaku, atau bagaimana?.		
--	---	--	--

Majene, 2019

A. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Selaku penerima manfaat dan pemelihara lingkungan permukiman, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang dilakukan oleh program Kotaku di lingkungan permukimannya di Kelurahan Banggae ? Dimohon penjelasannya secara ringkas dan jelas!		
2	<p>Sepanjang pengamatan, pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu, sdr(i) selaku penerima manfaat dan pemelihara lingkungan permukiman selama program Kotaku dilaksanakan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah bangunan hunian atau rumah tinggalnya?</p> <p>a. Apakah bapak/ibu/sdr(i) diberitahu atau dimintai pendapat/gagasan/ide pemikiran mengenai rencana dan pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan penataan bangunan hunian oleh pihak pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>b. Apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, perbaikan, pemugaran, penataan bangunan hunian tersebut, atau bagaimana?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>d. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !</p>		
3	<p>Sepanjang pengamatan, pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selama program Kotaku dilaksanakan di lingkungan permukimannya, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah aksesibilitas lingkungannya?</p> <p>a. Apakah bapak/ibu/sdr(i) diberitahu atau dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan jalan lingkungan oleh pihak/ unsur pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>b. Apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan</p>		

	<p>perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan jalan lingkungan tersebut, atau bagaimana?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>d. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !</p>		
4	<p>Sepanjang pengamatan, pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah drainase lingkungannya?</p> <p>a. Apakah bapak/ibu/sdr(i) diberitahu atau dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan drainase lingkungan oleh pihak/unsur pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>b. Apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan drainase lingkungan tersebut, atau bagaimana?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>d. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !</p>		
5	<p>Sepanjang pengamatan, pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pelayanan air minum/bersih/baku di lingkungan permukimannya?</p> <p>a. Apakah bapak/ibu/sdr(i) diberitahu atau dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan saluran perpipaan air minum/baku oleh pihak pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>b. Apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan saluran perpipaan air minum/baku tersebut, atau bagaimana?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>d. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
6	<p>Sepanjang pengamatan, pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan air limbah rumah tangga di lingkungan permukimannya?</p> <p>a. Apakah bapak/ibu/sdr(i) diberitahu atau dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan serta pengelolaan air</p>		

	<p>limbah rumah tangga oleh pihak pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>b. Apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan MCK, kloset, serta perbaikan, penataan serta pengelolaan air limbah rumah tangga, atau bagaimana?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>d. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
7	<p>Sepanjang pengamatan, pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan persampahan rumah tangga dan kebersihan lingkungan permukimannya?</p> <p>a. Apakah bapak/ibu/sdr(i) diberitahu atau dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan serta pengelolaan persampahan rumah tangga oleh pihak pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>b. Apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan bak sampah, TPS, gerobak sampah, pelayanan angkutan sampah rumah tangga, atau bagaimana?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>d. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
8	<p>Sepanjang pengamatan, pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu, sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah perlindungan kebakaran di lingkungan permukimannya?</p> <p>a. Apakah bapak/ibu/sdr(i) diberitahu atau dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan keamanan, keselamatan dan perlindungan kebakaran oleh pihak pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>b. Apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan sumber air pemadaman kebakaran, sarana dan peralatan pemadam kebakaran, atau bagaimana?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses pelayanan informasi, nomor telepon, serta tata cara/ prosedur meminta bantuan pelayanan pemadaman kebakaran dari instansi terkait atau UPTD, atau bagaimana?</p> <p>d. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>e. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		

9	<p>Sepanjang pengamatan, pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu, sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh keluarga/ rumah tangga bapak/ibu/sdr(i) maupun warga lainnya dilingkungan permukimannya?</p> <p>a. Apakah bapak/ibu/sdr(i) diberitahu atau dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan masalah sosial ekonomi (usaha, pekerjaan, sumber modal, pendapatan, pendidikan, kesehatan, sumber energi listrik) oleh pihak/unsur pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>b. Apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan kultur kewirausahaan, pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan rumah tangga dan kegiatan usaha, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, atau bagaimana?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses pelayanan informasi dan bantuan mengenai sumber modal, pemasaran hasil usaha, pemanfaatan fasilitas keuangan (bank, koperasi), pelayanan deposito dan kredit usaha, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lainnya, atau bagaimana?</p> <p>d. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, pemberdayaan, manajemen, fasilitas maupun dana dalam mengatasi masalah sosial ekonominya, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		
10	<p>Sepanjang pengamatan, pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu, sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial budaya yang dihadapi oleh keluarga/ rumah tangga bapak/ibu/sdr(i) maupun warga lainnya dilingkungan permukimannya?</p> <p>a. Apakah bapak/ibu/sdr(i) diberitahu atau dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan masalah sosial budaya di lingkungan permukimannya oleh pihak/unsur pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>b. Apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pendidikan nilai-nilai budaya lokal, tradisi dan adat istiadat, pengadaan/pembangunan tempat ibadah, penyuluhan-penyuluhan agama, pendidikan budaya hidup bersih dan sehat, kesadaran dan perilaku dalam pemeliharaan lingkungan dan kebersihannya, atau bagaimana?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh akses pelayanan informasi dan bimbingan spiritual, pendidikan nilai-nilai moral dan etika dalam berlingkungan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, dan lainnya, atau bagaimana?</p> <p>d. Apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, pemberdayaan, manajemen, fasilitas maupun dana dalam mengatasi masalah sosial budayanya tersebut, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		

11	Menurut bapak/ibu/sdr(i), pola tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> Pencegahan? Peningkatan kualitas permukiman? Pengelolaan lingkungan permukiman? 		
----	---	--	--

Majene, 2019

B. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Secara umum, bapak/ibu/sdr(i) selaku penerima manfaat dan pemelihara lingkungan permukiman dalam program Kotaku: <ol style="list-style-type: none"> Apakah penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap perubahan kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya di lingkungan permukimannya, atau bagaimana? Apakah pelaksanaan program Kotaku memberikan mamfaat dan dampak perubahan yang berarti dalam penanganan masalah permukiman kumuh baik dalam hal mencegah perluasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman maupun dalam hal pengelolaan, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya ! 		
2	Secara spesifik/ khusus, apakah bapak/ibu/sdr(i) dan keluarganya merasakan manfaat dan dampak perubahan yang berarti bagi kehidupan yang lebih baik dari pelaksanaan program Kotaku tersebut? Dimohon penjelasannya !		
3	Apakah bapak/ibu/sdr(i) merasakan ada perbedaan yang berarti kondisi lingkungan permukimannya antara Tahun 2014 sebelum program Kotaku diberlakukan dan Tahun 2019 seetelah program Kotaku dilaksanakan? <ol style="list-style-type: none"> Jika ada perbedaan, dimanakah letak perbedaan tersebut? Jika tidak ada perbedaan, dimanakah letak kelemahan dan permasalahannya? Dimohon penjelasannya ! 		
4	Menurut bapak/ibu/sdr(i), manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan apa saja yang terjadi setelah program Kotaku dilaksanakan dalam penanganan permukiman kumuh baik secara umum maupun secara spesifik,terutama dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> Perubahan bangunan hunian? Perubahan aksesibilitas lingkungan? Perubahan drainase lingkungan? Perubahan pelayanan air bersih/minum? Perubahan pengelolaan air limbah? Perubahan pengelolaan persampahan? 		

	g. Perubahan proteksi kebakaran? Dimohon penjelasannya!.		
5	Menurut bapak/ibu/sdr(i), manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi apa saja yang dihasilkan oleh program Kotaku terhadap keluarga/ rumah tangganya maupun warga masyarakat lainnya dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan usaha ekonomi b. Pekerjaan c. Sumber permodalan d. Pendapatan e. Akses pelayanan kesehatan f. Akses pelayanan pendidikan g. Akses pelayanan sumber energi listrik h. Pemanfaatan fasilitas umum dan sosial i. Pemanfaatan ruang publik/ ruang terbuka hijau j. Pemanfaatan sarana prasarana ekonomi? Dimohon penjelasannya! 		
6	Menurut bapak/ibu/sdr(i), manfaat dan dampak perubahan sosial budaya apa saja yang diperoleh masyarakat dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan nilai-nilai kearifan budaya lokal b. Adat istiadat dan tradisi kepercayaan/ agama c. Perubahan mental dan perilaku d. Sikap dan perilaku dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan e. Budaya hidup bersih dan sehat f. Pemanfaatan fasilitas tempat ibadah g. Kesadaran berpartisipasi dalam program Kotaku? Dimohon penjelasannya! 		
7	Bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat perbandingan perubahan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2019) program Kotaku dilaksanakan? Apa apresiasi, kritikan dan saran yang bisa disampaikan! Dimohon penjelasannya!		

Majene,2019

Informan/ Responden

Interviewer

(.....
.....)(.....
.....)

:~Selamat bekerja~:

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

Researcher/ Investigator

NUR RATIKA SYAMSIAR

(4617102002)

Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/ Ibu, Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan Relawan			
No.	Identitas	Uraian	Kode
1	Nama :		<input type="checkbox"/>
	(lengkap/inisial)		
2	Jenis kelamin :		<input type="checkbox"/>
3	Usia :		<input type="checkbox"/>
4	Pendidikan :		<input type="checkbox"/>
5	Pekerjaan/ profesi :		<input type="checkbox"/>
6	Pengalaman sebagai relawan :		<input type="checkbox"/>
7	Alamat :		<input type="checkbox"/>

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Relawan (Unsur Pelaksana)

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Selaku relawan atau bagian dari unsur pelaksana program Kotaku, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat kondisi lingkungan permukiman saat ini di Kelurahan Banggae secara umum dan keseluruhan setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah ikut merasa senang atau bagaimana melihat perkembangannya? Dimohon penjelasannya !	Jawaban/ tanggapan ditulis dikertas lain tersendiri!	
2	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku pihak yang bekerja secara sukarela, kondisi bangunan hunian saat ini semakin lebih baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae?Dimohon penjelasannya !		
3	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi aksesibilitas lingkungan saat ini semakin baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya!		
4	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi drainase lingkungan saat ini semakin baik atukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae?. Dimohon penjelasannya!		
5	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi pelayanan air minum/bersih/baku saat ini semakin baik atukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
6	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan saat ini semakin baik atukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
7	Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi pengelolaan persampahan rumah tangga dan lingkungan saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		

8	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi perlindungan kebakaran bagi rumah tinggal dan lingkungan saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !</p>		
9	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi sosial ekonomi keluarga/ rumah tangga dan masyarakat saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae?</p> <p>i. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan atau bagaimana?</p> <p>j. Apakah pendapatan setiap keluarga/ rumah tangga sudah meningkat atau bagaimana?</p> <p>k. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah bisa menabung atau bagaimana?</p> <p>l. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber modal dan keuangan bagi rumah tangga dan kegiatan usaha, atau bagaimana?</p> <p>m. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan menyekolahkan anak-anaknya atau anggota keluarganya, atau bagaimana?</p> <p>n. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan keuangan untuk biaya sekolah anak-anaknya atau anggota keluarganya, atau bagaimana?</p> <p>o. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan berobat di rumah sakit atau puskesmas atau bagaimana?</p> <p>p. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber energi listrik-nya atau bagaimana? Dimohon penjelasannya secara ringkas dan jelas!</p>		
10	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i), kondisi sosial budaya rumah tangga/keluarga dan lingkungan masyarakat saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya untuk pertanyaan-pertanyaan berikut!</p> <p>f. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin leluasa mengamalkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, adat istiadat, tradisi kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur, atau bagaimana?</p> <p>g. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin leluasa menjalankan syariat agama atau mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, atau bagaimana?</p> <p>h. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin tahu dan sadar akan pentingnya mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan permukiman, atau bagaimana?</p> <p>i. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin tahu arti penting hidup sehat dan layak, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan atau bagaimana?</p> <p>j. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah</p>		

	semakin sadar pentingnya mengambil inisiatif dan memotivasi diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam penanganan permukiman kumuh terutama pada pelaksanaan program Kotaku, atau bagaimana?.		
--	---	--	--

Majene, 2019

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Selaku sukarelawan, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang dilakukan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya secara ringkas dan jelas!		
2	Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) terlibat memberikan bantuan secara sukarela selama program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah bangunan hunian atau rumah tinggal penduduk? e. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran mengenai penanganan bangunan hunian oleh pihak/unsur pelaksanaprogram lainnya, atau bagaimana? f. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perbaikan, pemugaran, penataan bangunan hunian tersebut, atau bagaimana? g. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka penataan bangunan hunian milik warga masyarakat, atau bagaimana? h. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah bangunan hunian tersebut? i. Selaku relawan, apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !		
3	Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan selama program Kotaku dilaksanakan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah aksesibilitas lingkungan di Kelurahan Banggae? e. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan jalan		

	<p>lingkungan oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>f. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan jalan lingkungan tersebut, atau bagaimana?</p> <p>g. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka pelayanan aksesibilitas lingkungan kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>h. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah aksesibilitas lingkungan tersebut?</p> <p>i. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !</p>		
4	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah drainase lingkungan di Kelurahan Banggae?</p> <p>e. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan drainase lingkungan oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>f. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan drainase lingkungan tersebut, atau bagaimana?</p> <p>g. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan pengelolaan drainase lingkungan kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>h. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah drainase lingkungan tersebut?</p> <p>i. Apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !</p>		
5	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pelayanan air minum/bersih/baku di Kelurahan Banggae?</p> <p>e. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan saluran perpipaan air minum/baku oleh pihak pelaksana program, atau bagaimana?</p>		

	<p>f. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan saluran perpipaan air minum/baku tersebut, atau bagaimana?</p> <p>g. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan air minum/baku kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>h. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah pelayanan air minum/baku tersebut?</p> <p>i. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		
6	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) sebagai relawan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan air limbah rumah tangga di Kelurahan Banggae?</p> <p>e. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan serta pengelolaan air limbah rumah tangga oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>f. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan MCK, kloset, serta perbaikan, penataan serta pengelolaan air limbah rumah tangga, atau bagaimana?</p> <p>g. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>h. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah pengelolaan air limbah rumah tangga tersebut?</p> <p>i. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		
7	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan persampahan rumah tangga dan kebersihan lingkungan permukiman di Kelurahan Banggae?</p> <p>e. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/gagasan/ide pemikiran mengenai rencana pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan serta pengelolaan persampahan rumah tangga oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>f. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan</p>		

	<p>pengadaan bak sampah, TPS, gerobak sampah, pelayanan angkutan sampah rumah tangga, atau bagaimana?</p> <p>g. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan pengelolaan dan pengangkutan sampah kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>h. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah persampahan?</p> <p>i. Apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
8	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah perlindungan kebakaran di lingkungan permukiman di Kelurahan Banggae?</p> <p>f. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan keamanan, keselamatan dan perlindungan kebakaran oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>g. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan sumber air pemadaman kebakaran, sarana dan peralatan pemadam kebakaran, atau bagaimana?</p> <p>h. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan informasi, nomor telepon, serta tata cara/ prosedur meminta bantuan pelayanan pemadaman kebakaran bagi penduduk, atau bagaimana?</p> <p>i. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>j. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
9	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh penduduk di Kelurahan Banggae?</p> <p>e. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan masalah sosial ekonomi penduduk oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>f. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan kultur kewirausahaan, pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan rumah tangga dan kegiatan usaha, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>g. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang</p>		

	<p>luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan bantuan kepada penduduk mengenai sumber modal, pemasaran hasil usaha, pemanfaatan fasilitas keuangan (bank, koperasi), pelayanan deposito dan kredit usaha, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lainnya, atau bagaimana?</p> <p>h. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan baik teknis, pemberdayaan, manajemen, fasilitas maupun dana dalam mengatasi masalah sosial ekonomi penduduk, atau bagaimana?</p> <p>i. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh pelatihan keterampilan dalam rangka membantu masyarakat mengatasi masalah sosial ekonominya, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
10	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial budaya yang dihadapi oleh penduduk di Kelurahan Banggae?</p> <p>e. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan masalah sosial budaya di lingkungan permukimannya oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>f. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan nilai-nilai budaya lokal, tradisi dan adat istiadat, pengadaan/pembangunan tempat ibadah, penyuluhan-penyuluhan agama, pendidikan budaya hidup bersih dan sehat, peningkatan kesadaran dan perilaku penduduk dalam pemeliharaan lingkungan dan kebersihannya, atau bagaimana?</p> <p>g. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait, pemuka agama, pemangku adat dan lainnya dalam rangka penanganan masalah sosial budaya penduduk, atau bagaimana?</p> <p>h. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan pelayanan informasi dan bimbingan spiritual, pendidikan nilai-nilai moral dan etika dalam berlingkungan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, dan lainnya kepada penduduk, atau bagaimana?</p> <p>i. Selaku relawan, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh pelatihan keterampilan dalam rangka membantu masyarakat mengatasi masalah sosial budayanya, atau bagaimana?.</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
11	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan atau salah satu unsur pelaksana, pola tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <p>d. Pencegahan?</p> <p>e. Peningkatan kualitas permukiman?</p> <p>f. Pengelolaan lingkungan permukiman?</p>		

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	<p>Secara umum menurut pandangan bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan atau salah satu unsur pelaksana dalam program Kotaku khususnya di Kelurahan Banggae:</p> <p>c. Apakah penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap perubahan kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya di lingkungan permukiman, atau bagaimana?</p> <p>d. Apakah pelaksanaan program Kotaku memberikan mamfaat dan dampak perubahan yang signifikan, positif, konstruktif dalam penanganan masalah permukiman kumuh baik dalam hal mencegah perluasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman maupun dalam hal pengelolaan, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !</p>		
2	<p>Selaku relawan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pogram Kotaku di Kelurahan Banggae, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat perbedaan antara kondisi lingkungan permukiman kumuh Tahun 2014 sebelum program Kotaku diberlakukan dengan Tahun 2019 seetelah program Kotaku dilaksanakan?</p> <p>c. Jika ada perbedaan, dimanakah letak perbedaan tersebut?</p> <p>d. Jika tidak ada perbedaan, dimanakah letak kelemahan dan permasalahannya? Dimohon penjelasannya !</p>		
2	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan, manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan apa saja yang terjadi setelah program Kotaku dilaksanakan dalam penanganan permukiman kumuh baik secara umum maupun secara spesifik di Kelurahan Banggae, terutama dalam hal:</p> <p>h. Perubahan bangunan hunian?</p> <p>i. Perubahan aksesibilitas lingkungan?</p> <p>j. Perubahan drainase lingkungan?</p> <p>k. Perubahan pelayanan air bersih/minum?</p> <p>l. Perubahan pengelolaan air limbah?</p> <p>m. Perubahan pengelolaan persampahan?</p> <p>n. Perubahan proteksi kebakaran?</p> <p>Dimohon penjelasannya!.</p>		
3	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan, manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi apa saja yang dihasilkan oleh program Kotaku terhadap keluarga/ rumah tangga atau warga masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae,</p>		

	<p>terutama dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Kegiatan usaha ekonomi l. Pekerjaan m. Sumber permodalan n. Pendapatan o. Akses pelayanan kesehatan p. Akses pelayanan pendidikan q. Akses pelayanan sumber energi listrik r. Pemanfaatan fasilitas umum dan sosial s. Pemanfaatan ruang publik/ ruang terbuka hijau t. Pemanfaatan sarana prasarana ekonomi? Dimohon penjelasannya! 		
4	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku relawan,, manfaat dan dampak perubahan sosial budaya apa saja yang diperoleh masyarakat dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Pemeliharaan nilai-nilai kearifan budaya lokal i. Adat istiadat dan tradisi kepercayaan/ agama j. Perubahan mental dan perilaku k. Sikap dan perilaku dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan l. Budaya hidup bersih dan sehat m. Pemanfaatan fasilitas tempat ibadah n. Kesadaran berpartisipasi dalam program Kotaku? Dimohon penjelasannya!. 		
5	<p>Selaku relawan, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat perbandingan perubahan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2017-2019) program Kotaku dilaksanakan? Apakah hasil evaluasi, hambatan/kendala, kritikan dan saran yang bisa disampaikan! Dimohon penjelasannya!</p>		

Majene,2019

Informan/ Responden

Interviewer

(.....) (.....)

~Selamat bekerja~

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

Researcher/ Investigator

NUR RATIKA SYAMSIAR

(4617102002)

Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/ Ibu, Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan KSM			
No.	Identitas	Uraian	Kode
1	Nama :		<input type="checkbox"/>
	(lengkap/inisial)		
2	Jenis kelamin :		<input type="checkbox"/>
3	Usia :		<input type="checkbox"/>
4	Pendidikan :		<input type="checkbox"/>
5	Pekerjaan/ profesi :		<input type="checkbox"/>
6	Pengalaman sebagai :		<input type="checkbox"/>
	KSM		
7	Alamat :		<input type="checkbox"/>

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk KSM (Unsur Pelaksana)

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Selaku KSM atau bagian dari unsur pelaksana program Kotaku, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat kondisi lingkungan permukiman saat ini di Kelurahan Banggae secara umum dan keseluruhan setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah ikut merasa senang atau bagaimana melihat perkembangannya? Dimohon penjelasannya !	Jawaban/ tanggapan ditulis dikertas lain tersendiri!	
2	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM, kondisi bangunan hunian saat ini semakin lebih baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
3	Menurut bapak/ibu/sdr(i)selaku KSM, kondisi aksesibilitas lingkungan saat ini semakin baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya!		
4	Menurut bapak/ibu/sdr(i)selaku KSM, kondisi drainase lingkungan saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae?. Dimohon penjelasannya!		
5	Menurut bapak/ibu/sdr(i)selaku KSM, kondisi pelayanan air minum/bersih/baku saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
6	Menurut bapak/ibu/sdr(i)selaku KSM, kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
7	Menurut bapak/ibu/sdr(i)selaku KSM, kondisi pengelolaan persampahan rumah tangga dan lingkungan saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		

8	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i)selaku KSM, kondisi perlindungan kebakaran bagi rumah tinggal dan lingkungan saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !</p>		
9	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i)selaku KSM, kondisi sosial ekonomi keluarga/ rumah tangga dan masyarakat saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae?</p> <p>q. Apakah setiap keluarga/rumah tangga sudah menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan, atau bagaimana?</p> <p>r. Apakah pendapatan setiap rumah tangga sudah meningkat atau bagaimana?</p> <p>s. Apakah setiap rumah tangga sudah bisa menabung atau bagaimana?</p> <p>t. Apakah setiap rumah tangga sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber modal dan keuangan bagi rumah tangga dan kegiatan usaha, atau bagaimana?</p> <p>u. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan menyekolahkan anak-anaknya atau anggota keluarganya, atau bagaimana?</p> <p>v. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan keuangan untuk biaya sekolah anak-anaknya atau anggota keluarganya, atau bagaimana?</p> <p>w. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan berobat di rumah sakit atau puskesmas atau bagaimana?</p> <p>x. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber energi listrik-nya atau bagaimana? Dimohon penjelasannya secara ringkas dan jelas!</p>		
10	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i)selaku KSM, kondisi sosial budaya rumah tangga/keluarga dan lingkungan masyarakat saat ini semakin baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya untuk pertanyaan-pertanyaan berikut!</p> <p>k. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin leluasa mengamalkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, adat istiadat, tradisi kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur, atau bagaimana?</p> <p>l. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin leluasa menjalankan syariat agama atau mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, atau bagaimana?</p> <p>m. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin tahu dan sadar akan pentingnya mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan permukiman, atau bagaimana?</p> <p>n. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin tahu arti penting hidup sehat dan layak, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan atau bagaimana?</p> <p>o. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah</p>		

	semakin sadar pentingnya mengambil inisiatif dan memotivasi diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam penanganan permukiman kumuh terutama pada pelaksanaan program Kotaku, atau bagaimana?.		
--	---	--	--

Majene, 2019

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Selaku KSM yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang dilakukan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya secara ringkas dan jelas!		
2	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan selama program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah bangunan hunian atau rumah tinggal penduduk?</p> <p>j. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran mengenai penanganan bangunan hunian oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>k. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perbaikan, pemugaran, penataan bangunan hunian tersebut, atau bagaimana?</p> <p>l. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka penataan bangunan hunian milik warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>m. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah bangunan hunian tersebut?</p> <p>n. Selaku KSM, apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !</p>		
3	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM selama program Kotaku dilaksanakan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah aksesibilitas lingkungan di Kelurahan Banggae?</p> <p>j. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide</p>		

	<p>pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan jalan lingkungan oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>k. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan jalan lingkungan tersebut, atau bagaimana?</p> <p>l. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka pelayanan aksesibilitas lingkungan kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>m. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah aksesibilitas lingkungan tersebut?</p> <p>n. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !</p>		
4	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah drainase lingkungan di Kelurahan Banggae?</p> <p>j. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan drainase lingkungan oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>k. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan drainase lingkungan tersebut, atau bagaimana?</p> <p>l. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan pengelolaan drainase lingkungan kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>m. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah drainase lingkungan tersebut?</p> <p>n. Apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !</p>		
5	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pelayanan air minum/bersih/baku di Kelurahan Banggae?</p> <p>j. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan saluran</p>		

	<p>perpipaan air minum/baku oleh pihak pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>k. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan saluran perpipaan air minum/baku tersebut, atau bagaimana?</p> <p>l. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan air minum/baku kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>m. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah pelayanan air minum/baku tersebut?</p> <p>n. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		
6	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) sebagai KSM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan air limbah rumah tangga di Kelurahan Banggae?</p> <p>j. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan serta pengelolaan air limbah rumah tangga oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>k. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan MCK, kloset, serta perbaikan, penataan serta pengelolaan air limbah rumah tangga, atau bagaimana?</p> <p>l. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>m. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah pengelolaan air limbah rumah tangga tersebut?</p> <p>n. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		
7	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan persampahan rumah tangga dan kebersihan lingkungan permukiman di Kelurahan Banggae?</p> <p>j. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/gagasan/ide pemikiran mengenai rencana pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan serta pengelolaan persampahan rumah tangga oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p>		

	<p>k. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan bak sampah, TPS, gerobak sampah, pelayanan angkutan sampah rumah tangga, atau bagaimana?</p> <p>l. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan pengelolaan dan pengangkutan sampah kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>m. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah persampahan?</p> <p>n. Apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
8	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah perlindungan kebakaran dilingkungan permukiman di Kelurahan Banggae?</p> <p>k. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan keamanan, keselamatan dan perlindungan kebakaran oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>l. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan sumber air pemadaman kebakaran, sarana dan peralatan pemadam kebakaran, atau bagaimana?</p> <p>m. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan informasi, nomor telepon, serta tata cara/ prosedur meminta bantuan pelayanan pemadaman kebakaran bagi penduduk, atau bagaimana?</p> <p>n. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>o. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
9	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh penduduk di Kelurahan Banggae?</p> <p>j. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan masalah sosial ekonomi penduduk oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>k. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan kultur kewirausahaan, pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan rumah tangga dan kegiatan usaha, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat, atau bagaimana?</p>		

	<p>l. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan bantuan kepada penduduk mengenai sumber modal, pemasaran hasil usaha, pemanfaatan fasilitas keuangan (bank, koperasi), pelayanan deposito dan kredit usaha, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lainnya, atau bagaimana?</p> <p>m. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan baik teknis, pemberdayaan, manajemen, fasilitas maupun dana dalam mengatasi masalah sosial ekonomi penduduk, atau bagaimana?</p> <p>n. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh pelatihan keterampilan dalam rangka membantu masyarakat mengatasi masalah sosial ekonominya, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
10	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial budaya yang dihadapi oleh penduduk di Kelurahan Banggae?</p> <p>j. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan masalah sosial budaya di lingkungan permukimannya oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>k. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan nilai-nilai budaya lokal, tradisi dan adat istiadat, pengadaan/pembangunan tempat ibadah, penyuluhan-penyuluhan agama, pendidikan budaya hidup bersih dan sehat, peningkatan kesadaran dan perilaku penduduk dalam pemeliharaan lingkungan dan kebersihannya, atau bagaimana?</p> <p>l. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait, pemuka agama, pemangku adat dan lainnya dalam rangka penanganan masalah sosial budaya penduduk, atau bagaimana?</p> <p>m. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan pelayanan informasi dan bimbingan spiritual, pendidikan nilai-nilai moral dan etika dalam berlingkungan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, dan lainnya kepada penduduk, atau bagaimana?</p> <p>n. Selaku KSM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh pelatihan keterampilan dalam rangka membantu masyarakat mengatasi masalah sosial budayanya, atau bagaimana?.</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
11	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM atau salah satu unsur pelaksana, pola tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <p>g. Pencegahan?</p> <p>h. Peningkatan kualitas permukiman?</p> <p>i. Pengelolaan lingkungan permukiman?</p>		

Majene, 2019

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	<p>Secara umum menurut pandangan bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM atau salah satu unsur pelaksana dalam program Kotaku khususnya di Kelurahan Banggae:</p> <p>e. Apakah penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap perubahan kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya di lingkungan permukiman, atau bagaimana?</p> <p>f. Apakah pelaksanaan program Kotaku memberikan mamfaat dan dampak perubahan yang signifikan, positif, konstruktif dalam penanganan masalah permukiman kumuh baik dalam hal mencegah perluasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman maupun dalam hal pengelolaan, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !</p>		
2	<p>Selaku KSM yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pogram Kotaku di Kelurahan Banggae, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat perbedaan antara kondisi lingkungan permukiman kumuh Tahun 2014 sebelum program Kotaku diberlakukan dengan Tahun 2019 seetelah program Kotaku dilaksanakan?</p> <p>e. Jika ada perbedaan, dimanakah letak perbedaan tersebut?</p> <p>f. Jika tidak ada perbedaan, dimanakah letak kelemahan dan permasalahannya? Dimohon penjelasannya !</p>		
2	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM, manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan apa saja yang terjadi setelah program Kotaku dilaksanakan dalam penanganan permukiman kumuh baik secara umum maupun secara spesifik di Kelurahan Banggae, terutama dalam hal:</p> <p>o. Perubahan bangunan hunian?</p> <p>p. Perubahan aksesibilitas lingkungan?</p> <p>q. Perubahan drainase lingkungan?</p> <p>r. Perubahan pelayanan air bersih/minum?</p> <p>s. Perubahan pengelolaan air limbah?</p> <p>t. Perubahan pengelolaan persampahan?</p> <p>u. Perubahan proteksi kebakaran?</p> <p>Dimohon penjelasannya!.</p>		
3	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM, manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi apa saja yang dihasilkan oleh program Kotaku terhadap keluarga/ rumah tangga atau warga masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae, terutama dalam hal:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> u. Kegiatan usaha ekonomi v. Pekerjaan w. Sumber permodalan x. Pendapatan y. Akses pelayanan kesehatan z. Akses pelayanan pendidikan aa. Akses pelayanan sumber energi listrik bb. Pemanfaatan fasilitas umum dan sosial cc. Pemanfaatan ruang publik/ ruang terbuka hijau dd. Pemanfaatan sarana prasarana ekonomi? Dimohon penjelasannya! 		
4	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku KSM,, manfaat dan dampak perubahan sosial budaya apa saja yang diperoleh masyarakat dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> o. Pemeliharaan nilai-nilai kearifan budaya lokal p. Adat istiadat dan tradisi kepercayaan/ agama q. Perubahan mental dan perilaku r. Sikap dan perilaku dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan s. Budaya hidup bersih dan sehat t. Pemanfaatan fasilitas tempat ibadah u. Kesadaran berpartisipasi dalam program Kotaku? Dimohon penjelasannya! 		
5	<p>Selaku KSM, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat perbandingan perubahan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2017-2019)program Kotaku dilaksanakan? Apa hasil evaluasi, hambatan/kendala, kritikan dan saran yang bisa disampaikan! Dimohon penjelasannya!</p>		

Majene,2019

Informan/ Responden

Interviewer

(.....) (.....)

☺☺Selamat bekerja☺☺

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

Researcher/ Investigator

NUR RATIKA SYAMSIAR

(4617102002)

Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/ Ibu, Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/TIPP			
No.	Identitas	Uraian	Kode
1	Nama :		<input type="checkbox"/>
	(lengkap/inisial)		
2	Jenis kelamin :		<input type="checkbox"/>
3	Usia :		<input type="checkbox"/>
4	Pendidikan :		<input type="checkbox"/>
5	Pekerjaan/ profesi :		<input type="checkbox"/>
6	Pengalaman sebagai TIPP :		<input type="checkbox"/>
7	Alamat :		<input type="checkbox"/>

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk TIPP (Unsur Pelaksana)

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Selaku TIPP atau bagian dari unsur pelaksana program Kotaku, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat kondisi lingkungan permukiman saat ini di Kelurahan Banggae secara umum dan keseluruhan setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah ikut merasa senang atau bagaimana melihat perkembangannya? Dimohon penjelasannya !	Jawaban/ tanggapan ditulis dikertas lain tersendiri!	
2	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, kondisi bangunan hunian saat ini semakin lebih baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
3	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, kondisi aksesibilitas lingkungan saat ini semakin baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya!		
4	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, kondisi drainase lingkungan saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae?. Dimohon penjelasannya!		
5	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, kondisi pelayanan air minum/bersih/baku saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
6	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		

7	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, kondisi pengelolaan persampahan rumah tangga dan lingkungan saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
8	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, kondisi perlindungan kebakaran bagi rumah tinggal dan lingkungan saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
9	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, kondisi sosial ekonomi keluarga/ rumah tangga dan masyarakat saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? y. Apakah setiap keluarga/rumah tangga sudah menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan, atau bagaimana? z. Apakah pendapatan setiap rumah tangga sudah meningkat atau bagaimana? aa. Apakah setiap rumah tangga sudah bisa menabung atau bagaimana? bb. Apakah setiap rumah tangga sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber modal dan keuangan bagi rumah tangga dan kegiatan usaha, atau bagaimana? cc. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan menyekolahkan anak-anaknya atau anggota keluarganya, atau bagaimana? dd. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan keuangan untuk biaya sekolah anak-anaknya atau anggota keluarganya, atau bagaimana? ee. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan berobat di rumah sakit atau puskesmas atau bagaimana? ff. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber energi listrik-nya atau bagaimana? Dimohon penjelasannya secara ringkas dan jelas!		
10	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, kondisi sosial budaya rumah tangga/keluarga dan lingkungan masyarakat saat ini semakin baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya untuk pertanyaan-pertanyaan berikut! p. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin leluasa mengamalkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, adat istiadat, tradisi kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur, atau bagaimana? q. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin leluasa menjalankan syariat agama atau mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, atau bagaimana? r. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin tahu dan sadar akan pentingnya mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan		

	<p>permukiman, atau bagaimana?</p> <p>s. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin tahu arti penting hidup sehat dan layak, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan atau bagaimana?</p> <p>t. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin sadar pentingnya mengambil inisiatif dan memotivasi diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam penanganan permukiman kumuh terutama pada pelaksanaan program Kotaku, atau bagaimana?.</p>		
--	--	--	--

Majene, 2019

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Selaku TIPP yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang dilakukan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya secara ringkas dan jelas!	Jawaban ditulis dikertas lain tersendiri!	
2	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan selama program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah bangunan hunian atau rumah tinggal penduduk?</p> <p>o. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran mengenai penanganan bangunan hunian oleh pihak/ unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>p. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perbaikan, pemugaran, penataan bangunan hunian tersebut, atau bagaimana?</p> <p>q. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka penataan bangunan hunian milik warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>r. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah bangunan hunian tersebut?</p> <p>s. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !</p>		

3	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP selama program Kotaku dilaksanakan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah aksesibilitas lingkungan di Kelurahan Banggae?</p> <p>o. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan jalan lingkungan oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>p. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan jalan lingkungan tersebut, atau bagaimana?</p> <p>q. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka pelayanan aksesibilitas lingkungan kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>r. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah aksesibilitas lingkungan tersebut?</p> <p>s. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !</p>		
4	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah drainase lingkungan di Kelurahan Banggae?</p> <p>o. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan drainase lingkungan oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>p. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan drainase lingkungan tersebut, atau bagaimana?</p> <p>q. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan pengelolaan drainase lingkungan kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>r. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah drainase lingkungan tersebut?</p> <p>s. Apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !</p>		
5	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pelayanan air minum/bersih/baku di Kelurahan Banggae?</p>		

	<p>o. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan saluran perpipaan air minum/baku oleh pihak pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>p. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan saluran perpipaan air minum/baku tersebut, atau bagaimana?</p> <p>q. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan air minum/baku kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>r. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah pelayanan air minum/baku tersebut?</p> <p>s. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
6	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) sebagai TIPP, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan air limbah rumah tangga di Kelurahan Banggae?</p> <p>o. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan serta pengelolaan air limbah rumah tangga oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>p. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan MCK, kloset, serta perbaikan, penataan serta pengelolaan air limbah rumah tangga, atau bagaimana?</p> <p>q. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>r. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah pengelolaan air limbah rumah tangga tersebut?</p> <p>s. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
7	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan persampahan rumah tangga dan kebersihan lingkungan permukiman di Kelurahan Banggae?</p> <p>o. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/gagasan/ide pemikiran mengenai rencana pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan serta</p>		

	<p>pengelolaan persampahan rumah tangga oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>p. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan bak sampah, TPS, gerobak sampah, pelayanan angkutan sampah rumah tangga, atau bagaimana?</p> <p>q. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan pengelolaan dan pengangkutan sampah kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>r. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah persampahan?</p> <p>s. Apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
8	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah perlindungan kebakaran dilingkungan permukiman di Kelurahan Banggae?</p> <p>p. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan keamanan, keselamatan dan perlindungan kebakaran oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>q. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan sumber air pemadaman kebakaran, sarana dan peralatan pemadam kebakaran, atau bagaimana?</p> <p>r. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan informasi, nomor telepon, serta tata cara/ prosedur meminta bantuan pelayanan pemadaman kebakaran bagi penduduk, atau bagaimana?</p> <p>s. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>t. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
9	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh penduduk di Kelurahan Banggae?</p> <p>o. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan masalah sosial ekonomi penduduk oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>p. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan kultur kewirausahaan, pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan rumah tangga dan kegiatan usaha, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat,</p>		

	<p>atau bagaimana?</p> <p>q. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan bantuan kepada penduduk mengenai sumber modal, pemasaran hasil usaha, pemanfaatan fasilitas keuangan (bank, koperasi), pelayanan deposito dan kredit usaha, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lainnya, atau bagaimana?</p> <p>r. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan baik teknis, pemberdayaan, manajemen, fasilitas maupun dana dalam mengatasi masalah sosial ekonomi penduduk, atau bagaimana?</p> <p>s. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh pelatihan keterampilan dalam rangka membantu masyarakat mengatasi masalah sosial ekonominya, atau bagaimana?</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
10	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial budaya yang dihadapi oleh penduduk di Kelurahan Banggae?</p> <p>o. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan masalah sosial budaya di lingkungan permukimannya oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>p. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan nilai-nilai budaya lokal, tradisi dan adat istiadat, pengadaan/pembangunan tempat ibadah, penyuluhan-penyuluhan agama, pendidikan budaya hidup bersih dan sehat, peningkatan kesadaran dan perilaku penduduk dalam pemeliharaan lingkungan dan kebersihannya, atau bagaimana?</p> <p>q. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait, pemuka agama, pemangku adat dan lainnya dalam rangka penanganan masalah sosial budaya penduduk, atau bagaimana?</p> <p>r. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan pelayanan informasi dan bimbingan spiritual, pendidikan nilai-nilai moral dan etika dalam berlingkungan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, dan lainnya kepada penduduk, atau bagaimana?</p> <p>s. Selaku TIPP, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh pelatihan keterampilan dalam rangka membantu masyarakat mengatasi masalah sosial budayanya, atau bagaimana?.</p> <p>Dimohon penjelasannya !.</p>		
11	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP atau salah satu unsur pelaksana, pola tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <p>j. Pencegahan?</p> <p>k. Peningkatan kualitas permukiman?</p> <p>l. Pengelolaan lingkungan permukiman?</p>		

Majene, 2019

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	<p>Secara umum menurut pandangan bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP atau salah satu unsur pelaksana dalam program Kotaku khususnya di Kelurahan Banggae:</p> <p>g. Apakah penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap perubahan kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya di lingkungan permukiman, atau bagaimana?</p> <p>h. Apakah pelaksanaan program Kotaku memberikan mamfaat dan dampak perubahan yang signifikan, positif, konstruktif dalam penanganan masalah permukiman kumuh baik dalam hal mencegah perluasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman maupun dalam hal pengelolaan, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !</p>	Jawaban ditulis dikertas lain tersendiri!	
2	<p>Selaku TIPP yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pogram Kotaku di Kelurahan Banggae, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat perbedaan antara kondisi lingkungan permukiman kumuh Tahun 2014 sebelum program Kotaku diberlakukan dengan Tahun 2019 seetelah program Kotaku dilaksanakan?</p> <p>g. Jika ada perbedaan, dimanakah letak perbedaan tersebut?</p> <p>h. Jika tidak ada perbedaan, dimanakah letak kelemahan dan permasalahannya? Dimohon penjelasannya !</p>		
2	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, manfaat dan dampak perubahanfisik lingkungan apa saja yang terjadi setelah program Kotaku dilaksanakan dalam penanganan permukiman kumuh baik secara umum maupun secara spesifik di Kelurahan Banggae,terutama dalam hal:</p> <p>v. Perubahan bangunan hunian?</p> <p>w. Perubahan aksesibilitas lingkungan?</p> <p>x. Perubahan drainase lingkungan?</p> <p>y. Perubahan pelayanan air bersih/minum?</p> <p>z. Perubahan pengelolaan air limbah?</p> <p>aa. Perubahan pengelolaan persampahan?</p> <p>bb.Perubahan proteksi kebakaran?</p> <p>Dimohon penjelasannya!.</p>		
3	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP, manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi apa saja yang dihasilkan oleh program Kotaku terhadap keluarga/ rumah tangga atau warga masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae, terutama dalam hal:</p>		

	ee. Kegiatan usaha ekonomi ff. Pekerjaan gg. Sumber permodalan hh. Pendapatan ii. Akses pelayanan kesehatan jj. Akses pelayanan pendidikan kk. Akses pelayanan sumber energi listrik ll. Pemanfaatan fasilitas umum dan sosial mm. Pemanfaatan ruang publik/ ruang terbuka hijau nn. Pemanfaatan sarana prasarana ekonomi? Dimohon penjelasannya!		
4	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku TIPP,, manfaat dan dampak perubahan sosial budaya apa saja yang diperoleh masyarakat dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal: v. Pemeliharaan nilai-nilai kearifan budaya lokal w. Adat istiadat dan tradisi kepercayaan/ agama x. Perubahan mental dan perilaku y. Sikap dan perilaku dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan z. Budaya hidup bersih dan sehat aa. Pemanfaatan fasilitas tempat ibadah bb. Kesadaran berpartisipasi dalam program Kotaku? Dimohon penjelasannya!		
5	Selaku TIPP, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat perbandingan perubahan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2017-2019)program Kotaku dilaksanakan? Apa hasil evaluasi, hambatan/kendala, kritikan dan saran yang bisa disampaikan! Dimohon penjelasannya!		

Majene,2019

 Informan/ Responden
 ttd

Interviewer

(.....) (.....)

❀Selamat bekerja❀

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

Researcher/ Investigator

NUR RATIKA SYAMSIAR

(4617102002)

Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/ Ibu, Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan BKM/LKM			
No.	Identitas	Uraian	Kode
1	Nama :		<input type="checkbox"/>
	(lengkap/inisial)		
2	Jenis kelamin :		<input type="checkbox"/>
3	Usia :		<input type="checkbox"/>
4	Pendidikan :		<input type="checkbox"/>
5	Pekerjaan/ profesi :		<input type="checkbox"/>
6	Pengalaman sebagai :		<input type="checkbox"/>
	BKM/LKM		
7	Alamat :		<input type="checkbox"/>

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk BKM/LKM (Unsur Pelaksana)

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Selaku BKM/LKM atau bagian dari unsur pelaksana program Kotaku, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat kondisi lingkungan permukiman saat ini di Kelurahan Banggae secara umum dan keseluruhan setelah program Kotaku dilaksanakan? Apakah ikut merasa senang atau bagaimana melihat perkembangannya? Dimohon penjelasannya !	Jawaban/ tanggapan ditulis dikertas lain tersendiri!	
2	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, kondisi bangunan hunian saat ini semakin lebih baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
3	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, kondisi aksesibilitas lingkungan saat ini semakin baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya!		
4	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, kondisi drainase lingkungan saat ini semakin baik atautkah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae?. Dimohon penjelasannya!		
5	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, kondisi pelayanan air minum/bersih/baku saat ini semakin baik atautkah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
6	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan saat ini semakin baik atautkah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		

7	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, kondisi pengelolaan persampahan rumah tangga dan lingkungan saat ini semakin baik setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
8	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, kondisi perlindungan kebakaran bagi rumah tinggal dan lingkungan saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !		
9	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, kondisi sosial ekonomi keluarga/ rumah tangga dan masyarakat saat ini semakin baik ataukah bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? gg. Apakah setiap keluarga/rumah tangga sudah menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan, atau bagaimana? hh. Apakah pendapatan setiap rumah tangga sudah meningkat atau bagaimana? ii. Apakah setiap rumah tangga sudah bisa menabung atau bagaimana? jj. Apakah setiap rumah tangga sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber modal dan keuangan bagi rumah tangga dan kegiatan usaha, atau bagaimana? kk. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan menyekolahkan anak-anaknya atau anggota keluarganya, atau bagaimana? ll. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan keuangan untuk biaya sekolah anak-anaknya atau anggota keluarganya, atau bagaimana? mm. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan berobat di rumah sakit atau puskesmas atau bagaimana? nn. Apakah setiap keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber energi listrik-nya atau bagaimana? Dimohon penjelasannya secara ringkas dan jelas!.		
10	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, kondisi sosial budaya rumah tangga/keluarga dan lingkungan masyarakat saat ini semakin baik atau bagaimana setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya untuk pertanyaan-pertanyaan berikut! u. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin leluasa mengamalkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, adat istiadat, tradisi kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur, atau bagaimana? v. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin leluasa menjalankan syariat agama atau mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, atau bagaimana? w. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin tahu dan sadar akan pentingnya mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan permukiman, atau bagaimana?		

	<p>x. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin tahu arti penting hidup sehat dan layak, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan atau bagaimana?</p> <p>y. Apakah semua keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin sadar pentingnya mengambil inisiatif dan memotivasi diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam penanganan permukiman kumuh terutama pada pelaksanaan program Kotaku, atau bagaimana?.</p>		
--	---	--	--

Majene, 2019

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Selaku BKM/LKM yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang dilakukan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya secara ringkas dan jelas!		
2	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan selama program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah bangunan hunian atau rumah tinggal penduduk?</p> <p>t. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran mengenai penanganan bangunan hunian oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>u. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perbaikan, pemugaran, penataan bangunan hunian tersebut, atau bagaimana?</p> <p>v. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka penataan bangunan hunian milik warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>w. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah bangunan hunian tersebut?</p> <p>x. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !</p>		
3	Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku		

	<p>BKM/LKM selama program Kotaku dilaksanakan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah aksesibilitas lingkungan di Kelurahan Banggae?</p> <p>t. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan jalan lingkungan oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>u. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan jalan lingkungan tersebut, atau bagaimana?</p> <p>v. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka pelayanan aksesibilitas lingkungan kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>w. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah aksesibilitas lingkungan tersebut?</p> <p>x. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !</p>		
4	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah drainase lingkungan di Kelurahan Banggae?</p> <p>t. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan drainase lingkungan oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>u. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan drainase lingkungan tersebut, atau bagaimana?</p> <p>v. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan pengelolaan drainase lingkungan kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>w. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah drainase lingkungan tersebut?</p> <p>x. Apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !</p>		

5	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pelayanan air minum/bersih/baku di Kelurahan Banggae?</p> <p>t. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan saluran perpipaan air minum/baku oleh pihak pelaksana program, atau bagaimana?</p> <p>u. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemugaran, penataan saluran perpipaan air minum/baku tersebut, atau bagaimana?</p> <p>v. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan air minum/baku kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>w. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah pelayanan air minum/baku tersebut?</p> <p>x. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		
6	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) sebagai BKM/LKM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan air limbah rumah tangga di Kelurahan Banggae?</p> <p>t. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran/ gagasan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan serta pengelolaan air limbah rumah tangga oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>u. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan MCK, kloset, serta perbaikan, penataan serta pengelolaan air limbah rumah tangga, atau bagaimana?</p> <p>v. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>w. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah pengelolaan air limbah rumah tangga tersebut?</p> <p>x. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		
7	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh</p>		

	<p>program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan persampahan rumah tangga dan kebersihan lingkungan permukiman di Kelurahan Banggae?</p> <p>t. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/gagasan/ide pemikiran mengenai rencana pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemugaran dan penataan serta pengelolaan persampahan rumah tangga oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>u. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan bak sampah, TPS, gerobak sampah, pelayanan angkutan sampah rumah tangga, atau bagaimana?</p> <p>v. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam memberikan pelayanan pengelolaan dan pengangkutan sampah kepada warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>w. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana dalam penanganan masalah persampahan?</p> <p>x. Apakah bapak/ibu, sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		
8	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah perlindungan kebakaran dilingkungan permukiman di Kelurahan Banggae?</p> <p>u. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan keamanan, keselamatan dan perlindungan kebakaran oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>v. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pengadaan sumber air pemadaman kebakaran, sarana dan peralatan pemadam kebakaran, atau bagaimana?</p> <p>w. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan informasi, nomor telepon, serta tata cara/ prosedur meminta bantuan pelayanan pemadaman kebakaran bagi penduduk, atau bagaimana?</p> <p>x. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan tenaga, materi ataupun sarana, atau bagaimana?</p> <p>y. Apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh bantuan baik teknis, fasilitas maupun dana, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		
9	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i), tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh</p>		

	<p>penduduk diKelurahan Banggae?</p> <p>t. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan masalah sosial ekonomi penduduk oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>u. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan kultur kewirausahaan, pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan rumah tangga dan kegiatan usaha, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat, atau bagaimana?</p> <p>v. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan bantuan kepada penduduk mengenai sumber modal, pemasaran hasil usaha, pemanfaatan fasilitas keuangan (bank, koperasi), pelayanan deposito dan kredit usaha, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lainnya, atau bagaimana?</p> <p>w. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan baik teknis, pemberdayaan, manajemen, fasilitas maupun dana dalam mengatasi masalah sosial ekonomi penduduk, atau bagaimana?</p> <p>x. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh pelatihan keterampilan dalam rangka membantu masyarakat mengatasi masalah sosial ekonominya, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !.</p>		
10	<p>Sepanjang pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial budaya yang dihadapi oleh penduduk diKelurahan Banggae?</p> <p>t. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dimintai pendapat/ ide pemikiran mengenai rencana dan tindak lanjut penanganan masalah sosial budaya di lingkungan permukimannya oleh pihak/unsur pelaksana program lainnya, atau bagaimana?</p> <p>u. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) dilibatkan atau terlibat mengambil keputusan, peran dan bagian dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan nilai-nilai budaya lokal, tradisi dan adat istiadat, pengadaan/pembangunan tempat ibadah, penyuluhan-penyuluhan agama, pendidikan budaya hidup bersih dan sehat, peningkatan kesadaran dan perilaku penduduk dalam pemeliharaan lingkungan dan kebersihannya, atau bagaimana?</p> <p>v. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh akses yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait, pemuka agama, pemangku adat dan lainnya dalam rangka penanganan masalah sosial budaya penduduk, atau bagaimana?</p> <p>w. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) berpartisipasi memberikan bantuan pelayanan informasi dan bimbingan spiritual, pendidikan nilai-nilai moral dan etika dalam berlingkungan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, dan lainnya kepada penduduk, atau bagaimana?</p> <p>x. Selaku BKM/LKM, apakah bapak/ibu/sdr(i) memperoleh pelatihan keterampilan dalam rangka membantu masyarakat mengatasi</p>		

	masalah sosial budayanya, atau bagaimana?.Dimohon penjelasannya !.		
11	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM atau salah satu unsur pelaksana, pola tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal: m. Pencegahan? n. Peningkatan kualitas permukiman? o. Pengelolaan lingkungan permukiman?		

Majene, 2019

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Secara umum menurut pandangan bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM atau salah satu unsur pelaksana dalam program Kotaku khususnya di Kelurahan Banggae: i. Apakah penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap perubahan kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya di lingkungan permukiman, atau bagaimana? j. Apakah pelaksanaan program Kotaku memberikan mamfaat dan dampak perubahan yang signifikan, positif, konstruktif dalam penanganan masalah permukiman kumuh baik dalam hal mencegah perluasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman maupun dalam hal pengelolaan, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya !		
2	Selaku BKM/LKM yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pogram Kotaku di Kelurahan Banggae, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat perbedaan antara kondisi lingkungan permukiman kumuh Tahun 2014 sebelum program Kotaku diberlakukan dengan Tahun 2019 seetelah program Kotaku dilaksanakan? i. Jika ada perbedaan, dimanakah letak perbedaan tersebut? j. Jika tidak ada perbedaan, dimanakah letak kelemahan dan permasalahannya? Dimohon penjelasannya !		
2	Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, manfaat dan dampak perubahanfisik lingkungan apa saja yang terjadi setelah program Kotaku dilaksanakan dalam penanganan permukiman kumuh baik secara umum maupun secara spesifik di Kelurahan Banggae,terutama dalam hal: cc. Perubahan bangunan hunian? dd.Perubahan aksesibilitas lingkungan? ee. Perubahan drainase lingkungan? ff. Perubahan pelayanan air bersih/minum? gg.Perubahan pengelolaan air limbah?		

	<p>hh. Perubahan pengelolaan persampahan? ii. Perubahan proteksi kebakaran? Dimohon penjelasannya!.</p>		
3	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM, manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi apa saja yang dihasilkan oleh program Kotaku terhadap keluarga/ rumah tangga atau warga masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae, terutama dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> oo. Kegiatan usaha ekonomi pp. Pekerjaan qq. Sumber permodalan rr. Pendapatan ss. Akses pelayanan kesehatan tt. Akses pelayanan pendidikan uu. Akses pelayanan sumber energi listrik vv. Pemanfaatan fasilitas umum dan sosial ww. Pemanfaatan ruang publik/ ruang terbuka hijau xx. Pemanfaatan sarana prasarana ekonomi? Dimohon penjelasannya! 		
4	<p>Menurut bapak/ibu/sdr(i) selaku BKM/LKM,, manfaat dan dampak perubahan sosial budaya apa saja yang diperoleh masyarakat dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> cc. Pemeliharaan nilai-nilai kearifan budaya lokal dd. Adat istiadat dan tradisi kepercayaan/ agama ee. Perubahan mental dan perilaku ff. Sikap dan perilaku dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan gg. Budaya hidup bersih dan sehat hh. Pemanfaatan fasilitas tempat ibadah ii. Kesadaran berpartisipasi dalam program Kotaku? Dimohon penjelasannya! 		
5	<p>Selaku BKM/LKM, bagaimana bapak/ibu/sdr(i) melihat perbandingan perubahan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2017-2019) program Kotaku dilaksanakan? Apa hasil evaluasi, hambatan/kendala, kritikan dan saran yang bisa disampaikan! Dimohon penjelasannya!</p>		

Majene,2019

Informan/ Responden

Interviewer

(.....)

(.....)

.....)

.....)

~:~:~*Selamat bekerja!*~:~:~

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/ Narasumber: LURAH

■ Nama (Lengkap/
Inisial) :

■ Usia : (tahun)

■ Pendidikan :

■ Pangkat/Gol. :

■ Masa jabatan :

■ Kelurahan :

■ Alamat :

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA Untuk LURAH

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Selaku Lurah yang memimpin kelurahan sekaligus diberi amanat dan kepercayaan serta tanggungjawab memimpin penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku, bagaimana Bapak melihat kondisi permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan saat ini di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya !	Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain!	
2	Bagaimana Bapak melihat kondisi bangunan hunian saat ini Lingkungan Copala (Kelurahan Banggae) setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya ! a. Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan b. Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah/kendala		
3	Bagaimana Bapak melihat kondisi aksesibilitas lingkungan saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya ! a. Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan b. Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah		
4	Bagaimana Bapak melihat kondisi drainase lingkungan saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya ! a. Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan b. Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah/kendala		
5	Bagaimana Bapak melihat kondisi pelayanan air minum/bersih/baku saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya ! a. Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan b. Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah		

6	<p>Bagaimana Bapak melihat kondisi pengelolaan air limbah saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya !</p> <p>a. Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan</p> <p>b. Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah</p>		
7	<p>Bagaimana Bapak melihat kondisi pengelolaan persampahan saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya !</p> <p>a. Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan</p> <p>b. Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah</p>		
8	<p>Bagaimana Bapak melihat kondisi perlindungan kebakaran bagi warga masyarakat saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya!</p> <p>a. Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan</p> <p>b. Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah</p>		
9	<p>Bagaimana Bapak melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya !</p> <p>a. Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan</p> <p>b. Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah</p>		
10	<p>Bagaimana Bapak melihat kondisi sosial budaya masyarakat saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya !</p> <p>z. Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan</p> <p>aa. Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah.</p>		

Majene, 2019

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	<p>Selaku Lurah yang memimpin penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku, bagaimana Bapak mengkoordinasikan dan melihat pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang digunakan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala? Dimohon penjelasannya !</p>	<p>Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain</p>	
2	<p>Menurut Bapak, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah bangunan hunian yang tidak teratur dan padat di Lingkungan Copala</p>		

	(Kelurahan Banggae)? Dimohon penjelasannya !		
3	Tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah aksesibilitas lingkungan di Lingkungan Copala (Kelurahan Banggae)? Dimohon penjelasan Bapak !		
4	Tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah drainase lingkungan di Lingkungan Copala (Kelurahan Banggae)? Dimohon penjelasan Bapak !		
5	Tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pelayanan air minum/bersih/baku di Lingkungan Copala (Kelurahan Banggae)? Dimohon penjelasan Bapak !		
6	Tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan air limbah di Lingkungan Copala (Kelurahan Banggae)? Dimohon penjelasan Bapak !		
7	Tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah pengelolaan persampahan di Lingkungan Copala (Kelurahan Banggae)? Dimohon penjelasan Bapak !		
8	Tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah perlindungan kebakaran bagi warga masyarakat di Lingkungan Copala (Kelurahan Banggae)? Dimohon penjelasan Bapak !		
9	Tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial ekonomi masyarakat di Lingkungan Copala (Kelurahan Banggae)? Dimohon penjelasan Bapak !		
10	Tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah sosial budaya masyarakat di Lingkungan Copala (Kelurahan Banggae)? Dimohon penjelasan Bapak !		
11	Pola tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal: p. Pencegahan?		

	q. Peningkatan kualitas? r. Pengelolaan ?		
12	Selaku Lurah tentu memiliki komitmen dan tanggungjawab terhadap pengentasan permukiman kumuh di kelurahannya, apa saja peran dan tindakan yang Bapak lakukan dalam mendukung, melaksanakan dan melancarkan pelaksanaan program Kotaku di kelurahannya? Mohon penjelasannya!		

Majene, 2019

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan	Kode
1	Selaku Lurah yang memimpin penanganan permukiman kumuh di kelurahannya: k. Menurut Bapak, pelaksanaan program Kotaku memberikan mamfaat dan dampak perubahan yang berarti dalam penanganan masalah permukiman kumuh baik dalam hal pencegahan, peningkatan kualitas permukiman maupun dalam hal pengelolaan? l. Bagaimana Bapak melihat manfaat dan dampak perubahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan program Kotaku tersebut? Dimohon penjelasannya secara jelas dan ringkas!	Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain	
2	Menurut Bapak, manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan apa saja yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh baik secara umum maupun secara spesifik seperti: jj. Bangunan hunian? kk. Aksesibilitas lingkungan? ll. Drainase lingkungan mm. Pelayanan air bersih/minum nn. Pengelolaan air limbah oo. Pengelolaan persampahan pp. Proteksi kebakaran Dimohon penjelasannya!.		
3	Mamfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi apa saja yang dihasilkan oleh program Kotaku terhadap masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal: yy. Kegiatan usaha ekonomi zz. Pekerjaan, akses sumber permodalan, pendapatan aaa. Akses pelayanan kesehatan bbb. Akses pelayanan pendidikan ccc. Akses pelayanan sumber energi listrik ddd. Pemanfaatan fasilitas umum dan sosial eee. Pemanfaatan sarana prasarana ekonomi? Dimohon penjelasan Bapak!		

4	<p>Manfaat dan dampak perubahan sosial budaya apa saja yang diperoleh masyarakat dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> jj. Pemeliharaan nilai-nilai kearifan budaya lokal kk. Adat istiadat dan tradisi kepercayaan/ agama ll. Perubahan mental dan perilaku mm. Sikap dan perilaku dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan nn. Budaya hidup bersih dan sehat oo. Pemanfaatan fasilitas tempat ibadah pp. Kesadaran berpartisipasi dalam program Kotaku? Dimohon penjelasan Bapak! 		
5	Bagaimana Bapak melihat perbandingan perubahan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2017-2019)program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya!		
6	Selaku Lurah tentu sangat menginginkan kelurahannya bebas <i>slum area</i> . Oleh karena itu, apakah manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku di kelurahannya sudah sesuai dengan harapan Bapak, atukah bagaimana? Mohon penjelasannya!		
7	Selaku Lurah, apa hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasi Bapak terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banggae?		

Majene,2019

Informan/ Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....) (.....)

~Selamat bekerja~

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topic penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terimakasih.

Identitas Informan/ Narasumber :CAMAT

<input type="checkbox"/>	Nama (Lengkap/ Inisial)	:
<input type="checkbox"/>	Usia	: (tahun)
<input type="checkbox"/>	Pendidikan	:
<input type="checkbox"/>	Pangkat/Gol.	:
<input type="checkbox"/>	Masa jabatan	:
<input type="checkbox"/>	Kecamatan	:
<input type="checkbox"/>	Alamat	:

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA Untuk CAMAT

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan	Kode
1	<p>Selaku Camat yang memimpin kecamatan sekaligus diberi amanat dan kepercayaan serta tanggung jawab memimpin penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku di wilayahnya, bagaimana Bapak melihat kondisi permukiman (kumuh atau ekskumuh) secara umum dan keseluruhan saat ini di kecamatannya, terutama di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya !</p>	<p>Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain!</p>	
2	<p>Bapak sebagai Camat dan sekaligus pemimpin penanganan permukiman kumuh di tingkat kecamatan, tentu senantiasa memberikan perhatian untuk ikut mengkoordinir, memonitoring atau memantau situasi dan kondisi terkini perkembangan penanganan permukiman kumuh oleh program Kotaku di wilayahnya. Dan, tentu bapak memiliki penilaian tersendiri mengenai hal itu, terutama di Kelurahan Banggae dan khususnya di lingkungan permukiman (ekskumuh).</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak memberikan pandangan/pendapat/penilaian atas hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana kondisi bangunan hunian saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? b. Bagaimana kondisi aksesibilitas lingkungan saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? c. Bagaimana kondisi drainase lingkungan saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? d. Bagaimana kondisi pelayanan air minum/bersih/baku saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? e. Bagaimana kondisi pengelolaan air limbah saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? f. Bagaimana kondisi pengelolaan persampahan saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan? g. Bagaimana kondisi perlindungan kebakaran bagi warga masyarakat saat ini setelah program Kotaku dilaksanakan?. <p>Dari pertanyaan poin a s/d g tersebut, dimohon kepada Bapak juga untuk menjelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan • Apasaja yang masih kurang dan menjadi masalah. 		

2	<p>Terkait dengan kondisi social ekonomi masyarakat seperti kultur kewirausahaan, motivasi dan kegiatan usaha, pekerjaan, pendapatan, akses sumber modal, kemampuan menabung, akses tempat usaha, sarana prasarana atau fasilitas perekonomian kelurahan atau lingkungan, dan lainnya, bagaimana Bapak melihat semua hal tersebut saat ini di Kelurahan Banggae khususnya di lingkungan permukiman (ekskumuh) setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya !</p> <p>c. Apasaja yang sudah baik dan menggembirakan d. Apasaja yang masih kurang dan menjadi masalah</p>		
3	<p>Menyangkut kondisi social budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan budaya local, adat istiadat, tradisi kepercayaan, mental dan perilaku kebiasaan serta kesadaran warga dalam pemeliharaan lingkungan dan lainnya, bagaimana Bapak melihat semua hal tersebut saat ini di Kelurahan Banggae khususnya di lingkungan permukiman (ekskumuh) setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya !</p> <p>bb. Apasaja yang sudah baik dan menggembirakan cc. Apasaja yang masih kurang dan menjadi masalah.</p>		

Majene, 2019

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	<p>Selaku Camat yang memimpin penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku di tingkat kecamatan, bagaimana Bapak mengkoordinasikan dan melihat pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang digunakan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan permukiman kumuh yang ada? Dimohon penjelasannya !</p>	<p>Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain</p>	
2	<p>Menurut Bapak selaku pihak yang memimpin penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku di tingkat kecamatan, tindakan dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah-masalah berikut di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan permukiman kumuh yang ada?.</p> <p>a. Penanganan masalah bangunan hunian b. Penanganan masalah aksesibilitas lingkungan c. Penanganan masalah drainase lingkungan d. Penanganan masalah pelayanan air minum/bersih/baku e. Penanganan masalah pengelolaan air limbah rumah tangga</p>		

	<p>f. Penanganan masalah pengelolaan persampahan g. Penanganan masalah perlindungan kebakaran bagi warga masyarakat h. Penanganan masalah social ekonomi masyarakat i. Penanganan masalah social budaya masyarakat Dimohon penjelasannya !</p>		
3	<p>Sebagaimana diketahui bahwa ada tiga prinsip penting pada program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, yaitu mencegah perluasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, dan pengelolaan permukiman. Bapak selaku nahkoda penanganan permukiman kumuh di tingkat kecamatan, bagaimana melihat ketiga hal tersebut dilaksanakan di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae? Dimohon penjelasannya !</p>		
4	<p>Selaku Camat yang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap pengentasan permukiman kumuh di kecamatannya, apa saja peran dan tindakan yang Bapak lakukan dalam mendukung, melaksanakan dan melancarkan pelaksanaan program Kotaku? Mohon penjelasannya!</p>		

Majene, 2019

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan	Kode
1	<p>Selaku Camat yang memimpin penanganan permukiman kumuh di kecamatannya:</p> <p>m. Menurut Bapak, pelaksanaan program Kotaku memberikan mamfaat dan dampak perubahan yang berarti dalam penanganan masalah permukiman kumuh baik dalam hal pencegahan, peningkatan kualitas permukiman maupun dalam hal pengelolaan?</p> <p>n. Bagaimana Bapak melihat manfaat dan dampak perubahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan program Kotaku tersebut? Dimohon penjelasannya secara jelas dan ringkas!</p>	<p>Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain</p>	
2	<p>Menurut Bapak, manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan apa saja yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh baik secara umum maupun secara spesifik, terutamadalam hal:</p> <p>qq. Bangunan hunian? rr. Aksesibilitis lingkungan? ss. Drainase lingkungan tt. Pelayanan air bersih/minum uu. Pengelolaan air limbah vv. Pengelolaan persampahan ww. Proteksi kebakaran Dimohon penjelasannya!.</p>		

3	<p>Di bidang social ekonomi, manfaat dan dampak perubahan apa saja yang dihasilkan oleh program Kotaku terhadap masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <p>fff. Kegiatan usaha ekonomi ggg. Pekerjaan, akses sumber permodalan, pendapatan hhh. Akses pelayanan kesehatan iii. Akses pelayanan pendidikan jjj. Akses pelayanan sumber energi listrik kkk. Pemanfaatan fasilitas umum dan sosial lll. Pemanfaatan sarana prasarana ekonomi? Dimohon penjelasan Bapak!</p>		
4	<p>Di bidang social budaya, manfaat dan dampak perubahan apa saja yang diperoleh masyarakat dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <p>qq. Pemeliharaan nilai-nilai kearifan budaya lokal rr. Adat istiadat dan tradisi kepercayaan/ agama ss. Perubahan mental dan perilaku tt. Sikap dan perilaku dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan uu. Budaya hidup bersih dan sehat vv. Pemanfaatan fasilitas tempat ibadah ww. Kesadaran berpartisipasi dalam program Kotaku? Dimohon penjelasan Bapak!</p>		
5	<p>Bagaimana Bapak melihat perbandingan perubahan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2017-2019) program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya!</p>		
6	<p>Selaku Camat tentu sangat menginginkan wilayah kecamatannya bebas <i>slum area</i>. Oleh Karena itu, apakah manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku di kecamatannya sudah sesuai dengan harapan Bapak, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya!</p>		
7	<p>Selaku Camat, apa hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasi Bapak terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?</p>		

Majene,2019

Informan/ Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....
.....)

(.....
.....)

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/ Narasumber : Kepala Lingkungan

- Nama (Lengkap/ Inisial) :
- Usia : (tahun)
- Pendidikan :
- Σ tahun menjabat :
- Nama lingkungan :
- Kelurahan :
- Alamat :

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA Untuk KEPALA LINGKUNGAN/ RW/RT

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan	Kode
1	Bapak sebagai Kepala Lingkungan, bagaimana melihat kondisi permukiman secara umum dan keseluruhan saat ini di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya !	Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain!	
2	Menurut Bapak selaku Kepala Lingkungan, dan sekaligus pihak yang lebih dekat dan banyak mengetahui situasi dan kondisi terkini lingkungan dan warga masyarakatnya, bagaimana melihat kondisi hal-hal berikut setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungannya ada? j. Kondisi bangunan hunian saat ini? k. Kondisi aksesibilitas lingkungan saat ini? l. Kondisi drainase lingkungan saat ini? m. Kondisipelayanan air minum/bersih/baku saat ini? n. Kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga saat ini? o. Kondisi pengelolaan persampahan saat ini? p. Kondisi perlindungan kebakaran bagi warga saat ini? q. Kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini? r. Kondisi sosial budaya masyarakat saat ini? Dimohon penjelasannya ! Dari poin a/s/d i tersebut, mohon dijelaskan pula tentang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan dari setiap poin-poin a-i tersebut ▪ Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah/kendala dari masing-masing poin a-i tersebut 		
3	Selaku Kepala Lingkungan, menurut Bapak apakah kondisi fisiklingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat saat ini di Lingkungannya pasca program Kotaku sejalan dengan harapan Bapak, atautkah bagaimana? Mohon dijelaskan secara ringkas dan jelas!		

Majene, 2019

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan	Kode

1	Selaku Kepala Lingkungan yang lebih mengetahui segala beluk situasi dan kondisi lingkungannya, bagaimana Bapak melihat pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang digunakan oleh program Kotaku di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala? Dimohon penjelasannya !	Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain!	
2	Menurut Bapak selaku Kepala Lingkungan, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah-masalah berikut di Lingkungan Copala (Kelurahan Banggae)? <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan masalah bangunan hunian b. Penanganan masalah aksesibilitas lingkungan c. Penanganan masalah drainase lingkungan d. Penanganan masalah pelayanan air minum/bersih/baku e. Penanganan masalah pengelolaan air limbah rumah tangga f. Penanganan masalah pengelolaan persampahan g. Penanganan masalah perlindungan kebakaran bagi warga masyarakat h. Penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat i. Penanganan masalah sosial budaya masyarakat Dimohon penjelasannya !		
3	Menurut Bapak selaku Kepala Lingkungan, pola tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> s. Mencegah meluasnya permukiman kumuh? t. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman? u. Pengelolaan permukiman ? Mohon dijelaskan secara ringkas dan jelas!		
4	Menurut Bapak selaku Kepala Lingkungan, semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah-masalah lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat di Lingkungannya sudah tepat dan efektif, sudah sesuai kebutuhan pemecahan masalah, sudah sesuai harapan Bapak, ataukah bagaimana? Mohon dijelaskan secara ringkas dan jelas!		

Majene, 2019

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan	Kode
1	Selaku Kepala Lingkungan yang lebih mengetahui segala beluk situasi dan kondisi lingkungannya: <ul style="list-style-type: none"> o. Menurut Bapak, pelaksanaan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak perubahan yang berarti (atau bagaimana) dalam penanganan masalah permukiman kumuh baik dalam hal pencegahan, peningkatan kualitas permukiman 	Jawaban ditulis tersendiri di kertas	

	<p>maupun dalam hal pengelolaan di lingkungannya? Dimohon penjelasannya !</p> <p>p. Bagaimana Bapak menyikapi atau merespon manfaat dan dampak perubahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan program Kotaku di lingkungannya tersebut? Dimohon penjelasannya !</p>	lain!	
2	<p>Menurut Bapak selaku Kepala Lingkungan, manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan apa saja yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di lingkungannya baik secara umum maupun secara spesifik, terutama dalam hal:</p> <p>xx. Penataan bangunan hunian?</p> <p>yy. Aksesibilitas lingkungan?</p> <p>zz. Drainase lingkungan</p> <p>aaa. Pelayanan air bersih/minum</p> <p>bbb. Pengelolaan air limbah</p> <p>ccc. Pengelolaan persampahan</p> <p>ddd. Proteksi kebakaran</p> <p>Dimohon penjelasannya!</p>		
3	<p>Manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi apa saja yang dihasilkan oleh program Kotaku terhadap masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <p>mmm. Kegiatan usaha ekonomi penduduk</p> <p>nnn. Pekerjaan</p> <p>ooo. Sumber permodalan</p> <p>ppp. Pendapatan</p> <p>qqq. Akses pelayanan kesehatan</p> <p>rrr. Akses pelayanan pendidikan</p> <p>sss. Akses pelayanan sumber energi listrik</p> <p>ttt. Pemanfaatan fasilitas umum dan sosial</p> <p>uuu. Pemanfaatan sarana prasarana ekonomi?</p> <p>Dimohon penjelasan Bapak!</p>		
4	<p>Manfaat dan dampak perubahan sosial budaya apa saja yang diperoleh masyarakat dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <p>xx. Pemeliharaan nilai-nilai kearifan budaya lokal</p> <p>yy. Adat istiadat dan tradisi kepercayaan/ agama</p> <p>zz. Perubahan mental dan perilaku</p> <p>aaa. Sikap dan perilaku dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan</p> <p>bbb. Budaya hidup bersih dan sehat</p> <p>ccc. Pemanfaatan fasilitas tempat ibadah</p> <p>ddd. Kesadaran warga berpartisipasi dalam program Kotaku? Dimohon penjelasan Bapak!</p>		
5	<p>Bagaimana Bapak melihat perbandingan perubahan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2017-2019) program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya!</p>		

6	Selaku Kepala Lingkungan tentu sangat menginginkan lingkungannya bebas kumuh. Oleh karena itu, apakah manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku di lingkungannya sudah sesuai dengan harapan Bapak, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya!		
7	Apa hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasi Bapak terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Lingkungannya?		

Majene,2019

Informan/ Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....) (.....)

Selamat bekerja!

UNIVERSITAS

BOSOWA

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/ Narasumber : SEKDA MAJENE

■ Nama (Lengkap/ Inisial)	:	H. A. Achmad Syukri, SE., MM
■ Usia	:	57 tahun
■ Pendidikan	:	S2 (Strata Dua)
■ Posisi dalam Program Kotaku	:	Nahkoda & <i>Decision/ policy maker</i>
■ Alamat	:	J.L.R.A.KARTINI

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara Untuk SEKDA Majene

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

1. Bapak sebagai *top leader, decision/policy maker*, serta nahkoda dalam pelaksanaan program Kotaku di Majene, barangkali Bapak bisa menceritakan secara umum **situasi dan kondisi permukiman kumuh saat ini** pasca pelaksanaan program Kotaku di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
 - Program KOTAKU salah satu program pusat dalam rangka Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Majene, khusus Kecamatan Banggae dengan luasan kawasan kumuh 21,49 Ha sudah hampir tuntas yang tersisa hanya pada Kelurahan Rangas, secara keseluruhan dengan adanya Program KOTAKU penanganan kumuh dengan 7 indikator kumuh mampu terselesaikan dan khusus Kelurahan Banggae sejak tahun 2017 sudah tidak masuk dalam kawasan kumuh karena dari 7 indikator sudah mampu terselesaikan secara menyeluruh. Dan, dengan adanya Program KOTAKU maka penanganan kumuh sudah bisa terselesaikan.

2. Secara khusus, Bapak bisa mengutarakan pandangan-pandangan atau penilaiannya mengenai kondisi **fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat saat ini** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
 - Pandangan-pandangan atau penilaian mengenai kondisi Kelurahan Banggae :
 - **Kondisi Fisik Lingkungan**, dengan Program KOTAKU sudah mampu menyentuh perbaikan fisik lingkungan pada rumah-rumah masyarakat di permukiman kumuh melalui kolaborasi penanganan yang ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - **Kondisi Sosial Ekonomi**, Program KOTAKU melalui bantuan dana bergulir tujuannya memberikan bantuan keuangan dalam perbaikan ekonomi masyarakat di lingkungan kumuh.
 - **Kondisi Sosial Budaya Masyarakat**, dengan adanya Program KOTAKU mampu meningkatkan kesejahteraan social masyarakat melalui penghidupan berkelanjutan di wilayah kawasan kumuh.

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

1. Sebagai nahkoda dalam pelaksanaan program Kotaku di Majene, bisa Bapak menceritakan **pola penanganan apa saja** secara umum yang diterapkan dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!

- Sebagai Nahkoda Pemerintah Daerah menjadi *header* penanganan kumuh dengan pendekatan :
 - Kemudahan kebijakan penanganan melalui regulasi dan perencanaan serta penganggaran dalam pendampingan dana pusat.
 - Mempertegas pola kolaborasi penanganan melalui OPD terkait.
 - Membuat replikasi program untuk kawasan kumuh yang tidak masuk penanganan KOTAKU.
2. Secara spesifik, Bapak bisa menceritakan **tindakan apa saja** yang dilakukan dalam **mencegah perluasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas permukiman, serta pengelolaan permukiman kumuh** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
- Secara spesifik yang dilakukan pemerintah daerah melalui pendekatan program pendampingan yang dikhususkan untuk kawasan yang sudah tidak masuk dalam kawasan kumuh, membuat POKJA Penanganan Kumuh Kabupaten Majene.
3. Secara spesifik lagi, Bapak bisa menceritakan variasi **strategi dan langkah-langkah tindakan** yang dilakukan bersama dengan jajaran kelebagaannya dalam **menangani masalah lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat** pada penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
- Secara spesifik variasi strategis langkah-langkah tindakan :
 - **Masalah Lingkungan**, tetap menjaga kawasan-kawasan yang sudah keluar dari kumuh untuk tidak kembali kumuh lagi dengan memaksimalkan peran POKJA Kabupaten dan BKM serta masyarakat yang ada di kawasan penanganan selama ini.
 - **Sosial Ekonomi**, meningkatkan kawasan yang dulunya kumuh menjadi kawasan yang berpotensi mampu meningkatkan perekonomiannya melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada masyarakat di kawasan melalui BKM yang terbentuk selama ini.
4. Bapak sebagai pemimpin daerah dan masyarakat, tentu memiliki komitmen, peran vital-sentral dan strategis, serta tanggungjawab besar terhadap keberhasilan program Kotaku melakukan pengentasan permukiman kumuh di Majene terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae. Sehubungan dengan hal tersebut, peran *leadership* dan manajerial apa saja yang Bapak lakukan dalam mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, mendukung, melancarkan, mengorganisir, mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Kotaku di wilayah otoritasnya? Mohon penjelasannya!
- Sebagai Program prioritas penanganan kumuh (KOTAKU) Pemerintah Kabupaten Majene dalam rangka berjalannya program telah melaksanakan :
 - a. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan di dalam RPJMD Kabupaten Majene dan perencanaan formal lainnya.
 - b. Mengarahkan kepada OPD terkait tentang penerapan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi sektor dan multi aktor.

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

1. Sebagaimana Bapak ketahui bahwa sebelum program Kotaku dilaksanakan, kalau tidak salah ada dua kecamatan dan 5 kelurahan (ditetapkan oleh SK Bupati Majene Tahun 2014) atau 8 kelurahan delineasi (data baseline Kotaku 2015) yang menghadapi masalah kawasan permukiman kumuh di Majene, termasuk Kelurahan Banggae di Kecamatan Banggae. Kini sudah masuk Tahun 2019 (atau tahun ke-..... pelaksanaan program Kotaku di Majene). Sehubungan dengan itu, barangkali Bapak bisa menceritakan hal-hal berikut.
 - a. Sejak program Kotaku dilaksanakan di Majene sampai sekarang, perubahan-perubahan apa saja yang menurut Bapak dianggap paling berarti dalam penanganan permukiman kumuh
 -
 - b. Dari poin a tersebut, barangkali Bapak bisa menceritakan lebih spesifik mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal:
 - 1) Fisik lingkungan permukiman
 - 2) Kondisi sosial ekonomi penduduk
 - 3) Kondisi sosial budaya penduduk
 - c. Selanjutnya dari poin b tersebut, dengan memperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan, apakah perubahan kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat memberikan manfaat dan dampak yang berarti bagi pencegahan kawasan kumuh meluas, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?. Mohon penjelasan Bapak !
2. Bapak selaku Nahkoda pelaksanaan program Kotaku di Majene, tentu ke depan tidak ingin melihat ada lagi kawasan kumuh perkotaan di Majene. Oleh karena itu, apakah manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae sudah sesuai dengan harapan Bapak, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya!.
3. Bapak, tentu bukan saja sebagai Nahkoda, namun juga Evaluator terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene. Sebagai evaluator, barangkali Bapak bisa mengemukakan hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasinya terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!.

Majene, September 2019
 Interviewer

Informan/ Narasumber

Ttd

(.....) (.....)
 (.....) (.....)

~ Selamat datang ~

**PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
 MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
 (STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
 BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/ Narasumber : pihak BAPPEDA

<input type="checkbox"/>	Nama (Lengkap/ Inisial)	:
<input type="checkbox"/>	Usia	: (tahun)
<input type="checkbox"/>	Pendidikan	:
<input type="checkbox"/>	Pangkat/Gol.	:
<input type="checkbox"/>	Bidang tugas	:
<input type="checkbox"/>	Jabatan dalam instansi	:
<input type="checkbox"/>	Alamat	:

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA Untuk Pihak BAPPEDA

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan	Kode
1	Selaku pihak yang memegang peranan penting dan sentral dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Majene, dan sekaligus sebagai pihak yang diberi amanat, kepercayaan serta tanggungjawab dalam pelaksanaan program Kotaku untuk mendesain penanganan permukiman kumuh, bagaimana Bapak melihat kondisi permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan saat ini di Kecamatan Banggae, terutama di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala setelah program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya !	Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain!	
2	<p>Bapak dengan kedudukan dan perannya yang sentral dalam program Kotaku, bagaimana melihat kondisi hal-hal berikut setelah program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungannya ada?.</p> <p>s. Kondisi bangunan hunian saat ini? t. Kondisi aksesibilitas lingkungan saat ini? u. Kondisi drainase lingkungan saat ini? v. Kondisipelayanan air minum/bersih/baku saat ini? w. Kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga saat ini? x. Kondisi pengelolaan persampahan saat ini? y. Kondisi perlindungan kebakaran bagi warga saat ini? z. Kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini? aa. Kondisi sosial budaya masyarakat saat ini? Dimohon penjelasannya !</p> <p>Dari poin a s/d i tersebut, mohon dijelaskan pula tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa saja yang sudah baik dan menggembirakan dari setiap poin-poin a-i tersebut ▪ Apa saja yang masih kurang dan menjadi masalah/kendala dari masing-masing poin a-i tersebut. 		
3	Selaku unsur pelaksana program Kotaku yang berada di level tinggi di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Majene, menurut Bapak apakah kondisi fisiklingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat saat ini di Kecamatan Banggae terutama di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala sejalan		

	dengan harapan Bapak, ataukah bagaimana? Mohon dijelaskan secara ringkas dan jelas!		
--	---	--	--

Majene, 2019

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan/ Penjelasan	Kode
1	Sebagai pemegang kendali perencanaan pembangunan daerah dan pihak yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Majene, bagaimana Bapak mempersiapkan, merencanakan, mengkoordinir, mengorganisir, memonitoring/memantau, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan yang digunakan oleh program Kotaku di Kecamatan Banggae terutama di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala? Dimohon penjelasannya !	Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain	
2	Menurut Bapak selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program Kotaku di Majene, tindakan dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh program Kotaku dalam menangani masalah-masalah berikut di Kecamatan Banggae terutama di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan permukiman kumuh yang ada?. a. Penanganan masalah bangunan hunian b. Penanganan masalah aksesibilitas lingkungan c. Penanganan masalah drainase lingkungan d. Penanganan masalah pelayanan air minum/bersih/baku e. Penanganan masalah pengelolaan air limbah rumah tangga f. Penanganan masalah pengelolaan persampahan g. Penanganan masalah perlindungan kebakaran bagi warga masyarakat h. Penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat i. Penanganan masalah sosial budaya masyarakat Dimohon penjelasannya !		
3	Sebagaimana diketahui bahwa program Kotaku mengetengahkan tiga prinsip pendekatan dalam penanganan permukiman kumuh, yaitu pencegahan kawasan kumuh baru, peningkatan kualitas permukiman, dan pengelolaan permukiman. Bagaimana Bapak melihat ketiga hal tersebut dilaksanakan di Kecamatan Banggae terutama di Kelurahan Banggae khususnya di kawasan kumuh yang ada? Dimohon penjelasannya !		

4	Selaku pihak yang memiliki peran vital, sentral dan strategis, serta tanggungjawab besar terhadap keberhasilan program Kotaku melakukan pengentasan permukiman kumuh di Majene terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae, apa saja peran dan tindakan yang Bapak lakukan dalam mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, mendukung, melancarkan, mengorganisir, mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Kotaku di wilayah kerjanya? Mohon penjelasannya!		
---	---	--	--

Majene, 2019

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Tanggapan	Kode
1	<p>Selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program Kotaku di Majene, termasuk di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae:</p> <p>q. Menurut Bapak, pelaksanaan program Kotaku memberikan mamfaat dan dampak perubahan yang berarti dalam penanganan masalah permukiman kumuh baik dalam hal pencegahan, peningkatan kualitas permukiman maupun dalam hal pengelolaan?</p> <p>r. Bagaimana Bapak melihat manfaat dan dampak perubahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan program Kotaku tersebut? Dimohon penjelasannya secara jelas dan ringkas!</p>	Jawaban ditulis tersendiri di kertas lain	
2	<p>Menurut Bapak sebagai planner sekaligus evaluator, manfaat dan dampak perubahan fisik lingkungan apa saja yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh baik secara umum maupun secara spesifik di Majene, termasuk di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae, terutama dalam hal:</p> <p>eee. Bangunan hunian?</p> <p>fff. Aksesibilitas lingkungan?</p> <p>ggg. Drainase lingkungan</p> <p>hhh. Pelayanan air bersih/minum</p> <p>iii. Pengelolaan air limbah</p> <p>jjj. Pengelolaan persampahan</p> <p>kkk. Proteksi kebakaran</p> <p>Dimohon penjelasannya!.</p>		
3	<p>Manfaat dan dampak perubahan sosial ekonomi apa saja yang dihasilkan oleh program Kotaku terhadap masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <p>vvv. Kegiatan usaha ekonomi</p> <p>www. Pekerjaan, akses sumber permodalan, pendapatan</p> <p>xxx. Akses pelayanan kesehatan</p> <p>yyy. Akses pelayanan pendidikan</p> <p>zzz. Akses pelayanan sumber energi listrik</p> <p>aaaa. Pemanfaatan fasilitas umum dan sosial</p>		

	bbbb. Pemanfaatan sarana prasarana ekonomi? Dimohon penjelasan Bapak!		
4	<p>Manfaat dan dampak perubahan sosial budaya apa saja yang diperoleh masyarakat dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, terutama dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> eee. Pemeliharaan nilai-nilai kearifan budaya lokal fff. Adat istiadat dan tradisi kepercayaan/ agama ggg. Perubahan mental dan perilaku hhh. Sikap dan perilaku dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan iii. Budaya hidup bersih dan sehat jjj. Pemanfaatan fasilitas tempat ibadah kkk. Kesadaran berpartisipasi dalam program Kotaku? <p>Dimohon penjelasan Bapak!</p>		
5	Bagaimana Bapak melihat perbandingan perubahan permukiman kumuh sebelum (Tahun 2014) dan setelah (Tahun 2017-2019) program Kotaku dilaksanakan? Dimohon penjelasannya!		
6	Selaku pihak yang berada dalam status dan peran sebagai <i>leading sector</i> perencanaan pembangunan wilayah dan perkotaan di Majene, tentu sangat menginginkan wilayahnya bebas <i>slum area</i> . Oleh karena itu, apakah manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae sudah sesuai dengan harapan Bapak, atautah bagaimana? Mohon penjelasannya!.		
7	Apa hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasi Bapak terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?		

Majene,2019

Informan/ Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....) (.....)

(.....) (.....)

^^Selamat bekerja^^

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topic penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terimakasih.

Identitas Informan/ Narasumber : Praktisi/Pakar Tata Ruang Wilayah-Kota

■ Nama (Lengkap/ Inisial) :

■ Usia : (tahun)

■ Pendidikan :

■ Bidang Kompetensi/ Kepakaran : **Tata Ruang Wilayah & Kota**

■ Profesi/ Pekerjaan :

■ Nama Instansi/ Institusi :

■ Alamat :

INSTRUMEN PENELITIAN

**Pedoman Wawancara Untuk Praktisi/Pakar Tata Ruang
W/K**

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini kaitannya dengan RTRWK pasca pelaksanaan Program KOTAKU

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengamati ataupun menilai secara umum **situasi dan kondisi permukiman saat ini** di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae **dalam perspektif perencanaan tata ruang wilayah dan kota** di Majene pasca pelaksanaan program Kotaku!

.....
.....

2. Secara khusus, bagaimana Bapak/Ibu melihat/menilai kondisi **fisik lingkungan, social ekonomi dan social budaya masyarakat dalam penetapan fungsi kawasan dan peruntukan lahan pada perencanaan tata ruang wilayah dan kota saat ini** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!

.....
.....

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU kaitannya dengan RTRWK

1. Menurut penilaian Bapak/Ibu, apakah **pola penanganan permukiman kumuh** yang secara umum diterapkan oleh pelaksana program Kotaku di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **disinergikan atau disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota (RTRWK)**!

.....
.....

2. Secara spesifik, menurut pandangan/penilaian Bapak/Ibu, apakah **land use planning** dan **RTRWK** dipedomani dalam pola penanganan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku guna mencegah perluasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae! Dimohon penjelasannya!

.....
.....

3. Secara spesifik lagi, menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu, apakah **strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku** yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran kelebagaannya dalam **menangani**

masalah lingkungan, social ekonomi, dan social budaya masyarakat pada penanganan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **sudah tepat atau sesuai dengan kebijakan dan konsep penatagunaan lahan dan RTRWK** baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya!

.....

.....

4. Menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu, **yang manakah diantara pendekatan berikut paling tepat dan sesuai untuk diterapkan** dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **berdasarkan kebijakan dan konsep penatagunaan lahan dan RTRWK.**
- Penanganan terpadu (perbaikan/ pemugaran, peremajaan, relokasi)
 - Peremajaan saja
 - Penataan saja
 - Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat
 - Redevelopment*
 - Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya)
 - Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN)
 - Penerapan konsep Kampung Tematik
 - Pendekatan lainnya? Mohon penjelasannya!.
-
-

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU kaitannya dengan RTRWK

- Dari perspektif tata ruang wilayah dan kota (TRWK), **apakah penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak perubahan yang berarti terhadap penataan ruang dan lahan perkotaan serta efektivitas fungsi kawasan yang lebih baik, ataukah bagaimana?** Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!

.....

.....

- Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan fisik lingkungan permukiman** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap *penatagunaan lahan dan ruang perkotaan serta efektivitas fungsi kawasan* yang lebih baik, ataukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!

.....

.....

- Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan social ekonomi masyarakat** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap *penatagunaan lahan dan ruang perkotaan serta efektivitas fungsi kawasan* yang lebih baik, ataukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan social budaya masyarakat** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap *penatagunaan lahan dan ruang perkotaan serta efektivitas fungsi kawasan* yang lebih baik, ataukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara dan praktikal!

.....

.....

5. Memperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan, apakah **tata guna lahan (*land use management*), penataan ruang dan fungsi kawasan semakin lebih baik, (atauakah bagaimana)** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?.Mohon penjelasan Bapak/Ibu!

.....

.....

6. Apakah **prinsip pencegahan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, serta pengelolaan permukiman** benar-benar terwujud dalam **menciptakan tata guna lahan (*land use management*), penataan ruang dan fungsi kawasan yang lebih baik(atau bagaimana)** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?.Mohon penjelasan Bapak/Ibu!

.....

.....

7. **Apakah manfaat dan dampak perubahan** yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae **sudah sesuai dengan harapannya** selaku praktisi ataupun pakar tata ruang, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya!.

.....

.....

8. Bapak/Ibu **selaku praktisi/pakar tata ruang wilayah dan kota**, mohon **dikemukakan hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasinya** terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!.

Majene,2019

Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....) (.....)

.....)

~:~:~Selamatbekerja~:~:~

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topic penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/ Narasumber :Praktisi/Pakar Ekonomi Perkotaan

■ Nama (Lengkap/ Inisial) :

■ Usia : (tahun)

■ Pendidikan :

■ Bidang Kompetensi/ : **Ekonomi Perkotaan/Sektor Informal**
Kepakaran

■ Profesi/ Pekerjaan :

■ NamaInstansi/ :

Institusi

■ Alamat :

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara Untuk Praktisi/Pakar Ekonomi

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini kaitannya dengan ekonomi perkotaan pasca pelaksanaan Program KOTAKU

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengamati ataupun menilai secara umum **situasi dan kondisi permukiman saat ini** di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae **dalam perspektif ekonomi perkotaan** di Majene pasca pelaksanaan program Kotaku!

.....

2. Secara khusus, bagaimana Bapak/Ibu melihat/menilai kondisi **fisik lingkungan, social ekonomi dan social budaya masyarakat saat ini kaitannya dengan penetapan fungsi kawasan ekonomi, nilai ekonomi tanah/lahan dan pengembangan sentra produksi ekonomi** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!

.....

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU kaitannya dengan pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan

1. Menurut penilaian Bapak/Ibu, apakah **pola penanganan permukiman kumuh** yang secara umum diterapkan oleh pelaksana program Kotaku di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **disinergikan atau disesuaikan dengan konsep pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan yang terkoneksi dengan pusat-pusat bisnis/perdagangan dan fasilitas perekonomian kota!**

.....

2. Secara spesifik, menurut pandangan/penilaian Bapak/Ibu, apakah **konsep pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan** dipedomani dalam pola penanganan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku guna mencegah perluasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae! Dimohon penjelasannya!.

.....

3. Secara spesifik lagi, menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu, apakah **strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku** yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran kelembagaannya dalam **menangani masalah lingkungan, social ekonomi, dan social budaya masyarakat** pada

penanganan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **sudah tepat atau sesuai dengan kebijakan dan konsep pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan** baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya!

.....

.....

4. Menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu, **yang manakah diantara pendekatan berikut paling tepat dan sesuai untuk diterapkan** dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **berdasarkan kebijakan dan konsep pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan.**
- j. Penanganan terpadu (perbaikan/ pemugaran, peremajaan, relokasi)
 - k. Peremajaan saja
 - l. Penataans aja
 - m. Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat
 - n. *Redevelopment*
 - o. Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya)
 - p. Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN)
 - q. Penerapan konsep Kampung Tematik
 - r. Pendekatan lainnya? Mohon penjelasannya!.
-
-

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU kaitannya dengan pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan

1. Dari perspektif perekonomian kota, **apakah penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak perubahan yang berarti terhadap pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan yang lebih baik, atautkah bagaimana?** Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan fisik lingkungan permukiman** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap **pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan** yang lebih baik, atautkah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!

.....

.....

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan social ekonomi masyarakat** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti

terhadap **pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan** yang lebih baik, ataukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!

.....

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i), apakah **perubahan social budaya masyarakat** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap **pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan** yang lebih baik, ataukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara dan praktikal!

.....

5. Memperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan, **apakah kehidupan ekonomi masyarakat semakin lebih baik (atau bagaimana)** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?.Mohon penjelasan Bapak/Ibu!

.....

6. Apakah **prinsip pencegahan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, serta pengelolaan permukiman** benar-benar terwujud dalam **menciptakan pengembangan kawasan ekonomi terpadu perkotaan yang lebih baik (atau bagaimana)** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?.Mohon penjelasan Bapak/Ibu!

.....

7. **Apakah manfaat dan dampak perubahan** yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae **sudah sesuai dengan harapannya** selaku praktisi ataupun pakar ekonomi perkotaan, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya!.

.....

8. Bapak/Ibu **selaku praktisi/ pakar ekonomi perkotaan**, mohon **dikemukakan hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasinya** terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!.

.....

Majene,2019

Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....) (.....)
 (.....) (.....)

~:~:Selamatbekerja~:~:

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topic penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/ Narasumber :Praktisi Sosial/Pakar Sosiologi

■ Nama (Lengkap/ Inisial) :

■ Usia : (tahun)

■ Pendidikan :

■ Bidang Kompetensi/ Kepakaran : **Sosiologi Perkotaan**

■ Profesi/ Pekerjaan :

■ NamaInstansi/ Institusi :

■ Alamat :

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara Untuk Praktisi/Pakar Sosiologi

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini kaitannya dengan kondisi social masyarakat pasca pelaksanaan Program KOTAKU

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengamati ataupun menilai secara umum **situasi dan kondisi permukiman saat ini** di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae **dalam perspektif ilmu social atau sosiologi perkotaan** di Majene pasca pelaksanaan program Kotaku!
.....
.....
2. Secara khusus, bagaimana Bapak/Ibu melihat/menilai kondisi **fisik lingkungan, social ekonomi dan social budaya masyarakat saat ini kaitannya dengan kehidupan social masyarakat, ketertiban, rasa aman, ketentraman, kenyamanan, kedamaian hidup warga masyarakat** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
.....
.....

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU kaitannya dengan pengembangan pranata social budaya perkotaan

1. Menurut penilaian Bapak/Ibu, apakah **pola penanganan permukiman kumuh** yang secara umum diterapkan oleh pelaksana program Kotaku di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **disinergikan atau disesuaikan dengan pengembangan ruang-ruang publik, fasilitas umum dan social perkotaan!**
.....
.....
2. Secara spesifik, menurut pandangan/penilaian Bapak/Ibu, apakah **konsep pengembangan ruang-ruang publik, fasilitas umum dan social perkotaan** dipedomani dalam pola penanganan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku guna mencegah perluasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae! Dimohon penjelasannya!
.....
.....
3. Secara spesifik lagi, menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu, apakah **strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku** yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran kelebagaannya dalam **menangani**

masalah lingkungan, social ekonomi, dan social budaya masyarakat pada penanganan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **sudah tepat atau sesuai dengan kebijakan dan konsep pengembangan ruang-ruang publik, fasilitas umum dan social perkotaan** baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya!

.....

.....

4. Menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu, **yang manakah diantara pendekatan berikut paling tepat dan sesuai untuk diterapkan** dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **berdasarkan kebijakan dan konsep pengembangan ruang-ruang publik, fasilitas umum dan social perkotaan.**
- s. Penanganan terpadu (perbaikan/ pemugaran, peremajaan, relokasi)
 - t. Peremajaan saja
 - u. Penataan saja
 - v. Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat
 - w. *Redevelopment*
 - x. Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya)
 - y. Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN)
 - z. Penerapan konsep Kampung Tematik
 - aa. Pendekatan lainnya? Mohon penjelasannya!.
-
-

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU kaitannya dengan perlindungan social dan kesejahteraan social masyarakat perkotaan

1. **Apakah penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak perubahan yang berarti terhadap perlindungan social dan kesejahteraan social masyarakat perkotaan yang lebih baik, ataukah bagaimana?** Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!
-
-
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan fisik lingkungan permukiman** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap **perlindungan social dan kesejahteraan social masyarakat perkotaan** yang lebih baik, ataukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!
-
-
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan social ekonomi masyarakat** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap **perlindungan social dan kesejahteraan social masyarakat perkotaan**

yang lebih baik, ataukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!

.....
.....

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan social budaya masyarakat** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap **perlindungan social dan kesejahteraan social masyarakat perkotaan** yang lebih baik, ataukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara dan praktikal!

.....
.....

5. Memperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan, **apakah perlindungan social dan kesejahteraan social masyarakat perkotaan semakin lebihbaik (ataukah bagaimana)**di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?.Mohon penjelasan Bapak/Ibu!

.....
.....

6. Apakah **prinsip pencegahan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, serta pengelolaan permukiman** benar-benar terwujud dalam **menciptakan perlindungan social dan kesejahteraan social masyarakat perkotaan yang lebih baik (ataubagaimana)** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?.Mohon penjelasan Bapak/Ibu!

.....
.....

7. **Apakah manfaat dan dampak perubahan** yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae **sudah sesuai dengan harapannya** selaku praktisi ataupun pakar sosiologi perkotaan, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya!

.....
.....

8. Bapak/Ibu **selaku praktisi/ pakar sosiologi perkotaan**, mohon **dikemukakan hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasinya** terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!.

.....
.....

Majene,2019

Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....
.....)

(.....
.....)

Salawat

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topic penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/ Narasumber :Praktisi /Pakar Lingkungan

■ Nama (Lengkap/ Inisial) :

■ Usia : (tahun)

■ Pendidikan :

■ Bidang Kompetensi/ Kepakaran : **Lingkungan Perkotaan**

■ Profesi/ Pekerjaan :

■ Nama Instansi/ Institusi :

■ Alamat :

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara Untuk Praktisi/Pakar Lingkungan
--

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini kaitannya dengan kondisi lingkungan pasca pelaksanaan Program KOTAKU

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengamati ataupun menilai secara umum **situasi dan kondisi permukiman saat ini** di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae **dalam perspektif ekologi perkotaan atau pembangunan berwawasan lingkungan** di Majene pasca pelaksanaan program Kotaku!
.....
.....

2. Secara khusus, bagaimana Bapak/Ibu melihat/menilai kondisi **fisik lingkungan, social ekonomi dan social budaya masyarakat saat ini kaitannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
.....
.....

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU kaitannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan

1. Menurut penilaian Bapak/Ibu, apakah **pola penanganan permukiman kumuh** yang secara umum diterapkan oleh pelaksana program Kotaku di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **disinergikan atau disesuaikan dengan pembangunan berwawasan lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH)**!
.....
.....

2. Secara spesifik, menurut pandangan/penilaian Bapak/Ibu, apakah **pembangunan berwawasan lingkungan dan pengembangan RTH** dipedomani dalam pola penanganan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku guna mencegah perluasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae! Dimohon penjelasannya!
.....
.....

3. Secara spesifik lagi, menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu, apakah **strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku** yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran kelembagaannya dalam **menangani masalah lingkungan, social ekonomi, dan social budaya masyarakat** pada

penanganan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **sudah tepat atau sesuai dengan kebijakan dan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan pengembangan RTH** baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya!

.....

.....

4. Menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu, **yang manakah diantara pendekatan berikut paling tepat dan sesuai untuk diterapkan** dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **berdasarkan kebijakan dan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan pengembangan RTH.**
- bb. Penanganan terpadu (perbaikan/ pemugaran, peremajaan, relokasi)
 - cc. Peremajaan saja
 - dd. Penataan saja
 - ee. Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat
 - ff. *Redevelopment*
 - gg. Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya)
 - hh. Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood (SUN)*
 - ii. Penerapan konsep Kampung Tematik
 - jj. Pendekatan lainnya? Mohon penjelasannya!.
-
-

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU kaitannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan dan pengembangan RTH

1. **Apakah penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak perubahan yang berarti terhadap perlindungan LH, peningkatan kualitas lingkungan dan pengembangan RTH yang lebih baik, atukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!**

.....

.....
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan fisik lingkungan permukiman** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap **perlindungan LH, peningkatan kualitas lingkungan dan pengembangan RTH perkotaan** yang lebih baik, atukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!

.....

.....
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan social ekonomi masyarakat** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap **perlindungan LH, peningkatan kualitas lingkungan dan pengembangan RTH perkotaan** yang lebih baik, atukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara ilmiah dan praktikal!

.....

.....

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah **perubahan social budaya masyarakat** pasca pelaksanaan program Kotaku memberikan manfaat dan dampak yang berarti terhadap **perlindungan LH, peningkatan kualitas lingkungan dan pengembangan RTH perkotaan** yang lebih baik, ataukah bagaimana? Mohon penjelasan Bapak/Ibu secara dan praktikal!

.....

.....

5. Memperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan, **apakah perlindungan LH, peningkatan kualitas lingkungan dan pengembangan RTH perkotaan semakin lebih baik (ataukah bagaimana)** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?.Mohon penjelasan Bapak/Ibu!

.....

.....

6. Apakah **prinsip pencegahan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, serta pengelolaan permukiman** benar-benar terwujud dalam **menciptakan perlindungan LH, peningkatan kualitas lingkungan dan pengembangan RTH perkotaan yang lebih baik (atau bagaimana)** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?.Mohon penjelasan Bapak/Ibu!

.....

.....

7. **Apakah manfaat dan dampak perubahan** yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae **sudah sesuai dengan harapannya** selaku praktisi ataupun pakar lingkungan perkotaan, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya!

.....

.....

8. Bapak/Ibu **selaku praktisi/ pakar lingkungan perkotaan**, mohon **dikemukakan hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasinya** terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!.

.....

.....

Majene,2019

Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....
.....)

(.....
.....)

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/ Narasumber : Pakar/Akademisi

■ Nama (Lengkap/
Inisial) :

■ Usia : (tahun)

■ Pendidikan/Bidang
Keahlian :

■ Profesi/
Pekerjaan/Institusi :

■ Alamat :

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara Untuk Pakar/Akademisi Lokal di Majene**A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU**

1. Sebagai pakar atau akademisi, bagaimana Bapak/Ibu melihat atau menilai secara umum **situasi dan kondisi permukiman kumuh saat ini** pasca pelaksanaan program Kotaku di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!

.....

2. Secara khusus, bagaimana Bapak/Ibumelihat/ menilai kondisi **fisiklingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat saat ini** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!

.....

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

1. Bapak/Ibu selaku pakar/ akademisi, bagaimana pandangan atau penilaiannya terhadap **pola penanganan permukiman kumuh** yang secara umum diterapkan oleh pelaksana program Kotaku di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!

.....

2. Secara spesifik, menurut pandangan atau penilaian Bapak/Ibu, apakah pola penanganan dan tindakanyang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku benar-benar **mencegah perluasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!Dimohon penjelasannya!

.....

3. Secara spesifik lagi, menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibuselaku akademisi/pakar, apakah **strategi danlangkah-langkahtindakan program Kotaku** yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran kelembagaannya dalam **menangani masalah lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat** pada penanganan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae) **sudah tepat atau sesuai** dengan kebutuhan *problem solving* atau pemecahan masalah baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya!

.....

-
-
4. Menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibuselaku akademisi/pakar, **yang manakah diantara pendekatan berikut paling tepat dan sesuai untuk diterapkan** dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh di Majene terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae.
- kk. Penanganan terpadu (perbaikan/ pemugaran, peremajaan, relokasi)
- ll. Peremajaan saja
- mm. Penataan saja
- nn. Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat
- oo. *Redevelopment*
- pp. Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya)
- qq. Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood (SUN)*
- rr. Penerapan konsep Kampung Tematik
- ss. Pendekatan lainnya? Mohon penjelasannya!.
-
-

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

1. Selaku pakar/akademisi:
- a. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak perubahan yang berarti/signifikan atau bagaimana dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama Kelurahan Banggae di Kecamatan Banggae?
-
-
- b. Bagaimana Bapak/Ibu melihat, mengamati, menganalisa dan menilai perubahan-perubahan (manfaat dan dampak) yang ditimbulkan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majenetersebut?
-
-
- c. Sejak program Kotaku dilaksanakan di Majene sampai sekarang, perubahan-perubahan (manfaat dan dampak) apa saja yang menurut Bapak/Ibu anggap paling berarti dalam penanganan permukiman kumuh terutama Kelurahan Banggae di Kecamatan Banggae?
-
-
2. Selaku pakar/akademisi yang akrab dengan dunia analisis ilmiah, menurut Bapak/Ibu:
- 1) Manfaat dan dampak perubahan apakah yang dihasilkan program Kotaku terhadap fisik lingkungan permukiman
-
-
- 2) Manfaat dan dampak perubahan apakah yang dihasilkan program Kotaku terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk

.....
.....
3) Manfaat dan dampak perubahan apakah yang dihasilkan program Kotaku terhadap kondisi sosial budaya penduduk
.....
.....

3. Memperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan, apakah perubahan kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat memberikan manfaat dan dampak yang berarti bagi pencegahan kawasan kumuh meluas, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?. Mohon penjelasan Bapak/Ibu !
.....
.....

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae sudah sesuai dengan harapan Bapak/Ibu selaku akademisi/pakar, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya!.
.....
.....

5. Bapak/Ibuselaku akademisi/pakar, mohon dikemukakan hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasinya terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!.
.....
.....

Majene,2019

Informan/ Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....)
.....) (.....)
.....)

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/ Narasumber : Aktivist LSM

■ Nama (Lengkap/ Inisial) :

■ Usia : (tahun)

■ Pendidikan/Bidang Keahlian :

■ Profesi/ Pekerjaan/Institusi :

■ Nama LSM :

■ Alamat :

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara Untuk Aktivist LSM Lokal di Majene

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

1. Sebagai aktivis LSM dan *pressure group* terhadap kebijakan-kebijakan dan program pemerintah, bagaimana Bapak/Ibu/Sdr(i) melihat/ menilai, mengapresiasi ataupun mengkritisi secara umum **situasi dan kondisi permukiman kumuh saat ini** pasca pelaksanaan program Kotaku di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
.....
.....
2. Secara khusus, bagaimana Bapak/Ibu/Sdr(i) melihat/ menilai, mengapresiasi ataupun mengkritisi kondisi **fisiklingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat saat ini** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
.....
.....

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

1. Bapak/Ibu/Sdr(i) selaku aktivis LSM dan kelompok penekan, bagaimana pandangan/ penilaian ataupun kritiknya terhadap **pola penanganan permukiman kumuh** yang secara umum diterapkan oleh pelaksana program Kotaku di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
.....
.....
2. Secara spesifik, menurut pandangan/penilaian Bapak/Ibu/Sdr(i), apakah pola penanganan dan tindakanyang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku benar-benar **mencegah perluasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!Dimohon penjelasannya!
.....
.....
3. Secara spesifik lagi, menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu/Sdr(i) selaku aktivis LSM dan kritikus, apakah **strategi dan langkah-langkah tindakan program Kotaku** yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran kelebagaannya dalam **menangani masalah lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat** pada penanganan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae)

sudah tepat atau sesuai dengan kebutuhan *problem solving* atau pemecahan masalah baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya!

.....

4. Menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu/Sdr(i) selaku aktivis LSM dan kritikus, **yang manakah diantara pendekatan berikut paling tepat dan sesuai untuk diterapkan** dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh di Majene terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae.
- tt. Penanganan terpadu (perbaikan/ pemugaran, peremajaan, relokasi)
 - uu. Peremajaan saja
 - vv. Penataan saja
 - ww. Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat
 - xx. *Redevelopment*
 - yy. Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya)
 - zz. Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood* (SUN)
 - aaa. Penerapan konsep Kampung Tematik
 - bbb. Pendekatan lainnya? Mohon penjelasannya!.

.....

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

1. Selaku aktivis LSM, *pressure group*, kritikus serta pembela kepentingan masyarakat:
 - a. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i), apakah pelaksanaan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak perubahan yang berarti/signifikan atau bagaimana dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama Kelurahan Banggae di Kecamatan Banggae?

 - b. Bagaimana Bapak/Ibu/Sdr(i) melihat, mengamati, menganalisa dan menilai serta mengkritisi perubahan-perubahan (manfaat dan dampak) yang ditimbulkan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majenetersebut?

 - c. Sejak program Kotaku dilaksanakan di Majene sampai sekarang, perubahan-perubahan (manfaat dan dampak) apa saja yang menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) anggap paling berarti dalam penanganan permukiman kumuhterutama Kelurahan Banggae di Kecamatan Banggae?

2. Selaku aktivis LSM yang akrab dengan dunia diskursus dan kritikan, menurut Bapak/Ibu/Sdr(i):

1) Manfaat dan dampak perubahan apakah yang dihasilkan program Kotaku terhadap fisik lingkungan permukiman

.....

2) Manfaat dan dampak perubahan apakah yang dihasilkan program Kotaku terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk

.....

3) Manfaat dan dampak perubahan apakah yang dihasilkan program Kotaku terhadap kondisi sosial budaya penduduk

.....

3. Memperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan, apakah perubahan kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat memberikan manfaat dan dampak yang berarti bagi pencegahan kawasan kumuh meluas, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?. Mohon penjelasan Bapak/Ibu/Sdr(i)!

.....

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) selakupembela kepentingan masyarakat, apakah manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae sudah sesuai dengan harapannya, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya!.

.....

5. Bapak/Ibuselaku aktivis LSM, *pressure group*, kritikus serta pembela kepentingan masyarakat, mohon dikemukakan hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasinya terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!.

.....

Majene,2019

Informan/ Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....) (.....)
 (.....) (.....)

~Selamat bekerja~

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA (UNIBOS)
MAKASSAR**

TOPIK PENELITIAN

**EVALUASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI PADA PENANGANAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

NUR RATIKA SYAMSIAR

4617102002

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini semata-mata dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian atas penulisan karya ilmiah sehubungan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar Tahun 2018/2019. Oleh karena itu, kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya sudi atau berkenan memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan atas bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan banyak terima kasih.

Identitas Informan/ Narasumber : Tokoh Masyarakat

■ Nama (Lengkap/ Inisial) :

■ Usia : (tahun)

■ Pendidikan :

■ Bidang Ketokohan :

■ Profesi/ Pekerjaan/Institusi :

■ Nama LSM :

■ Alamat :

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat Lokal di Majene

A. Kondisi permukiman kumuh saat ini pasca pelaksanaan Program KOTAKU

1. Sebagai tokoh masyarakat yang dekat dengan masyarakat dan lingkungannya, bagaimana Bapak/Ibu/Sdr(i) melihat, mengapresiasi ataupun menilai secara umum **situasi dan kondisi permukiman kumuh saat ini** pasca pelaksanaan program Kotaku di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
.....
.....
2. Secara khusus, bagaimana Bapak/Ibu/Sdr(i) melihat, mengapresiasi ataupun menilaikondisi **fisiklingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat saat ini** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
.....
.....

B. Pola dan tindakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Program KOTAKU

1. Bapak/Ibu/Sdr(i) selaku panutan masyarakat, mediator-fasilitator serta penyambung lidah warga masyarakat, bagaimana pandangan/ penilaiannya terhadap **pola penanganan permukiman kumuh** yang secara umum diterapkan oleh pelaksana program Kotaku di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!
.....
.....
2. Secara spesifik, menurut pandangan/penilaian Bapak/Ibu/Sdr(i), apakah pola penanganan dan tindakanyang dilakukan oleh pelaksana program Kotaku benar-benar **mencegah perluasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman** di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!Dimohon penjelasannya!
.....
.....
3. Secara spesifik lagi, menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu/Sdr(i) selaku pihak yang mengetahui kondisi lingkungan dan masyarakatnya, apakah **strategi dan langkah-langkahtindakan program Kotaku** yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran kelebagaannya dalam **menangani masalah lingkungan, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat** pada penanganan permukiman kumuh di Majene (terutama di Kecamatan Banggae

khususnya di Kelurahan Banggae) **sudah tepat atau sesuai** dengan kebutuhan *problem solving* atau pemecahan masalah baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, atau bagaimana? Dimohon penjelasannya!

.....

4. Menurut pandangan/ penilaian Bapak/Ibu/Sdr(i) selaku pihak yang ikut memantau perkembangan pelaksanaan program Kotaku, **yang manakah diantara pendekatan berikut paling tepat dan sesuai untuk diterapkan** dalam strategi dan pola penanganan/pengentasan permukiman kumuh di Majene terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae.

ccc. Penanganan terpadu (perbaikan/ pemugaran, peremajaan, relokasi)

ddd. Peremajaan saja

eee. Penataan saja

fff. Penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat

ggg. *Redevelopment*

hhh. Revitalisasi (fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya)

iii. Penerapan prinsip *Sustainable Urban Neighborhood (SUN)*

jjj. Penerapan konsep Kampung Tematik

kkk. Pendekatan lainnya? Mohon penjelasannya!.

.....

C. Manfaat dan dampak perubahan yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dengan Program KOTAKU

1. Selaku wakil masyarakat:

a. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i), apakah pelaksanaan program Kotaku benar-benar memberikan manfaat dan dampak perubahan yang berarti/signifikan atau bagaimana dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama Kelurahan Banggae di Kecamatan Banggae?

.....

b. Bagaimana Bapak/Ibu/Sdr(i) melihat, mengamati, menganalisa dan menilai perubahan-perubahan (manfaat dan dampak) yang ditimbulkan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majenetersebut?

.....

c. Sejak program Kotaku dilaksanakan di Majene sampai sekarang, perubahan-perubahan (manfaat dan dampak) apa saja yang menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) anggap paling berarti dalam penanganan permukiman kumuh terutama Kelurahan Banggae di Kecamatan Banggae?

.....

2. Selaku wakil masyarakat, menurut Bapak/Ibu/Sdr(i):

1) Manfaat dan dampak perubahan apakah yang dihasilkan program Kotaku terhadap fisik lingkungan permukiman

.....
.....
2) Manfaat dan dampak perubahan apakah yang dihasilkan program Kotaku terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk
.....
.....

3) Manfaat dan dampak perubahan apakah yang dihasilkan program Kotaku terhadap kondisi sosial budaya penduduk
.....
.....

3. Memperbandingkan sebelum dan setelah program Kotaku dilaksanakan, apakah perubahan kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat memberikan manfaat dan dampak yang berarti bagi pencegahan kawasan kumuh meluas, meningkatkan kualitas permukiman, serta meningkatkan pengelolaan permukiman di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae?. Mohon penjelasan Bapak/Ibu/Sdr(i)!

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) selakupembela kepentingan masyarakat, apakah manfaat dan dampak perubahan yang diberikan oleh program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae sudah sesuai dengan harapannya, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya!.

5. Bapak/Ibuselaku wakil masyarakat, penyambung lidah dan aspirasi masyarakat, serta pembela kepentingan masyarakat, mohon dikemukakan hasil penilaian konstruktif dan saran evaluasinya terhadap pelaksanaan program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Majene, terutama di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae!.

Majene,2019

Informan/ Narasumber

Interviewer

Ttd

(.....) (.....)

~Selamat bekerja~

Matriks Penilaian Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

No.	Indikator	Penilaian	Evaluasi
1	Kondisi permukiman secara umum saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Diantara warga masyarakat (KPM) merasa puas dan senang melihat kondisi permukiman di lingkungan atau kelurahannya saat ini, namun ada pula yang menyatakan kurang puas dengan alasan bahwa program-program yang sudah direncanakan belum dikerjakan/direalisasikan dengan merata. 	<p>Pelaksanaan atau pasca pelaksanaan program Kotaku, kondisi permukiman di Kelurahan Banggae secara umum saat ini belum sepenuhnya mengembirakan dalam berbagai aspek baik aspek sarana prasarana fisik dasar maupun sosial budaya dan ekonomi. Walaupun pengelola program Kotaku telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik namun belum merata di setiap lingkungan, bahkan masih terkesan timpang. Oleh karena itu kiranya wajar jika kalangan KPM (warga masyarakat) memberikan penilaian yang berbeda-</p>
2	Kondisi penataan bangunan hunian	<ul style="list-style-type: none"> • Diantara KPM menilai penataan bangunan hunian atau rumah tinggalnya saat ini semakin lebih baik, namun yang lainnya menyatakan rumah tinggalnya belum pernah tersentuh bantuan, perbaikan, pemugaran atau penataan 	
3	Kondisi aksesibilitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebanyakan KPM sepatutnya mengakui adanya kegiatan perbaikan dan pembangunan jalan yang dilakukan oleh program Kotaku dan mereka merasa senang atas adanya perubahan yang dikerjakan oleh program Kotaku dalam pembangunan jalan. 	
4	Kondisi drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Umumnya mereka merasa senang dengan adanya perbaikan, pemugaran dan pembangunan saluran drainase di lingkungan sekitarnya karena sudah tidak terganggu genangan air dan ancaman banjir. 	
5	Kondisi pelayanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Umumnya KPM merasa senang dengan kondisi pelayanan air minum/bersih/bakunya saat ini. 	
6	Kondisi PAL (pengelolaan air limbah)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian KPM menilai pengelolaan air limbah rumah tangga di lingkungannya saat ini masih kurang atau belum cukup, namun sebagian yang lainnya justru menilai kondisi PAL di lingkungan permukimannya semakin baik. 	
7	Kondisi pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Umumnya KPM menilai pengelolaan persampahan masih kurang memuaskan. 	
8	Kondisi perlindungan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kebanyakan KPM menilai perlindungan kebakaran masih bermasalah terutama kondisi rumah yang jalannya sempit dan tidak ada akses jalanan masuk mobil ke dalam jalan setapak. • Diantara mereka juga mengetahui bahwa bilamana terjadi bencana atau peristiwa kebakaran maka pihak yang harus dihubungi dan dimintai bantuan adalah Badan Penanggulangan Bencana (BPB) bagian pemadam kebakaran, dan kalangan KPM tersebut mengakui memiliki akses informasi nomor telepon pihak pemadam kebakaran bila suatu saat terjadi kebakaran. 	

9	Kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Umumnya KPM sepatat dan mengakui bahwa kehidupan ekonomi keluarga atau rumah tangganya masih kurang atau belum baik. ✱ Kebanyakan warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, baik ibu rumah tangga maupun kepala keluarga menyatakan belum pernah dilibatkan ataupun terlibat menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan selama pelaksanaan program Kotaku di lingkungannya. ✱ Kebanyakan dari mereka menyatakan tidak mengalami peningkatan pendapatan dan kesulitan menabung, tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah, tidak pernah ambil kredit ataupun memanfaatkan bantuan dana bergulir. ✱ Mereka tidak terlalu kesulitan menyekolahkan anak-anak atau anggota keluarganya ataupun berobat di puskesmas karena sudah mendapat bantuan seperti dana BOS, KIP, PKH, kartu KIS, BPJS. 	beda.
---	--	---	-------

Sumber: Hasil Wawancara 2019

Matriks Penilaian Relawan

No.	Indikator	Penilaian	Evaluasi
1	Kondisi permukiman secara umum saat ini	✱ Kondisi lingkungan permukiman yang telah disentuh oleh Program Kotaku sudah lebih baik namun yang belum disentuh masih harus dibenahi	Pandangan relawan tersebut mengindikasikan bahwa dari sekian banyak program kegiatan (<i>action plan</i>) yang direncanakan, belum seluruhnya direalisasikan pelaksanaannya. Permasalahan-permasalahan permukiman dan lingkungan yang sudah
2	Kondisi penataan bangunan hunian	✱ Kondisi bangunan hunian yang telah dikena rehab rumah sudah lebih baik namun masih ada rumah yang belum disentuh.	
3	Kondisi aksesibilitas lingkungan	✱ Jalan di Kelurahan Banggae sudah semakin membaik.	
4	Kondisi drainase lingkungan	✱ Kondisi drainase saat ini masih banyak tergenang air, namun yang sudah disentuh program Kotaku sudah baik.	
5	Kondisi pelayanan air minum	✱ Pelayanan air minum saat ini masih bagus	
6	Kondisi PAL (pengelolaan air limbah)	✱ Pengelolaan air limbah masih banyak yang tergenang karena tidak mempunyai SPAL	
7	Kondisi pengelolaan persampahan	✱ Pengelolaan sampah yang menjadi masalah adalah kurangnya armada pengangkut sampah.	
8	Kondisi perlindungan	✱ Perlindungan kebakaran rumah tangga tidak ada, hanya mengharap pemadam kebakaran.	

	kebakaran		disentuh atau diintervensi oleh program dengan kegiatan pembangunan (perbaikan, pemugaran, penataan) infrastruktur atau prasarana dan sarana fisik dasar, umumnya sudah baik dan dapat diatasi. Sedangkan permasalahan lainnya yang belum ditangani oleh program Kotaku yang sifatnya masih perencanaan dan belum ada realisasi sampai sekarang, itulah yang masih tetap menjadi persoalan penilaian yang memerlukan penuntasan intervensi.
9	Kondisi sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga dan masyarakat saat ini di Kelurahan Banggae belum sepenuhnya membaik. ✱ Masih banyak warga kesulitan mendapatkan sumber dana yang murah dan cepat untuk modal usaha karena bantuan dana bergulir masih relatif terbatas. 	
10	Kondisi sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Kalau menyangkut biaya pendidikan, sudah banyak keluarga atau rumah tangga yang tidak terlalu kesulitan karena sekarang sudah banyak program pemerintah seperti BOS, KIP, PKH yang kesemuanya menangani semua biaya sekolah. ✱ Dalam hal pemeliharaan kesehatan atau biaya berobat di puskesmas, banyak warga masyarakat tidak lagi kesulitan karena sudah ada BPJS. ✱ Kalau menyangkut perilaku berbudaya, walaupun sebagian warga sudah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, namun masih ada saja sebagian orang yang belum sadar atau tidak memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungan permukimannya. Mental dan perilaku kebiasaannya mereka ✱ Yang buruk seperti membuang sampah di sembarang tempat masih sulit diubah atau dihilangkan sama sekali. Mereka bersikap acuh dan sibuk dengan urusan kepentingannya sendiri serta tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan warga. 	

Sumber: Hasil Wawancara 2019

Matriks Penilaian KSM

No.	Indikator	Penilaian	Evaluasi
1	Kondisi permukiman secara umum saat ini	✱ Senang melihat perkembangan yang ada setelah program Kotaku masuk lingkungan di wilayah kumuh terlihat bersih	Dalam pandangan KSM sebagai salah satu unsur pelaksana
2	Kondisi penataan bangunan hunian	✱ Kondisi bangunan hunian saat ini sudah memadai.	

3	Kondisi aksesibilitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Jalanan sudah lumayan bagus 	<p>program Kotaku itu sendiri menilai kondisi permukiman di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah masalah yang tidak/belum tertuntaskan. Walaupun merasa senang dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana (sapasras) fisik dasar seperti jalan lingkungan, drainase dan pelayanan air minum, namun kondisi aspek-aspek lainnya seperti SPAL, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran masih dinilai bermasalah. Demikian pula dalam hal kondisi sosial ekonomi dan</p>
4	Kondisi drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Drainase juga sudah bagus 	
5	Kondisi pelayanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan air minum sudah cukup bagus. 	
6	Kondisi PAL (pengelolaan air limbah)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan air limbah rumah tangga, masih ada yang tergenang karena belum ada saluran pembuangan. 	
7	Kondisi pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah, masih banyak warga yang membakar sampah dan membuang di kebun (kesadaran kurang) dan tidak ada armada. 	
8	Kondisi perlindungan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada perlindungan kebakaran 	
9	Kondisi sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua atau hanya sebagian kecil yang sudah menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan dari program Kotaku. • Kalangan rumah tangga ada yang mengalami peningkatan pendapatan namun juga ada yang tidak, dan juga ada yang sudah bisa menyalurkan penghasilannya untuk ditabung. • Mengenai sumber modal, ada sejumlah warga atau rumah tangga yang memanfaatkan bantuan dana bergulir, namun semuanya juga belum lancar dalam mengembalikan bantuan tersebut 	
10	Kondisi sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan, bisa dikatakan banyak keluarga atau rumah tangga sudah tidak kesulitan menyekolahkan anak-anaknya atau anggota keluarganya karena sudah ada bantuan pertolongan dari pemerintah melalui BOS, KIP, PKH. • Untuk biaya kesehatan, banyak warga tidak kesulitan berobat di rumah sakit atau Puskesmas karena sudah ada BPJS. • Kalau menyangkut akses sumber penerangan, semua keluarga atau rumah tangga sudah punya listrik masing-masing. • Menyangkut perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), tidak semua warga memiliki pengetahuan dan kesadaran yang baik mengenai pentingnya mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan permukiman 	

			budaya masyarakat yang dinilai masih menghadapi tantangan permasalahan dan belum sepenuhnya menggembirakan
--	--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara 2019

Matriks Penilaian TIPP

No.	Indikator	Penilaian	Evaluasi
1	Kondisi permukiman secara umum saat ini	✳️ Kondisi permukiman saat ini masih terbilang kumuh, kecuali yang diintervensi oleh program Kotaku	Dalam pandangan TIPP yang juga sebagai salah satu unsur pelaksana program Kotaku itu sendiri menilai kondisi permukiman di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan program masih kumuh, terkecuali yang sudah ditangani atau diintervensi oleh program Kotaku. Hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi permukiman kumuh saat ini masih timpang, yakni ada
2	Kondisi penataan bangunan hunian	✳️ Bangunan hunian saat ini masih banyak rumah tidak layak huni.	
3	Kondisi aksesibilitas lingkungan	✳️ Akses jalan di Kel. Banggae sudah memadai	
4	Kondisi drainase lingkungan	✳️ Kondisi drainase lingkungan masih ada yang rusak dan tidak terpelihara khususnya di wilayah perkotaan misalnya Lingk. Saleppa, Pakkola, dan apabila musim hujan masih terjadi genangan air.	
5	Kondisi pelayanan air minum	✳️ Kondisi pelayanan air minum/bersih/baku saat ini belum terlayani karena masih banyak warga yang kekurangan air apalagi saat ini musim kemarau.	
6	Kondisi PAL (pengelolaan air limbah)	✳️ Masih banyak air tergenang di sekitar rumah warga karena tidak adanya saluran air limbah, khususnya di wilayah Pakkola dan Saleppa.	
7	Kondisi pengelolaan persampahan	✳️ Sarana prasarana persampahan saat ini belum memadai karena pengangkutan sampah dari TPS ke TPA tidak lancar, utamanya di wilayah pasar.	
8	Kondisi perlindungan kebakaran	✳️ Kondisi perlindungan kebakaran belum ada, yang ada hanya pemadam kebakaran, dan itupun jauh dari permukiman	
9	Kondisi sosial ekonomi	✳️ Kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga dan masyarakat saat ini belum sepenuhnya membaik. ✳️ Belum semua warga atau rumah tangga menerima pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan manajemen keuangan karena kurangnya program dari pemerintah.	

		<ul style="list-style-type: none"> ✿ Pendapatan setiap rumah tangga belum meningkat dan masih bervariasi. Kalau menyangkut menabung, saya kira tergantung pendapatan masyarakat. ✿ Untuk kebutuhan sumber modal dan keuangan bagi kegiatan usaha, sudah ada pinjaman dana bergulir, koperasi, KUR dan lainnya sehingga warga tidak kesulitan untuk mendapatkan modal. 	yang sudah baik seharusnya namun ada pula yang masih kumuh karena belum ada intervensi.
10	Kondisi sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> ✿ Untuk urusan pendidikan atau sekolah, banyak keluarga atau rumah tangga sudah tidak kesulitan menyekolahkan anak-anaknya karena sudah ada program pemerintah yaitu dana BOS dan KIP. ✿ Kalau urusan berobat di rumah sakit atau Puskesmas, saya kira banyak keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan karena ada program pemerintah khususnya warga miskin yaitu BPJS. ✿ Untuk urusan listrik sudah tidak ada kesulitan bagi mereka. ✿ Kalau dari segi perilaku, sudah banyak warga memiliki kesadaran dan mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan permukiman. 	

Sumber: Hasil Wawancara 2019

Matriks Penilaian BKM/LKM

No.	Indikator	Penilaian	Evaluasi
1	Kondisi permukiman secara umum saat ini	✿ Melihat kondisi lingkungan yang ada, sangat senang dengan adanya program Kotaku, dimana program tersebut menangani kumuh yang ada di Kelurahan Banggae	Dalam pandangan BKM/LKM sebagai bagian integral unsur pelaksana program Kotaku, merasa senang melihat perkembangan dan kemajuan kondisi permukiman di Kelurahan Banggae terutama dalam penataan
2	Kondisi penataan bangunan hunian	✿ Kondisi bangunan saat ini cukup baik apalagi dengan masuknya program bedah rumah di wilayah kumuh.	
3	Kondisi aksesibilitas lingkungan	✿ Akses jalan saat ini cukup bagus dengan adanya program Kotaku namun belum seluruhnya diperbaiki	
4	Kondisi drainase lingkungan	✿ Kondisi drainase lingkungan saat ini cukup bagus terutama di kawasan kumuh.	
5	Kondisi pelayanan air minum	✿ Akses air minum cukup bagus.	
6	Kondisi PAL (pengelolaan air limbah)	✿ Kondisi pengelolaan SPAL masih ada warga yang tidak mempunyai akses SPAL	
7	Kondisi pengelolaan	✿ Akses sarana prasarana persampahan masih kurang.	

	persampahan		bangunan, akses jalan, drainase, pelayanan air minum.
8	Kondisi perlindungan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Kondisi perlindungan kebakaran belum ada, utamanya di kawasan kumuh 	
9	Kondisi sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Belum semua warga menerima pelatihan keterampilan usaha dari program Kotaku. ✱ Pendapatan setiap rumah tangga bervariasi. Banyak rumah tangga belum bisa menabung karena kebutuhannya banyak. Banyak rumah tangga masih kesulitan memenuhi kebutuhan sumber modal dan keuangan apalagi yang anggotanya banyak. ✱ Banyak keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan keuangan untuk biaya sekolah anak-anaknya atau anggota keluarganya. 	Namun yang dianggap belum menyenangkan adalah kondisi pengelolaan air limbah (SPAL) dan persampahan, termasuk perlindungan kebakaran. Dalam penilaian BKM/BLM, kondisi sosial ekonomi warga masyarakat belum seluruhnya baik dan mengembirakan/menguntungkan.
10	Kondisi sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Kalau masalah pendidikan, sudah tidak ada kesulitan karena ada bantuan pemerintah melalui dana BOS. ✱ Banyak keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan berobat di rumah sakit atau puskesmas karena ada BPJS, tapi masih ada warga yang kurang mampu belum punya BPJS. ✱ Rata-rata keluarga/ rumah tangga sudah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sumber energi listrik-nya karena sudah punya listrik pribadi. ✱ Banyak keluarga/ rumah tangga atau penduduk sudah semakin tahu dan sadar akan pentingnya mengubah mental dan perilaku kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan permukiman. ✱ Kalau mengenai motivasi dan partisipasi, ada sebagian warga masyarakat yang sudah mau terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, tapi ada juga yang tidak peduli. 	Demikian pula dalam hal sosial budaya, walaupun sudah ada kecenderungan kalangan warga masyarakat mengalami perubahan <i>mindset</i> , mental dan perilaku terhadap kebersihan dan kualitas kesehatan

			lingkungan dan permukiman nya, namun sebagian warga lainnya masih tetap minim kepedulian, statusquo dan pragmatis serta oportunistis.
--	--	--	---

Sumber: Hasil Wawancara 2019

Keseluruhan uraian mengenai penilaian ketiga unsur pelaksana program Kotaku menunjukkan bahwa KSM, TIPP dan BKM/LKM belum sepenuhnya memiliki pandangan atau penilaian yang sama mengenai kondisi permukiman saat ini pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae. Mereka memiliki persamaan dan perbedaan pendapat atau penilaian terhadap kondisi fisik lingkungan (infrastruktur, sarana prasarana fisik dasar). Namun untuk kondisi sosial ekonomi dan budaya, mereka memiliki kesamaan penilaian.

Kriteria fisik dan indikator permukiman kumuh yang dinilai sudah baik dan memadai adalah aksesibilitas jalan lingkungan, sedangkan drainase lingkungan, pelayanan air minum, pengelolaan sampah serta perlindungan kebakaran masih dinilai bermasalah. Untuk kriteria non-fisik, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat saat ini dinilai belum sepenuhnya membaik. Pelibatan warga masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan *livehood* masih sangat kurang, dan status MBR banyak rumah tangga masih tetap tidak berubah walaupun sudah ada bantuan modal usaha melalui dana bergulir. Sedangkan untuk aspek lainnya seperti akses pendidikan dan kesehatan dinilai tidak ada masalah karena sudah ada program bantuan dari pemerintah pusat melalui BOS, KIP, BPJS dan lainnya. Demikian pula halnya akses sumber daya listrik dinilai tidak ada masalah, termasuk adanya kecenderungan kalangan warga yang mengalami perubahan mental dan perilaku terhadap lingkungan permukimannya

Matriks Penilaian Lurah Banggae

No.	Indikator	Penilaian	Evaluasi
1	Kondisi permukiman secara umum saat ini	<ul style="list-style-type: none"> ✿ Kondisi permukiman kumuh khususnya di Lingkungan Copala, pada Tahun 2017 program Kotaku sudah mengintervensi pembangunan mulai dari pembangunan drainasenya, juga jalanan. ✿ Program ini berhasil dan tepat sasaran, meskipun masih perlu dilanjutkan. Tapi sasaran keseluruhan sudah bagus 	Penilaian Lurah tersebut menunjukkan bahwa dalam hal kriteria fisik, ada tiga indikator permukiman kumuh yang sudah mengalami perkembangan dan
2	Kondisi penataan bangunan hunian	✿ Kondisi bangunan hunian saat ini sudah baik dan menggembirakan	
3	Kondisi aksesibilitas	✿ Kondisi jalan saat ini sudah baik dan menggembirakan	

	lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi aksesibilitas jalan lingkungan saat ini sudah bagus tinggal mau dilanjutkan programnya seperti pembangunan jalan 	<p>kondisinya baik yakni jalan lingkungan, drainase dan pengelolaan air limbah. Sedangkan indikator lainnya yakni pelayanan air minum, pengelolaan sampah, termasuk perlindungan kebakaran, kondisinya belum menggembirakan/ menguntungkan. Namun demikian, kelanjutan program masih sangat diharapkan baik dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana fisik dasar lingkungan maupun untuk menuntaskan rencana kegiatan yang belum terealisasi. Terkait kriteria non-fisik, kondisi sosial ekonomi warga masyarakat</p>
4	Kondisi drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi drainase saat ini sudah baik dan menggembirakan • Kondisi drainase lingkungan saat ini sudah bagus tinggal mau dilanjutkan programnya 	
5	Kondisi pelayanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan air minum/bersih/baku saat ini kondisinya masih sangat kurang 	
6	Kondisi PAL (pengelolaan air limbah)	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi pengelolaan air limbah saat ini sudah bagus tinggal mau dilanjutkan programnya seperti pembangunan WC. 	
7	Kondisi pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan persampahan saat ini, kebanyakan warga masyarakat pada dasarnya sudah sadar akan sampah, namun tempat atau sarana penampungan sampah masih sangat kurang 	
8	Kondisi perlindungan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan kebakaran bagi masyarakat saat ini masih bisa diatasi 	
9	Kondisi sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sangat beragam atau bervariasi mulai dari yang tidak mampu sampai kelas menengah. 	
10	Kondisi sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial budaya masyarakat sangat heterogen dan terdapat didalam sosiokulturalnya. • Mereka sangat menghargai adat kebiasaan dan budi pekerti • Yang masih kurang dan menjadi masalah yakni masih ada sekelompok orang atau masyarakat yang kurang sadar mengenai kebersihan lingkungan 	

			<p>masih tetap ada kesenjangan. Sedangkan kondisi sosial budaya masih tetap dicirikan oleh kepatuhan kalangan warga masyarakat pada adat kebiasaan dan nilai-nilai moralitas. Yang masih menjadi permasalahan adalah <i>mindset</i>, kesadaran, sikap mental dan perilaku sejumlah warga yang belum sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya dalam berkebersihan lingkungan.</p>
--	--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara 2019

Matriks Penilaian Staf Kantor Kelurahan Banggae

No.	Indikator	Penilaian	Evaluasi
1	Kondisi permukiman secara umum saat ini	<p>✳ Diantara staf kelurahan berpendapat bahwa kondisi permukiman kumuh secara umum dan keseluruhan saat ini di Kelurahan Banggae termasuk di Lingkungan Copala setelah program Kotaku dilaksanakan cukup memadai. Namun staf lainnya justru menilai kondisi permukiman pasca program Kotaku tidak mengalami perkembangan yang signifikan.</p>	<p>Kalangan staf kelurahan Banggae berbeda pandangan dalam menilai perkembangan permukiman saat ini di Kelurahan Banggae dan</p>
2	Kondisi penataan bangunan	<p>✳ Diantara staf kelurahan berpendapat bahwa sebagian besar rumah penduduk telah diperbaiki dengan adanya bedah rumah</p>	

	hunian	walaupun masih ada sebagian kecil rumah penduduk perlu dibenahi/ diperbaiki. Sedangkan staf yang lainnya menilai ada perubahan bagi bangunan hunian atau rumah penduduk yang mendapat sentuhan program Kotaku, dan masih perlu ditambah jumlah penerima bantuan bedah rumah.	Lingkungan Copala pasca pelaksanaan program Kotaku.
3	Kondisi aksesibilitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Semua staf kelurahan sepakat bahwa kondisi akses jalan transportasi di Kelurahan Banggae pasca program Kotaku sudah baik dan tetap kondusif, walaupun pengelolaan lahan masih kurang serta kuantitas dan kualitas jalan lingkungan masih perlu ditingkatkan termasuk peningkatan jalan setapak (lorong). 	Kalangan staf kelurahan Banggae berbeda pandangan dalam menilai perkembangan
4	Kondisi drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Semua staf kelurahan sepakat mengenai adanya perbaikan dan peningkatan pembangunan drainase lingkungan, namun masih perlu ada perbaikan tambahan dan peningkatan lagi. 	pembangunan lingkungan fisik maupun sosial
5	Kondisi pelayanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Kalangan staf kelurahan menilai bahwa kondisi pasokan air minum/bersih cukup memadai dan sebahagian masyarakat sudah dapat menikmatinya, sementara staf yang lainnya menilai bahwa masih banyak warga yang belum terlayani air minum sesuai standar. Namun demikian, mereka sepakat bahwa pembagian pasokan air minum tersebut belum merata dan sebagian masyarakat tidak menikmatinya atau belum terlayani sesuai standar sehingga masih perlu ditingkatkan pelayanannya. 	ekonomi dan budaya masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku.
6	Kondisi PAL (pengelolaan air limbah)	<ul style="list-style-type: none"> • Kalangan staf kelurahan menilai pengelolaan air limbah (PAL) rumah tangga dan permukiman sudah baik karena sudah ada perbaikan sebagian tanggul walaupun masih ada sungai yang belum dibuatkan tanggul sehingga sampah yang ada dipinggirnya jatuh ke dalam sungai. Sedangkan staf yang lainnya menyatakan bahwa kondisi PAL tersebut belum menggembirakan dan masih perlu peningkatan sosialisasi dan penyadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan belum memadai. 	
7	Kondisi pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Semua staf sepakat bahwa pengelolaan sampah masih kurang sebab sebagian masyarakat masih membuang sampah di pinggir sungai, sehingga diperlukan ketersediaan armada pengangkut sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat. 	
8	Kondisi perlindungan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kalangan staf kelurahan menilai perlindungan kebakaran masih kurang, dan bahwa sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah sudah mendapat bansos berupa rastra, namun pembagiannya masih kurang dan tidak merata dan sebagian lagi mengeluh. 	

9	Kondisi sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Umumnya staf kelurahan menilai kondisi sosial ekonomi warga masyarakat pasca pelaksanaan program Kotaku masih kurang menggembirakan, bahkan kondisinya masih stagnansama seperti tahun-tahun yang lalu, dan oleh karena itu menurut mereka perlu dibuka atau dikembangkan ruang-ruang atau sarana untuk meningkatkan kuantitas ekonomi penduduk.
10	Kondisi sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Diantara staf kelurahan berbeda pandangan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat saat ini, yakni ada yang menilai sudah lumayan baik, namun yang lainnya justru menyatakan masih belum menggembirakan.

Sumber: Hasil Wawancara 2019

Matriks Penilaian Kepala Lingkungan

No.	Indikator	Penilaian	Evaluasi
1	Kondisi permukiman secara umum saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi permukiman secara umum di Lingkungan Copala belum memadai. 	Penilaian Kepala Lingkungan mengisyaratkan bahwa walaupun program Kotaku sudah diimplementasikan di Kelurahan Banggae, namun Lingkungan Copala yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan kumuh oleh SK Bupati dan tergolong kumuh berat berdasarkan hasil pendataan baseline 100-0-100 program Kotaku, masih tetap menghadapi masalah
2	Kondisi penataan bangunan hunian	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada 36% bangunan hunian tidak layak huni. 	
3	Kondisi aksesibilitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas lingkungan masih kurang. 	
4	Kondisi drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi drainase lingkungan saat ini sudah baik. 	
5	Kondisi pelayanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi pelayanan air minum/bersih/baku saat ini masih sangat minim. 	
6	Kondisi PAL (pengelolaan air limbah)	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga saat ini hanya 15%. 	
7	Kondisi pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi pengelolaan persampahan saat ini secara langsung tidak ada. 	
8	Kondisi perlindungan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi perlindungan kebakaran bagi warga saat ini tidak ada. 	
9	Kondisi sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini memuaskan 	
10	Kondisi sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial budaya kurang karena masih banyak masyarakat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari daripada mengikuti pelatihan-pelatihan tentang sosial budaya, 	

		<p>apalagi masih ada sebagian kecil masyarakat tidak mengerti apa itu budaya.</p>	<p>kumuh sampai sekarang. Capaian kriteria fisik terutama indikator kondisi penataan bangunan, aksesibilitas jalan lingkungan, PAL dan PAM semuanya masih sangat rendah dan bermasalah, bahkan pengelolaan sampah dan perlindungan kebakaran belum ada. Kecuali indikator drainase lingkungan yang dinilai kondisinya sudah cukup baik dengan adanya sejumlah perbaikan, rehabilitas dan pemagaran maupun pembangunan baru. Untuk kriteria non-fisik, kondisi sosial ekonomi dianggap sudah lebih baik, namun kondisi sosial budaya masyarakat</p>
--	--	---	--

			belum sepenuhnya menggembirakan atau masih bermasalah.
--	--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara 2019

Keseluruhan uraian mengenai penilaian unsur pelaksana program Kotaku di tingkat kelurahan tersebut menunjukkan bahwa antara Lurah, staf kelurahan dan kepala lingkungan, masih cenderung memiliki perbedaan-perbedaan disamping persamaan-persamaan pandangan atau penilaian tertentu terhadap kondisi terkini sejumlah kriteria fisik dan non-fisik serta indikator lingkungan, sosial ekonomi dan budaya. Namun terlepas dari semua itu, satu hal yang patut digarisbawahi dari penilaian mereka yang beragam tersebut mengisyaratkan dengan jelas adanya “ketidaktuntasan, ketidakmerataan, disparitas, ketimpangan atau kesenjangan” penanganan masalah fisik dan non-fisik yang dihadapi oleh lingkungan permukiman kumuh dan penduduknya, sehingga program Kotaku masih sangat dibutuhkan kelanjutan realisasi pelaksanaannya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang benar-benar steril dari kondisi kumuh (*freelsum area condition*).

Matriks Penilaian Kepala Daerah dan Bappeda

No.	Pemimpin program Kotaku	Penilaian	Evaluasi
1	Bupati Majene	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Adanya program Kotaku, penanganan kumuh dengan 7 indikator kumuh mampu terselesaikan, dan khusus Kelurahan Banggae sejak Tahun 2017 sudah tidak masuk dalam kawasan kumuh karena dari 7 indikator sudah mampu terselesaikan secara menyeluruh. ✱ Dengan adanya program Kotaku maka penanganan kumuh sudah bisa terselesaikan. 	<p>Pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae sudah dianggap selesai sejak Tahun 2017. Tujuh indikator dalam kriteria fisik yaitu penataan bangunan, aksesibilitas jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pelayanan air minum, pengelolaan</p>

			<p>sampah, dan perlindungan kebakaran, maupun kriteria non-fisik yakni kondisi sosial ekonomi dan budaya semuanya sudah dianggap selesai penanganan masalahnya, dan kawasan kumuh sudah dianggap sudah tidak ada di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala. Namun demikian, jika pendapat atau penilaian tersebut dihubungkan dengan hasil analisis kondisi terkini (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara sistematis, runtut, runtun dan komprehensif) dan hasil survei dan observasi realitas empiris Tahun 2019, maka klaim tersebut tentu masih sangat perlu</p>
--	--	--	--

			diluruskan.
2	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> ● Setelah dilakukan intervensi di lokasi sasaran program maka sudah ada perubahan nyata baik secara fisik maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. ● Sudah ada perubahan kondisi bangunan hunian karena sudah ada intervensi dari dinas terkait. ● Sudah ada perubahan kondisi aksesibilitas lingkungan dengan adanya intervensi program. ● Kondisi drainase sudah memadai. ● Di Copala sudah terpenuhi air bersihnya. ● Kondisi limbah rumah tangga sudah bagus. ● Pengelolaan persampahan lumayan bagus karena ditambah lagi lokasi kelurahan dekat dengan TPS3R. ● Akses belum memadai untuk perlindungan kebakaran bagi warga. ● Menyangkut masalah ekonomi, dengan bantuan dana bergulir dari program Kotaku mampu membantu perekonomian masyarakat. ● Sudah ada kesadaran masyarakat untuk berubah dari ketidaknyamanan di tempat kumuh menjadi tidak kumuh. ● Intinya, kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat saat ini di Kelurahan Banggae khususnya di Lingkungan Copala sangat sejalan dengan harapan Pemerintah daerah karena mampu menjabarkan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah tentang masalah perkotaan. 	<p>Pihak Bappeda sebagai <i>leading sector</i> pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Majens menilai Kelurahan Banggae pada umumnya dan Lingkungan Copala khususnya sudah mengalami perubahan kondisi lingkungan permukiman dari kondisi kumuh menjadi non-kumuh setelah adanya intervensi pembangunan fisik sejumlah infrastruktur, prasarana dan sarana fisik dasar (mulai dari penataan bangunan hunian, jalan, drainase, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah hingga perlindungan kebakaran) maupun intervensi non-fisik (sosial ekonomi dan budaya).</p>

			<p>Namun bilamana pendapat atau penilaian tersebut dihubungkan dengan hasil analisis kondisi terkini (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara sistematis, runtut, runtun dan komprehensif), realitas empiris hasil survei dan observasi Tahun 2019, serta berbagai pendapat informan/narasumber lainnya, maka klaim yang sifatnya menggeneralisasi tersebut masih sangat perlu diluruskan, seperti halnya penilaian Kepala Daerah.</p>
--	--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara 2019

Matriks Penilaian Pakar/Akademisi, Pemerhati/Pengamat, Praktisi

No.	Informan/narasumber	Penilaian	Evaluasi
1	Dra.Marjanah,M.Pd , salah seorang dosen di Yayasan STAI-DDI Majene	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Situasi dan kondisi permukiman saat ini pasca pelaksanaan Kotaku belum ada perubahan yang signifikan, masih nampak permukiman kumuh biasa-biasa saja ✱ Kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Banggae belum mengalami peningkatan, terutama diseputaran 	Penilaian beberapa pakar atau akademisi, praktisi, serta pemerhati atau pengamat menurut bidangnya

		<p>Lingkungan Pakkola yang masih banyak sampah yang dibuang ke selokan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✱ Budaya bersih untuk lingkungan rumah masih jauh dari harapan 	<p>masing-masing menunjukkan bahwa umumnya mereka sepakat melihat adanya perubahan kondisi lingkungan permukiman baik fisik maupun non-fisik. Namun demikian, ada salah seorang pakar/akademi si yang berpendapat lain atau memberikan penilaian yang berbeda yang melihat kondisi lingkungan permukiman (baik fisik maupun non-fisik) tidak atau belum mengalami perubahan yang signifikan, masih melihat kondisi permukiman kumuh tampak biasa-biasa saja, yang menilai kondisi fisik lingkungan serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Banggae belum mengalami</p>
2	Muh.Sabir, salah seorang pemerhati masalah sosiologi perkotaan di Majene	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Dari pengamatan, fakta membuktikan bahwa situasi dan kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae termasuk di Copala pasca pelaksanaan Kotaku dalam perspektif ilmu sosial atau sosiologi perkotaan masih tergolong baik dan ada perubahan yang cukup menggemblirakan terlihat dari budaya dan sikap masyarakat yang mempertahankan <i>'siwaliperr'</i> atau bersama dalam suka dan duka. ✱ Kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat tetap kondusif dan terkendali 	<p>berpendapat lain atau memberikan penilaian yang berbeda yang melihat kondisi lingkungan permukiman (baik fisik maupun non-fisik) tidak atau belum mengalami perubahan yang signifikan, masih melihat kondisi permukiman kumuh tampak biasa-biasa saja, yang menilai kondisi fisik lingkungan serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Banggae belum mengalami</p>
3	Supriadi, salah seorang pengamat/pemerhati masalah lingkungan perkotaan di Majene	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Situasi dan kondisi lingkungan permukiman saat ini di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan Kotaku sudah menunjukkan adanya perubahan dan perbaikan dengan dibangunnya jalan-jalan setapak dalam bentuk rabat beton serta rehabilitasi drainase dan juga perbaikan pada rumah-rumah sejumlah warga masyarakat di permukiman kumuh. ✱ Kondisi fisik lingkungan di Kelurahan Banggae semakin membaik dengan adanya drainase, jalan setapak rabat beton, tempat sampah berpilah. ✱ Untuk kondisi sosial ekonomi, dengan adanya bantuan keuangan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, akan tetapi masih ada sebahagian yang belum merasakan bantuan tersebut sehingga program ini khususnya bantuan keuangan terus berkelanjutan. ✱ Untuk kondisi sosial budaya, pola dan gaya hidup masyarakat yang konsumtif perlu dibarengi dengan pemberian pemahaman dari pemerintah tentang pembangunan berwawasan lingkungan sehingga di Kecamatan Banggae khususnya di Kelurahan Banggae tidak nampak kumuh 	<p>berpendapat lain atau memberikan penilaian yang berbeda yang melihat kondisi lingkungan permukiman (baik fisik maupun non-fisik) tidak atau belum mengalami perubahan yang signifikan, masih melihat kondisi permukiman kumuh tampak biasa-biasa saja, yang menilai kondisi fisik lingkungan serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Banggae belum mengalami</p>
4	Syahrinullahi, salah seorang praktisi tata ruang wilayah dan kota di Majene	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Terkhusus untuk permukiman daerah, sejak adanya program Kotaku sudah lebih tertata dengan baik, sudah ada kepedulian masyarakat masyarakat tentang kebersihan dan penanganan sampah. ✱ Khusus di Kelurahan Banggae, kondisi 	<p>berpendapat lain atau memberikan penilaian yang berbeda yang melihat kondisi lingkungan permukiman (baik fisik maupun non-fisik) tidak atau belum mengalami perubahan yang signifikan, masih melihat kondisi permukiman kumuh tampak biasa-biasa saja, yang menilai kondisi fisik lingkungan serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Banggae belum mengalami</p>

		<p>fisik lingkungan sudah mulai tertata dan telah tersentuh oleh beberapa program pemerintah terkait penataan ruang</p>	<p>peningkatan, serta melihat masih kurangnya budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat pada kalangan warga masyarakat. Perbedaan penilaian tersebut tentu cukup beralasan dan wajar sebab hal itu juga terjadi pada sejumlah informan/narasumber lainnya yang menunjukkan sikap pro-kontra dalam melihat persoalan kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae.</p>
5	<p>M.AfiatMulwan ST MT, salah seorang praktisi tata ruang wilayah dan kota di Majene</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Situasi dan kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae pasca pelaksanaan Kotaku telah terjadi perubahan dalam perspektif tata ruang wilayah dan kota, khususnya dalam penataan jalan lingkungan, drainase, limbah rumah tangga dan pengolahan sampah rumah tangga. ✱ Kondisi fisik lingkungan menunjukkan adanya perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menjadi pencetus kekumuhan seperti kondisi jalan, drainase, ruang terbuka hijau, dan penempatan titik-titik simpul sampah. ✱ Untuk kondisi sosial ekonomi, dengan penataan lingkungan maka berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian masyarakat khususnya bagi penjual makanan karena memenuhi aspek higienis terhadap makanan yang dijual. ✱ Untuk kondisi sosial budaya, terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang lebih peduli kebersihan lingkungan 	<p>peningkatan, serta melihat masih kurangnya budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat pada kalangan warga masyarakat. Perbedaan penilaian tersebut tentu cukup beralasan dan wajar sebab hal itu juga terjadi pada sejumlah informan/narasumber lainnya yang menunjukkan sikap pro-kontra dalam melihat persoalan kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae.</p>
6	<p>Muh. Alif Chalil, salah seorang birokrat dan praktisi tata ruang wilayah dan kota di Majene</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Situasi dan kondisi permukiman saat ini pasca pelaksanaan Kotaku telah menunjukkan terciptanya permukiman layak huni dan bebas kumuh skala lingkungan di wilayah Kelurahan Banggae. Demikian pula adanya upaya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh yang dilakukan. ✱ Kondisi fisik lingkungan di Kelurahan Banggae menunjukkan adanya perubahan jangkauan jaringan jalan lingkungan. ✱ Untuk kondisi sosial ekonomi, mayoritas penduduk tetap memiliki potensi dan peluang mengelola dan menekuni pola pencaharian atau pekerjaan sebagai pedagang, petani, ataupun peternak. ✱ Untuk kondisi sosial budaya, menunjukkan peningkatan pemenuhan aspek pelayanan dasar 	<p>peningkatan, serta melihat masih kurangnya budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat pada kalangan warga masyarakat. Perbedaan penilaian tersebut tentu cukup beralasan dan wajar sebab hal itu juga terjadi pada sejumlah informan/narasumber lainnya yang menunjukkan sikap pro-kontra dalam melihat persoalan kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae.</p>
7	<p>Dr.Hj. Atika MM, salah seorang ilmuwan, birokrat dan praktisi sekaligus pemerhati/pengamat dalam bidang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✱ Melihat situasi dan kondisi permukiman saat ini sejak adanya intervensi dari program Kotaku, Kelurahan Banggae tampaknya mengalami perubahan khususnya dalam perspektif ekonomi perkotaan pasca pelaksanaan Kotaku. ✱ Perubahan yang dimaksud terutama 	<p>peningkatan, serta melihat masih kurangnya budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat pada kalangan warga masyarakat. Perbedaan penilaian tersebut tentu cukup beralasan dan wajar sebab hal itu juga terjadi pada sejumlah informan/narasumber lainnya yang menunjukkan sikap pro-kontra dalam melihat persoalan kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae.</p>

	<p>manajemen sumber daya manusia dan ekonomi perkotaan di Majene</p>	<p>pola pikir masyarakat (cara merubah kebiasaan) secara pelan-pelan atau perlahan, yang tadinya atau sebelumnya masih memiliki atau memelihara sifat untuk selalu dibantu (mengharapkan bantuan secara gratis), maka melalui sentuhan program ini diajak dan diarahkan untuk dapat mandiri dalam mengelola usahanya sendiri. Mereka diberikan bantuan dana bergulir namun disertai dengan pendampingan sehingga secara bertahap mereka dapat memperbaiki tingkat ekonomi keluarganya dan memajukan usaha ekonomi produktif.</p> <p>✱ Program Kotaku dengan beberapa pendekatan yang dilakukan, memberikan cukup banyak manfaat ataupun kontribusi yang berarti kepada masyarakat terutama kelompok penerima manfaat (KPM), apalagi diketahui bahwa bukan hanya lingkungan fisik permukimannya yang direhabilitasi tetapi juga melakukan penataan dan penanganan terpadu berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan (<i>sustainability development</i>).</p>	
--	--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara 2019

